



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA NOMOR TAHUN 2022



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023**



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1-04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona *Virus Disease 2019 (COVID19)*.
- (3) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan :

- a. rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023;
- b. rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023; dan
- c. rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juli 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	viii
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-51
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-120
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-140
2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-317
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Perkembangan Perekonomian Dunia.....	III-1
3.1.2. Perkembangan Perekonomian Nasional	III-3
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-5
3.1.4. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera	III-7
3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	III-9
3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2023	III-11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
3.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-34
3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah	III-35
3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-39
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-1
4.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov. Sumatera Barat Tahun 2023.....	IV-7
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023.....	IV-12
4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi.....	IV-25

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
	6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
	6.2. Indikator Kinerja Daerah	VI-6
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi	II-2
Tabel 2. 2 Klasifikasi Geologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan	II-8
Tabel 2. 3 Karakteristik Hidrologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan	II-9
Tabel 2. 4 Sungai/Batang yang Melalui Kota Bukittinggi	II-10
Tabel 2. 5 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)	II-12
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi	II-16
Tabel 2. 7 Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor	II-16
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi	II-19
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021	II-21
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012 s.d. 2021	II-22
Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 Atas Dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kota Bukittinggi	II-24
Tabel 2. 12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi	II-25
Tabel 2. 13 Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi	II-27
Tabel 2. 14 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d. 2021	II-28
Tabel 2. 15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional	II-29
Tabel 2. 16 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021	II-31
Tabel 2. 17 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-32
Tabel 2. 18 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-33
Tabel 2. 19 Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021	II-35
Tabel 2. 20 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021	II-35
Tabel 2. 21 Perbandingan Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021 ..	II-36
Tabel 2. 22 Perubahan Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021..	II-37
Tabel 2. 23 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-39
Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2021 ..	II-40
Tabel 2. 25 Angka Melek Huruf Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-42
Tabel 2. 26 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-43
Tabel 2. 27 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2021	II-43
Tabel 2. 28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-45
Tabel 2. 29 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2021	II-45
Tabel 2. 30 Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-47
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021	II-47

Tabel 2. 32 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2021	II-48
Tabel 2. 33 Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-49
Tabel 2. 34 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020	II-50
Tabel 2. 35 Kelompok Seni Tradisional yang Ada di Kota Bukittinggi.....	II-51
Tabel 2. 36 Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-52
Tabel 2. 37 Perkembangan Capaian urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-57
Tabel 2. 38 Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-62
Tabel 2. 39 Luasan RTH Publik sebesar 205 dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-64
Tabel 2. 40 Perkembangan Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-65
Tabel 2. 41 Jumlah Kasus Pelanggaran Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-66
Tabel 2. 42 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-68
Tabel 2. 43 Perkembangan Capaian Urusan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-68
Tabel 2. 44 Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-69
Tabel 2. 45 Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-70
Tabel 2. 46 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-72
Tabel 2. 47 Perkembangan Capaian Urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-73
Tabel 2. 48 Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-74
Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-75
Tabel 2. 50 Perkembangan Capaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-76
Tabel 2. 51 Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-78
Tabel 2. 52 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-79
Tabel 2. 53 Jumlah Kelompok Dasa Wisma Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-81
Tabel 2. 54 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2017 s.d 2021.....	II-81
Tabel 2. 55 Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-83
Tabel 2. 56 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-84
Tabel 2. 57 Trayek Angkutan Umum di Kota Bukittinggi.....	II-85
Tabel 2. 58 Rasio Izin Trayek Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-86
Tabel 2. 59 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-88
Tabel 2. 60 Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-89
Tabel 2. 61 Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bukittinggi Tahun 2021 ...	II-90
Tabel 2. 62 Perkembangan Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-91
Tabel 2. 63 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-93
Tabel 2. 64 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Bukittinggi sampai tahun 2021.....	II-93
Tabel 2. 65 Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	II-94
Tabel 2. 66 Perkembangan Capaian Urusan Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-96

Tabel 2. 67 Pemanfaatan Persandian Tahun 2021.....	II-96
Tabel 2. 68 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi.....	II-99
Tabel 2. 69 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	II-101
Tabel 2. 70 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	II-102
Tabel 2. 71 Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-105
Tabel 2. 72 Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-107
Tabel 2. 73 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017 s.d 2021.....	II-108
Tabel 2. 74 Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-109
Tabel 2. 75 Produktivitas Padi Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-110
Tabel 2. 76 Produktivitas Jagung Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-111
Tabel 2. 77 Produktivitas Ketela Rambut Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-111
Tabel 2. 78 Produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-112
Tabel 2. 79 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-113
Tabel 2. 80 Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-113
Tabel 2. 81 Perkembangan Capaian Perencanaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-115
Tabel 2. 82 Perkembangan Capaian Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-116
Tabel 2. 83 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-117
Tabel 2. 84 Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-118
Tabel 2. 85 Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-118
Tabel 2. 86 Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-119
Tabel 2. 87 Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-120
Tabel 2. 88 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-121
Tabel 2. 89 PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-124
Tabel 2. 90 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-126
Tabel 2. 91 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-127
Tabel 2. 92 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi 2017 s.d 2021.....	II-128
Tabel 2. 93 Rasio S1/S2/S3 Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	II-130
Tabel 2. 94 Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	II-130
Tabel 2. 95 Capaian SPM Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	II-132
Tabel 3. 1 Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023.....	III-7
Tabel 3. 2 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	III-10
Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Kota Bukittinggi Tahun 2023.....	III-12
Tabel 3. 4 Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 (dibanding Tahun 2020).....	III-19
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-23
Tabel 3. 6 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021.....	III-26
Tabel 3. 7 Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-28
Tabel 3. 8 Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-28
Tabel 3. 9 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-28
Tabel 3. 10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-29
Tabel 3. 11 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan terhadap APBD Tahun 2017 s.d. 2021.....	III-30
Tabel 3. 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024.....	III-35

Tabel 3. 13 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	III-38
Tabel 3. 14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. 2021 dan Proyeksi/Target Tahun 2022 s.d. 2024	III-40
Tabel 4. 1 Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026.....	IV-13
Tabel 4. 2 Strategi dan Kebijakan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026	IV-16
Tabel 4. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026	IV-29
Tabel 4. 4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026	IV-30
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2023	IV-35
Tabel 4. 6 Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	IV-36
Tabel 4. 7 Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	IV-50
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi	VI-2
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s.d. 2023	VI-6

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD.....	I-6
Gambar 1. 2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.....	I-7
Gambar 1. 3 Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri.....	I-7
Gambar 1. 4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.....	I-8
Gambar 1. 5 Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan.....	I-11
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	II-3
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Bukittinggi	II-5
Gambar 2. 3 Peta Daerah Rawan Guncangan Tanah Kota Bukittinggi	II-18
Gambar 2. 4 Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017--2021	II-30
Gambar 3.1 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	III-6
Gambar 3.2 Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Pengembangan Tahun 2023.....	III-8

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2. 1 Komposisi Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2021	II-21
Grafik 2. 2 Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	II-48
Grafik 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s.d. 2021	II-41
Grafik 2. 4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021	II-44
Grafik 2. 5 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021	II-46
Grafik 2. 6 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov. Sumatera Barat Tahun 2020-2021	II-123
Grafik 2. 7 Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut subsektor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II-123
Grafik 3. 1 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021 ..	III-15
Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	III-17
Grafik 3. 3 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	III-17
Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	III-18
Grafik 3. 5 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021 ..	III-20
Grafik 3. 6 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	III-21
Grafik 3. 7 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	III-22
Grafik 3. 8 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	III-23
Grafik 3. 9 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021	III-24
Grafik 3.10 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021	III-25

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPJPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Secara umum, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran, serta fungsi yang sangat strategis, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026, untuk mewujudkan “Bukittinggi Hebat” setelah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan semenjak ditetapkannya Covid 19 sebagai pandemi pada tahun 2020, telah menyebabkan berbagai target pembangunan bergeser. Untuk penanganan penyebaran, penyembuhan serta dampak pandemi tersebut dilakukan *refocusing* anggaran. Dengan demikian, penyusunan dokumen RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang dilakukan pada masa mulai menurunnya kasus Covid 19 setelah dilakukannya pemberian vaksin dan berbagai kebijakan lainnya untuk pengendalian kasus dan pemulihan ekonomi, diharapkan secara bertahap akan dapat mendekati bias target pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Terlebih lagi untuk Kota Bukittinggi dan daerah lainnya yang bertumpu pada tingkat kunjungan masyarakat karena bergerak pada sektor wisata, perdagangan dan jasa. Dengan pelonggaran protokol kesehatan dan dibukanya kembali objek wisata, diharapkan masyarakat akan mulai beraktivitas normal, sehingga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2023, Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, arah kebijakan prioritas RKP tahun 2023, meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (ekonomi hijau)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan ibu kota Nusantara.

RKP Tahun 2023 juga memuat sasaran yang terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,3—5,9 persen,
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27 persen,
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3—6 persen,
4. Rasio Gini 0,375—0,378,
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,29—73,35,
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7—8 persen, serta
7. Nilai Tukar Petani (NTP) antara 103—105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105—107.

Penyelarasan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dilakukan sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir penetapan tema RKP 2023 dan juga dengan mempertimbangkan visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pemilu Serentak Tahun 2020. Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Perdagangan & Usaha Mikro Kecil Menengah”.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas.

Merujuk kepada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah : “Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Pemulihan Pascapandemi”.

Secara teknis, RKPD Tahun 2023 disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan Daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan salah satu pedoman untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi; pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berfikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari kebijakan Kepala Daerah, di samping itu juga mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan mengakomodir kehendak dan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2019-2024, Rancangan RKP Tahun 2023 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara terbatas, dan memberi peluang secara daring menggunakan teknologi komunikasi dan informatika bagi pemangku kepentingan yang tidak hadir secara langsung. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

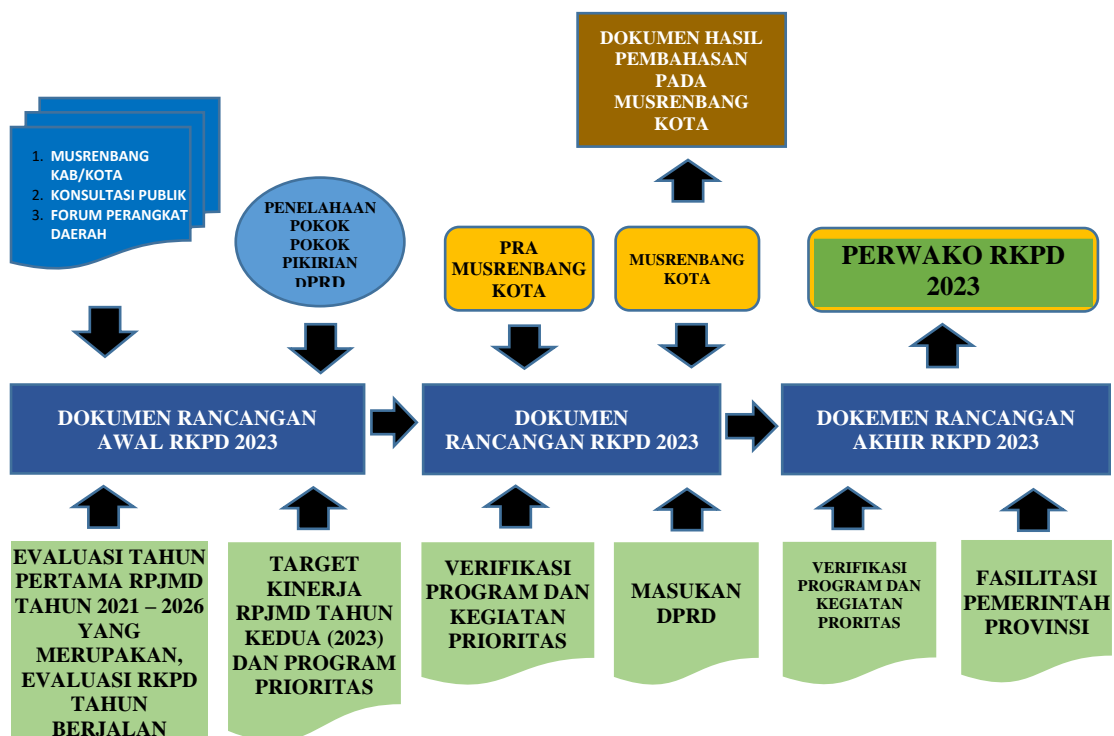
Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilakukan sebagai upaya dimana program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dijabarkan secara fungsional dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target kinerja tahun pertama pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 yang mulai diimplementasikan pada RKPD Tahun 2022 dan mempedomani target kinerja pada tahun 2023 sebagai implementasi tahun kedua serta program prioritas daerah. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 juga sudah memperhatikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal dimana Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:
 - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang telah diverifikasi; dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan penyelarasan dengan RKP Tahun 2023 dengan mempedomani kebijakan pemerintah yang menjadi fokus dan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023, merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota oleh Gubernur, dan setelah itu penetapan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 dengan Peraturan Walikota Bukittinggi.

Adapun proses penyusunan dokumen RKPD adalah seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen RKPD



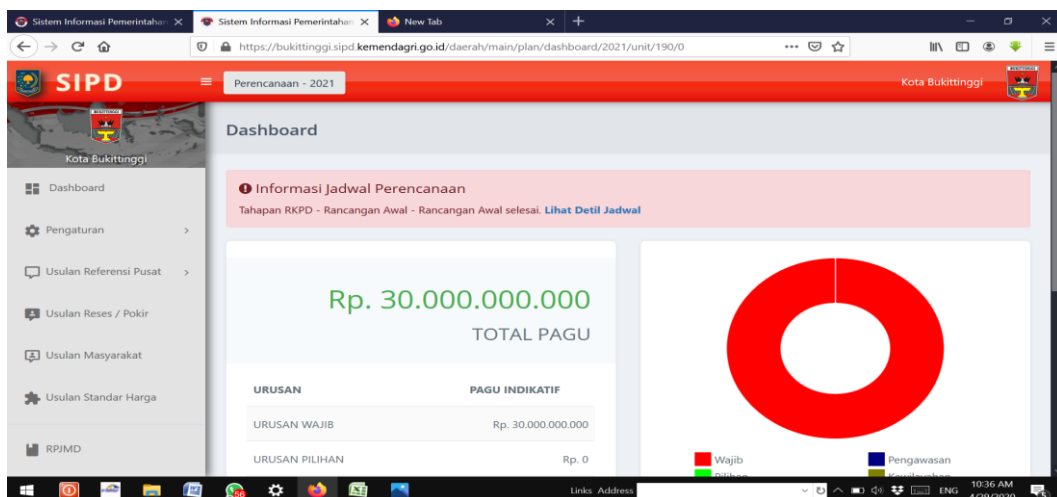
Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 2021 dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah digunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak hanya sekedar menyelaraskan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/ Renstra, RKPD/ Renja) dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA), tetapi juga akan memperkuat terwujudnya sinergitas perencanaan di tingkat provinsi dan nasional.

Gambar 1.2
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri



Di samping itu, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di kelurahan dan kecamatan.

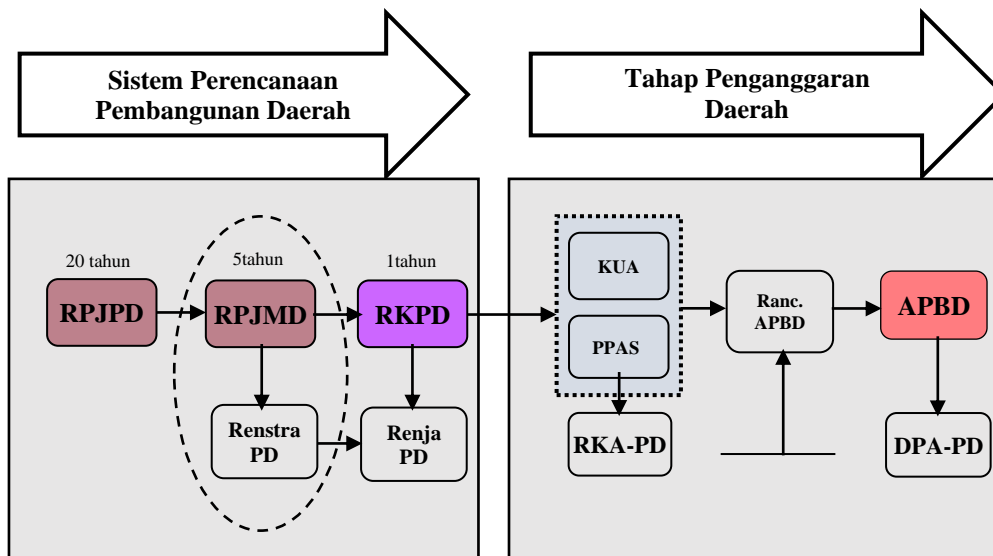
Gambar 1.3
Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri



Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RKPD memiliki hubungan/ keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan RAPBD. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD



Di samping itu, untuk mewujudkan seluruh kaidah dan ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasinya dilakukan pada saat perumusan teknis program dan kegiatan yang mempertimbangkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

3 Hubungan Antar Dokumen

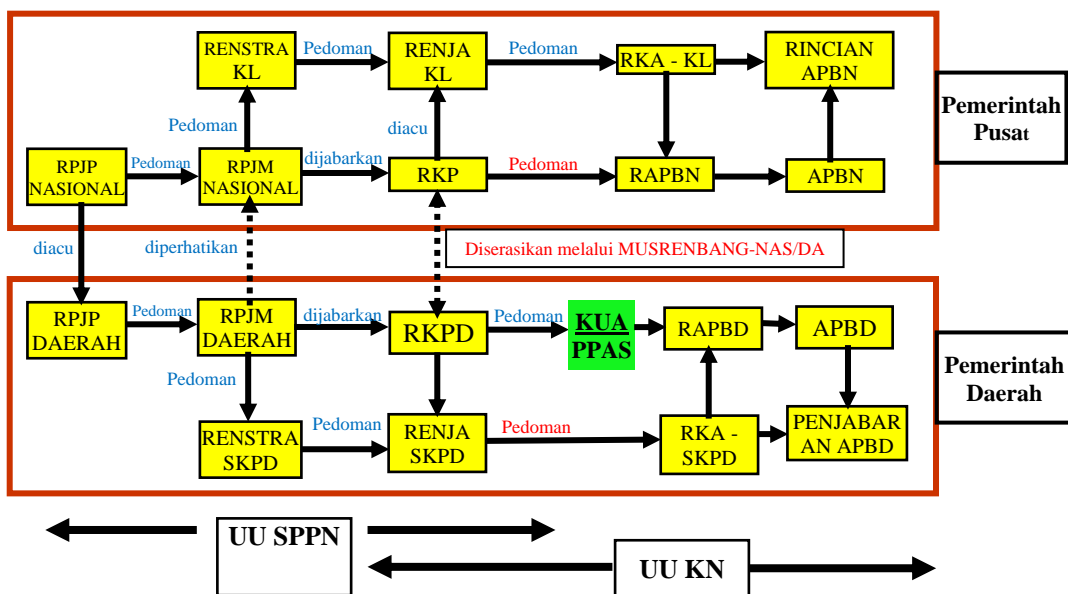
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tahun 2021-2026, RPJMD

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021—2026 dan RPJMN tahun 2019—2024 serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030 serta memperhatikan *masterplan* tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi .

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan



4 Maksud dan Tujuan

4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah:

1. Untuk mewujudkan program pembangunan daerah Kota Bukittinggi sesuai visi misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang telah dimuat dalam RPJMD Kota Tahun 2021—2026;
2. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2023;
4. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah; dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2023. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, identifikasi permasalahan di tingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.

BAB VII Penutup

Berisi penegasan bahwa RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00°20' Lintang Selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera. Letak astronomisnya menunjukkan bahwa Bukittinggi berada di bagian tengah pulau Sumatera. Posisi ini menjadikan Bukittinggi tergolong beriklim tropis. Namun, dengan berada pada ketinggian antara 780—950 meter di atas permukaan laut, udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan destinasi wisata. Di samping itu, letak geografis Bukittinggi yang cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru, berimplikasi terhadap tingginya arus mobilitas orang dan barang melalui kota ini.

Kota yang terkenal dengan bangunan Jam Gadang sebagai markah-nya, terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat dengan luas hanya 0,06 persen dari Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan 25,239 Km². Dengan kondisi geografis yang berbukit dan mempunyai lembah, maka luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang bisa dieksploitasi secara fisik. Potensi yang dimiliki Kota Bukittinggi hanyalah lingkungan alam yang indah, sejuk, bersih, dan letaknya strategis, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama dan nilai adat, yang turut memperkaya khazanah perbendaharaan potensinya.

Dengan kondisi tersebut di atas menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, di samping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa, serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi juga menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek-objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi.

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

Berbicara tentang karakteristik lokasi dan wilayah, maka akan tergambar bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah serta menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Bahwa luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², yang merupakan 0,06 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi yang sangat strategis terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi—Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi—Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Di samping itu, Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan;
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan;
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Pembagian wilayah administrasi Kota Bukittinggi per kecamatan dan kelurahan ditampilkan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

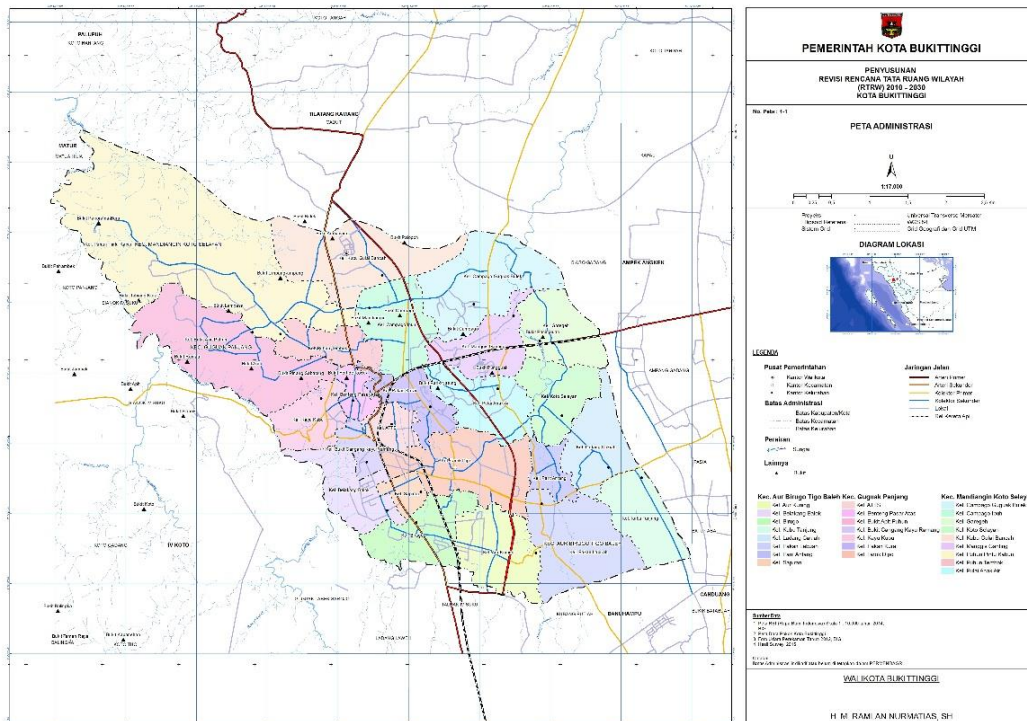
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
I	GUGUK PANJANG	683,10	27,07
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	48,16
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Banchah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	24,77
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
JUMLAH		2.523,90	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2020

Pembagian wilayah Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi berikut,

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030

Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara $100^{\circ}20'$ - $100^{\circ}25'$ BT dan antara $00^{\circ}16'$ - $00^{\circ}20'$ LS.

b. Posisi Geostrategis

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu, dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan dan pariwisata.

c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan dan kepulauan.

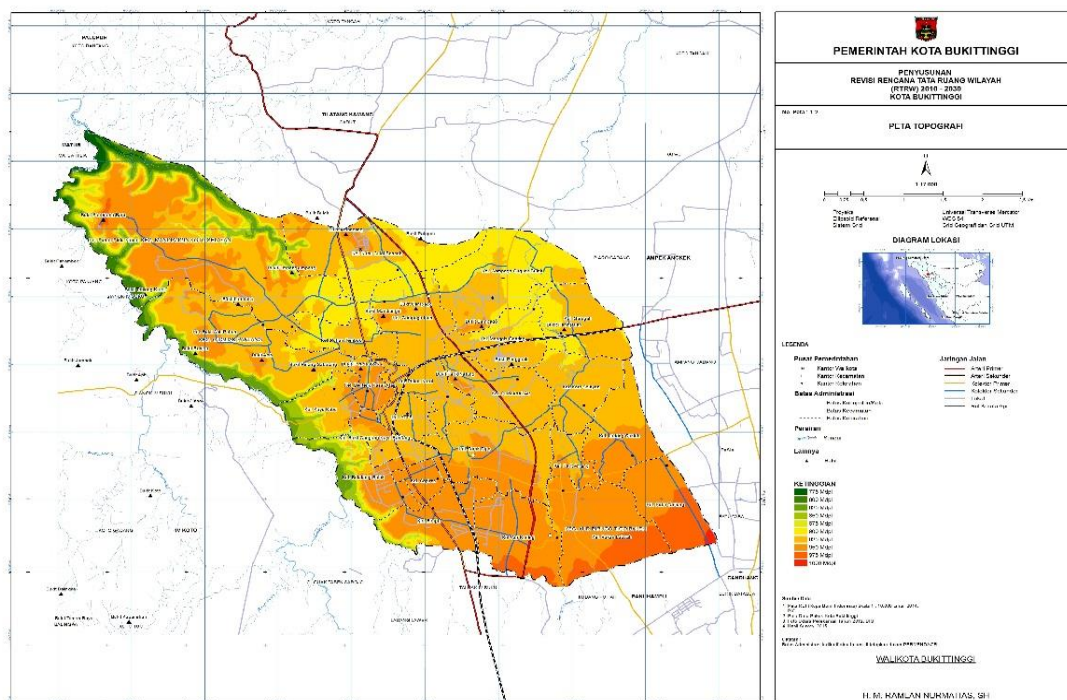
3. Topografi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batu apung dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut (mdpl), sehingga tanahnya subur. Namun demikian, luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali yaitu 639 ha. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas yaitu 344 ha, sementara kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh seluas 238 ha dan kecamatan Guguk Panjang 57 ha. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar lahan

digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelereng adalah sebagai berikut:

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Kondisi demikian berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2. 2
Peta Topografi Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030

Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

a. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15% dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan persawahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

4. Geologi

Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (*exposed*), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian (volkanisme). Pada peta geologi resmi yang dipublikasikan Kementrian ESDM, Tufa Batuapung itu disimbolkan sebagai “Qpt”. Secara aktual, terdapat batuan Qpt segar, dan Qpt lapuk menjadi tanah residual (hasil pelapukan). Tampilan fisik dari Qpt segar adalah: “kuning kelabu jika basah dan kuning keputihan jika kering”. Terdapat partikel hitam ukuran 1 mm, serabut kaca putih mengkilat, kwarsa putih susu, partikel kuning karat 1 mm, dan gumpalan-gumpalan amorf silika. Partikel-partikel itu satu sama lain terikat lemah.

Secara menyeluruh sebagai massa material, Qpt bersifat kohesif namun lunak (*soft*), porous dan kenyal (*Stiff*). Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai

Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (*impact test*) menunjukkan “tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu”. Hasil *impact test* itu menunjukkan skala kekuatan Qpt segar adalah “cukup kuat”. Dengan metode peremas tangan, material Qpt memungkinkan peremas secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas “kokoh” dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan $\sigma = 18 \text{ kN/m}^3$, dan perkiraan porositas $n = 0,5$

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) tanah endapan; dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (aluvium) dan oleh longoran tebing (koluvium). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (vegetasi) merupakan humus.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai “Patahan Semangko” yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1.250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera.

Kondisi geologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu lenau lempungan, lempung, lempung lanauan, lempung pasir, dan tufa. Dominasi geologi yang terdapat di Kota Bukittinggi adalah lempung lanauan, yaitu mencapai 1.138,88 Ha atau 45,85 % dari luas Kota Bukittinggi. Secara lebih detail klasifikasi geologi Kota Bukittinggi disajikan pada tabel berikut,

Tabel 2.2
Klasifikasi Geologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan

Kelurahan	Klasifikasi Geologi					Luas (Ha)
	Lanau	Lempung	Lempung	Lempung	Tufa	
	Lempungan		Lanauan	Pasiran		
I Kec. Guguk Panjang						
1 Kel. Benteng Pasar Atas		0,11	26,58			26,69
2 Kel. Pakan Kurai		33,99	25,63			59,62
3 Kel. Kayu Kubu			47,41		16,52	63,93
4 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah		29,3	5,11			34,41
5 Kel. Bukit Apit Puhun		19,53	137,02		47,26	203,81
6 Kel. Tarok Dipo	16,08	40,46	82,67			139,21
7 Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang		7,81	18,55		0,73	27,09
II Kec. Aur Birugo Tigo Baleh						
1 Kel. Aur Kuning	92,9		11,41			104,31
2 Kel. Birugo	51,3	12,93	23,7		0,21	88,14
3 Kel. Pakan Labuah	142,86					142,86
4 Kel. Belakang Balok		29,51	19,37		29,87	78,75
5 Kel. Sapiran		23,4				23,4
6 Kel. Ladang Cakiah	87,83					87,83
7 Kel. Parit Antang	32,2	1,38	0,5			34,08
8 Kel. Kubu Tanjung	84,22					84,22
III Kec. Mandiangin Koto Selayan						
1 Kel. Pulai Anak Air		9,31	81,55			90,86
2 Kel. Kubu Gulai Bancah		6,61	101,03	41,83	8,12	157,59
3 Kel. Puhun Pintu Kabun		48,52	231,24	0,37	205,14	485,27
4 Kel. Cimpago Guguak Bulek		33,57	89,77	30,46		153,8
5 Kel. Puhun Tembok		27,95	30,9			58,85
6 Kel. Cimpago Ipuh		13,62	57,08	23,04		93,74
7 Kel. Garegeh	8,55	12,27	65,16			85,98
8 Kel. Manggis Ganting		36,25	42,53			78,78
9 Kel. Koto Selayan	24,39	14,43	41,68			80,5
Kota Bukittinggi	540,33	400,95	1.138,89	95,7	307,85	2.483,72

Sumber : Bapelitbang, 2022

5. Hidrologi

Data hidrologi digunakan untuk mengetahui besarnya potensi sumber daya air tanah yang terdapat di Kota Bukittinggi. Dalam hal ini sumberdaya air tanah berupa produktivitas air tanah, kedalaman muka air tanah bebas, serta keberadaan sumber air tanah. Potensi air tanah yang tinggi serta pengambilannya yang mudah (air tanah dangkal) akan menunjang kebutuhan kegiatan yang ada di atasnya (khususnya kebutuhan untuk kegiatan perkotaan). Dengan diketahuinya besar potensi sumberdaya air, maka data hidrologi ini pun dapat

digunakan untuk menilai kelayakan permukiman berdasarkan produktivitas akuifer yang terkandung di dalamnya.

Secara umum Kota Bukittinggi dilalui oleh beberapa sungai, baik sungai-sungai kecil maupun sungai besar. Karakteristik hidrologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, akuifer produktif dengan penyebaran luas, serta akuifer produktif sedang. Masing-masing jenis hidrologi tersebut tersebar merata di wilayah Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelas mengenai kondisi hidrologi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel berikut ini,

Tabel 2.3
Karakteristik Hidrologi Kota Bukittinggi Berdasarkan Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan	Karakteristik Hidrologi		Luas (Ha)
	Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas	Akuifer Produktif Sedang	
I Kec. Guguk Panjang			
1 Kel. Benteng Pasar Atas	26,12	0,56	26,68
2 Kel. Pakan Kurai	59,62		59,62
3 Kel. Kayu Kubu	1,67	62,26	63,93
4 Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah	34,41		34,41
5 Kel. Bukit Apit Puhun	0,71	203,1	203,81
6 Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang	12,5	14,6	27,1
7 Kel. Tarok Dipo	138,19	1,03	139,22
II Kec. Aur Birugo Tigo Baleh			
1 Kel. Belakang Balok	7,74	71,01	78,75
2 Kel. Sapiran	22,86	0,54	23,4
3 Kel. Ladang Cakiah		87,83	87,83
4 Kel. Parit Antang	7,29	26,79	34,08
5 Kel. Kubu Tanjung		84,22	84,22
6 Kel. Aur Kuning	104,24	0,07	104,31
7 Kel. Birugo	64,96	23,18	88,14
8 Kel. Pakan Labuah	24,11	118,75	142,86
III Kec. Mandiangin Koto Selayan			
1 Kel. Kubu Gulai Bancah	117,84	39,75	157,59
2 Kel. Puhun Pintu Kabun	16,14	469,14	485,27
3 Kel. Cimpago Guguak Bulek	153,81		153,81
4 Kel. Pulai Anak Air	90,85		90,85
5 Kel. Puhun Tembok	30,89	27,97	58,86
6 Kel. Cimpago Ipuh	93,74		93,74
7 Kel. Garegeh	76,06	9,91	85,98
8 Kel. Manggis Ganting	78,78		78,78
9 Kel. Koto Selayan	54,28	26,21	80,49
JUMLAH	1216,81	1266,92	2483,73

Sumber : Bapelitbang, 2022

Kota Bukittinggi termasuk kedalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri dan Masang Pasaman. Sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi termasuk kedalam DAS Indragiri, yaitu mencapai 64,41 % dari luas wilayah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- Batang Sianok dengan lebar 12—15 meter, yang terletak di Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam yang membentang didalam lembah disebut dengan Ngarai Sianok dan alirannya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang serta kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Tambuo dengan lebar 5—7 meter, yang terletak disebelah timur Kota Bukittinggi dan aliran sungainya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Agam dengan lebar 5—7 meter, yang terletak di dalam wilayah Kota Bukittinggi dan melintasi Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Kecuali berfungsi sebagai *outlet* hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier.

Tabel 2. 4
Sungai/Batang yang Melalui Kota Bukittinggi

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Sianok	12	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

Sumber: Dinas PUPR, 2022

6. Klimatologi

Menurut UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, definisi klimatologi adalah, gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara. Kota Bukittinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit cenderung memiliki udara yang sejuk, berikut gambaran terkait dengan kondisi klimatologi Kota Bukittinggi.

a. Tipe

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk tropis basah yang ditandai dengan kelembapan udara yang relatif tinggi (umumnya diatas 90%), memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki suhu tahunan lebih dari 18° C dan mencapai 38° C ketika musim kemarau, yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, di samping untuk tempat peristirahatan.

b. Curah Hujan

Secara umum kondisi rata-rata curah hujan di Kota Bukittinggi berkisar antara 3.000 – 4.000 mm per tahun untuk seluruh wilayah yang berada di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2020 curah hujan Kota Bukittinggi berkisar 3.010 mm/tahun.

c. Suhu

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu kisaran suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dengan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

d. Kelembaban

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 89% dan maksimum 92%, dengan kelembaban rata-rata 91% setiap tahunnya.

7. Penggunaan Lahan

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi dari setiap kawasan di Kota Bukittinggi dalam pengembangan kota secara keseluruhan. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini, yang lebih penting adalah rencana pengembangan ke depan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penetapan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi adalah :

- Penentuan hirarki pusat pelayanan disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada kondisi eksisting dengan tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan di masa mendatang yang tinggi.
- Subpusat pelayanan akan dibentuk dengan merencanakan pengelompokan fasilitas yang memiliki skala pelayanan blok rencana, tidak hanya fasilitas pelayanan umum namun juga fasilitas pelayanan lainnya.
- Fungsi dan peran Kota Bukittinggi terhadap wilayah sekitar Kota Bukittinggi dalam pengembangan sektor pariwisata.
- Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kota Bukittinggi.

Tabel 2. 5
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2, Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

- Sumber: Sumbar : RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030
- Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian. Namun, Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian, tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat, juga mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi dalam tata ruang Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I. Dalam WPP I didominasi oleh jenis obyek wisata alam pegunungan.

Pemerintah Kota selalu berbenah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi, diantaranya telah dilakukan perencanaan secara menyeluruh terhadap pembenahan kandang-kandang satwa yang ada di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, atau yang lebih dikenal dengan “kebun binatang”. Secara bertahap mulai

tahun 2019 telah dilakukan pembangunan kandang-kandang yang sesuai standar Balai Kelestarian Sumber Daya Alam. Upaya ini dalam rangka menciptakan ruang yang nyaman bagi satwa sehingga dapat hidup dan berkembang secara sehat, serta menciptakan suasana yang nyaman dan mengesankan bagi pengunjung. Sehingga diharapkan tingkat kunjungan ke kebun binatang senantiasa meningkat.

Usaha lain yang juga terus ditingkatkan adalah atraksi budaya yang dikemas dalam sajian yang lebih atraktif sehingga semakin meningkatkan dan menambah daya tarik wisata, seperti penampilan tari-tarian tradisional di pelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan *event-event* daerah di kawasan objek wisata. Hal tersebut dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Peningkatan prasarana sarana dan utilitas sanitasi juga merupakan bagian penting dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang, yang merupakan markah Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi nonfisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru dengan tetap mengedepankan kearifan lokal sehingga keaslian potensi wisata Bukittinggi tetap terjaga.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kota Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Dari catatan sejarah kejadian bencana pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, data kejadian bencana Kota Bukittinggi yang tercatat merupakan kejadian bencana dalam rentang tahun 2019—2021. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14 (empat belas) kejadian yang merupakan banjir. Sementara tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kejadian (tanah amblas dan irigasi amblas), dan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kejadian berupa longsor dan angin puting beliung.

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021, kejadian banjir mengalami pengurangan, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Tidak adanya kejadian banjir pada 2 (dua) tahun tersebut karena telah dilakukannya pengerukan sampah dan perbaikan saluran drainase di beberapa kelurahan yang sudah tidak berfungsi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, banjir yang terjadi sebelumnya diakibatkan karena kesalahan manusia, yakni akibat penumpukan sampah yang terbawa air di saluran drainase dan badan air, serta tidak berfungsinya sebagian drainase karena beberapa drainase yang ada saat ini masih peninggalan dari zaman Belanda.

Hal ini membuktikan bahwa Kota Bukittinggi membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir/Genangan

Melihat kondisi topografi, Kota Bukittinggi sangat rentan terhadap bencana. Bencana yang berkemungkinan paling sering terjadi adalah banjir. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Besarnya debit air yang datang dari Kabupaten Agam;
- b. Penumpukan sampah yang terbawa air disaluran drainase dan badan air;
- c. Banyaknya terjadi *bottleneck* di badan drainase (dimensi drainase primer/sekunder/tersier);
- d. Adanya bangunan liar di atas drainase;
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase; dan
- f. Riol lama peninggalan zaman Belanda tertutup.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Penentuan luasan terpapar bahaya banjir menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya banjir meliputi:

1. Daerah Rawan Banjir, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;
2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;

3. Jarak dari Sungai, menggunakan data Peta Jaringan Sungai dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010—2030.

Berdasarkan parameterukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya banjir. Adapun luasan bahaya banjir perkecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	382,77	Tinggi
2. Guguk Panjang	294,12	Tinggi
3. Mandiangin Koto Selayan	607,77	Tinggi
Kota Bukittinggi	1.284,66	Tinggi

Sumber : Dok. KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luas bahaya di Kota Bukittinggi dengan total 1.284,66 Ha yang berada pada kelas ‘tinggi’.

2. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Kawasan rawan gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, sama halnya dengan daerah rawan longsor, yang berada sepanjang bibir Ngarai Sianok, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. 7
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor

Rawan Gempa Bumi					
No	Zona	Rawan	Kecamatan		
			ABTB	GP	MKS
1.	Zona Tinggi	Rawan	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah					
1.	Zona rendah	Rawan	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
		Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana ‘rendah’, ‘sedang’ dan ‘tinggi’. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, dinyatakan sepanjang kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok, yaitu dari bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter, merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

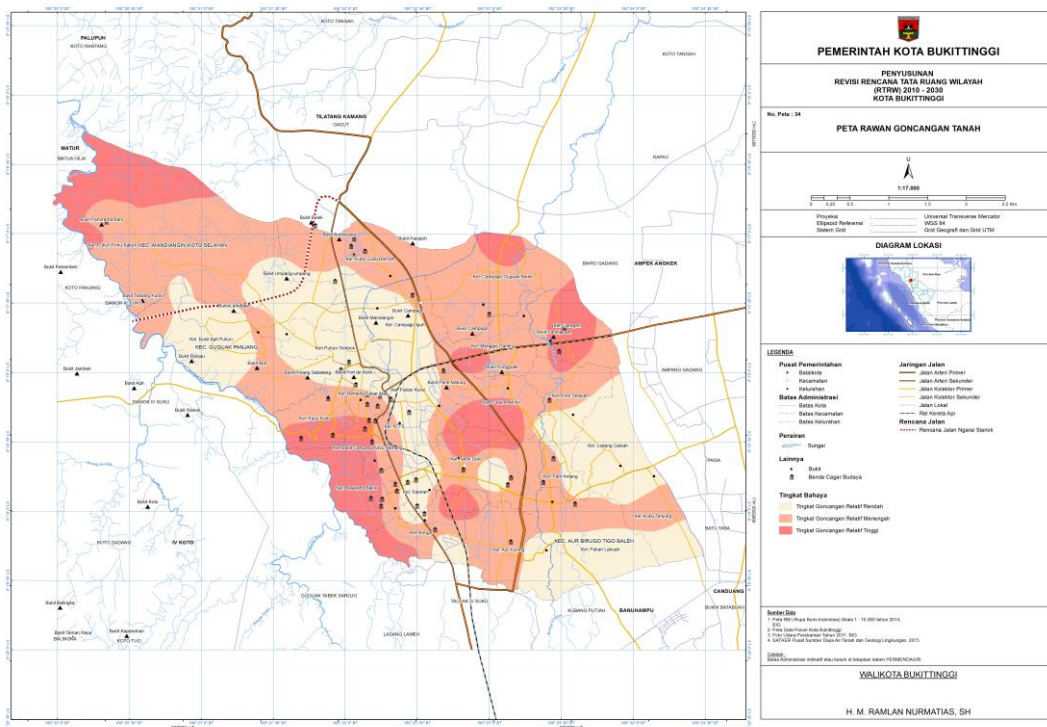
Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona rawan ini didasarkan kepada:
 - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsor apabila terjadi gempa.
 - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
 - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.
2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu: (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi; (2) Rendah, gerakan

tanah bisa terjadi bila ada gangguan; (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng; (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan goncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Rawan Goncangan Tanah di Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Daerah Rawan Goncangan Tanah Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030

Kota Bukittinggi terdiri dari perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Batang Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%.
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.

4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.
3. Kawasan Rawan bencana Cuaca Ekstrim
- Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana cuaca ekstrim ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Kurangnya peremajaan pohon pelindung;
- b. Konstruksi papan iklan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya cuaca ekstrim.

Penentuan luasan terpapar bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya cuaca ekstrim meliputi:

1. Keterbukaan Lahan, menggunakan data Peta Penutupan/Penggunaan Lahan dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030;
2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS; RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Berdasarkan parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim. Adapun luasan bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

KECAMATAN	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	Sedang
2. Guguk Panjang	683,10	Sedang
3. Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	Sedang
Kota Bukittinggi	2.523,90	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

B. Demografi

Perubahan demografi menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan. Hal ini karena penduduk merupakan salah satu modal utama dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah, di samping kepemilikan sumber daya alam. Penduduk yang berkualitas juga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga penggunaan potensi sumber daya alam pada setiap daerah dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Perubahan jumlah penduduk selain disebabkan oleh faktor alami (fertilitas) berupa kelahiran dan kematian, juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah migrasi masuk dibandingkan dengan migrasi keluar (migrasi netto positif). Kondisi ini terjadi di Kota Bukittinggi sebagai salah satu daerah destinasi wisata dan pusat perdagangan di Sumatera Barat, sehingga menjadi daya tarik penduduk daerah lain untuk tinggal di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi perlu meningkatkan penyediaan pelayanan publik secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat serta menerapkan berbagai kebijakan pengendalian penduduk.

1. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Selama periode tahun 2017—2021, jumlah penduduk Kota Bukittinggi memiliki tren yang fluktuatif, namun cenderung menurun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 126.804 jiwa, meningkat di tahun 2019 menjadi 130.773 jiwa. Kemudian menurun menjadi 121.588 jiwa di tahun 2021. Dalam periode ini, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi sekitar 1,12 persen. Tren perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk pada Tabel 2.9 memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah penduduk yang cenderung menurun yang disertai dengan penurunan LPP di Kota Bukittinggi pada tahun 2021. Kondisi ini berkemungkinan terjadi sebagai dampak menurunnya aktivitas perekonomian Kota Bukittinggi pada masa pandemi Covid 19 kurun waktu 2020—2021, sehingga arus migrasi keluar Kota Bukittinggi meningkat. Selain itu, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh keberhasilan berbagai program pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, di antaranya program Keluarga Berencana, Sekolah Keluarga, dan sebagainya.

Kondisi penurunan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dengan luas wilayah yang tetap yaitu 25,239 km², maka kepadatan penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2017—2019 terjadi peningkatan menjadi 5.151 jiwa/km². Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 4.817 jiwa/km² yang diakibatkan penurunan jumlah penduduk. Penurunan tingkat kepadatan ini dipandang sebagai hal positif, mengingat terbatasnya pemanfaatan ruang wilayah Kota Bukittinggi.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

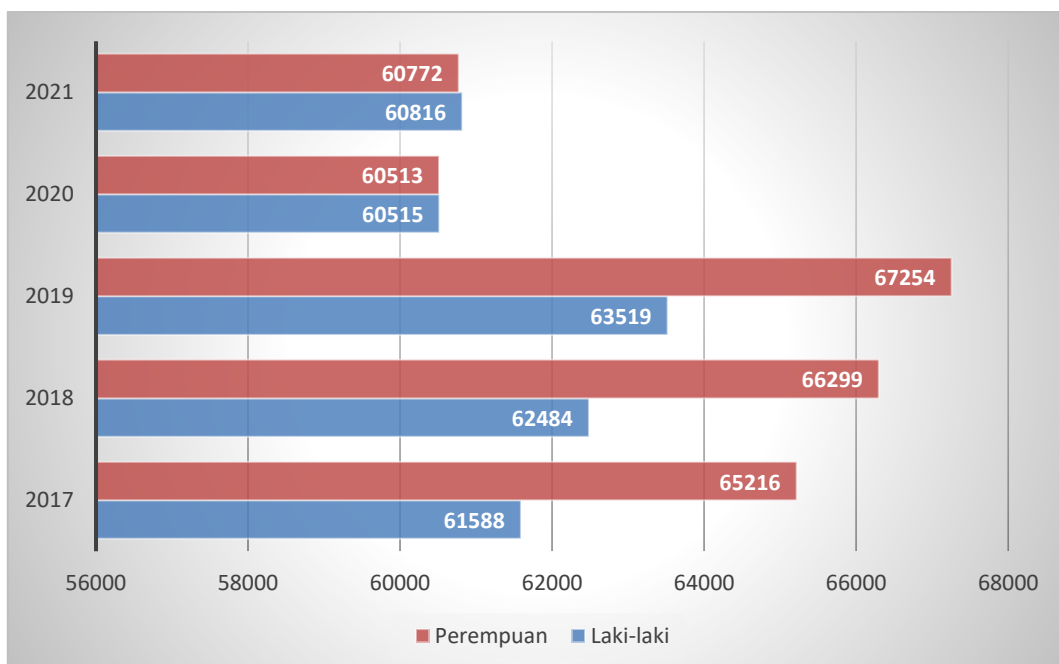
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	126.804	128.783	130.773	121.028	121.588
Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	5.024	5.103	5.151	4.795	4.817
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,68	1,56	1,55	0,81	0,005

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama periode tahun 2017—2021, komposisi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin menunjukkan dua kondisi yang berbeda. Untuk rentang waktu 2017—2019, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Namun, tahun 2020—2021 terjadi hal sebaliknya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan walaupun dengan gap yang tidak terlalu besar. Rata-rata peningkatan jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 0,13 persen sementara itu penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar -0,99 persen.

Grafik 2.1
Komposisi Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

3. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial, artinya masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.10
Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2017 s.d. 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 – 4	5.523	5.223	10.746	
5 – 9	5.172	4.958	10.130	
10 – 14	5.343	4.983	10.326	
15 – 19	5.107	4.829	9.936	
20 – 24	5.101	5.214	10.315	
25 – 29	5.353	5.407	10.760	
30 – 34	4.965	4.891	9.856	
35 – 39	4.459	4.433	8.892	
40 – 44	4.097	4.034	8.131	
45 – 49	3.839	3.867	7.706	
50 – 54	3.278	3.448	6.726	
55 – 59	2.884	2.884	5.768	
60 – 64	2.193	2.220	4.413	
65 – 69	1.500	1.626	3.126	
70 – 74	834	1.079	1.913	
75+	867	1.417	2.284	
Jumlah	2021*	60.816	60.772	121.588
	2020	60.515	60.513	121.028
	2019	63.519	67.254	130.773
	2018	62.484	66.299	128.783
	2017	61.588	65.216	126.804

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah, sehingga dapat dikatakan PDRB menggambarkan kegiatan roda perekonomian

yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Di samping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam RKPD ini digunakan harga tahun 2010.

a. PDRB atas dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 secara nominal PDRB atas harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp5,483,398.44,- dan pada tahun 2021 PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp6.263,129.76 terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar Rp779,731.32. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69,120.86	1.26	68,797.97	1,18	69,089.41	1.12	70,012.79	1.16	72,157.95	3.06
2.	Pertambangan dan Penggalian	124.41	0.00	123.92	0,00	123.41	0.00	120.04	0.00	119.89	-0.12
3.	Industri Pengolahan	376,197.39	6.86	370,134.83	6,37	364,832.12	5.93	361,107.56	5.97	364,294.03	0.88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	41,303.96	0.75	42,950.77	0,74	44,061.92	0.72	40,849.56	0.69	42,129.43	3.15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,216.44	0.15	8,397.29	0,14	8,804.26	0.14	9,177.56	0.15	8.956.19	-2.41
6.	Konstruksi	359,860.60	6.56	384,955.45	6,62	409,929.10	6.66	398,580.49	6.59	403,945.93	1.35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,803,831.77	32.90	1,926,174.04	33,14	2,059,082.68	33,4	2,037,476.63	33.70	2,102,503.97	33.17
8.	Transportasi dan Pergudangan	638,262.16	11.30	694,264.66	11,94	733,918.61	11.93	654,886.65	10.83	687,214.65	10.22
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,442.64	4.62	273,127.74	4,70	290,011.16	4.71	222,403.14	3.68	232,873.48	4.71
10.	Informasi dan Komunikasi	438,485.51	8.00	473,259.81	8,14	512,172.78	8.33	564,445.23	9.34	595,989.28	5.59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,463.23	5.72	315,767.83	5,43	323,790.81	5.26	329,045.56	5.44	356,422.13	8.32
12.	Real Estat	183,495.50	3.35	190,792.22	3,28	198,085.59	3.22	198,587.40	3.29	202,982.36	2.21
13.	Jasa Perusahaan	36,702.35	0.67	38,464.42	0,66	40,679.97	0.66	39,286.78	0.65	39,715.40	1.09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	304,946.75	5.56	322,589.86	5,55	336,425.17	5.47	335,005.29	5.54	337,756.39	0.82
15.	Jasa Pendidikan	279,445.53	5.10	298,040.25	5,13	322,892.07	5.25	346,132.61	5.73	352,536.80	1.85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,876.40	3.24	190,591.04	3,28	204,460.54	3.32	229,798.27	3.80	242,838.26	5.67
17.	Jasa lainnya	198,622.93	3.62	213,959.05	3,68	233,722.92	3.80	208,177.73	3.44	220,693.62	6.01
	PDRB	5,483,398.44	100.00	5,812,391.14	100.00	6,152,082.50	100.00	6,045,093.28	100.00	6,263,129.76	100.00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni dengan angka Rp2.102.503,97 atau dengan persentase sebesar 33,17 %, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp687.214,65 atau dengan persentase 10,22 %. Sektor lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid 19. Sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan sebesar 1,1% ini disebabkan dampak pandemi Covid 19, dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas berpergian sehingga menurunkan angka perjalanan. Namun, pada tahun 2021 perlahan-lahan angka indikator tersebut menunjukkan kenaikan.

Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan pertumbuhannya naik turun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,04% kondisi ini terjadi karena pemerintah kota selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian lahan kering. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dengan kontribusi hampir 0%. Secara keseluruhan PDRB atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat dampak pandemi Covid 19.

b. PDRB atas dasar Harga Berlaku

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (juta)

NO	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96.650,87	1,29	96.373,81	1,20	99.508,03	1,14	101.410,07	1,18	104.286,12	1,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	190,5	0,00	189,91	0,00	190,75	0,00	186,58	0,00	188,72	0,00
3.	Industri Pengolahan	453.203,15	6,07	453.172,38	5,66	437.222,66	5,03	447.376,30	5,19	461.860,48	5,12
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	53619,5	0,72	57.336,96	0,72	63.023,35	0,72	59.164,34	0,69	61602,26	0,68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.035,67	0,15	11.630,30	0,15	12.662,31	0,15	13.187,98	0,15	12.950,88	0,14

NO	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
6.	Konstruksi	486.029,6	6,52	532.094,14	6,64	578.563,89	6,65	577.807,99	6,70	594.344,15	6,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.524.056,86	33,87	2.709.773,96	33,83	2.958.607,74	34,03	2.910.422,94	33,73	2.993.968,47	33,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	799.518,9	10,73	877.271,61	10,95	943.611,46	10,85	868.106,21	10,06	922.465,30	10,22
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	435.068,27	5,84	480.609,98	6,00	526.064,01	6,05	405.653,81	4,70	430.783,11	4,77
10.	Informasi dan Komunikasi	460.244,43	6,18	507.205,72	6,33	567.676,54	6,53	622.251,49	7,21	664.303,48	7,36
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	432.853,32	5,81	442.449,69	5,52	465.959,44	5,36	481.149,49	5,58	543.877,71	6,03
12.	Real Estat	258.774,84	3,47	276.035,54	3,45	289.203,11	3,33	292.009,19	3,38	299.283,91	3,32
13.	Jasa Perusahaan	48.298,26	0,65	51.378,83	0,64	56.386,13	0,65	55.389,48	0,64	56.237,82	0,62
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.816,62	6,06	485.248,96	6,06	538.923,42	6,20	581.858,04	6,74	611.333,02	6,77
15.	Jasa Pendidikan	415.625,87	5,58	453.039,62	5,66	506.537,37	5,83	545.305,28	6,32	558.228,69	6,18
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	241.571,22	3,24	264.427,99	3,30	293.425,72	3,37	337.934,34	3,92	360.062,94	3,99
17.	Jasa lainnya	285.548,92	3,83	312.882,60	3,90	357.574,64	4,11	328.374,14	3,81	350.787,50	3,89
	PDRB	7.453.106,84	100,00	8.011.062,02	100,00	8.695.100,58	100,00	8.627.587,69	100,00	9.026.564,58	100,00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 masih berkontribusi 1,29 %. Namun, pada tahun 2021 hanya berkontribusi sebesar 1,16 %. Angka ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,06 %, tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Sektor-sektor tersebut pada tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp2.993.968,47 atau terjadi kenaikan 0,2 % dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya pergerakan positif meskipun dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang masih belum surut.

c. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi, yang dapat dilihat pada tabel dibawah,

Tabel 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d. 2021
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi

NO	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	1.26	1,20	1.18	1,29	1.26	1,20	1.18	1,18	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.	Industri Pengolahan	6,07	6.86	5,66	6.37	6,07	6.86	5,66	6.37	5,19	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0.75	0,72	0.74	0,72	0.75	0,72	0.74	0,69	0.68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0.15	0,15	0.14	0,15	0.15	0,15	0.14	0,15	0.15
6.	Konstruksi	6,52	6.56	6,64	6.62	6,52	6.56	6,64	6.62	6,70	6.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,87	32.90	33,83	33.14	33,87	32.90	33,83	33.14	33,73	33.70
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,73	11.64	10,95	11.94	10,73	11.64	10,95	11.94	10,06	10.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,84	4.62	6,00	4.70	5,84	4.62	6,00	4.70	4,70	3.68
10.	Informasi dan Komunikasi	6,18	8.00	6,33	8.14	6,18	8.00	6,33	8.14	7,21	9.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,81	5.72	5,52	5.43	5,81	5.72	5,52	5.43	5,58	5.44
12.	Real Estate	3,47	3.35	3,45	3.28	3,47	3.35	3,45	3.28	3,38	3.29
13.	Jasa Perusahaan	0,65	0.67	0,64	0.66	0,65	0.67	0,64	0.66	0,64	0.65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5.56	6,06	5.55	6,06	5.56	6,06	5.55	6,74	5.54
15.	Jasa Pendidikan	5,58	5.10	5,66	5.13	5,58	5.10	5,66	5.13	6,32	5.73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,24	3.24	3,30	3.28	3,24	3.24	3,30	3.28	3,92	3.80
17.	Jasa lainnya	3,83	3.62	3,90	3.68	3,83	3.62	3,90	3.68	3,81	3.44
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2022

Jika dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha pada tahun 2021 atas dasar Harga Konstan dan atas dasar Harga Berlaku, maka perkembangan kontribusi tiap-tiap sektor PDRB mengalami pertumbuhan dan juga mengalami penurunan, kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang cenderung tetap. Sementara untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung turun dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat. Artinya, perlu upaya peningkatan untuk memicu pertumbuhan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sehingga pertanian di Kota Bukittinggi tetap bertahan dan berkelanjutan.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	-0,47	0,42	1,34	3,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,50	-0,39	-0,41	-2,74	-0,12
3.	Industri Pengolahan	0,78	-1,61	-1,43	-1,02	0,88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,24	3,99	2,59	-7,29	3,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	2,20	4,85	4,24	-2,41
6.	Konstruksi	8,67	6,97	6,49	-2,77	1,35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	6,78	6,90	-1,05	3,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,28	8,77	5,71	-10,77	4,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	7,77	6,18	-23,31	4,71
10.	Informasi dan Komunikasi	8,97	7,93	8,22	10,21	5,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,74	2,54	1,62	8,32
12.	Real Estate	4,40	3,98	3,82	0,25	2,21
13.	Jasa Perusahaan	5,23	4,80	5,76	-3,42	1,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,30	5,79	4,29	-0,42	0,82
15.	Jasa Pendidikan	8,70	6,65	8,34	7,20	1,85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	7,15	7,28	12,39	5,67
17.	Jasa lainnya	4,07	7,72	9,24	-10,93	6,01
PDRB		6,08	6,02	5,88	-1,74	3,61

Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,61 persen setelah mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid 19 tahun 2020, yakni di angka -1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi, pertumbuhan

ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif di atas 3 persen di bawah tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan yang terjadi selama tahun 2021.

Tabel 2.15
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target Daerah, Provinsi dan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,8	6,8	6,9	7	2,67
Bukittinggi	6,08	6,02	5,88	-1,74	3,61
Sumatera Barat	5,26	5,14	5,05	-1,60	3,29
Indonesia	5,23	5,43	4,98	-2,03	3,70

Sumber : BPS, 2022

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 3,61 persen berada di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 2,67 persen. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 3,70 persen, tetapi berada di atas capaian Provinsi, yaitu 3,29 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat memperlihatkan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 berada di bawah Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kabupaten/ kota lainnya berada di bawah capaian Kota Bukittinggi. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017—2021 sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah,

Gambar 2.4
Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota/ <i>Regency/ Municipality</i>	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kabupaten / Regency</i>					
1. Kep. Mentawai	5,12	4,89	4,73	-1,85	2,89
2. Pesisir Selatan	5,41	5,32	4,78	-1,11	3,37
3. Solok	5,32	5,19	5,04	-1,12	3,32
4. Sijunjung	5,26	5,07	4,81	-1,10	3,15
5. Tanah Datar	5,11	5,04	4,99	-1,13	3,30
6. Padang Pariaman	5,58	5,44	2,40	-10,46	2,18
7. Agam	5,43	5,23	4,78	-1,38	3,70
8. Lima Puluh Kota	5,33	5,23	5,06	-1,16	3,33
9. Pasaman	5,08	4,97	4,80	-0,87	3,39
10. Solok Selatan	5,15	5,00	4,86	-1,24	3,35
11. Dhamasraya	5,44	5,28	4,94	-1,39	3,42
12. Pasaman barat	5,34	5,21	4,45	-1,34	3,75
<i>Kota / Municipality</i>					
71. Padang	6,23	6,06	5,64	-1,86	3,66
72. Solok	5,76	5,65	5,49	-1,42	3,56
73. Sawahlunto	5,74	5,50	5,31	-1,27	2,49
74. Padang Panjang	5,80	5,71	5,56	-1,44	3,46
75. Bukittinggi	6,08	6,00	5,84	-1,74	3,61
76. Payakumbuh	6,12	6,02	5,89	-1,65	3,58
77. Pariaman	5,61	5,47	5,30	-1,32	3,53
Sumatera Barat	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka tahun 2022

e. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK)/inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indikator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transport, komunikasi, dan jasa keuangan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, karena inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017 s.d.Tahun 2021.

Tabel 2.16
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021

Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
Target Daerah	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Bukittinggi	1,37	2,99	1,31	2,02	1,69
Sumatera Barat	2,11	2,60	1,67	2,11	1,40
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS, 2022

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2021 tercatat di atas laju inflasi Sumatera Barat, yaitu sebesar 1,40 persen, dan berada di bawah inflasi Nasional sebesar 1,87 persen. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada di bawah target yang ditetapkan, bahkan selalu terkontrol di bawah 3 (tiga) persen setiap tahunnya.

2. PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69	9.026.564,58
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28	6.263.129,76
Jumlah Penduduk (jiwa)	126.804	128.783	130,773	121.028	121.588
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	58,78	62,21	66,49	71,29	74,23
PDRB per Kapita ADHK	43,24	45,13	47,04	49,95	51,51

Sumber: Bukittinggi dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada Tahun 2021, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp74,23 juta, naik sebesar Rp2,94 juta dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp71,29 juta. Kenaikan ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah penduduk tahun 2020, serta didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Perdagangan Besar dan Eceran serta bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

3. Indeks Gini/Koefisien Gini

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)

- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2017—2021 berada pada ketimpangan ‘rendah’ dan ‘sedang’. Tahun 2020 Indeks Gini Kota Bukittinggi sebesar 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari tahun 2017—2021 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.18
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021
Target Daerah	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
Kota Bukittinggi	0,313	0,337	0,267	0,265	0,286
Sumatera Barat	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2021 lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional, yang berarti ketimpangan pengeluaran di Kota Bukittinggi semakin menurun. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi dan Nasional, Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih rendah 0,019 dari Provinsi dan lebih rendah 0,097 dari Nasional. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021, Indeks Gini Kota Bukittinggi masih mendekati ketimpangan ‘sedang’.

4. Kemiskinan

Sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, tingkat kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya dengan *basic need approach* atau pendekatan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan sebuah daerah.

Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021—2026. Capaian indikator ini dari tahun 2017—2020 menunjukkan persentase yang semakin menurun, dari 5,35 persen menjadi 4,54 persen. Walaupun capaian ini masih jauh jika dibandingkan dengan target optimis daerah, yaitu 2,84 persen, namun jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tren yang semakin menurun.

Kondisi yang berbeda justru terjadi di tahun 2021 yang menjadi periode awal RPJMD, dimana kondisi pandemi Covid 19 dan masa pemulihan ekonomi mulai dilakukan ternyata cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi meningkat menjadi 6.980 jiwa, yang juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi 5,14 persen dengan target 4,59 persen. Kondisi ketidaktercapaian target tersebut akan menjadi evaluasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun mendatang dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Perbandingan kondisi kemiskinan Kota Bukittinggi dengan daerah lain, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat juga diukur dengan melihat pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 750 jiwa. Namun, pada tahun 2021 bertambah sebanyak 970 jiwa atau meningkat 16,14 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk miskin pada periode 2020—2021 dengan daerah perkotaan lainnya seperti Kota Payakumbuh dan Kota Padang, maka penambahan jumlah penduduk miskin ini cukup tinggi. Begitu juga jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang meningkat 7,68 persen dan kondisi berbeda dengan Indonesia secara keseluruhan dimana jumlah penduduk miskin menurun di tahun 2021 dengan besaran penurunannya 3,67 persen.

Tabel 2.19
Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi dengan Kota lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d. 2021

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut (Ribuan Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	43,75	44,04	42,44	42,17	48,44
Kota Solok	2,50	2,29	2,29	1,99	2,31
Sawahlunto	1,23	1,48	1,35	1,36	1,52
Padang Panjang	3,22	3,11	3,00	2,84	3,28
Bukittinggi	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98
Payakumbuh	7,72	7,69	7,68	7,74	8,66
Pariaman	4,49	4,40	4,20	3,66	3,99
SUMBAR	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
INDONESIA	26592,99	25674,58	24785,87	27549,70	26539,51

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2022 data diolah

Jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayah dan dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang setara di Provinsi Sumatera Barat, kondisi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data BPS pada 2021 menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada di urutan ke 3 (tiga) di bawah Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Perbandingan dengan kota lainnya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.20
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d. 2021

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	4.74	4.70	4.48	4.40	4,94
Kota Solok	3.66	3.30	3.24	2.77	3,12
Sawahlunto	2.01	2.39	2.17	2.16	2,38
Padang Panjang	6.17	5.88	5.60	5.24	5,92
Bukittinggi	5.35	4.92	4.60	4.54	5,14
Payakumbuh	5.88	5.77	5.68	5.65	6,16
Pariaman	5.20	5.03	4.76	4.10	4,38
SUMATERA BARAT	6,85	6,64	7,40	6,56	6,63
INDONESIA	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Kondisi di atas masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dari tahun 2017, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 5,35 persen masih berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yaitu 6,85 persen dan 10,12 persen. Hal yang sama juga terjadi sampai dengan tahun 2021 dimana tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 5,14 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 6,63 persen dan 9,71 persen.

Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki berbagai program strategis daerah, diantaranya Sistem Bukittinggi Hebat, Tabungan Utsman dan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UKM serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada tiap-tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perbandingan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.21
Perbandingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat					Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	0,54	0,73	0,63	0,45	0,67	0,11	0,17	0,18	0,09	0,13
Kota Solok	0,62	0,42	0,29	0,27	0,28	0,23	0,09	0,04	0,04	0,05
Sawahlunto	0,29	0,27	0,23	0,07	0,33	0,07	0,07	0,05	0	0,06
Padang Panjang	0,94	0,88	0,53	0,46	0,76	0,22	0,22	0,09	0,08	0,16
Bukittinggi	0,57	0,39	0,56	0,56	0,80	0,13	0,06	0,12	0,2	0,19
Payakumbuh	0,75	0,71	0,46	0,71	0,82	0,12	0,15	0,06	0,14	0,17
Pariaman	0,59	0,68	0,49	0,49	0,36	0,14	0,16	0,07	0,1	0,08
Sumatera Barat	1	1,04	0,94	0,92	1,04	0,23	0,24	0,21	0,2	0,24
Nasional	1,79	1,63	1,5	1,75	2,42	0,46	0,41	0,36	0,47	0,69

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2022 data diolah

Nilai indeks kedalaman Kota Bukittinggi tahun 2017 sebesar 0,57 meningkat sebanyak 0,22 point mejadi 0,80 di tahun 2021. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin menjauh dari garis

kemiskinan. Berbagai program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar harus lebih ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat, nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bukittinggi masih cukup tinggi, berada pada posisi 2 (dua) setelah Kota Payakumbuh pada tahun 2021. Namun, nilai ini masih berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Terkait dengan indeks keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi, pada tahun 2017 terjadi penurunan 0,04 poin, dari 0,13 menjadi 0,06 pada tahun 2018. Kemudian nilai ini meningkat di tahun 2021 menjadi 0,19. Dengan semakin meningkatnya nilai indeks ini menunjukkan kondisi penduduk miskin Kota Bukittinggi yang semakin beragam sehingga memang diperlukan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dapat memberikan respon yang berbeda terhadap berbagai kondisi penduduk miskin tersebut.

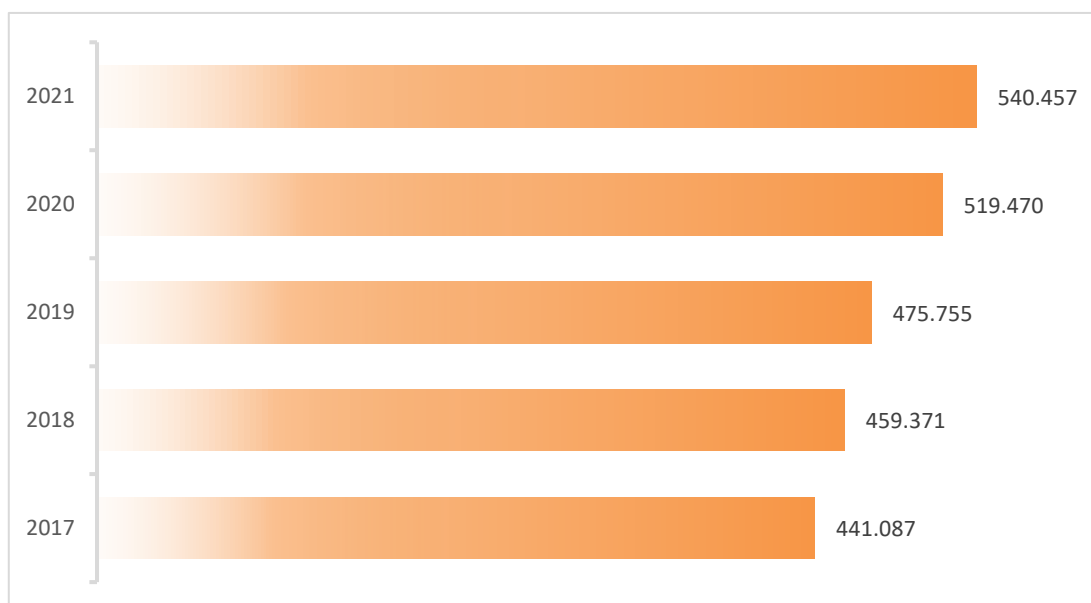
Tabel 2.22
Perubahan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021`
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.57	0.39	0.56	0,56	0,8
2.	Perubahan P1 (poin)	-0,48	-0,18	0,16	0	0,8
3.	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0.10	0.06	0.12	0,20	0,19
4.	Perubahan P2 (poin)	-0.2	-0,04	0,06	0,08	0,01

Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2022

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori (kkal) per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Data garis kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik berikut,

Grafik 2.2
Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2022

Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kota Bukittinggi yaitu Rp441.087,- per kapita per bulan kemudian terus meningkat menjadi Rp475.755,- per kapita per bulan di tahun 2019. Angka ini meningkat lagi tahun 2021 menjadi Rp540.457,- per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini terjadi secara terus menerus di Kota Bukittinggi karena naiknya harga barang makanan dan nonmakanan. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada :

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH):
Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+)
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS)
Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu Program Wajib Belajar.
4. Komoditas pengeluaran per kapita disesuaikan

Tabel 2.23
Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021

Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,94	14,95	14,96	14,9	14,98
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,3	11,31	11,32	11,33	11,44
Kesehatan						
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,69	73,91	74,22	74,52	74,62
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/orang/ tahun	12.636	12.792	12.950	13.110	13.445
IPM		79,72	79,80	80,11	81,51	80,86

Sumber : Bapelitbang, 2022

Tabel di atas merupakan target IPM dan komponen pembentuknya di Kota Bukittinggi. Periode 2017—2020 merupakan target Daerah yang tertuang pada RPJMD sebelumnya, dengan capaian IPM pada akhir periode yaitu 80,58 di bawah target 81,51 pada tahun 2020. Tahun 2021 merupakan periode awal RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021—2026 sehingga penyesuaian target berdasarkan kondisi pada tahun 2020 sebesar 80,86. Target inilah yang kemudian menjadi indikator tujuan dan sasaran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2017 s.d. 2021

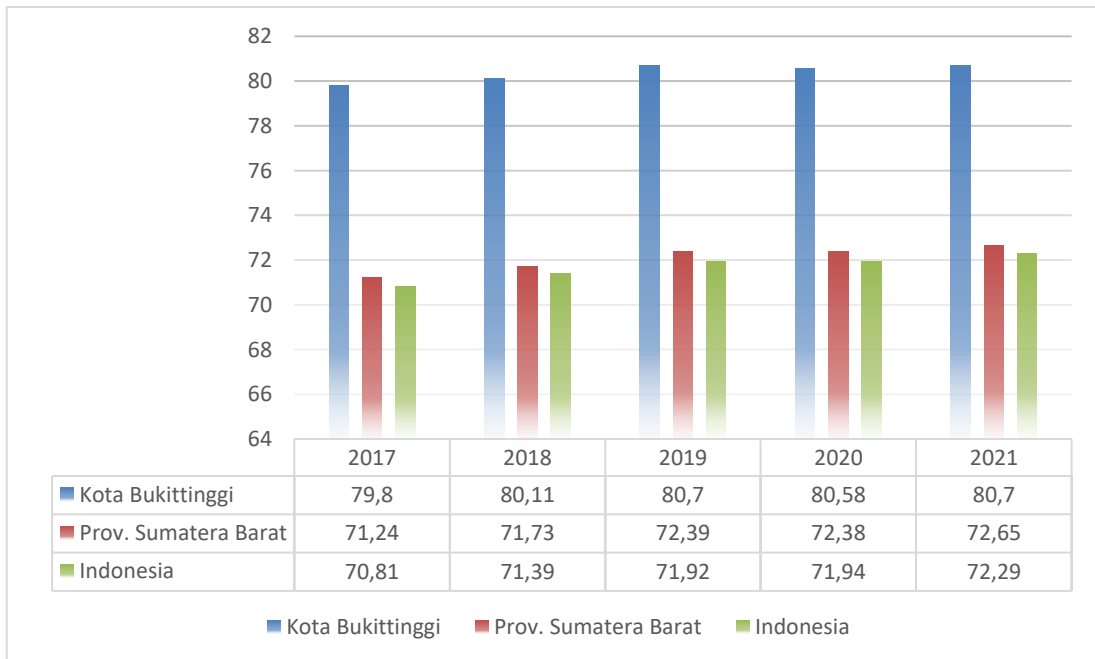
Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
Kab. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
Kab. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
Kota Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai IPM Kota Bukittinggi berada pada kategori ‘sangat baik’ jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Dari tahun 2017—2021 Kota Bukittinggi merupakan kabupaten/kota tertinggi ke dua setelah Kota Padang, walaupun tahun 2020 IPM Kota Bukittinggi turun 0,13 kemudian meningkat kembali 0,12 poin menjadi 80,70 di tahun 2021. Kondisi ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan alokasi belanja daerah pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini,

Grafik 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Pada tahun 2021, peningkatan IPM Kota Bukittinggi sebesar 0,12 poin, sedangkan Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,27 poin dan Nasional 0,35 poin. Walaupun peningkatan IPM ini tidak lebih besar dari Provinsi dan Nasional, namun nilai IPM Kota Bukittinggi 80,70 lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat 72,65 dan Indonesia secara keseluruhan 72,29. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi lebih baik. Jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada RPJMD, capaian IPM sebesar 80,70 masih berada dibawah target optimis yaitu 80,86. Sehingga program di bidang layanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi perlu terus dikembangkan.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel 2.25
Angka Melek Huruf Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melek Huruf	99.94	99.94	99.58	99.96	99.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Penyelenggaraan program pendidikan di Bukittinggi didukung oleh 45 sekolah dasar negeri dan 11 sekolah dasar swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah, baik tingkat SD, SMP atau SMA. Pada tahun 2017 terjadi pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang merupakan pengejawantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, peralihan ini hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja. Kota Bukittinggi tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.

Dengan demikian tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi AMH, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan data tahun 2017—2021, AMH di Kota Bukittinggi hampir mencapai 100%. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis dan baca, dan sangat sedikit sekali yang buta huruf. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen baru dalam pembentukan IPM sebagai pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS dapat dimaknai sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu Program Wajib Belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.26
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98
Target HLS	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 14,94 tahun pada tahun 2017 menjadi 14,98 tahun pada tahun 2021. Bahkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, setiap tahunnya tingkat capaian HLS mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pendidikan pada berbagai jenjang di Kota Bukittinggi semakin baik. Berbagai strategi, kebijakan dan dukungan program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan telah membuahkan hasil.

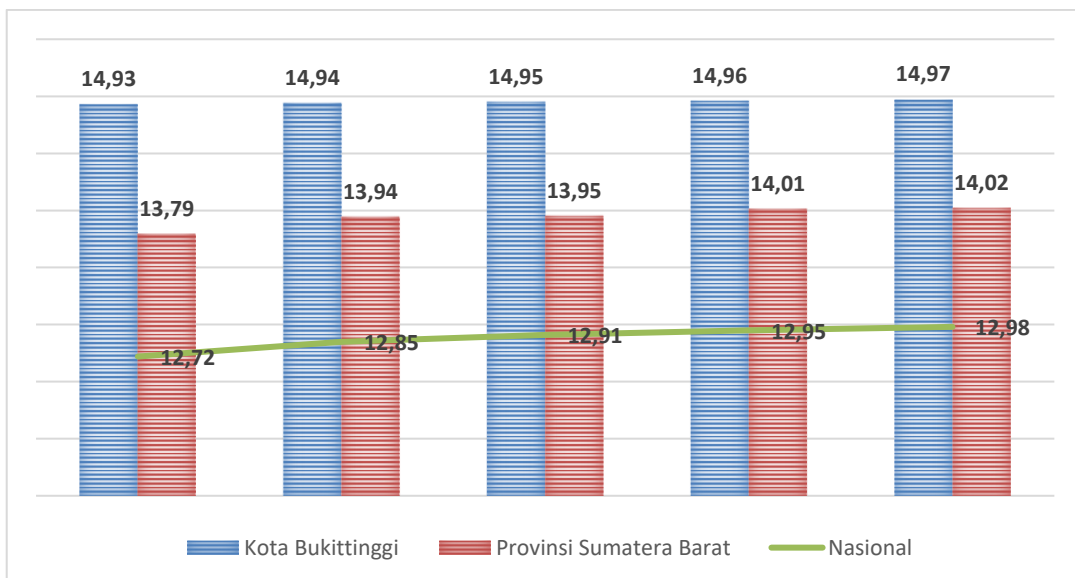
Tabel 2.27
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d. 2021

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	12.07	12.39	12.76	12.82	12,89
Kab. Pesisir Selatan	13.06	13.30	13.31	13.32	13,33
Kab. Solok	13.01	13.02	13.03	13.04	13,05
Kab. Sijunjung	12.34	12.35	12.36	12.37	12,38
Kab. Tanah Datar	13.59	13.88	14.32	14.33	14,34
Kab. Padang Pariaman	13.56	13.57	13.62	13.67	13,68
Kab. Agam	13.94	13.85	13.86	13.87	13,88
Kab. Lima Puluh Kota	13.26	13.27	13.28	13.29	13,30
Kab. Pasaman	12.72	12.78	12.79	12.80	12,81
Kab. Solok Selatan	12.68	12.69	12.70	12.71	12,72
Kab. Dharmasraya	12.40	12.41	12.42	12.43	12,44
Kab. Pasaman Barat	13.06	13.22	13.40	13.61	13,68
Kota Padang	16.15	16.50	16.51	16.52	16,53
Kota Solok	14.29	14.30	14.31	14.32	14,33
Kota Sawahlunto	13.14	13.15	13.16	13.17	13,18
Kota Padang Panjang	15.03	15.04	15.05	15.06	15,07
Kota Bukittinggi	14.94	14.95	14.96	14.97	14,98
Kota Payakumbuh	14.23	14.24	14.25	14.26	14,27
Kota Pariaman	14.51	14.52	14.53	14.54	14,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat secara umum cukup tinggi dari tahun 2017 s.d. 2021. Kota Bukittinggi berada pada urutan ke-3 (tiga) setelah Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Terlihat kondisi terakhir pada tahun 2021, HLS Kota Bukittinggi 14,98 tahun, sementara Kota Padang pada angka 16,53 tahun dan Kota Padang Panjang 15,07 tahun. HLS Kota Bukittinggi juga lebih tinggi di atas HLS Provisi Sumatera Barat dan Nasional. Di tahun 2017 HLS Nasional 12,72 tahun dan HLS Provinsi Sumatera Barat 13,79 tahun, sementara Kota Bukittinggi berada pada 14,93 tahun. Kondisi yang sama juga terjadi sampai pada tahun 2021, HLS Kota Bukittinggi 14,97 tahun sementara Provinsi Sumatera Barat pada 14,02 tahun dan HLS Nasional 12,98 tahun.

Grafik 2.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

3. Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Tabel 2.28
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata lama sekolah	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34
Target RLS	11,3	11,31	11,32	11,33	11,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sebesar 11,30 dan tahun 2021 yaitu 11,34 menunjukkan angka yang semakin membaik walaupun belum mencapai 12. Artinya, rata-rata penduduk Kota Bukittinggi belum menamatkan pendidikan minimal jenjang SMA (12 tahun). Hal ini tentu menjadi perhatian bersama agar angka rata-rata sekolah semakin membaik. Jika dibandingkan dengan capaian target RLS pada RPJMD Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tingkat ketercapaian yang baik.

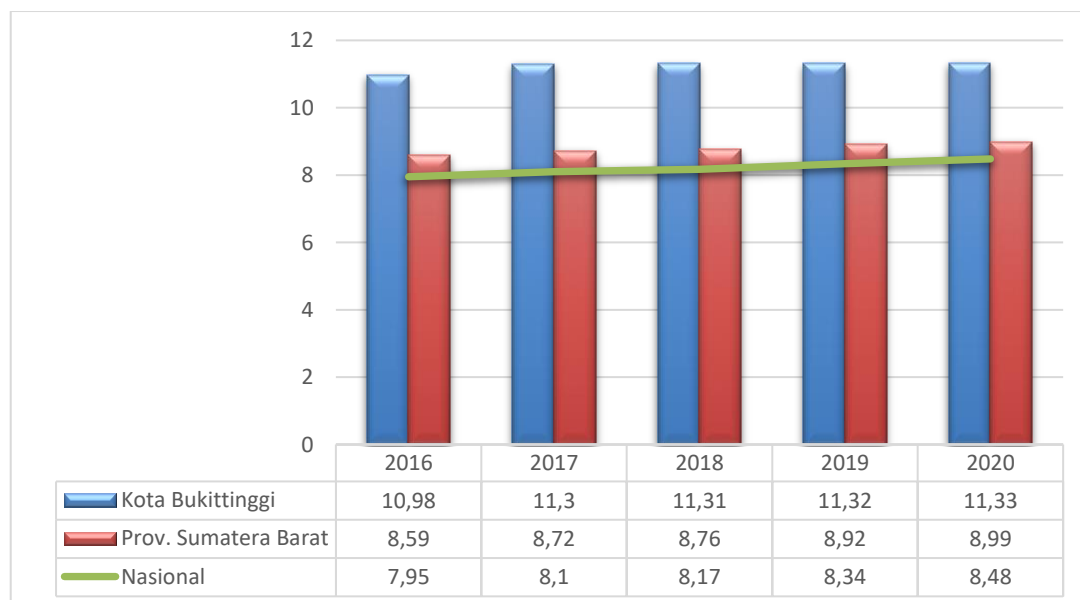
Tabel 2.29
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 s.d. 2021

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kep. Mentawai	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20
Kab. Pesisir Selatan	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
Kab. Solok	7,6	7,84	7,85	7,86	7,87
Kab. Sijunjung	7,72	7,77	8,1	8,11	8,12
Kab. Tanah Datar	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62
Kab. Padang Pariaman	7,21	7,5	7,86	7,87	7,88
Kab. Agam	8,39	8,69	8,85	8,96	8,97
Kab. Lima Puluh Kota	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07
Kab. Pasaman	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10
Kab. Solok Selatan	8	8,15	8,16	8,28	8,32
Kab. Dharmasraya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55
Kab. Pasaman Barat	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27
Kota Padang	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59
Kota Solok	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04
Kota Sawahlunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
Kota Padang Panjang	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63
Kota Bukittinggi	11,3	11,31	11,32	11,33	11,34
Kota Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
Kota Pariaman	10,1	10,36	10,37	10,59	10,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2022 berada pada urutan ke 3 setelah Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kondisi terakhir pada tahun 2021, RLS Kota Bukittinggi 11,34 sedangkan RLS Kota Padang Panjang 11,63 dan RLS Kota Padang 11,59. Pada grafik berikut dapat dilihat perbandingan RLS Kota Bukittinggi dengan RLS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. RLS yang dijalani penduduk Kota Bukittinggi sudah mendekati tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan peningkatan yang terus menerus menunjukkan adanya perbaikan kualitas modal manusia pada usia produktif di Kota Bukittinggi. Selain itu, RLS Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata RLS Prov. Sumatera Barat selama 8,99 tahun dan RLS Nasional yang selama 8,48 tahun pada tahun 2021.

Grafik 2.5
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s/d 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.30
Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Angka Harapan Hidup	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bukittinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,50
Target Daerah	73,69	73,91	74,22	74,52	74,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan AHH yaitu dari 73,69 tahun menjadi 74,50 tahun. Semakin tinggi AHH Kota Bukittinggi menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dibandingkan dengan target AHH yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 tingkat capaian AHH mencapai 100 persen. Sedangkan di tahun 2021 terdapat gap antara target yang ditetapkan dengan capaian AHH yaitu sebesar 0,03 point, artinya pada tahun 2020 tingkat capaian AHH sebesar 99, 81 persen.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d. 2021

Angka Harapan Hidup	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bukittinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,50
Prov. Sumatera Barat	68,78	69,01	69,31	69,47	69,47
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, AHH tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator AHH ini, pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi AHH masyarakat. Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada di posisi yang cukup baik, bahkan berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat yaitu 69,47 tahun dan Nasional 71,41 tahun pada tahun 2021. Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 s.d. 2021

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir [Metode Baru] (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	64.37	64.49	64.68	64.73	64,73
Kab. Pesisir Selatan	70.23	70.45	70.73	70.86	70,96
Kab. Solok	67.65	67.95	68.34	68.58	67,59
Kab. Sijunjung	65.44	65.69	66.02	66.21	66,36
Kab. Tanah Datar	69.11	69.38	69.73	69.94	70,12
Kab. Padang Pariaman	67.96	68.23	68.58	68.79	68,97
Kab. Agam	71.57	71.83	72.17	72.37	72,53
Kab. Lima Puluh Kota	69.31	69.47	69.70	69.79	69,84
Kab. Pasaman	66.54	66.82	67.18	67.40	67,59
Kab. Solok Selatan	66.92	67.21	67.58	67.81	68,01
Kab. Dharmasraya	70.44	70.73	71.10	71.33	71,53
Kab. Pasaman Barat	67.15	67.37	67.67	67.82	67,94
Kota Padang	73.20	73.35	73.57	73.65	73,69
Kota Solok	72.92	73.14	73.45	73.61	73,73
Kota Sawahlunto	69.39	69.59	69.87	70.00	70,10
Kota Padang Panjang	72.46	72.58	72.77	72.82	72,82
Kota Bukittinggi	73.69	73.91	74.22	74.38	74,50
Kota Payakumbuh	73.13	73.33	73.61	73.74	73,84
Kota Pariaman	69.67	69.87	70.15	70.28	70,38
Provinsi Sumatera Barat	68.78	69.01	69.31	69.47	69,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021 secara umum berada di atas AHH kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini dimungkinkan karena berbagai program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang capaian target dan peningkatan indikator ini bekerja efektif dan efisien, berupa: peningkatan status kesehatan keluarga, akses mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita, penguatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan dan sebagainya.

5. Pengeluaran per Kapita (PPP)

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang menginterpretasikan dimensi standar hidup layak. Menurut BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun

bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar Rp12.816 ribu (target Rp12.636 ribu) yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan sehingga tahun 2019 menjadi Rp13.586 ribu (target Rp12.950 ribu). Namun di tahun 2020 PPP Kota Bukittinggi mengalami penurunan menjadi Rp13.282 ribu (target Rp13.110 ribu) sebagai akibat adanya pandemi Covid 19. Pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan pengeluaran per kapita turun. Perbaikan terjadi pada tahun 2021, dimana pendapatan per kapita Kota Bukittinggi meningkat menjadi Rp13.331 ribu, namun capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu Rp13.445 ribu.

Tabel 2.33
Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bukittinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331
Target PPP	12.636	12.792	12.950	13.110	13.445

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Kondisi pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, PPP Kota Bukittinggi sebesar Rp12.816 ribu merupakan terbesar ke 3 setelah Kota Padang (Rp13.957 ribu) dan Kota Payakumbuh (Rp12.816 ribu). Peningkatan PPP Kota Bukittinggi terus membaik sehingga di tahun 2021 menjadi Rp13.331 ribu yang merupakan terbesar ke-2 setelah Kota Padang sebesar Rp14.540 ribu. Perbandingan Pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat ditampilkan pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.34
Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016 s.d. 2020

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan [Metode Baru] Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321
Kab. Pesisir Selatan	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270
Kab. Solok	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215
Kab. Sijunjung	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389
Kab. Tanah Datar	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616
Kab. Padang Pariaman	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050
Kab. Agam	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662
Kab. Lima Puluh Kota	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668
Kab. Pasaman	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440
Kab. Solok Selatan	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367
Kab. Dharmasraya	10.851	11.189	11.431	11.273	11.324
Kab. Pasaman Barat	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089
Kota Padang	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540
Kota Solok	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168
Kota Sawahlunto	9.343	9.765	10.238	10.182	10.195
Kota Padang Panjang	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754
Kota Bukittinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331
Kota Payakumbuh	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317
Kota Pariaman	12.425	12.611	12.958	12.796	12.818

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2022

Belanja rumah tangga di Kota Bukittinggi secara umum lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang dapat dilihat dari pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi yang lebih tinggi.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: 1) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral etika, berbudaya dan beradab; serta 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kota Bukittinggi yang selama ini telah dikenal sebagai kota pariwisata. Kesadaran akan pentingnya

seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* lainnya di Kota Bukittinggi.

Sebagai Kota Pariwisata, Kota Bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga. Namun, lebih dari itu, budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi dijual dan dijadikan atraksi pada *event-event* pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut jumlah kelompok seni tradisional yang ada di Kota Bukittinggi yang terus selalu dibina dan dikembangkan :

Tabel 2.35
Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	14
2	Guguk Panjang	7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	10
	Jumlah	31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2022

Pada tahun 2021 tidak ada festival seni dan budaya yang diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan alokasi anggaran untuk mengikuti *event* festival seni dan budaya mengalami *refocusing* dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid 19.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi a.) pendidikan; b.) kesehatan; c.) pekerjaan umum dan penataan ruang; d.) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f.) sosial.

1. Pendidikan

Urusan Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah yang menjadi modal sumber daya manusia berkualitas untuk mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembangunan yang dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pendidikan salah satunya dapat dilihat pada perkembangan capaian urusan Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 sebagai berikut,

Tabel 2.36
Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Pendidikan										
Angka melek huruf	99,94	99,94	99,95	99,94	99,95	99,58	99,95	99,96	99,95	99,96
Angka rata-rata lama sekolah	10,95	11,30	11,05	11,31	11,10	11,32	11,15	11,33	11,15	11,33
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	>100%	107,34	>100%	110,47	>100%	105,78	>100%	112,44	>100%	123,44
Angka Partisipasi Kasar MP/MTS/ Paket B	>100%	87,71	>100%	91,16	>100%	88,29	>100%	84,76	>100%	94,76
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Paket C	>100%	98,98	>100%	87,19	>100%	99,31	>100%	109,5	>100%	109,5
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	>100%	99,46	>100%	98,77	>100%	98,95	>100%	99,38	>100%	99,38
Angka Partisipasi Murni SMP/ MTS/ Paket B	>100%	79,21	>100%	80,79	>100%	81,00	>100%	81,46	>100%	81,46
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	>100%	79,06	>100%	77,66	>100%	78,28	>100%	77,3	>100%	79,3
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86,50%		87%		87,50%		88%	45,20	88%	45,20
Pendidikan Dasar										
Angka partisipasi sekolah	127,60	99,46	127,70	99,46	128	98,77	128,50		128,50	
Rasio ketersediaan sekolah/	1:243	1:239	1:243	1:,211	1:243	1:210	1:243	1:223	1:243	1:223

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
penduduk usia sekolah										
Rasio guru/murid	1:29	1:20	1:30	1:20	1:30	1:17	1:30	1:19	1:30	1:19
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	124,58	98,98	127,07	87,19	128,32	99,31	130,88	109,5		
Pendidikan menengah:										
Angka partisipasi sekolah	145	98,53	145,10	98,43	145,15	98,24	145,20		145,20	
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:277	1:516	1:278	1:369	1:280	1:335	1:281	1:469	1:281	1:469
Rasio guru terhadap murid	1:13	1:18	1:14	1:16	1:15	1:14	1:15	1:22	1:15	1:22
Fasilitas Pendidikan:										
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	65,91	100%	76,34	100%	84,48	100%	98,46	100%	98,46
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100%	50	100%	69,20	100%	80	100%	93,33	100%	93,33
Angka Putus Sekolah:										
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<1%	0,02%	<1%	0,12%	<1%	0,12%	<1%	0,12%	<1%	0,12%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<1%	0,24%	<1%	0,05%	<1%	0,05%	<1%	0,26%	<1%	0,26%
Angka Putus Sekolah (APS) MA/SMK/MA	<1%		<1%		<1%		<1%		<1%	
Angka kelulusan										
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kelulusan (AL) MP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%		100%		100%		100%		100%	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	>100%	18,98%	>100%	114,15%	>100%	78,39%	>100%	88,66%	>100%	88,66%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	>100%		>100%		>100%		>100%		>100%	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-	93%	94%	95%	95%	100%	96%	100%	87,94%	100%	87,94%

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IV										

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran atau proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin besar APK maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai pada suatu daerah. Nilai APK Kota Bukittinggi untuk SD/MI/Paket A dan SMA/SMK/MA/Paket C berada di angka lebih besar dari 100 persen di tahun 2021, yaitu 123,44 persen dan 109,5 persen. Dalam beberapa kondisi nilai APK ini dapat melebihi 100 persen yang disebabkan oleh populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Selain itu disebabkan oleh adanya pendaftaran usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau adanya pengulangan kelas. Sedangkan untuk nilai APK SMP/MTS/Paket B pada tahun 2021 yaitu 84,76 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi persentase APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Nilai APM Kota Bukittinggi lebih besar dari target yang ditetapkan nasional yaitu 80 persen. Besarnya kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan meningkatkan perkembangan dunia pendidikan di Kota Bukittinggi.

Untuk nilai APM SD/MI/MTS/Paket A di Kota Bukittinggi dari tahun 2017—2021 sudah menunjukkan angka di atas 90 persen. Artinya, hampir 100 persen anak usia sekolah SD umur 7—12 tahun sudah mendapatkan pendidikan sesuai jenjangnya. Ini berarti hampir seluruh penduduk di usia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang

tersebar di 45 sekolah dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7—12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah formal.

APM tingkat SMP/MTs umur 13—15 tahun sudah mencapai rata-rata sekitar 80%. Meskipun APM tingkat SMP/MTs masih rendah dibanding APM pada tingkat SD, tetapi secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk sekolah sudah baik. Angka Kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTs selalu menunjukkan angka 100% Angka Kelulusan. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun sebelumnya.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun, kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dinyatakan untuk standar sarana dan prasarana SD/MI sebagai berikut: (1) Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, (2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru, (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI, (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Adapun standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTs sebagai berikut: (1) Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar; (2)

Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru; (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs, yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut; (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Pada tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap sekolah telah terpenuhi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan RKB, serta pengadaan peralatan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Di samping itu, alokasi dana dari Pemerintah Pusat di bidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan tenaga guru honorer. Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan

yang layak di bidang kesehatan, amandemen UUD 1945, pasal 34 (3) mengamanatkan: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Pada era otonomi daerah, amanat amandemen dimaksud mempunyai makna penting terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sehat diperlukan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan sarana/prasarana kesehatan dan tenaga Kesehatan.

Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian ibu, rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita, rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk., Rasio Dokter per Satuan Penduduk, dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Perkembangan capaian urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Kesehatan										
a. Angka harapan hidup	73,95	73.69	74	73.91	74,25	74,22	74,52	74,38	74,52	74,38
b. Persentase balita gizi buruk	<0.15	0.15	<0.15	0.14	<0.15	0.15	<0.15	0.15	<0.15	0.15
c. Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	10.41	0.1	10.68	0.1	12.62	0.1	0,1	0.1	1:68
d. Rasio Rumah Sak per satuan penduduk	4.9	0.039	5.7	0.039	5.7	0.038	5.7	0.039	5.7	0.039
e. Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	2.21	1.75	2.16	1.75	2.71	1.75	2.75	1.75	2.55
f. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawa & bidan)	12.95	1.99	12.95	1.93	12.95	2.48	12.95	12.95	12.95	12.95
g. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	0.055	5.7	0.05	5.7	0.05	5.7	0.05	5.7	0.05
h. Pelayanan Kesehatan Dasar										
- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92	90.47	92	92.1	93	93.7	94	95	94	95

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97	87.94	98	77.2	98	99	99	100	99	100
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90.2	87.94	90.4	90.9	90.6	96.9	90.8	91	90.8	91
- Cakupan pelayanan nifas	85	90.86	86	87.4	88	92..3	90	90	90	90
- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75	83.23	76	84.3	78	71.4	80	80	80	80
- Cakupan kunjungan bayi	86	85.29	87	50.4	88	78	90	90	90	90
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan pelayanan anak balita	86	65.29	87	50.4	88	78	90	90	90	90
- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan peserta KB aktif	70	43.70	70	61.8	70	58.9	70	70	70	70
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9
- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	70	43,62	80	79	90	100	100	100	100	100
- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	84	84	87	87	90	90	90	90	90	90
- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	70	67.07	75	69.2	80	56.1	80	80	80	80
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
i. Pelayanan Kesehatan Rujukan										
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	11.8	100	17	100	27.19	100	23.1	100	23.1
- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
j. cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
k. Cakupan Desa Siaga Aktif	100	60	100	65	100	70	100	75	100	75
l. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	68.9	100	87,3	100	88,62	100	88,62	100	88,62
m. Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	0	100	83	100	96	100	100	100	100
n. Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	1.3	10	2.8	10	2.5	10	1.8	10	1.8
o. Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
pengecahan dan penularan										
p. Cakupan Penderit penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus ibu dan anak yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif serta perlindungan anak, secara pengalaman empiris di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Rasio Posyandu persatuan Balita di Kota Bukittinggi yaitu 1:68 di tahun 2021, yang artinya 1 posyandu dapat melayani rata-rata 68 balita.

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis professional serta sarana kedokteran yang permanen dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Saat ini terdapat 6 rumah sakit di Kota Bukittinggi yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi RSOMH (Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta)
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina
4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah Sakit TNI AD Tk.IV
6. Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD)

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2021 adalah 0,039 artinya satu rumah sakit melayani 390.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk sehingga kehadiran RSUD Kota Bukittinggi diharapkan dapat melayani kesehatan penduduk Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Rasio Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) per Satuan Penduduk

Puskesmas dan Pustu (puskesmas pembantu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk memaksimalkan pelayanan di puskesmas, Dinas Kesehatan melakukan peningkatan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk selama lima tahun terakhir adalah 0.05 itu berarti dari 1 puskesmas yang ada melayani 5.352 penduduk. Sedangkan untuk tahun 2021, rasio puskesmas adalah 0.050, mengalami sedikit penurunan. Namun, angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional adalah 1 puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Menurut WHO rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000 yang berarti 1 dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu daerah. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 adalah 2,55 artinya untuk 1 orang dokter dapat menangani 255 orang penduduk. Dengan demikian Kota Bukittinggi telah mempunyai dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Secara umum dari tahun 2017 s.d. 2021 terdapat kecenderungan kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dikarenakan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat, pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur (Bidang Pekerjaan Umum) ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota.

Perkembangan capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	88%	75%	90%	87%	92%	87%	94%	89,08%	94%	90,86%
Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	170,38		174,25		178,12	181,99	181,99	160.487	160,35	163,710
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	59.478 km		64.478 km		69.478 km	74.478 km	74.478 km	72.663	74.478 km	72.963
Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar	90 m		40 m		50 m		-	77 titik		
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	52.437,39 m		57.204.42 m		61.971.43 m	66.738,49 m	66.738,49 m	669.657,49		68.380
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	1 titik		1 titik		1 titik		1 titik			1 titik
Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	6 Titik		4 Titik		2 Titik		0			
Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	8%	01:00,1	9%	01:00,1	11%	01:00,2	13%		20%	15,55%
RASio Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	42%		43.47%		46,46%				20%	15,55%

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Dari tabel Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 s.d. 2021 terlihat bahwa terdapat 7 aspek kinerja yang harus dipenuhi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk capaian aspek proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2021 meningkat $\pm 1,78\%$ dari dari tahun 2020 yaitu dari 89,08%

menjadi 90,86%. Angka capaian ini menggambarkan rata-rata setiap 1 Km jalan yang ada 0,90 Km sudah dalam kondisi baik dan dapat diartikan juga bahwa sebagian besar jalan-jalan yang ada di Kota Bukittinggi sudah memberikan kenyamanan bagi penggunanya serta menggambarkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat semakin lancar.

Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu pembenahan terhadap kondisi jalan yang ada harus ditingkatkan sehingga tercapai target kinerja yang ditetapkan. Jalan sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian, dalam desainnya harus mempertimbangkan upaya antisipasi terhadap kondisi lalu lintas di masa yang akan datang. Dari capaian tahun 2021 terlihat kenaikan kondisi jalan dalam kondisi baik, tetapi tetap perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2022. Sedangkan capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air juga terjadi kenaikan panjang saluran.

Kondisi drainase tahun 2021 mengalami peningkatan sepanjang 300 m dibanding kondisi tahun 2020. Mengacu pada kondisi lapangan yang ada, kondisi drainase Kota masih perlu pembenahan karena masih ditemui permasalahan seperti titik-titik genangan serta kapasitas saluran yang tidak mampu lagi menampung debit air yang ada pada saat hujan serta adanya tumpukan sedimen. Sebagaimana diketahui, sistem drainase tidak memandang batas wilayah administratif kota-kabupaten bahkan negara sekalipun. Oleh karena itu selain penggunaan lahan yang berada dalam Kota Bukittinggi, perlu juga dipertimbangkan penggunaan lahan disekitar Kota Bukittinggi yang berpengaruh dan memberi kontribusi, sekaligus dampak dari pengelolaan drainase perkotaan. Daerah tetangga yang memungkinkan memberi dampak tersebut adalah Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, sebagai hulu dari sistem drainase, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan IV Angkat, dan Nagari Gadut dan Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang sebagai hilir dari sistem drainase.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang ini mengamanatkan besaran proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % untuk Ruang Terbuka Hijau Privat.

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari zona lindung geologi berupa sempadan Ngarai Sianok, sempadan sungai, dan zona Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari rimba kota, taman kota dan pemakaman. Berikut perkembangan luasan RTH Publik Kota Bukittinggi dari tahun 2017 s.d. 2021:

Tabel 2.39
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM (M2)	2.121.280	2.194.680	2.345.001	3.924.200	3.924.200
Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kaw	5.047.800	5.047.800	5.047.800	5.047.800	5.047.800
Persentase	42%	43,47%	46,46%	77,74%	77,74%

Sumber : DLH tahun 2022

Bila dilihat dari tabel yang ada, luas RTH publik yang tersedia pada tahun 2021 adalah 3.924.200 m² atau tidak terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: sebagian besar lahan yang berpotensi sebagai RTH adalah tanah milik kaum/suku sehingga penetapan lahan ini menjadi RTH membutuhkan proses yang panjang. Kemudian adanya pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman, dan kendala lainnya adalah harga jual tanah yang tinggi tentu membutuhkan alokasi dana yang besar untuk pengadaannya. Sementara kemampuan APBD Kota Bukittinggi cukup terbatas.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni.

Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman										
Persentase rumah tinggal bersantiasi	73%		83%		93%		100%		100%	88,47%
Kawasan Kumuh	0	0,90%	0	0,15%	0	0%	0	0	5 titik	0
Luas kawasan permukiman kumuh	20,40 Ha	21,79	10,20 Ha	4 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0	64,78 Ha	0

Sumber: Dinas Perkim, 2022

Capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 ditinjau dari aspek persentase rumah tinggal bersantiasi, kawasan kumuh dan luas kawasan permukiman kumuh.

Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2020 tidak ada kawasan kumuh di Kota Bukittinggi berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45-300-2014 tanggal 19 September 2014, karena kawasan yang telah ditetapkan melalui SK tersebut sudah dapat ditangani secara keseluruhan sebesar 30,6 Ha yang ada di 2 kawasan yaitu Kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, sehingga persentase kawasan kumuh pada tahun 2020 sudah tuntas (0%). Penuntasan kawasan kumuh tersebut melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan Kotaku dan kegiatan Skala Kawasan.

Tetapi berdasarkan telaahan dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun pada tahun 2015 masih terdapat kawasan kumuh lainnya, yaitu di Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Puhun Tembok dan Kelurahan Tarok Dipo. Kawasan kumuh ini telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor 188.45-279-2020 tanggal 25 September 2020 dengan total luas 64,78 Ha dan untuk penanganan kawasan kumuh baru ini akan diintervensi pada tahun 2022 s.d. tahun 2026. Berdasarkan SK tersebut juga ditetapkan 5 (lima) titik lokasi di tiga kelurahan dimaksud.

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum dapat mengintervensi dalam mengatasi permasalahan kumuh di wilayah baru tersebut. Tetapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman telah membuat perencanaan melalui Dokumen Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan upaya untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perkembangan capaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.41
Jumlah Kasus Pelanggaran Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat										
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	90	95	90	95	90	95	90	95	95	95
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Sumber : Satpol PP, 2022

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas Linmas merupakan perbandingan jumlah petugas Linmas dengan jumlah RT dalam suatu wilayah. Indikator ini merupakan gambaran Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat. Pada tahun 2021 cakupan petugas Linmas Kota Bukittinggi yaitu 36 persen, yang berarti setiap 10.000 penduduk dilindungi oleh 36 orang petugas Linmas.

Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Satuan Polisisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah, salah satunya untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Bukittinggi di tahun 2021 yaitu 95 persen. Artinya penyelesaian kasus pelanggaran sudah berjalan dengan sangat baik untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi mengemban jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Layanan kebakaran merupakan salah satu sub-urusan Ketentraman dan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana pada sub-urusan Kebakaran pemerintah kabupaten/kota salah satunya berkewajiban untuk melakukan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Kebakaran. Dalam memberikan pelayanannya diatur dalam Standar Pelayanan Minimal-nya yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (*response time*).

Tingkat waktu tanggap (*response time*) menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran). Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah 15 (lima belas) menit.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Artinya, setiap kejadian kebakaran wajib ditangani oleh Damkar.

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	115	121	77	65	58
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	115	121	77	65	58
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, rasio ini telah memenuhi mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Dari tabel juga tergambar bahwa kejadian kebakaran menurun sebanyak 12 kasus dan seluruh kasus dapat tertangani dan memenuhi tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*).

6. Sosial

Lingkup pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi mencakup penanganan korban bencana, kesejahteraan sosial, kemiskinan, anak dan lansia terlantar serta penyandang disabilitas. Perkembangan capaian urusan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Perkembangan Capaian Urusan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Sosial										
PPKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	80%	50%	80%	50%	86%	50%	86%	50%	75%

Sumber: Dinas Sosial, 2022

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara dan wajar. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini

tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun data PPKS Kota Bukittinggi dari tahun 2017—2021 dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.44
Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2017 - 2021

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anak Balita Terlantar	Anak	45	1	0	0	1
2.	Anak Terlantar	Anak	580	12	1	23	42
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak	4	9	2	3	2
4.	Anak Jalanan	Anak	25	0	0	0	0
5.	Anak dengan Kedisabilitas	Anak	134	64	74	150	50
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	32	12	0	11	0
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	4	8	6	4	1
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1908	443	383	745	450
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	390	216	1958	565	191
10.	Tuna Susila	Orang	5	2	0	0	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	5	2	1
12.	Pengemis	Orang	9	4	12	3	1
13.	Pemulung	Orang	83	23	39	54	19
14.	Kelompok Minoritas	Orang	7	7	3	0	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalah	Orang	15	14	11	34	7
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	36	55	0	34	0
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	470	66	7	6	3
18.	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	1137	1497	713	690	0
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	0	68	9	100	0
23.	Perempuan Rawan Sosial	Orang	820	810	724	936	632
24.	Fakir Miskin	KK	5508	5772	5744	5231	4977
25.	Keluarga Bermasalah Psikologi	KK	0	22	7	40	19
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2022

Berdasarkan tabel di atas, populasi PPKS di Kota Bukittinggi tahun 2021 yang paling banyak yaitu fakir miskin, perempuan rawan sosial, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas. Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui mekanisme program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah

satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu, kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Perkembangan capaian urusan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Ketenagakerjaan										
Rasio penduduk yang bekerja	0,96	0,94	0,97		0,97		0,97	0,98	0,98	0,94
Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,60	67,59	70,25	65,23	71,15	68,63	73,45	65,02	76,33	65,02
Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	52	64	68		90		94	94	94	94,17
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	27,15	24	30,18		32,17		34,18	36	36,18	83,3
Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7750	7536	7900		8000		8200	8500	8500	8676

Sumber: Dinas PM, PTSP dan Naker, 2022

Capaian urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 s.d. 2021 meliputi aspek Rasio penduduk yang bekerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dari tabel di atas terlihat realisasi penduduk yang bekerja tahun 2021 menurun sebesar 0,04 % dari tahun 2020, penurunan ini menggambarkan adanya tenaga kerja yang kehilangan

pekerjaannya kemungkinan penyebabnya adalah dampak dari Pandemi Covid 19 dimana dengan adanya pembatasan aktivitas di pusat-pusat keramaian menyebabkan ditutupnya beberapa lapangan usaha sehingga berimbas kepada pemutusan hubungan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2020 dan 2021 tidak ada. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Untuk Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2021 meningkat 0,17% dari tahun 2020. Angka ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ada di Kota Bukittinggi hampir keseluruhan sudah mendapat pembekalan terhadap dunia kerja yang mereka geluti. Tema pelatihan yang diadakan diarahkan sesuai kebutuhan pasar sehingga tenaga terlatih tersebut dapat langsung bekerja.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2021 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota berhasil menengahi setiap permasalahan/kasus industrial demi menciptakan iklim kerja yang baik dari waktu ke waktu.

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian pemerintah dimana memastikan seluruh pekerja/buruh peserta program Jamsostek mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Hal ini tergambar dari realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas di bawah laki-laki. Salah satu indikator pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang duduk di DPRD. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2017s.d. 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8.41%	8.92%	8.92%	8.92%	17.86%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%	8%	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0.20%	0.36%	0.19%		0.007%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0.06%	4.50%	4.50%		N/A
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	57.97%	54.68%	54.68%	54.63%	60.51%
6.	Indeks Pembangunan Gender	98,78%	98,8%	98,77%	98.89%	98.89%
7.	Indeks Pemberdayaan Gender	62,11%	62,19%	60,99%	60,33	60,33

Sumber: DP3APPKB, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Akses yang luas terhadap perempuan untuk ikut berperan aktif pada semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan, salah satunya diukur melalui partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berdasarkan tabel di atas, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah rata-rata di angka 18.86 persen, yang meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yaitu sebesar 8% dengan keterlibatan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total 25 orang anggota DPRD.

Perempuan dalam Pembangunan

Nilai IPG Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya, di tahun 2021 sebesar 98,89 persen. Indikator ini menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100 persen maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan perempuan dan laki-laki di Kota Bukittinggi hampir sama. Untuk rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil yaitu 0.007 persen di tahun 2021. Angka ini menggambarkan bahwa dalam 100.000 rumah tangga terdapat 7 KDRT yang terjadi di Kota Bukittinggi.

3. Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1966, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu :

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
3. Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan
4. Kualitas/ keamanan pangan

Perkembangan capaian urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Perkembangan Capaian Urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Ketahanan Pangan										
Score Pola Pangan Harapan	90	90	91	87,3	91	82,1	92	83,1	92	81,5
Regulasi ketahanan pangan	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Kinerja urusan ketahanan pangan dipengaruhi oleh Score Pola Pangan Harapan dan ketersediaan regulasi ketahanan pangan. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi

dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam Pasal 60 UU Nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Dari tabel di atas terlihat Score Pola Pangan Harapan tahun 2020 menurun 1,6 point dari tahun 2019 dan dari besaran score Pola Pangan Harapan tahun 2020 yaitu 83,1 % menggambarkan bahwa Angka Kecupan Gizi dan keberagaman pangan Kota Bukittinggi sudah baik. Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yang ada. Kecamatan Mandingin Koto Selayan mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding dua kecamatan lainnya dengan luas sawah 383 Ha. Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2017—2021 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.48
Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	119.183	126.804	130.773	121.028	121.588
2.	Produksi Padi	5.444,82	5.515,8	5450	5.844,36	5.896,67
3.	Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123/kg/tahun/org x jumlah penduduk – produksi padi x 10%)	4,57	4,35	4,16	4,82	4,91

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan, 2022

Dari tabel di atas terlihat jumlah Produksi Padi di Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, sedangkan jumlah penduduk menurun. Sehingga, persentase Ketersediaan pangan utama meningkat 0,4% atau sebanyak 394,36 ton/tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas tanam padi semakin baik meskipun kenyataan di lapangan area persawahan di Kota Bukittinggi cenderung berkurang karena sebagian lahan pertanian yang berpola permukiman telah dimanfaatkan untuk perumahan.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukkan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Saat ini sedang dilakukan kajian tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Artinya, suatu luasan lahan nantinya akan ditetapkan dan dipertahankan untuk tetap menjadi lahan pangan. Dalam hal lahan yang telah

ditetapkan sebagai LP2B tersebut dilakukan aktivitas pembangunan, maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi perdata.

4. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi per-31 Desember 2021 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Perkembangan capaian urusan Pertanahan tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Aset Tanah Kota yang disertifikasi (sertipikat)	6	1	11	11	14
Jumlah sertipikat pengembalian konsolidasi By Pass (sertipikat)	17	18	19	7	7
Jumlah bidang pengembalian Konsolidasi By Pass (bidang)	27	27	27	27	75
Luas Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (m2)		1.862	13.602	2574	0

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Dari tabel tersebut terlihat terjadi peningkatan capaian kinerja urusan pertanahan antara lain jumlah aset tanah milik Pemerintah Kota yang disertifikasi, dimana pada tahun 2021 menjadi 14 sertifikat. Begitu juga dengan jumlah bidang pengembalian pada Konsolidasi By Pass naik menjadi 75 bidang tanah. Sedangkan untuk pengadaan tanah, Dinas PUPR melalui Bidang Pertanahan pada tahun 2021 tidak melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan Konkuren Wajib Non Dasar. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Untuk Kota Bukittinggi Lingkungan

merupakan Misi ke-3 Walikota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021—2026, yaitu Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan, dengan artian masalah lingkungan sudah menjadi masalah Kota Bukittinggi bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Sektor Lingkungan adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan diatas Meningkatnya Kualitas Lahan dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air, Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara dan Meningkatnya Sampah Terkelola dengan Indikator Sasaran Persentase Sampah Terkelola.

Salah satu Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang harus dipenuhi dalam urusan lingkungan hidup adalah persentase penanganan sampah. Persoalan sampah bukanlah hal yang sepele jika tidak ditangani secara serius karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan Sosial Ekonomi. Perkembangan capaian urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Perkembangan Capaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2017 – 2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prosentase Penanganan sampah	90%	95,08%	95%	84,87%	100%	88,40%	100%	90%	100%	92,62%
Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	40%		50%		60%	70%	70%	40%	70%	70%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Capaian urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 meliputi aspek Persentase Penanganan Sampah, Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (dari tercemar ‘berat’ menjadi tercemar ‘ringan’). Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase

Penanganan sampah di Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mencapai 90%, capaian ini meningkat sebesar 1,60% dari tahun 2019. Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa sampah yang ada di Kota Bukittinggi sudah tertangani secara keseluruhan dengan baik melalui pengolahan setempat, pemilahan, didaur ulang dan yang dibawa ke TPA Regional.

Dari survey yang dilakukan, total sampah tahun 2021 adalah sebesar 140,424 ton/hari dengan sumber yang tertinggi Pasar 40,927 ton/hari, Jalan 39,498 ton/hari dan Perumahan 26,217 ton/hari. Dari total timbulan sampah 140,424 ton/hari lebih kurang 115 ton/hari atau sekitar 81,89 % diangkut ke TPA Regional Payakumbuh. Sisanya sekitar 18,11 % yang ditangani di Bukittinggi dengan melakukan pengomposan.

Untuk Aspek Capaian Kinerja Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV Gol B, Pemantauan yang dilakukan terhadap 3 (tiga) buah Sungai yang melewati Kota Bukittinggi berdasarkan 7 (tujuh) parameter yang diuji, 2 (dua) parameter melewati baku mutu air yaitu TSS (*Total Suspended Solid*) dan *Fecel Coliform* dan *Total Coliform* yang melewati baku mutu air. Parameter TSS yaitu Padatan yang menyebabkan kekeruhan air. Nilai baku kelas I dan II yaitu 50 mg/L, Nilai baku kelas III,IV yaitu 400 mg/L. Dari hasil uji Sungai Batang Masang melebihi baku mutu kelas III dengan nilai 1600 mg/L.

Parameter yang ke dua yang melebihi baku mutu air yaitu *Fecel Coliform* dan *Total Coliform*, merupakan indikator bakteri untuk menentukan aman tidaknya air dikonsumsi. Dari 3 (tiga) sungai yang melewati Kota Bukittinggi seluruh sungai memiliki konsentrasi parameter *Fecel Coliform* yang telah melewati baku mutu kelas IV.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada di bawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan akta catatan sipil. Indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari kepemilikan KTP dan kepemilikan akte kelahiran.

Perkembangan capaian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil										
Kepemilikan KTP	56.502	73.658	61.235	74.712	66.364	81.182	71.923	85.433	77.947	88.289
Kepemilikan akta kelahiran	62.803	66.844	64.292	72.890	65.817	75.821	67.378	79.067	68.975	82.761

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, 2022

Dari sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara daring dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya, antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2017—2021 masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP. Namun, jumlah yang telah memiliki KTP jika dibandingkan dengan penduduk yang wajib memiliki KTP, rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik, maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya SIAK dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang

baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data tahun 2017—2021, realisasi kepemilikan akta kelahiran selalu di atas target yang sudah ditetapkan dan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini berarti kesadaran bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak dan pemahaman akan pentingnya keberadaan akta kelahiran sebagai salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat sudah semakin tinggi. Pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hal ini tidak terjadi.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

Perkembangan capaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52
Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
PKK aktif	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan GP, MKS dan ABTB, 2022

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan mitra Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Tim Penggerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada Posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak. Harapan yang terpenting dari keberadaan Posyandu adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan Posyandu, agar kualitas Posyandu dapat maksimal dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mandiingin Koto Selayan	433	433	433	433	436
2.	Guguak Panjang	364	364	364	364	364
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	266

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi, 2022

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok Dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk. Kelompok Dasawisma terbanyak terdapat di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan yakni 436, disusul Kecamatan Guguk Panjang 364 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 266. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan. Oleh karena itu, kelompok Dasawisma merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peran perempuan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menekan rasio laju pertumbuhan penduduk salah satu adalah melalui program KB (Keluarga Berencana). Besarnya angka partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki rasio akseptor KB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Selama 5 tahun terakhir rasio akseptor KB Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang cukup berarti, artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat komtrasepsi dan program Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.54
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2017 s.d 2021

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
	Tahun 2017					
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21.04	3.685	63.49

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18.62	4.120	60.09
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23.22	2.283	63.58
	Total	16.344	3.352	20.51	10.088	61.72
	Tahun 2018					
1.	Guguk Panjang	5.932	1.550	26.13	3.784	63.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.943	1.382	19.90	4.325	62,29
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.580	932	26.03	2.387	66.68
	Total	16.455	3.864	23.48	10.496	63.79
	Tahun 2019					
1.	Guguk Panjang	5.927	1.461	24.65	3.834	64.69
2.	Mandiingin Koto Selayan	7.049	1.743	24.72	4.448	63.1
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.445	377	10.94	2.363	68.6
	Total	16.421	3.581	21.81	10.645	64.83
	Tahun 2020					
1	Guguk Panjang	5.941	1.364	22.96	3.924	66.05
2	Mandiingin Koto Selayan	7.219	1.401	19.41	4.958	68.68
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.481	621	17.84	2.446	70.27
	Total	16.641	3.386	20.35	11.328	68.07
	Tahun 2021					
1	Guguk Panjang	5.762	1.097	19,03	3.795	65,86
2	Mandiingin Koto Selayan	7.197	990	13,75	4.918	68,33
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.304	471	14,25	2.359	71,4
	Total	16.263	2.558	15,68	11.072	68,53

Sumber: Kecamatan MKS, Kecamatan GP, Kecamatan ABTB, 2022

9. Perhubungan

Kota Bukittinggi semakin berkembang menjadi suatu kota besar yang terlihat bukan hanya dari perkembangan jumlah penduduknya saja tetapi juga dari perkembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa, wisata dan kegiatan perkotaan lainnya. Perkembangan yang pesat di berbagai sektor berdampak pada meningkatnya pergerakan dan lalu lintas orang, kendaraan, maupun barang yang masuk dan keluar Kota Bukittinggi. Kondisi lalu lintas di Kota Bukittinggi terlihat semakin padat terutama pada pusat-pusat kegiatan seperti di kawasan perdagangan Pasar Atas dan Pasar Bawah, kawasan perdagangan Pasar Banto, kawasan perdagangan dan Terminal Aur Kuning, kawasan wisata Jam Gadang, kawasan wisata Taman Panorama, kawasan wisata Benteng Fort de Kock dan kebun binatang. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas yang menjadi titik timbulnya kemacetan lalu lintas. Selain kemacetan, juga terjadi percampuran pergerakan yang terjadi di jalan utama Kota.

Oleh sebab itu, transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, sehingga pengelolaan

sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat.

Paramater keberhasilan kinerja urusan perhubungan dilihat dari beberapa aspek yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, jumlah uji KIR angkutan umum, ketersediaan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, Kepemilikan KIR angkutan umum, durasi palayanan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas. Semua aspek ini ditetapkan target tahunannya kemudian dilihat pencapaian dari setiap target tersebut. Berikut perkembangan capaian urusan Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.55
Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Perhubungan										
Jumlah arus penumpang angkutan umum	330.000.000	3.869.000	340.000.000	3.179.174	355.000.000	3.864.386	3.600.000	618.079	3.500.000	1.292.100
Jumlah uji kir angkutan umum	2.900	1.088	3.000	1.077	3.100	1.791	3.200	2.607	2.611	0
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepemilikan KIR angkutan umum	2.800		2.900		3.000	3.100	3.100	4.150	1.982	0
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit
Pemasangan Rambu-rambu	10	621	0	956	10	711	0	1.485	2.581	1.589

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa aspek jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung menurun dari tahun ke tahun dan jauh dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan jumlah uji KIR angkutan umum. Sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum justru bertambah setiap tahunnya dan sebagian besar melebihi target tahunan. Hal ini juga terlihat pada .Pemasangan Rambu-rambu yang jauh melebihi target yang

seharusnya. Namun, berdasarkan analisa dari Dinas Perhubungan, jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia adalah sebanyak 3.000 unit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari yang seharusnya.

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi terjadi di Terminal Simpang Aur, Terminal Wowo dan beberapa terminal bayangan. Terminal Simpang Aur adalah terminal tipe A yang melayani arus penumpang bus Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Luar Provinsi. Pada tahun 2019 pengelolaan terminal ini telah diambil alih Kementerian Perhubungan. Sementara itu untuk melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari Utara Kota Bukittinggi berlangsung di Terminal Wowo, yaitu terminal tipe C dan beberapa terminal bayangan yang melayani arus penumpang pedesaan seperti di Simpang Stasiun.

Angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena angkutan ini melayani sebagian besar masyarakat Agam Timur yang beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penumpang Angkutan Kota	3.869.000	2.788.740	2.336.000	618.079	1.292.100
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	-	96.336	1.235.901	0	0
3.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	-	294.098	292.485	0	0
4.	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0	0
5.	Jumlah penumpang Pesawat udara	0	0	0	0	0
6.	Total Jumlah Penumpang	3.869.000	3.179.174	3.864.386	618.079	1.292.100

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022, Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Terminal Tipe A Tahun 2022

Dilihat dari tabel di atas, terjadi kenaikan jumlah penumpang angkutan kota dari tahun 2020 s.d. 2021, karena pada tahun 2021 aktivitas masyarakat telah mulai berjalan normal sejak pandemi Covid 19 terjadi. Seperti juga terlihat pada tabel tersebut, pada tahun 2020 terjadi

penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang signifikan yaitu sebanyak 1.717.921 orang. Penurunan ini terjadi karena dampak kondisi pandemi Covid 19, dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas dalam dan keluar daerah yang secara langsung berdampak berkurangnya arus perjalanan.

Disamping itu dengan era digitalisasi, masyarakat beralih memanfaatkan jasa angkutan daring seperti layanan transportasi pada aplikasi Gojek dan Grab, meskipun sampai saat ini belum ada aturan kalau layanan ini terdaftar sebagai angkutan umum resmi. Penyebab lain terjadinya penurunan ini adalah karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, yang disinyalir karena *dealer* kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, berlomba-lomba memberi kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan.

Sementara itu, penurunan jumlah penumpang Antar Kota Antar provinsi tidak terlepas dari kondisi Terminal Tipe A yang ada yang melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi yang pengelolaannya telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2016. Kondisi terminal Tipe A Simpang Aur Kuning saat ini kurang tertata dan semraut, dengan adanya penyempitan areal terminal oleh para pedagang kaki lima. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung/penumpang di samping faktor adanya pilihan moda lain yang lebih efisien dari sisi waktu perjalanan dan masing-masing moda memiliki pool kendaraan sendiri.

2) Rasio Izin Trayek

Menurut Kusumawati (1999), trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (*user*), pengelola (*operator*) dan pemerintah (*regulator*). Namun, pada kenyataannya ketiga kepentingan ini cenderung saling bertolak belakang. Dengan wilayah seluas ± 25 km², pelayanan transportasi kepada masyarakat telah dibentuk/ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 477 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi. Trayek angkutan kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Tabel Trayek Angkutan Umum di Kota Bukittinggi

No	Nama Trayek Kode	Kode Trayek	Jarak (Km)
1	Pasar Bawah – Terminal Simpang Aur	A001	7
2	Pasar Bawah – Tigo Baleh	A002	8
3	Pasar Bawah – Aur Atas	A003	7
4	Pasar Bawah – Koto Selayan via Garegeh	A004	6
5	Pasar Bawah – Kubu Tanjung	A005	8
6	Pasar Bawah – Garegeh	A008	7

No	Nama Trayek Kode	Kode Trayek	Jarak (Km)
7	Pasar Bawah – Simpang Kapau	B001	6
8	Pasar Bawah – Koto Selayan via Simpang Ganting	B002	6
9	Pasar Bawah – Gulai Bancah / Balaikota	B003	4
10	Pasar Bawah – Panorama Baru	C001	8
11	Pasar Bawah – Bukit Apit / Simpang Ranjau	C002	6
12	Simpang Taluak – Bukit Ambacang	C006	6
13	Pasar Bawah – Tabek Gadang	13	7
14	Pasar Bawah – Jambu Air	14	7
15	Pasar Bawah – Belakang Balok	15	6
16	Pasar Bawah – Bukit Ambacang	16	6
17	Pasar Bawah – INKORBA / STAIN	17	6,5
18	Pasar Bawah – Parit Antang via SMKN 1	18	6,5
19	Pasar Bawah – Simpang Aur via Tanah Jua	19	7
20	Gulai Bancah – Belakang Pasar Aur	D001	5
21	Pasar Bawah – Talao / Pasar Ternak	D002	7
22	Pasar Bawah – Simpang Jambu Air via A. Yani	D003	7
23	Pasar Bawah – Panganak / Pintu Kabun	D004	6
24	Pasar Bawah – Bukit Apit / Simpang Ranjau	D005	6

Sumber: RDTR Kota Bukittinggi 2021-2041, Tahun 2022

Dalam kurun waktu tahun 2017—2021 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah kota yang kecil, sehingga dengan trayek yang ada masih mampu melayani peningkatan kebutuhan masyarakat. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2017—2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Rasio Izin Trayek Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	126.804	121.590	128.783	121.028	121.588
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 rasio izin trayek Kota Bukittinggi masih tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan angkutan umum masih terlayani dengan trayek yang ada dan dengan kondisi ini pula Kota Bukittinggi terhindar dari benturan para pihak dalam pelayanan angkutan umum.

Pada dasarnya pengguna kendaraan angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Tuntutan akan hal tersebut dapat terpenuhi apabila penyediaan armada angkutan penumpang umum berada pada garis yang seimbang dengan permintaan jasa angkutan umum. Jumlah armada yang tepat sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata sepanjang waktu, misalnya pada jam-jam sibuk permintaan tinggi dan pada saat sepi permintaan rendah

3) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Moda transportasi adalah sarana yang berguna untuk memindahkan manusia ataupun barang (benda) dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terdapat beragam jenis dari moda transportasi yang telah dikembangkan, baik berupa moda transportasi darat, laut, dan udara, di mana pada setiap moda tersebut memiliki ciri dan karakteristik (Munawar, 2005). Salah satu prasarana transportasi darat yaitu jalan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Moda angkutan yang digunakan di Kota Bukittinggi terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum untuk pelayanan kota berupa mobil penumpang umum dan mini bus. Moda angkutan pariwisata umumnya berupa bus wisata yang memiliki pergerakan regional dan mendapatkan izin khusus untuk kepentingan pergerakan di dalam kota. Kondisi saat ini, angkutan umum di Kota Bukittinggi sudah dapat melayani keseluruhan wilayah Kota Bukittinggi, bahkan melayani wilayah *hinterland*. Untuk pelayanan lokal moda angkutan umum yang digunakan berupa angkutan kota dan ojek. Jenis angkutan umum yang melakukan pergerakan pada Kota Bukittinggi dapat dibedakan atas: bus, truk, angkutan umum penumpang, mobil pribadi, kendaraan roda dua dan ojek. Berikut panjang jalan di kota Bukittinggi dengan dan jumlah kendaraan yang melewatinya,

Tabel 2.59
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jalan	155,683	180,17	180,17	180,17	180,17
2.	Jumlah kendaraan	38.941	38.300	38.912	37.787*	*
	Rasio	250.1	212,5	202,6	209,7	

Sumber : Dinas Perhubungan 2022

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan di Kota Bukittinggi setiap 1 km jalan melayani 209 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

10. Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Perkembangan capaian urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Komunikasi dan Informatika										
Web site milik pemerintah daerah	17 Buah	19 Buah	19 Buah	21 Buah	21 buah	23 Buah	23 Buah	26 Buah	23 Buah	30 Buah
Jumlah jaringan komunikasi	21 green field 41 rooftop	21 green field 32 rooftop	21 green field 41 rooftop	14 green field 34 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.023	0.365	27	0.365	0.015	0.365	0.012	0,012	0,005
Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	30	28	31	31	31	24	31	24	24	22

Sumber: Dinas Kominfo, 2022

Pada urusan komunikasi dan Informatika terdapat 4 aspek kinerja yang mesti dipenuhi yaitu ketersediaan laman milik pemerintah daerah, jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, dan jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tiap-tiap aspek setiap tahunnya ada yang terpenuhi sesuai target dan ada yang tidak terpenuhi. Untuk pemenuhan laman pada tahun 2020 melebihi target yang diiringi dengan jumlah jaringan komunikasi, artinya akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi berbasis web semakin mudah dan lancar. Sedangkan keberadaan serta keberfungsian warnet menurun tajam termasuk jumlah surat kabar. Hal ini menggambarkan perubahan cara pandangan masyarakat pengguna layanan informasi yang semakin memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

Penyebaran informasi saat ini tidak hanya mengandalkan media cetak dan elektronik saja, tetapi perlu mendorong keterlibatan masyarakat sehingga informasi-informasi terkini, terutama yang berasal dari masyarakat setempat, dapat tersebar secara cepat sekaligus juga dapat memfasilitasi penyebaran informasi seni dan budaya lokal setempat. Untuk itu perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di masing-masing kecamatan. Adapun cakupan pengembangan KIM dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2.61
Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiangan Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

Sumber: Dinas Kominfo, 2022

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan melalui Keputusan Lurah. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelompok baik dalam hal meningkatkan SDM maupun dalam mengelola informasi.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah, baik melalui media elektronik maupun media tradisional, juga melibatkan lembaga komunikasi sosial. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini juga mendukung terciptanya keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang melandaskan kegiatannya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara tujuan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sehingga Koperasi sebagai salah satu sokoguru ekonomi Indonesia, selain perusahaan swasta dan BUMN, merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat lebar dan membahayakan kesatuan bangsa ini.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, yaitu mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Tiga peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yaitu: 1). Sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan; 2). Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil; 3). Memberikan pemasukan devisa bagi Negara. Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Persentase Koperasi aktif	83	82,8	84	94,6%	85	94,6	85	75,3	87	75.5
Usaha Mikro dan Kecil	9.623	9527	9.719		9.816		9.914	10.013	10.013	74.4
Jumlah UKM non BPR/LKM	9.574	9478	9.670		9.767		9.865	9.964	9.964	
Jumlah BPR/LKM	49	49	49		49		49	49	49	49

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase koperasi aktif cenderung menurun pada tahun 2020 dan tahun 2021, penurunannya $\pm 20\%$ dibanding tahun 2018. Hal sama juga terjadi pada Usaha Mikro dan Kecil yang mengalami penurunan pada tahun 2021 $> 90\%$ dibanding tahun 2020, sedangkan jumlah UMKM non-BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM cenderung tetap setiap tahunnya.

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi Aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/Per./M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.

Terdapat empat kendala mendasar yang menghambat bagi perkembangan kualitas koperasi yaitu, yang pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi yang kurang profesional dan kurang bisa diandalkan. Selanjutnya adanya kekurangan modal juga menjadi hambatan bagi perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga ada sistem manajerial koperasi, sumber daya manusia dengan sistem manajerial koperasi sangat berkaitan erat, karena sistem manajerial koperasi yang bagus dibentuk oleh sumber daya manusia yang bagus pula. Terakhir yaitu kurangnya kesadaran berkoperasi para anggota yang berdampak pada kurangnya rasa saling memiliki, sehingga para anggota kurang minatnya untuk

berkontribusi lebih pada koperasi. Melihat kendala yang dihadapi koperasi saat ini, pemberdayaan koperasi dari segi kualitas seperti pelatihan keterampilan pelayanan dan pengelolaan keuangan bagi para pegawai koperasi, sehingga koperasi-koperasi mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mensejahterakan anggotanya.

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Menurut Bank Indonesia BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Sejak beberapa tahun terakhir, BPR di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup sehat. Tetapi peran BPR dalam pembiayaan usaha kecil masih menempati porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil, salah satunya adalah : (1) Struktur pendanaan BPR belum didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat; (2) kualitas sumberdaya yang belum memadai, baik dari teknis manajerial maupun teknis operasional

12. Penanaman Modal

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut,

Tabel 2.63
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2020	<p>PMDN: (1). 12 (2). 26 (3). 15 (4). 83 (5). 104</p> <p>PMA: (1). 1 (2).0 (3) 0 (4) 2 (5) 0</p>	961	1	962

Sumber: Dinas PM, PTSP dan tenaga Kerja, 2022

Jumlah investor untuk berinvestasi dipengaruhi oleh faktor intern (dalam negeri) dan ekstern (luar negeri). Salah satu faktor intern adalah stabilitas politik dan perekonomian. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi. Kota Bukittinggi tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Potensi Penanaman Modal di Kota Bukittinggi adalah: (a) Perdagangan dan Jasa; (b) Pariwisata; (c) Pendidikan; dan (d) Kesehatan. Berdasarkan visi dan misi Penanaman Modal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaiki iklim Penanaman Modal
2. Mendorong persebaran Penanaman Modal
3. Fokus pengembangan infrastruktur pada 3(tiga) potensi unggulan daerah yaitu pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energy terbarukan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Tabel 2.64
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Bukittinggi sampai Tahun 2021

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2020	240	9.830.481.111.488	3	42.184.665

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja, 2022

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor pembangunan. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari beberapa aspek pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Pemuda dan Olahraga										
Jumlah gedung olahraga	6	6	7		7		7	7	7	7
Jumlah organisasi pemuda	27	27	27		27		27	27	27	28
Jumlah organisasi olahraga	33	4	33	12	33	18	33	18	33	32
Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Nihil
Jumlah kegiatan olahraga	10	4	10	12	10	18	10	20	10	Nihil

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2021 jumlah organisasi pemuda bertambah dari tahun sebelumnya, yakni dari 27 organisasi menjadi 28 organisasi. Hal yang sama juga terjadi pada organisasi olah raga yang mengalami penambahan pada tahun 2021 menjadi 32 organisasi dari 18 organisasi pada tahun 2020. Penambahan ini menggambarkan semakin meningkatnya peran kelembagaan pemuda dan olah raga dalam pembangunan sektor kepemudaan dan olah raga, yang berdampak dalam mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Sementara untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga tahun 2020 tidak dapat digambarkan karena tidak tersedianya data realisasi capaiannya. Namun, dapat digambarkan bahwa pada tahun ini sebagian besar kegiatan/*event* olah raga dan kepemudaan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid 19. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti: (1) masih terbatasnya peran serta

pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat; (3) masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; dan (4) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sedangkan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga; (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; dan (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Untuk ke depannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan diupayakan pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional, baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka, maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

14. Statistik

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Wali Data, melakukan percepatan pengumpulan data sektoral daerah yang berasal dari instansi terkait untuk percepatan penerbitan Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022. Langkah percepatan penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2022 merupakan kebijakan BPS secara nasional untuk mendukung penyusunan perencanaan nasional dan daerah, atas penerapan kebijakan tersebut Publikasi Bukittinggi dalam Angka Tahun 2021 telah tersedia pada laman BPS Kota Bukittinggi pada akhir Februari tahun berjalan. Capaian kinerja urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 66
Perkembangan Capaian Urusan Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "kabupaten/kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

15. Persandian

Persandian adalah kegiatan bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi, urusan Persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu E-mail Sandi dan Kriptografi.

E-mail sandi adalah sistem/perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia, yang dipantau langsung oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui. Berikut tabel pemanfaatan persandian tahun 2021,

Tabel 2. 67
Pemanfaatan Persandian Tahun 2021

Nama Alat Sandi	SKPD Pemanfaat	Jumlah Total SKPD	% Pemanfaatan	Keterangan
Email Sandi	1	28	3,5%	
Kriptografi	1	28	3,5%	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Dari tabel terlihat sampai tahun ini SKPD yang berwenang dalam memanfaatkan e-mail sandi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, sedangkan 7 (tujuh) SKPD yang tidak lagi menggunakan sandi dalam menerima surat dari instansi luar dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pemanfaatan e-mail sandi. Adapun perangkat daerah tersebut adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan

Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini penggunaan alat sandi hanya digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Alat sandi yang digunakan tersebut adalah E-mail Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

16. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah kebudayaan. Urusan kebudayaan dikelola oleh Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya. Dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi di dalamnya dan tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (panitahan) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, Kota Bukittinggi telah memiliki Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut, terdapat 42 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.68
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
1.	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
2.	Bangunan Kantor Disdikbud Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 9 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
3.	Komplek Kantor Polres Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 23 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
4.	Denzibang 5/1 Bukit Barisan	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
5.	Komplek Kantor Kodim 03/04 Agam	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
6.	Tugu Peringatan Perang Kamang Mangopoh	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
7.	Bangunan SMP 1	Jl. Sudirman No 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
8.	Gereja Katolik	Jl. Sudirman Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
9.	Rumah Bekas Kepala Stasiun	Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
10.	Gereja Protestan	Jl. M Syafei No 12 Kelurahan tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
11.	Villa Oepang-Oepang	Jl. Sudirman No 11 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
12.	Studio Foto Agam	Jl. Sudirman No 10 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
13.	Hotel Centrum	Jl. Sudirman No 75 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
14.	Istana Bung Hatta	Jl. Istana No. 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
15.	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
16.	Toko Sulaman Silungkang	Jl. Panorama No 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
17.	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama No. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
18.	Wisma Anggrek	Jl. Panorama No. 16 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
19.	Wisma Cipta Sari	Jl. Panorama No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
20.	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
21.	Rumah Keluarga Amiroeddin	Jl. Panorama No. 6 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
22.	Villa Merdeka	Jl. Dr. A. Rivai No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
23.	Rumah Dinas Wakil Walikota (Sekarang Rumah Dinas Sekdako)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
24.	Makam Tuangku Syech Imam Jirek	Jl. Haji Miskin Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
25.	LKAAM Agam	Jl. Veteran No 96 Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
26.	SMP 4	Jl. Dr.A.Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
27.	Benteng Fort de Kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
28.	Toko Souvenir (CK Center)	Jl. A. Yani No 85 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
29.	Eks Bank BNI 46 Bukittinggi (rumah kepala BNI)	Jl. A. Yani No 128 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
30.	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
31.	Mesjid Surau Gadang (Masjid Jami'/ bangunan asli tidak ada lagi)	Jl. H. Miskin Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
32.	Rumah Gadang	Jl. Ipuh Mandiangan No 61 A Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
33.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 22 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
34.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 38 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
35.	Rumah Tinggal	Jl. Veteran No 97 A Kelurahan Benteng Pasar atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
36.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 8 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
37.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 40/42 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
38.	Rumah/Salon	Jl. Panorama No 8 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
39.	Rumah Keluarga Dr. Erman (RS. Madina)	Jl. M Syafe'i Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
40.	Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
41.	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
42.	Batu Kurai Limo Jorong	Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Bukittinggi	Benda Cagar Budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2020

Revitalisasi (menghidupkan) karya budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi karya budaya merupakan suatu pekerjaan yang bukan sekedar menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa.

Inventarisasi (pendataan, pencatatan dan pelaporan) karya budaya perlu dilakukan guna mencegah hilangnya warisan budaya atau mengalami klaim orang lain karena tidak dihargai di rumah sendiri. Dengan adanya inventarisasi diharapkan warisan budaya bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa menjadi sumber pengetahuan di masa yang akan datang, dengan adanya inventarisasi ini juga diharapkan mampu mencegah hilangnya nilai-nilai budaya oleh gelombang globalisasi yang semakin hebat.

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.69
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	URAIAN		ASAL
1	Panitahan Adaik	Mesjid Al-Ikhwan Panorama	Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguak Panjang
2	Sakato Group	Medan Nan Bapaneh (Rutin) dan Silat Tradisional Harimau Agam dan Kurai	Jl. Kabun Pulasan Dalam Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
3	Rabuang Kuniang	Randai, Musik Gandang Tambua, Silek Galombang, Tari Pasambahan, Tari Piriang, Panitahan, Pasambahan Pidato Adat, Silek	Jl. Angku Basa Komp. Gaya Baru No. 8A Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
4	Sanggar Saayun Salangkah	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
5	Perguruan Silek Mambang Sari Alam	Mesjid Surau Gadang, Aktif Latihan Rutin (data menyusul)	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
6	Perguruan Silek Alang Cimpago	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
7	Perguruan Silat Tribela	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
8	Panitahan Jangkak	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
9	Perguruan Silek Tuo Pusako Minang	Aktif Latihan Rutin	Jl. Kusuma Bakti No. 10 Kel. Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
10	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjung, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh

NO	URAIAN		ASAL
11	Salawaik	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjung, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
12	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Lahitan Rutin	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
13	Pahat Ukir	Aktif F (Kriya Kayu)	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
14	Sanggar Puti Linduang Bulan	Aktif F (Pertunjukan Seni Tari, Less Tari dan Penyewaan Pakaian Tari)	Jl. Perawat No. 147 Kel. Belakang Balok, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
15	Panitahan Aداik	Aktif (Panitahan Aداik Bukittinggi)	Kel. Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguak Panjang
16	Randai Manggih Mudo	Aktif latihan rutin	Kel. manggih , Kec. Mandiangin Koto Salayan
17	Panitahan Aداik	Aktif (Panitahan Aداik Bukittinggi)	Jl. Sumua, Kel. Koto Salayan, Kec. Mandiangin Koto Salayan
18	Sanggar Gastarana	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Garegeh, Kec. Mandiangin Koto Salayan
19	Kuda Lumping	Aktif (latihan Seni pertunjukan jawa kuda lumping)	Jl. Bahar Kamil, Kel. Manggih Gantiang, Kec. Mandiangin Koto Salayan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari data di atas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2020 adalah 19 (sembilan belas) buah, meningkat dari tahun 2019 yang sebanyak 6 (enam) buah yang merupakan karya seni dari pelaku seni di Kota Bukittinggi.

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.70
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi	SMU N 2 Bukittinggi (sekolah Rajo) didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 1 Maret 1873, Sekolah Rajo dipindahkan ke gedung baru yaitu yang menjadi Gedung SMU 2 Bukittinggi, Direktur pertama Sekolah Rajo bernama G. Van der Wijk yang kemudian diganti oleh J. Van der Toorn hingga tahun 1895. Adapun staf pengajar dari bangsa Indonesia yang paling terkenal adalah guru Nawawi St. Makmur (1859-1928) Sekolah Rajo pernah ditutup pada tahun 1935 dan kemudian setelah kemerdekaan diaktifkan kembali dengan berbagai perubahan nama. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) tahun 1950 diubah menjadi SMA I B dan SMA II C, tahun 1960 SMA IIC dipecah menjadi SMA IIC dan SMA A, dan tahun 1962, SMA II C diubah menjadi SMA 2 bukittinggi. Terakhir, perubahan nama terjadi tahun 1965 dari SMA 2 Bukittinggi menjadi SMU 2 Bukittinggi. Berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2016, telah terjadi perubahan nama menjadi SMA 2 Bukittinggi.

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi	Pertama kali didirikan gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah Kweekschool. Pasca kemerdekaan, sebelum menjadi Kantor Dikbud, bangunan ini berturut-turut menjadi Kantor DPRD, Kantor Pajak, dan IKIP Bahasa Inggris dan Arab (sebelum dipindahkan ke Padang). Tahun 2017 gedung ini dipakai menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendidikan
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat oembangunan Jam Gadang ini tidak diketahui dengan pasti. Hanya saja jam yang dipajang pada bangunan ini dibuat pada tahun 1926. Jam tersebut ditangan dari Rotterdam, Belanda., tetapi jamnya sendiri merupakan buatan Jerman. Hal ini dapat dilihat pada label kertas yang tertempel di lemari pengaman komponen jam yang berbunyi : “Abs.B.Vortmann, Turmuhrenfabrik I.W.Germany”. Kemudian pada roda gigi jam terdapat inskripsi: “B.Vortman, Recklinghausen – 1926”. Sekarang Kompleks Jam Gadang ini dipakai sebagai tempat wisata. Hasil Pemutakhiran terakhir, Ja, Gadang baru di cat ulang, sebelumnya di cat terakhir tahun 2010 dan penambahan CCTV oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat gedung ini tidak diketahui dengan pasti. Sampai sekarang gedung ini masih dipakai sebagai sekolah (SD 14). Hasil pemutakhiran terbaru 2016 SD ini berubah nama menjadi SD 07 Teladan
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Ini merupakan terowongan buatan yang berfungsi sebagai tempat pertahanan para tantara Jepang. Dibangun pada tahun 1943 atas perintah Komandan Tentara Pertahanan Sumatera, Jenderal Watanabe. Para pekerjaanya kebanyakan didatangkan dari Jawa yang dibawa Jepang untuk bekerja secara paksa membuat terowongan sepanjang 1.470m dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk mengenang para pekerja paksa ini, di depan pintu masuk telah digambarkan dalam bentuk relief mengenai situasi pembuatan terowongan pada masa itu.Lobang Jepang ini berfungsi sebagai tempat wisata.
6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Rumah Dinas Peternakan terletak di seberang Rumah Sakit Achmad Mochtar atau sebelah kanan Gedung RRI lama dengan bangunan yang terbuat dari tembok dan beratap seng. Temboknya memberi kesan yang kokoh dan kuat karena terbuat dari bata-bata berukuran relatif besar. Di depan pintu masuk dihubungkan dengan sebuah tangga beton. Kondisi rumah cukup terawat. Saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan renovasi total sehingga bentuk aslinya sudah tidak nampak lagi.
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat pembangunan gedung ini untuk pertama kalinya tidak diketahui dengan pasti. Keterangan yang didapat dari kepala sekolah menyebutkan bahwa gedung ini pada tahun 1945 bangunan ini dipakai sebagi sekolah rendah atau MULO. Setelah MULO dibubarkan kemudian pada tahun berikutnya beralih fungsi sebagai tempat percetakan “Oeang Republik Indonesia (ORI)”. Pada tahun 1949 bangunan di lokasi ini hancur, tetapi tahun 1950 dibangun kembali dan sejak saat itu berfungsi sebagai SMP II Bukittinggi. Selanjutnya, sejak tahun 1997 bangunan SMP 2 berubah menjadi SMP 3 dan SMP 4 sampai sekarang, sedangkan SMP 2 pindah ke tempat yang lain. Dan

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
			sekarang menjadi SMP 4.
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan antara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dimonitori oleh Tuanku Imam Bonjol. Sekarang tempat ini dipakaisebagai tempat wisata salah satu bagian dari kebun binatang Kota Bukittinggi.
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan ini dibangun pada tahun 1928 dan berfungsi sebagai tempat pembakaran sampah. Pada saat pemerintahan kolonial jepang (Takekoshi) digunakan untuk pembakaran bata
10	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Rumah ini merupakan tempat kelahiran Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator RI. Adapun riwayat pembangunannya belum diketahui. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat wisata (museum)
11	KOTAK SURAT / BRIEVENBUS	Jl. Sudirman Kantor Pos Kota Bukittinggi	Benda ini ditetapkan melalui SK Walikota pada tahun 2019. Benda ini berupa kotak surat berbahan besi yang didatangkan langsung dari Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benda ini berjumlah 2 (dua) buah. Saat ini tidak dimanfaatkan lagi, tetapi masih berada di lokus Kantor pos.
12	MERIAM	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi dan Taman Marga Satwa da Budaya Kinantan	Benda Meriam yang ditetapkan berjumlah 9 buah. 8 buah Meriam berada di Benteng de Kock 1 buah Meriam berada di TMSBK

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Terdapat 12 buah jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di tahun 2020 dan menjadi aset yang harus selalu dijaga dalam rangka pelestarian benda-benda budaya yang juga merupakan sarana daya tarik wisata.

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Indikator dalam capaian urusan Perpustakaan Kota Bukittinggi Tahun 2017–2021 dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2.71
Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Perpustakaan										
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.536	20.511	15.536	18.339	17.536	21.153	19.536	21.243	11.539	22.038
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	5.749	3.800	10.310	3.800	12.735	3.850	8.392	13.600	10.565
Jumlah perpustakaan	1	238	1	240	1	240	1	240	1	240
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat		8		8		9	5	7	7	7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2017 mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Tabel di atas menginformasikan bahwa jumlah awal yaitu 20.511 buku menjadi 22.038 buku. Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dalam mengukur indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 10.565 orang meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 8.392 orang.

Jumlah Perpustakaan

Tahun 2021 jumlah perpustakaan di Kota Bukittinggi sebanyak 240 perpustakaan, terdiri dari 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Bukittinggi. Di samping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni milik pemerintah pusat, termasuk seluruh karyawannya. Tabulasi perpustakaan ini berasal dari sekolah-sekolah (145), perguruan tinggi (23), organisasi masyarakat (5), kecamatan (3), kelurahan (24), SKPD (24), instansi vertikal (10), BUMN/BUMD (3), pondok pesantren (2) dan 1 perpustakaan Nasional.

Jumlah Pustakawan

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bervariasi dari tahun ketahun. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya pengangkatan baru pustakawan, tenaga teknis dan penilai sehingga pada tahun 2019, 2020 dan 2021 justru mengalami penurunan. Hal ini perlu komitmen bersama agar minat dan pengangkatan pada jabatan fungsional pustakawan, tenaga teknis dan penilai juga ikut meningkat. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, untuk pustakawan dibutuhkan minimal 1 orang per 15.000 penduduk. Dengan demikian jika jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 121.028 pada tahun 2020, maka jumlah ideal pustakawan adalah sebanyak 8 orang. Oleh karena itu masih terdapat kekurangan 1 orang pustakawan lagi untuk mencapai jumlah yang ideal tersebut.

18. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses pengaturan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Aktvitasnya meliputi penerimaan, pencatatan penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip.

Perkembangan capaian urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2017—2021 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72
Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja										
	2017		2018		2019		2020		2021		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Urusan Kearsipan											
Penerapan pengelolaan arsip secara baku	9 SKPD	7 SKPD	12 SKPD	13 SKPD	15 SKPD	14 SKPD	18 SKPD	23 SKPD	18 SKPD	23 SKPD	
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 Keg	1 keg	3 Keg	1 keg	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2022

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, yang artinya telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan belum ada fungsional kearsipan pada setiap SKPD. Pada tahun 2021 baru ada 1 orang fungsional kearsipan dan 19 tenaga pengelola kearsipan. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku Pemerintah Kota terus melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiplier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi dengan pesona alam dan iklimnya yang sejuk, serta didukung dengan pengembangan berbagai objek wisata, dan berupaya menggali potensi daya tarik wisata baru menjadikannya sebagai sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota. Upaya ini juga didorong karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah tingkat kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 584.765 wisatawan yang terdiri dari 32.653 wisatawan mancanegara dan 522.132 wisatawan domestik. Meningkat 1,01 % dari tahun 2018, dimana jumlah kunjungan wisatanya sebanyak 577.857. Namun, kondisi ini berubah drastis akibat pandemi Covid 19, terutama pada tahun 2020. Secara perlahan pada tahun 2021 tingkat kunjungan wisata mulai meningkat. Perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2017 s.d. 2021 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.73
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017 s.d. 2021

No.	Wisatawan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	M mancanegara	30.412	31.841	32.653	2.337	5.012
2.	Domestik	516.483	546.016	522.132	217.631	587.000
JUMLAH		546.895	577.857	584.785	219.968	592.012

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022 & Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Dari tabel dapat dilihat kunjungan wisatawan ke Bukittinggi pada tahun 2021 tetap didominasi oleh wisatawan domestik. Namun, jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat 2x lipat dari tahun 2020. Kondisi tersebut karena dibukanya kembali objek wisata selama pandemi Covid 19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sementara untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan 50 % dibandingkan tahun 2020. Diharapkan untuk tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Tabel 2.74
Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pertanian										
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	65,1	67,66	65,2	66,06	65,3	65,41	65,4	67,8	67,00	67,70
Produksi perikanan	351,68 ton	375 ton	352,68 ton	387,39 ton	353,68 ton	415 ton	354,68 ton	420,20 ton		442,8 ton
Konsumsi Ikan (kg)	35	36,35	37	41,7	40	41,5	40,5	41,85		

Sumber: Dinas pertanian dan pangan, 2022

Target kinerja Urusan Pertanian meliputi aspek Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Produksi perikanan dan Konsumsi Ikan (kg). Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar selalu melebihi target yang ditetapkan artinya tanaman padi atau bahan pangan lainnya dapat tumbuh sebagaimana yang diharuskannya dan tidak terganggu oleh hama dan juga tersedianya unsur hara yang cukup bagi tumbuh kembangnya padi atau bahan pangan yang ditanam. Begitu juga dengan produksi perikanan dan konsumsi ikan juga selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Produktivitas pada tahun 2021 sebesar 67,7 kw/ha, mengalami penurunan sebesar 0,1 kw/ha dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 67,8 Kw/ha. Namun, dari aspek produksi mengalami peningkatan, yakni sebesar 5.896,67 ton di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 5.844,36 ton, dengan luas area tanaman 860 ha. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi dari tahun 2017 s.d. 2021 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.75
Produktivitas Padi Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2021	5.896,67	860	67,7
2.	2020	5.844,36	867	67,8
3.	2019	5.266,31	805,15	65,41
4.	2018	5.515,8	818	66,06
5.	2017	5.480,46	807	67,66

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas padi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut meningkat dan menurun, atau tidak stabil. Kondisi ini diperkirakan karena faktor cuaca (musim kemarau) yang menyebabkan lahan mengalami kekeringan dan gagal panen, disamping masa tanam yang juga berpengaruh. Selain itu kecenderungan penurunan produktivitas padi juga adanya alih fungsi lahan sawah yang pada mulanya ditanami padi setiap tahun beralih fungsi untuk keperluan sektor nonpertanian, seperti perumahan.

Menyikapi kondisi yang terjadi, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya agar produktivitas padi tetap terjaga, salah satunya dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani/gapoktan se-Kota Bukittinggi. Selain itu upaya untuk mengatasi masalah irigasi adalah meningkatkan peran kelembagaan petani sebagai motor penggerak berfungsinya pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah dibentuk Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang akan membantu pemerintah merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi di Kota Bukittinggi.

Di samping padi, bahan pangan lain yang dikembangkan adalah jagung, ketela rambat dan ketela pohon. Produktivitas jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 s.d. 2021 cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada tahun 2021 peningkatannya cukup tinggi yaitu 1,8 Kw/Ha dengan produktivitas tanaman 73,4 Kw/Ha dari luas area tanaman seluas 54 Ha. Perluasan area tanam diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.76
Produktivitas Jagung Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2021	352,32	54	73,4
2.	2020	372,32	49	71,6
3.	2019	232,88	47	56,8
4.	2018	37,4	41,9	37,74
5.	2017	73,61	38	43,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Produktivitas ketela rambat di Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 dengan luas area tanaman 30 Ha mampu memproduksi sebanyak 861 Ton atau dengan tingkat produktivitas 246 Kw/Ha. Sedangkan pada tahun 2021 dengan luas area tanaman seluas 26 Ha, produktivitas menjadi 323,1 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebanyak 678,51 Ton. Penurunan produktivitas ketela rambat diduga disebabkan oleh kualitas bibit yang kurang baik, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Rambat Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021.

Tabel 2.77
Produktivitas Ketela Rambat Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2021	678,51	26	323,1
2.	2020	861	30	246
3.	2019	744	27	310
4.	2018	789	28	263
5.	2017	1.008,66	31	272,61

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Produktivitas ketela pohon di Kota Bukittinggi tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 tingkat produktivitas 317,6 Kw/Ha, sedangkan pada tahun 2021 tingkat produktivitas 238,3 Kw/Ha menurun 79,3 Kw/Ha. Penurunan produktivitas ini sejalan dengan pengurangan luas area tanam. Namun demikian produksi juga ditentukan oleh kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam serta waktu bertanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021

Tabel 2.78
Produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2021	381,4	16	238,3
2.	2020	412,88	11	317,6
3.	2019	541,45	13	416,5
4.	2018	318,7	14	212,45
5.	2017	284,56	13	218,89

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

3. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan Pasar Simpang Aur, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai pusat perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 33,17%, turun sebesar 0,56% dari tahun 2020. Penurunan angka kontribusi menggambarkan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat kondisi ini karena dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang masih mewabah pada tahun 2021.

Tabel 2.79
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	33,87	33,89	34,03	33,73	33,17

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2022

4. Perindustrian

Industri menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Untuk mengukur kinerja unsur perindustrian, dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pada kota Bukittinggi, yang berasal dari Industri Pengolahan. Potensi komoditi industri pengolahan yang ada di Kota Bukittinggi adalah industri pakaian jadi dari tekstil, industri bordir/sulaman, industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furnitur, industri kue-kue basah, industri kerupuk dan sejenisnya, industri roti dan sejenisnya, serta industri pengolahan teh dan kopi. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2017—2021:

Tabel 2.80
Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Industri										
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7.1	6,08	7.2	5,66	7.3	5,03	7.4	5,19	7.4	5,12
Pertumbuhan Industri	5%	3%	5%	14%	5%	5%	5%	4,3%	5%	4,3%
Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB		25 KUB		25 KUB	30 KUB	30 KUB	15 KUB	30 KUB	15 KUB

Sumber: Dinas PM PTSP dan Tenaga Kerja, 2022

Kinerja perindustrian meliputi aspek Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Pertumbuhan Industri, Cakupan bina kelompok pengrajin. Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian target Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB setiap tahun tidak terpenuhi, realisasi selalu di bawah target, bahkan mengalami penurunan secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain diperkirakan karena adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid 19 pada 2 (dua) tahun terakhir, penurunan ini dikawatirkan juga karena sulitnya produk lokal bersaing dengan produk industri dari luar daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kontribusi sektor perindustrian ini antara lain dengan meningkatkan daya saing dan mempersiapkan produk unggulan, meningkatkan kapasitas produsen untuk ekspor, melakukan pendampingan promosi baik dalam dan luar negeri serta memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain, dan negara tetangga. Hal ini mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, karena aktivitas industri memberi efek ganda yang luas bagi penyerapan tenaga kerja lokal dan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor pertanian dan sektor jasa.

Untuk capaian target aspek pertumbuhan industri ada yang terpenuhi sesuai target bahkan melebihi lebih dari 2 kali lipat dari target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2018. Ini dapat menggambarkan adanya peningkatan kebutuhan/permintaan konsumen serta tumbuhnya sektor industri baru. Untuk cakupan bina kelompok pengrajin pada umumnya mencapai target yang ditetapkan namun kecendrungan kinerja tidak terlihat karena tidak tersedianya data secara utuh.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Perencanaan

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang pada tahun 2019 ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan,

Tabel 2. 81
Perkembangan Capaian Perencanaan di Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perencanaan										
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran konsistensi program RKPD dalam APBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbang, 2022

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006—2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006, dan pada tahun 2018 dilakukan revisi dan ditetapkan dengan Perda 06 Tahun 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi selalu dilakukan setiap tahun, untuk RKPD tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2020.

2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan. Dengan segala kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 dikemukakan azas umum pengelolaan keuangan daerah dan menjadi kewenangan daerah, dimana daerah dapat menetapkan target kinerja keuangan salah satunya strategi untuk mendapatkan penghargaan seperti kemampuan pemerintah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tabel 2.82
Perkembangan Capaian Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Keuangan										
Peningkatan PAD (%)	12,32%	(0,43)%	12,32%	9,77%	12,32%	(24,86)	12,32%	(24,86)	12,32	8,37

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Meskipun pandemi Covid 19 masih terjadi selama tahun 2021, namun pemerintah Kota Bukittinggi tetap mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,37 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini sangat membanggakan karena atas capaian ini, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat penghargaan dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Kota Terbaik Kelima se-Indonesia dalam realisasi pencapaian PAD.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 83
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	5,88	6,25	4,43	0	46,52
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	28	27	27	26

Sumber: BKPSDM, 2022

Indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun 2017 s.d. 2021 masih rata-rata 20 jpl (jam pelajaran) dalam satu tahun. Namun masih terdapat PNS yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tahun 2021 sangat sedikit yaitu 0,1 persen. Kondisi pascapandemi Covid 19 masih belum memungkinkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Selain itu masih sedikitnya lembaga yang membuka pendidikan pelatihan formal untuk ASN. Persentase ASN Kota Bukittinggi yang telah mengikuti diklat struktural tahun 2021 sudah meningkat menjadi 46,52 persen. Seiring dengan sudah dimulainya pelaksanaan Diklat Pimpinan Tingkat IV dan Tingkat III.

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru atau suatu rumusan yang menunjukkan adanya hasil. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan disemua kalangan termasuk di pemerintahan karena banyak program strategis daerah ataupun kegiatan yang berskala resiko besar ataupun dampak besar sangat diperlukan kajian atau penelitian. Banyak pekerjaan pembangunan baik berupa fisik maupun nonfisik di Kota Bukittinggi mempergunakan hasil kajian atau penelitian, dan ini merupakan kebutuhan oleh Pemerintah. Tentu pemikiran tersebut tidak terlepas dari pandangan Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa penelitian atau kajian mempunyai nilai yang sangat berarti dan penting untuk dipedomani.

Setiap tahun Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan kegiatan penelitian dan kajian pada sektor-sektor yang dianggap sangat strategis dalam rangka menyusun kebijakan, baik secara teknis maupun rekomendasi regulasi yang melahirkan kebijakan walikota. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan,

Tabel 2.84
Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penerapan SIDA :	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%

Sumber: Bapelitbang, 2022

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2.85
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d 2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
	Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada alat-alat kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan fungsi anggaran. Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsinya ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD.

6. Sekretariat Daerah

Perkembangan capaian indikator urusan penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.86
Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,32	83,26	95	95	80
2.	Persentase Jumlah CSR terhadap APBD	1,34	2,05	2,39	2,63	2,5
	- Perwako	97	61	42	62	62

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

Hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dengan nilai IKM baik yaitu nilai 80 pada tahun 2021. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 95 dengan kategori sangat baik. Survey pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pembangunan menuntut adanya terobosan yang inovatif dalam penyediaan alternatif sumber pendanaan, salah satunya adalah dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Penyerahan dana CSR kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa dapat mengurangi resiko penyimpangan baik dari sisi pengelolaan keuangan daerah maupun tujuan penggunaan dana CSR berkenaan.

7. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit kinerja dan keuangan setiap tahun semakin membaik, hal ini menggambarkan upaya SKPD menyajikan pelaksanaan pembangunan juga semakin baik. Di samping itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian penguatan APIP untuk lebih independen, efektif dan optimalisasi dalam mengawasi perangkat daerah. Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut,

Tabel 2.87
Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisas	Target	Realisas	Target	Realisas	Target	Realisas	Target	Realisas
	Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan	74%	82%	78%	84%	82%	81%	85%	82%	82 %	83 %
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.48%	0.54%	0.45%	0.26%	0.41%	0.64%	0.37%	0.23%	0 %	0 %
3	Jumlah temuan BPK	13	9	12	10	11	14	10	10	10	11

Sumber: Inspektorat, 2022

Kegiatan audit terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi. Pengertian tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan. Salah satu indikasi keberhasilan audit tercermin dari percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit oleh pimpinan audit. Dari tabel di atas persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 83%, angka ini menunjukkan indikasi keberhasilan yang telah dicapai dan disamping itu terdapat temuan BPK sebanyak 14 temuan, artinya masih terdapat kelemahan pengendalian dan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Diharapkan ke depan angka temuan BPK dapat ditekan dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasannya.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang

berdekatan, domestik atau internasional. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri (impor) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2.88
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp.)	3,906,189.75	4,248,963.77	4,676,148.18	4,784.023,59	4.934.269,15
b. ADHK (juta Rp.)	2,812,783.39	2,962,992.28	3,120,626.66	3.106.038,73	3.165.176,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	52.41	53.03	53.75	55,45	54.66
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribuan Rp.)					
a. ADHB (Ribuan Rp.)	31,363.59	32,993.20	35,757.75	39.187,64	40.581,88
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp.)	22,197.01	23,007.64	23,862.93	25.677,57	26.031,98
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	5.18	5.34	5.32	-1,05	2,00
b. Per Kapita	3.78	3.65	3.72	8,04	1,38

Sumber : PDRB 2017-2021

Selama periode 2017—2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif dan cenderung naik, yaitu 52,41 persen (2017); 52,94 persen (2018); 54,23 persen (2019); 54,89 persen (2020) dan 54,66 persen (2021). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 54,89 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 52,41 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap penduduk di Kota Bukittinggi menghabiskan dana sekitar 31,36 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 32,99 juta rupiah (2018); 35,75 juta rupiah (2019); 39,18 juta rupiah (2020) dan 40,58 juta rupiah (2021). Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010) pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga di atas 5 persen. Kecuali di tahun 2020 yang pertumbuhannya berkontraksi sebesar 1,05 persen, dan pada tahun 2021 sebesar 2,00 persen

2. Nilai Tukar petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

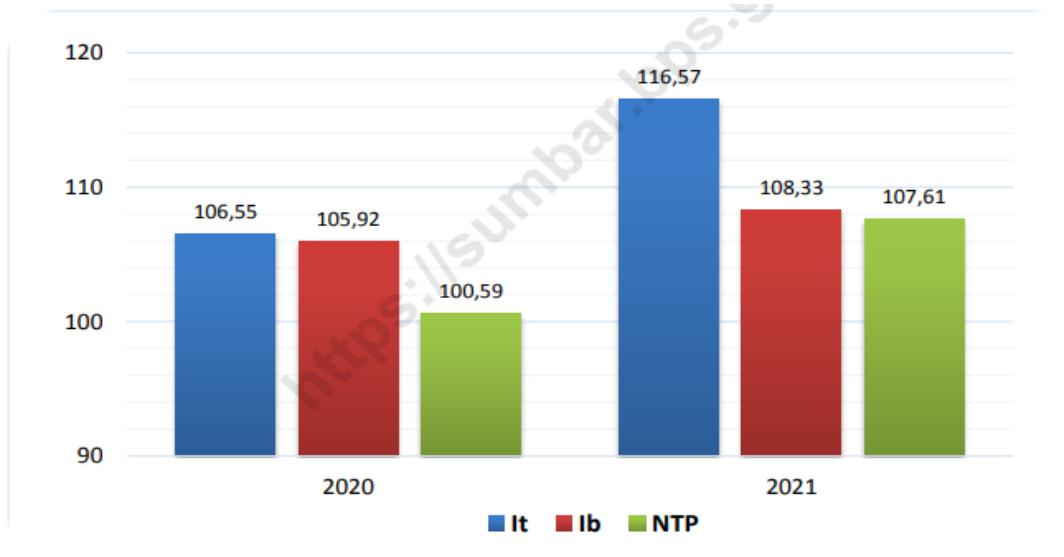
Kegunaan dan Manfaat unsur perhitungan Nilai Tukar Petani:

1. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka ini menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Untuk gambaran kondisi kesejahteraan petani di ditingkat provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

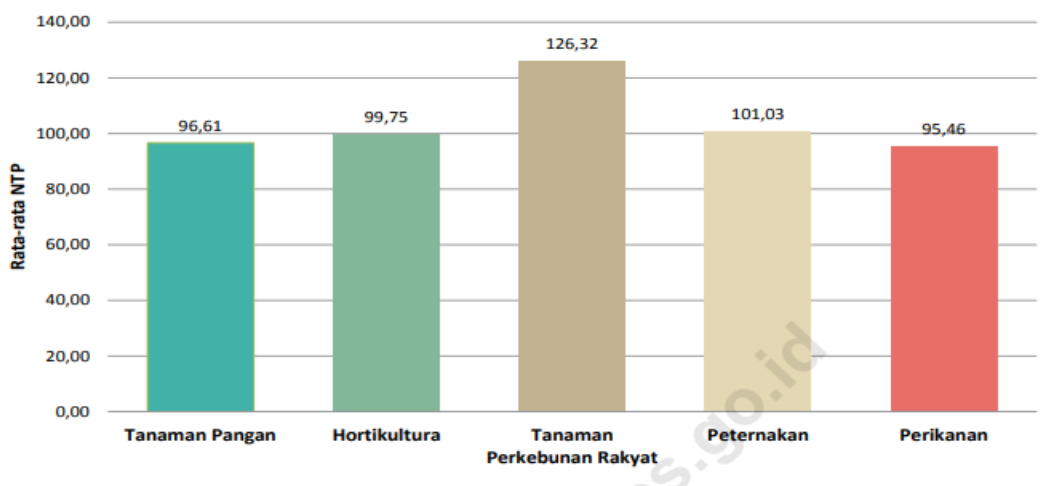
Grafik 2.6
Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov.Sumatera Barat
Tahun 2020-2021



Sumber : BPS 2022 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2017 - 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa nilai It maupun Ib mengalami peningkatan. Akan tetapi karena rata-rata It lebih tinggi dibanding rata-rata Ib sehingga rata-rata NTP berada di atas 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan petani dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan petani untuk konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal. Untuk Indeks Harga yang dibayar petani per-subsektor dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.7
Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021



Sumber : Sumber : BPS 2022 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2017 - 2021

Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terbesar tahun 2021 adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 125,32. Dilihat dari rata-rata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan yang berada di atas 100, ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor tersebut relatif lebih sejahtera dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena harga barang-barang produksinya lebih tinggi nilainya dibandingkan harga-harga barang untuk konsumsi dan produksi.

3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan nonpangan) dalam periode waktu tertentu. Kelompok Pengeluaran Konsumsi nonpangan adalah a.) konsumsi Pakaian dan alas kaki; b.) Perumahan, Perkakas,Perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; c.) Kesehatan dan Pendidikan; d.) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya; dan e.) lainnya.

Tabel 2.89
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d. 2021

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,906,189.75	4,241,071.84	4,704,582.80	4.735.787,68	4.934.269,15
1a	Makanan, Minuman, dan Rokok	1,650,818.45	1,820,526.51	1,993,252.53	1,955,756.17	2,041,694.14
1b	Pakaian dan Alas Kaki	164,125.01	179,053.59	199,236.31	197,667.49	205,273.05
1c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	417,857.38	448,166.47	494,117.57	504,770.45	517,707.52
1d	Kesehatan dan Pendidikan	369,907.06	396,534.72	446,742.55	481,513.73	503,988.46
1f	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	780,296.97	838,313.88	928,299.64	933,443.60	976,126.83
1e	Hotel dan Restoran Budaya	186,533.96	204,644.82	224,801.89	218,986.83	221,275.04
1f	Lainnya	336,650.91	353,831.85	418.132,30	443,649.42	468,204.12

Sumber: PDRB Pengeluaran tahun 2017-2021

Konsumsi nonpangan masyarakat Kota Bukittinggi lebih besar daripada konsumsi pangan, ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga mulai bergeser tidak hanya fokus ke pangan/kebutuhan pokok tapi sudah menganggap komponen nonpangan sudah menjadi kebutuhan lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan pangan.

B. Fokus Wilayah/ Infrastruktur

1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi RTRW telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan pola ruang tiap-tiap kawasan di Kota Bukittinggi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang kota sehingga keteraturan, keindahan serta keamanan bangunan kota dapat terwujud. Namun, sebagai amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RTRW belum dapat dijadikan dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang karena masih bersifat umum. Sehingga perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, yang dilengkapi Peraturan Zonasi (PZ) sebagai ketentuan yang mengatur persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, disusun untuk setiap subzona dan blok peruntukan. Maka pada tahun 2021 Kota Bukittinggi telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi (RDTRK) tahun 2021—2041 melalui Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021.

Fungsi RDTR sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW, acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang dan sebagai acuan dalam penyusunan RTBL. Sedangkan manfaat dari RDTR adalah sebagai penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu, sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat, sebagai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan dan ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan.

Rencana tata ruang baik dalam skala rencana umum maupun rencana rinci merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya, karena itu penataan ruang di Kota Bukittinggi merupakan hasil dari keterpaduan pembangunan dari seluruh sektor yang ada, sehingga pemanfaatan ruang harus dilakukan secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta dapat menjamin kelestarian dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang taat terhadap rencana Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW dan Perwako RDTRK di Kota Bukittinggi maka upaya ini sudah dilakukan sejak dini yaitu dengan penerbitan advis planning/ Keterangan Rencana Kota (KRK). Advis planning atau KRK adalah sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB. Advis planning diberikan kepada pemohon/masyarakat yang akan membangun. Dalam advis planning tersebut dijelaskan pola ruang lahan sesuai dengan RTRW/RDTRK yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang sesuai yang telah diterbitkan. Berikut ini jumlah advis planning/ KRK Kota Bukittinggi yang diterbitkan dari tahun 2017 s.d. 2021,

Tabel 2.90
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diterbitkan	219	285	255	407	357
Surat Peringatan (SP) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan IMB	368	323	225	268	166
Rasio	0,6	0,88	1,13	1,52	2,15

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun permohonan advis Planning cenderung meningkat, tapi pada tahun 2021 terjadi penurunan permohonan. Hal tersebut disebabkan karena disahkannya Peraturan Walikota Bukittinggi tentang RDTR Kota Bukittinggi Tahun 2021—2041 sehingga terjadi adaptasi terhadap aturan yang baru berlaku. Sedangkan untuk ketaatan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Bukittinggi ditinjau dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dimana juga terjadi penurunan pemberian surat peringatan yang menandakan bahwa masyarakat telah mulai sadar tentang aturan membangun rumah

2. Luas Wilayah Produktif

Zona/kawasan budidaya merupakan zona pembangunan diarahkan peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan perkotaan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan perencanaan untuk 20 tahun ke depan. Pemanfaatan ruang pada zona pembangunan ini direncanakan dan diatur pola pemanfaatannya, sehingga dapat diperoleh optimasi pemanfaatan

ruang dan memaksimalkan nilai tambah. Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, peruntukan lain, pergudangan dan fasilitas pelayanan umum, transportasi, sarana dan prasarana perkotaan kawasan. Pengembangan secara vertikal terbatas harus mulai diterapkan di zona pembangunan ini sehingga ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau dapat dijaga dalam jangka panjang

Luas Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan Wilayah Produktif merupakan wilayah yang di dalamnya melakukan proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang terdiri kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Mengacu kepada kawasan yang ada maka tidak semua kategori peruntukan lahan produktif ada di Kota Bukittinggi seperti peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan pertambangan karena potensi-potensi ini tidak dimiliki Kota Bukittinggi. Untuk itu luas lahan produktif yang dihitung adalah kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pariwisata serta kawasan peruntukan lainnya seperti pertanian dan sarana pelayanan umum. Rasio Wilayah Produktif dan Wilayah Budidaya Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.91
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Produktif	992,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88	1.804,54
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	1966,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88	1.804,54
	Persentase	50,47	100	100	100	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2018—2020 luas wilayah produktif dan luas wilayah budidaya di Kota Bukittinggi sama, dengan artian luas wilayah budidaya merupakan daerah-daerah produksi dan distribusi. Perhitungan luasan ini mengacu kepada hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010—2030.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kota Bukittinggi merupakan kota yang selalu menjadi kota tujuan untuk berwisata. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan bagi masyarakat Bukittinggi maupun terhadap pengunjung yang datang ke Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi selalu berupaya mewujudkan stabilitas keamanan. Untuk menentukan tingkat keamanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan .

Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengidentifikasi belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Bukittinggi. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat.

Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021

Tabel 2. 92
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	JUMLAH KRIMINAL YANG TERTANGANI
2017	434
2018	463
2019	449
2020	438
2021	438

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2022

Berdasarkan data yang ada, seperti yang tersaji pada tabel di atas, terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Bukittinggi bersifat fluktuatif tetapi secara umum mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Penurunan kasus kriminalitas ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas di daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1 sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi S2 di Kota Bukittinggi dan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d strata 3 pada tahun 2017—2020,

Tabel 2. 93
Rasio S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2020

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	9.622	10.454	11.394	12.072
2.	Jumlah lulusan S2/S3	893	956	1.091	1.156
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	10.515	11.410	12.485	13.228
5.	Jumlah penduduk	124.700	126.800	128,80	121.028
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	8,43	9,00	9,69	10,93

Sumber: Bapelitbang, data diolah 2022

Dari tabel di atas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021 :

Tabel 2.94
Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	34,710	35,014	35,285	31,202	
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.982	6,244	6,543	5,039	
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	40.692	41,258	41,828	36,241	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	86.112	87,525	88,945	82,503	
5.	Rasio Ketergantungan	47,25	47,14	47,03	43,93	

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap pemerintah daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai urusan konkuren meliputi:

- a) Urusan Wajib Pendidikan;
- b) Urusan Wajib Kesehatan;
- c) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e) Urusan Wajib Sosial; dan
- f) Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat.

Prinsip dasar SPM pada orientasinya tidak hanya memperjuangkan kualitas pelayanan semata, namun juga memperjuangkan kuantitas sehingga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Urusan wajib pemerintahan yang telah diperintahkan penyusunan SPM-nya ternyata mempunyai dasar yang kuat dalam ketentuan konstitusi UUD 1945. Artinya, pengaturan dan penerapan SPM sesungguhnya merupakan implementasi dari ketentuan konstitusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya.. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bukittinggi tahun 2021 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 86,80% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.95
Capaian SPM Kota Bukittinggi Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian Daerah 2021
1	2	3.	4.
Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)		100%	100%
Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Persentase warga negara usia 7-12 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar (sekolah dasar) sesuai standar	100%	100%
	Persentase warga negara usia 13-15 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar (menengah pertama) sesuai standar	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun memperoleh layanan pendidikan kesetaraan sesuai standar	100%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga negara usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini sesuai standar	100%	100%
Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)		100%	69,11%
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,8%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,3%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,3%
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	60,8%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,6%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	54%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,7%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	26%
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian Daerah 2021
1	2	3.	4.
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan ODGJ berat yang terlayani kesehatan	100%	88,94%
Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga TB yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	31,37%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	21,47%
Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		100%	86,23%
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	84,92%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	87,53%
Bidang Perumahan Rakyat (Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman)		100%	100%
Penyediaan dan rehabilitasirumah yang layak huni bagikorban bencana kab/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
Fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		100%	100%
Sub Urusan Trantibum (Satuan Polisi Pamong Praja)		100%	100%
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdatan Perkada	100%	100%
Sub Urusan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		100%	100%
Pelayanan informasi rawanbencana	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	100%	100%
	Penyusunan komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian Daerah 2021
1	2	3.	4.
	Penyediaan Papan Pengumuman dan Rambu-rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	100%	100%
	Pembuatan Rencana Kontingensi	100%	100%
	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100%	100%
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (HKBN)	100%	100%
	Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%
	Penyediaan Peralatan serta Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Kajian Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100%	100%
	Respon darurat Bencana	100%	100%
	Aktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana	100%	100%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
Bidang Sosial (Dinas Sosial)		100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian Daerah 2021
1	2	3.	4.
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti sosial	100%	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pencapaian SPM sebesar 86,80%, realisasi capaian penerapan SPM masih di bawah target Nasional 100%. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat bahwa capaian kinerja SPM harus 100% didukung oleh program dan kegiatan yang jelas. Karena itu butuh penguatan dan peningkatan pelaksanaan sesuai peraturan tiap-tiap kementerian.

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2021 sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan dasar standar jumlah dan kebutuhan barang atau jasa standar jumlah dan kualitas barang perlengkapan dasar untuk PAUD sudah dilaksanakan dengan baik melalui dana Penyelenggaraan sekolah dan BOP.
- Sementara untuk SDN dan SMPN pemenuhan kebutuhan dasar untuk buku teks pelajaran telah disediakan untuk semua siswa melalui dana BOS, hanya saja pengadaan buku paket untuk koleksi pustaka yang dipinjamkan kepada semua murid, untuk alat tulis belum ada penganggaran baik dari pusat maupun daerah. Untuk Kesetaraan buku modul belum dianggarkan pada APBD maupun APBN, modul diperbanyak melalui fotokopi dan penggandaan, alat tulis telah dianggarkan melalui dana Penyelenggaraan Paket A, B dan C dalam artian telah dipenuhi oleh pemerintah daerah.
- Untuk tenaga kependidikan ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pelatihan calon kepala sekolah, calon pengawas dan peningkatan kualitas guru melalui kegiatan peningkatan karir pendidik dan tenaga kependidikan di dua jenjang Pendidikan, yakni SD dan SMP.
- Untuk Ruang kelas baru pembangunan dan pemeliharaan sekolah merupakan prioritas RPJMD pada tahun 2021 SMPN 3 sekolah dan SDN 7 sekolah.

Realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan tahun 2021 sebagai berikut :

- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.932 orang dari 1.995 orang sasaran ibu hamil yang ditargetkan. Sehingga capaian pelayanan kesehatan ibu hamil didapatkan 96,8% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 90,7%.
- Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes selama tahun 2021 di Kota Bukittinggi adalah 1.739 orang dari 1.905 sasaran ibu bersalin yang ditargetkan atau sebesar 91,3%, sedikit menurun dari tahun 2020 sebesar 91,7%.
- Dari 1.739 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari, semuanya 93,3% (1.863 bayi baru lahir) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.805 dari 9.542 balita yang ada di wilayah kerja selama tahun 2021, atau sebesar 60,8% dan mengalami peningkatan dari 55,5% pada tahun 2020.
- Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan pendidikan dasar adalah 4.276 orang dari target sebanyak 4.717 orang atau mencapai 90,6%.
- Jumlah pengunjung usia 15-49 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah sebesar 34.753 orang dari sasaran sebanyak 64.913 orang, atau sebesar 54%, mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2020 yaitu 77,5%.
- Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun sebanyak 10.206 orang dari 11.506 orang. Jadi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 88,7% mengalami penurunan dari 99,7% pada tahun 2020.
- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak 8.164 orang dari 31.866 orang sasaran penderita hipertensi atau sebesar 26%, mengalami penurunan dari 67,5% pada tahun 2020.
- Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak 713 dari 806 orang sasaran penderita DM atau sebesar 88%, mengalami peningkatan dari 53,3% pada tahun 2020.
- Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak 169 orang dari 190 orang sasaran penderita ODGJ atau dengan capaian 88,94%.
- Jumlah orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebanyak 288 orang dari sasaran TB yaitu 918 atau sebesar 31,37%, mengalami penurunan dari 33,3% pada tahun 2020.

- Tahun 2021, orang yang terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar yaitu 1.257 orang dari 5.854 orang atau dengan capaian 21,47%.

Realisasi pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021 sebagai berikut :

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari didapat dengan indikator pencapaian jumlah warganegara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 84,92%.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik didapat dengan indikator pencapaian jumlah warganegara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 87,53%.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, terdapat Paket Perluasan SPAM Perkotaan dengan pagu Rp62.730.000,- tetapi tidak terlaksana, dimana tidak ada sambungan rumah yang dibangun sehingga capaian program nol.

Realisasi pencapaian SPM bidang perumahan rakyat tahun 2021 sebagai berikut :

- Di tahun 2021, bencana alam yang terjadi relatif berdampak kecil dan tidak ditetapkan sebagai Bencana Alam Level Kota oleh Kepala Daerah. Bencana alam yang terjadi tidak mengakibatkan kerusakan atau kehilangan rumah bagi warga Bukittinggi sehingga pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dalam hal Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota masih dikategorikan Not Available (NA).
- Pemerintah Kota Bukittinggi juga belum memiliki program merelokasi rumah pada kawasan kumuh, kawasan *negative list* maupun kawasan yang peruntukannya bukan untuk permukiman di tahun 2021 ini.
- Tahapan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2021 telah menyelesaikan 30% proses pengumpulan data awal rumah di kawasan rawan bencana, kawasan kumuh, kawasan *negative list*, dan kawasan yang peruntukannya bukan permukiman melalui kegiatan Pendataan rumah Berbasis Elektronik (SIRUBI.) Ditargetkan seluruh rumah di daerah rawan bencana dapat terdata secara detail *by name by address* di tahun 2022.

Realisasi pencapaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021 sebagai berikut :

- Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota Bukittinggi pada tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebanyak 36 layanan. Dan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2021 adalah sebanyak 36 kejadian. dan seluruh kejadian dapat ditangani oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi. Sehingga capaian Indikator Utama Layanan SPM Sub Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebesar 100 %

Realisasi pencapaian SPM bidang sosial tahun 2021 sebagai berikut :

- Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2021 jumlah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 563 orang. Sebanyak 308 orang penyandang disabilitas tidak masuk dalam DTKS, merupakan penyandang disabilitas ringan, masih potensial dan berasal dari keluarga mampu, tidak memenuhi kriteria sesuai permensos nomor 9 tahun 2018, sebagian juga ada yang pindah. Sebanyak 255 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pelayanan dasar rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2021 adalah 255 orang dengan capaian 100%, baik dari APBD, APBN dan Propinsi, dengan rincian :
 - 1) Dari APBN
 - a. Bantuan PBI JKN untuk 255 Orang
 - b. Bantuan Program Keluarga Harapan untuk 10 Orang
 - c. Bantuan Kursi Roda Disabilitas untuk 2 Orang
 - d. Bantuan Motor Roda Disabilitas untuk 1 Orang
 - 2) Dari APBD
 - a. Pelatihan Bahasa Isyarat sebanyak 20 Orang
 - b. Peningkatan kapasitas gerkatin sebanyak 100 Orang
 - c. Hibah untuk organisasi Pertuni
- Sesuai dengan Kriteria berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2018, kasus anak terlantar pada tahun 2021 berjumlah 42 orang anak yang berasal dari keluarga miskin yang membutuhkan penanganan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, dan telah tertangani 100 %, dimana anak terlantar yang berasal dari keluarga miskin diberi bantuan tas sekolah dan PKH yang pendanaannya bersumber dari APBD..
- Menurut data PMKS Kota Bukittinggi hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2021 jumlah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 709 orang.

Sebanyak 253 orang merupakan lansia masih potensial dan berasal dari keluarga mampu, tidak memenuhi kriteria sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, sebagian juga ada yang pindah dan meninggal dunia. Lansia Terlantar yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi dasar lansia terlantar di luar panti sebanyak 456 orang. Jumlah lansia terlantar diluar panti yang mendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2021 adalah 456 orang dengan capaian 100%, baik dari APBD, APBN dan Provinsi, dengan rincian :

1) Dari APBN

- a. Bantuan Program Keluarga Harapan untuk 150 Orang
- b. Bantuan Usaha untuk Lansia untuk 96 Orang

2) Dari APBD

- a. Bantuan Kursi Roda lansia untuk 30 Orang
- b. Bantuan Sandang (Lansia) untuk 160 Orang
- c. Pelatihan Kewirausahaan (lansia) sebanyak 50 Orang

- Rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia kemudian dilakukan pembinaan dan penyuluhan dari Kemenag, Kepolisian dan Pekerja Sosial. Pada Tahun 2021, Dinas Sosial telah menangani gelandangan dan pengemis sebanyak 67 orang.
- Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2021 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 55 KK/ 217 Jiwa, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta *family kit* bagi korban bencana.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dilakukan terhadap evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan evaluasi terhadap pencapaian realisasi kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi melalui 28 SKPD, menyelenggarakan 237 program dan 1.654 kegiatan. Dari 1.654 kegiatan yang dilaksanakan sampai akhir Tahun 2020 yang memenuhi target kinerja kegiatan adalah 87,60 % dapat terlihat pada tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.115
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Bukittinggi

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13							
1	1	01	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0	162.820.259.647		44.137.256.707		1.512.780.969				164.333.040.616			DISDIK		
	1	01	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				53.350.783.212		40.674.352.739		1.512.780.969				54.863.564.181			DISDIK		
	1	01	02	2,01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				31.413.973.660		25.714.638.707		1.065.653.589				32.479.627.249			DISDIK		
	1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana SD Kota Bukittinggi		12 Bulan	5.661.906.292		10.665.307.687		0				5.661.906.292			DISDIK		
	1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Selesaiyha rehab Sedang/berat ruang kelas		12 Bulan	1.563.623.603		787.251.800		0				1.563.623.603			DISDIK		
	1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Selesaiyha rehab Sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas sekolah			338.728.141		136.947.000		0				338.728.141			DISDIK		
	1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubiler yang dibeli			2.564.219.000		300.000.000		0				2.564.219.000			DISDIK		
	1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	perlengkapan yang dibeli			100.307.500								100.307.500			DISDIK		
						Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				158.475.712		152.380.000		0				158.475.712					
	1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang dibeli			3.112.162.600		2.455.000.000		0				3.112.162.600			DISDIK		
	1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya AKM SD Kota Bukittinggi		60 Sekolah	1.034.232.730		37.645.000		0				1.034.232.730			DISDIK		
	1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan		- 14 SD ya	43.833.310		31.649.000		0				43.833.310			DISDIK		
	1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah reward untuk siswa berprestasi		62 Sekolah	812.724.439		385.427.800		0				812.724.439			DISDIK		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	1	2	3	4	5			6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13								
	1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah Guru dan pegawai yang dikontrak, Jumlah guru Non PNS yang menerima			-316 guru	8.762.595.124		10.412.749.720		1.065.653.589				9.828.248.713			DISDIK	
	1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah bahan angka kredit, Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG,			8 kegiatan	452.056.972		95.949.800		0				452.056.972			DISDIK	
	1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Beasiswa miskin melalui program PIP pada jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat, Pelaksanaan BOS Jenjang SD			62 Sekolah	1.229.281.580		254.330.900		0				1.229.281.580			DISDIK	
	1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana BOS yang dikelola				5.579.826.657								5.579.826.657			DISDIK	
	1	01	02	2,02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					13.159.795.208		10.741.371.052		407.382.724		4%		13.567.177.932			DISDIK	
	1	01	02	2,02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah yang dibangun				87.790.000								87.790.000			DISDIK	
	1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah			12 Bulan	1.353.053.103		3.318.000.000		0				1.353.053.103			DISDIK	
	1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Selesaiyha rehab Sedang/berat ruang kelas sekolah				878.386.303		632.775.000		0				878.386.303			DISDIK	
	1	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Selesaiyha rehab Sedang/berat perpustakaan sekolah			12 Bulan	402.291.439		575.163.000		0				402.291.439			DISDIK	
	1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Selesaiyha rehab Sedang/berat laboratorium				241.203.887								241.203.887			DISDIK	
	1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah				80.474.589		41.450.000		0				80.474.589			DISDIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
									6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13							
1	1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	meubelair yang dibeli			788.462.900	555.000.000		0			788.462.900					DISDIK		
	1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	perlengkapan yang dibeli		1 paket	229.113.000						229.113.000					DISDIK		
	1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga yang dibeli			874.903.000			0			874.903.000					DISDIK		
	1	01	02	2,02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang		12 Bulan	712.109.300			0			712.109.300					DISDIK		
	1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta pelatihan penyusunan		12 Bulan	56.035.050			0			56.035.050					DISDIK		
	1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kontingen Kota Bukittinggi di KOSN		12 Bulan	400.916.515			0			400.916.515					DISDIK		
	1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak, Jumlah guru Non PNS yang menerima		12 Bulan	3.337.148.682		4.190.951.952		407.382.724			3.744.531.406					DISDIK	
	1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bahan angka kredit, Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG, Jumlah guru		8 kegiatan	142.948.355			0			142.948.355					DISDIK		
	1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	pelaksanaan beasiswa miskin melalui program		15 Sekolah	450.427.878			0			450.427.878					DISDIK		
	1	01	02	2,02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah			159.703.789						159.703.789					DISDIK		
	1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS yang dikelola			2.964.827.418						2.964.827.418					DISDIK		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				214.123.650			0			214.123.650							
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				214.123.650		65.653.000		0		214.123.650							
						Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar				214.123.650		65.653.000		0		214.123.650							
	1	01	02	2,03	00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				7.300.661.636		4.145.805.480		39.744.656		7.340.406.292					DISDIK		

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13							
1	1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah				315.810.000		0			-					DISDIK	
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini,		12 Bulan	201.768.444							201.768.444					DISDIK	
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah		8 orang TK	3.450.146.882		3.407.623.280		39.744.656			3.489.891.538					DISDIK	
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak, Jumlah guru Non PNS yang		4 kegiatan	84.433.570		19.365.000		0			84.433.570					DISDIK	
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bahan angka kredit, Jumlah		9 Kegiatan	1.700.106.500		403.007.200		0			1.700.106.500					DISDIK	
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dana BOP yang dikelola		2 Sekolah	1.864.206.240							1.864.206.240					DISDIK	
1	01	02	2,04	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.476.352.708		72.537.500		0			1.476.352.708					DISDIK	
1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Lancarnya Pembelajaran Paket A, B dan C. Terlaksananya			93.180.000							93.180.000					DISDIK	
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan		12 Bulan	488.269.032							488.269.032					DISDIK	
1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																DISDIK	
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C, Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Non Formal secara optimal		9 orang SK	326.645.476		28.775.000		0			326.645.476					DISDIK	
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak		1 Sekolah	23.825.200		43.762.500		0			23.825.200					DISDIK	

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13						
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelayanan Pendidikan Nonformal/Keset	1 Sekolah	544.433.000					544.433.000				DISDIK	
1	01	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			106.368.105.246		959.705.300	0		106.368.105.246				DISDIK	
1	01	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			318.029.057		56.890.000	0		318.029.057				DISDIK	
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	116.512.223		56.890.000	0		116.512.223				DISDIK	
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah anak usia sekolah yang divalidasi	12 Bulan	201.516.834					201.516.834				DISDIK	
1	01	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			104.782.474.424		0	0		104.782.474.424				DISDIK	
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	919 orang	104.782.474.424					104.782.474.424				DISDIK	
1	01	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah			282.155.503		234.019.500	0		282.155.503				DISDIK	
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	13 item	6.213.000		5.603.000	0		6.213.000				DISDIK	
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	10 item	37.459.500		36.849.500	0		37.459.500				DISDIK	
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	30 item	20.087.900		11.655.000	0		20.087.900				DISDIK	
1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum tamu yang dibeli	12 Bulan	6.018.170		11.720.000	0		6.018.170				DISDIK	
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan	6500 porsi	212.376.933		168.192.000	0		212.376.933				DISDIK	
1	01	01	2,07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			215.729.000		0	0		215.729.000				DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%									
1	1 01 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional TK Negeri I				-											DISDIK	
1	1 01 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor yang dibeli			12 Bulan	75.604.000						75.604.000					DISDIK	
1	1 01 01 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan kantor yang dibeli			12 Bulan	140.125.000						140.125.000					DISDIK	
1	1 01 01 2,08 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.928.221		148.450.000		0		113.928.221					DISDIK	
1	1 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos			3220 buah	8.060.000		7.450.000		0		8.060.000					DISDIK	
1	1 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air			6 rekening	105.868.221		141.000.000		0		105.868.221					DISDIK	
1	1 01 01 2,09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					655.789.041		520.345.800		0		655.789.041					DISDIK	
1	1 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan			5 unit roda	195.343.825		39.190.000		0		195.343.825					DISDIK	
1	1 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli			1 Tahun	16.160.000		15.000.000		0		16.160.000					DISDIK	
1	1 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direnovasi Jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihan yang disediakan			1 Unit	444.285.216		466.155.800		0		444.285.216					DISDIK	
2	2 22 00 0,00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.887.247.539		2.503.198.668		0		2.887.247.539					DISDIK	
2	2 22 02 0,00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					866.988.488		254.632.000		0		866.988.488					DISDIK	

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13									
1	2				3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13									
	2	22	02	2,01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				252.492.000		0				164.497.735					DISDIK			
	2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Even Seni Budaya yang diikuti	60 orang, 3	109.777.135	252.492.000		0				109.777.135						DISDIK		
	2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah lembaga adat yang dibina		54.720.600							54.720.600						DISDIK		
	2	22	02	2,03	00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			702.490.753	2.140.000		0			702.490.753							DISDIK		
	2	22	02	2,03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	12 Bulan	98.725.753	2.140.000		0			98.725.753							DISDIK		
	2	22	02	2,03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat	7 lembaga	603.765.000						603.765.000							DISDIK		
	2	22	03	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			404.369.480	0		0			404.369.480							DISDIK		
	2	22	03	2,01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			404.369.480	0		0			404.369.480							DISDIK		
	2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	12 Bulan	344.345.000						344.345.000								DISDIK	
	2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pembinaan sanggar dan perguruan silat	20 lembaga	60.024.480						60.024.480								DISDIK	
	2	22	05	0,00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			89.181.394	145.868.000		0			89.181.394							DISDIK		
	2	22	05	2,01	00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			37.146.840	59.068.000		0			37.146.840							DISDIK		
	2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya	1 cagar bu	9.244.240	13.680.000		0			9.244.240								DISDIK	

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12	13							
2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya					45.388.000		0				27.902.600				DISDIK		
2	22	05	2,02	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						86.800.000		0				52.034.554				DISDIK		
2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya yang dipelihara jumlah Studi/Kajian Kelayakan dan Teknis Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya jumlah Studi/kajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya			12 Bulan		52.034.554		0				52.034.554				DISDIK		
2	22	06	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1.526.708.177		0				1.526.708.177				DISDIK		
2	22	06	2,01	00	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						1.526.708.177		0				1.526.708.177				DISDIK		
2	22	06	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu				12 Bulan		402.230.806		0				402.230.806				DISDIK		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 8	11=10/5 x100%	12	13							
	2	22	06	2,01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Operasional Museum RKBH Pembayaran Honor Lembur PNS Pembayaran Honor Pegawai Non PNS Pembayaran Jasa Tenaga Cleaning Servis Pembayaran Jasa Tenaga Security Penunjang Pelaksanaan DAK Non Fisik			12 Bulan	1.020.709.971		1.395.695.192		0				1.020.709.971			DISDIK	
	2	22	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	jumlah sarana prasarana yang tersedia			1 RKBH	103.767.400		130.000.000		0				103.767.400			DISDIK	

NO.	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			80,8727	88.197.667.654	100											
I	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			92,93	37.144.152.861	100											
					Nilai SAKIP SKPD					A											
1	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan		100	47.659.400	0	72.794.000	0	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00				
	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	47.659.400		72.794.000,00		0,00				47.659.400				
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan															
2	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan		100	34.478.133.358	0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	34.478.133.358								#####				
						Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan															
3	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		90	272.571.647	#DIV/0!											
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		90	15.546.300		10.021.000,00		0,00				15.546.300				
						Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan di Dinkes															
						Jumlah jaringan listrik yang dipelihara di Dinkes															
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90	17.985.000								17.985.000				
						Jumlah iPad Kadis tersedia															
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		90	16.217.000		10.021.000,00		0,00				#REF!				
						Jumlah item alat tulis kantor di Dinkes															
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90	35.105.200		26.860.000,00		0,00				35.105.200				
						Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia di Dinkes															
	1	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		90	34.747.170		45.895.000,00		0,00				34.747.170				
						Jumlah makan minum rapat, tamu dan lembur di Dinkes															
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90	152.970.977		113.500.000,00		0,00				152.970.977				
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti															

NO.	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
4	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		90	277.236.624	90	275.410.000	####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00				
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		90	1.366.000		4.850.000,00		0,00				1.366.000				
						Jumlah item penyediaan layanan administrasi kantor yang disediakan															
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90	275.870.624		270.560.000,00		0,00				275.870.624				
						Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar di Dinkes															
5	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		84,63	2.068.551.832	90	2.761.120.510	####	104.164.304	#DIV/0!	3,77	#DIV/0!	3,77				
	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100	30.344.727		22.111.800,00		0,00				30.344.727				
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes															
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		67,5	348.432.351		437.292.090,00		0,00				348.432.351				
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes															
	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		90	47.882.490		51.690.000,00		0,00				47.882.490				
						Frekuensi perbaikan peralatan kerja di Dinkes															
	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		81	1.641.892.264		####		104.164.304,00				1.746.056.568				
						Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia di Dinkes															
						Jumlah tenaga kebersihan kantor di Dinkes															
						Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
						Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor															
						Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor															

NO.	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
II	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan			75,8363	5.231.947.564	80,00										
6	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			100	2.645.691.000	100	566.800.000	#####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0			
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	2.645.691.000		566.800.000,00		0,00				2.645.691.000			
						Jumlah pengadaan alat laboratorium kesehatan masyarakat															
						Persentase ketersediaan alat laboratorium kesehatan															
7	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan			51,509	963.316.364	95	261.000.000	51,51	-	54,22	0,00	54,22	0,00			
	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			55	4.712.000		261.000.000,00		0,00				4.712.000			
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan															
	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes		95	410.389.802								410.389.802			
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			100	548.214.562								548.214.562			
						Jumlah pengadaan bahan habis pakai RO dan BHP Skrining HIV															
						Jumlah pengadaan BMHP terpenuhi di Dinkes															
8	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar			76	1.622.940.200	80										
	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	1.252.520.200		790.000.000,00		0,00				1.252.520.200			
						Jumlah paket pengadaan peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKD)															
						Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			80	256.542.230		566.800.000,00		0,00				256.542.230				
						Jumlah paket Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan																
						Jumlah paket pengadaan alat kesehatan atau penunjang medik																
	1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	104.918.770								104.918.770				
						Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara																
	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	8.959.000		12.015.000,00		0,00				#REF!				
						Frekuensi pemeliharaan Ambulance siaga																
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		81,96	41.696.989.580	90	9.061.012.666	81,96	-	91,07	0,00	91,07	0,00				
9	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		90,49	6.454.870.534	100	8.447.241.316	#####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00				
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83,33	76.323.600		187.130.000,00		0,00				76.323.600				
						Jumlah cetak buku kespro catin																
						Jumlah cetak buku KIA + Stiker KIA																
						Jumlah peserta Pertemuan Data dan evaluasi Program Kesga																
						Jumlah peserta review Bulan 16 bulan																
						Jumlah peserta Sosialisasi Surveilans Berbasis Aplikasi																
						Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Manual Rujukan																
						Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidan																
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan cetak Media Informasi																

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah puskesmas yang mendapatkan Monev dan RTU															
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			66,67	157.720.796		162.370.000,00		0,00					157.720.796			
							Jumlah cetak media promosi															
							Jumlah peserta pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas															
							Jumlah peserta pertemuan update ADN															
							Persentase terlaksananya dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan															
							Persentase terlaksananya rujukan persalinan dan neonatal															
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100	64.180.100		162.370.000,00		0,00					64.180.100			
							Jumlah pengadaan laptop															
							Jumlah peserta pertemuan pembahasan AMP ibu dan bayi															
							Jumlah peserta pertemuan pembelajaran AMP pada ibu dan bayi															
							Jumlah peserta pertemuan update AMP pada ibu dan anak															
							Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL di tingkat primer															
							Jumlah sampel pemeriksaan sampel SHK pada BBL															
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100	31.483.550		89.800.000,00		0,00					31.483.550			
							Jumlah cetak kartu cakram DDTK															
							Jumlah item cetak media promosi															
							Jumlah peserta pertemuan update kesehatan															
							Jumlah peserta pertemuan update MTBS/MTBM															
							Jumlah peserta pertemuan update SIDDTK															
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100	4.225.200		19.956.000,00		0,00					4.225.200			
							Jumlah guru UKS yang mengikuti orientasi program sekolah sehat															
							Jumlah konselor sebaya yang dilatih															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek pengelolaan program PKPR di puskesmas															
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100	81.916.300		140.045.000,00		0,00								
							Jumlah cetak buku kesehatan lansia															
							Jumlah cetak buku pedoman kesehatan lansia															
							Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia															
							Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia															
							Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia															
							Jumlah puskesmas mengikuti lomba senam lansia															
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100	17.354.000		16.551.000,00		0,00					17.354.000			
							Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate)															
							Persentase penemuan pasien baru TB BTA+															
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			85	170.634.642		297.171.990,00		0,00					170.634.642			
							Jumlah sosialisasi yang diberikan ke masyarakat															
							Persentase kasus HIV tertangani dengan tahapan layanan kesehatan															
							Persentase komunitas yang berisiko HIV AIDS yang terjangkau															
	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			81,82	385.117.250		859.802.800,00		0,00					385.117.250			
							Jumlah item cetak media promosi															
							Jumlah item PMT															
							Jumlah paket pengalangan input dan diet															
							Jumlah pertemuan gizi (penyusunan kebutuhan PMT dan peningkatan pelayanan kesehatan dari sektor gizi di tingkat nasional)															
							Jumlah peserta sosialisasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri															
							Jumlah peserta pelatihan nutriceleen															
							Jumlah peserta Pelatihan PMBA															
							Jumlah peserta pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah peserta Pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tingkat Kota Bukittinggi															
							Jumlah peserta Pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi															
							Jumlah peserta Sosialisasi regulasi ASI Eksklusif															
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			100	43.380.960			33.920.000,00		0,00						43.380.960		
							Jumlah ASN yang diukur kebugarannya															
							Jumlah jemaah haji yang diukur kebugarannya															
							Jumlah peserta pertemuan kebugaran															
							Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK															
							Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga															
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			98	381.410.472			163.687.410,00		0,00						381.410.472		
							Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM															
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL															
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3															
							Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3															
							Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL															
							Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi															
							Jumlah PMI yang dilakukan															
							Jumlah PMI yang dilakukan															
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			100	8.895.600			21.878.000,00		0,00						8.895.600		
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan															
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional															
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100	244.267.030			262.719.496,00		0,00						244.267.030		
							Jumlah pembuatan media promosi surveilans penyakit															
							Jumlah peserta Monev PM dan PTM															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah peserta pertemuan pengelolaan surveilans penyakit hidung dan DM															
							Jumlah Peserta pertemuan penguatan peranan posbindu															
							Jumlah peserta sosialisasi Program Jeda															
							Jumlah peserta workshop Penyakit Menular															
							Jumlah peserta workshop PTM															
							Jumlah puskesmas yang menerima sosialisasi SI PTM															
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			90	15.523.000		28.245.000,00		0,00						15.523.000			
							Jumlah pecandu Napza yang terseker															
							Jumlah peserta sosialisasi efek samping narkoba															
							Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak															
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			100	668.219.000		54.170.000,00		0,00							668.219.000		
							Jumlah aktifitas kegiatan PMI															
							Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan															
							Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji															
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			85	11.627.500		11.292.500,00		0,00							11.627.500		
							Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar															
							Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana															
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			90	29.960.300		56.652.300,00		0,00							29.960.300		
							Jumlah keturanan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM															
							Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah															
							Jumlah masyarakat terdeteksi jumlah penderita DBD yang ditangani															
							Jumlah penderita diare dan penyakit menular menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan															
							Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan															
							Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu															
							Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular															
	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			100	3.696.120.840		#####		0,00						3.696.120.840		
							Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN															
							Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN															
							Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi															
	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			30	320.000										320.000		
							Frekuensi pengambilan dan pengiriman specimen															
	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			100	366.190.394		203.729.820,00		0,00						366.190.394		
							Frekuensi pertemuan bulanan forum															
							Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan															
							Frekuensi pertemuan tatanan di Kecamatan															
							Frekuensi Pertemuan tatanan di Kelurahan															
							Frekuensi Pertemuan tatanan di SKPD															
							Jumlah item cetak media promosi															
	10	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		83,7536	34.509.352.007	100	- #####	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			100	23.339.221.863										#####		
							Jumlah bulan pembayaran honorarium tenaga kontrak RSUD															
							Jumlah paket pengadaan alat kesehatan RSUD															
							Jumlah paket pengadaan prasarana dan kelengkapan RSUD															
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			100	243.928.126										243.928.126		
							Jumlah honorarium tenaga akutansi BLUD Puskesmas															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah Puskesmas BLUD															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Guguk Panjang)			100	1.393.913.986										1.393.913.986			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gulai Bancah)			88	723.146.620										723.146.620			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mandiingin)			85	1.254.032.364										1.254.032.364			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Nilam Sari)			51,7	867.625.070										867.625.070			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Plus Mandiingin)			95	823.754.521										823.754.521			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rasimah Ahmad)			84	1.398.971.086										1.398.971.086			
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Tigobaleh)			73,85	1.359.712.224										1.359.712.224			

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat															
	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi Kota)			90	560.788.572								560.788.572				
							Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan															
							Persentase pengelolaan obat dan perbekalan sesuai standar di IFK															
	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan)			95	495.936.734								495.936.734				
							Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan															
	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			100	209.062.511								209.062.511				
							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit															
							Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi															
							Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit															
							Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi															
							Tingkat capaian akreditasi Rumah Sakit															
	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			10	320.000								320.000				
							Jumlah kasus KIPI yang dirawat															
							Jumlah kasus KIPI yang terlacak															
	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			100	1.838.938.330								1.838.938.330				
							Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi															
							Jumlah kelurahan yang sudah Universal Child Immunization															

NO.	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
11	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai			100	28.187.650	100	32.025.000	####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			100	10.032.900		11.265.000,00		0,00				10.032.900			
						Jumlah buku profil kesehatan															
	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100	18.154.750		20.760.000,00		0,00				18.154.750			
						Jumlah laporan capaian SPM															
12	1	02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes			90	704.579.389	90	581.746.350	90	0	100,00	0,00	100,00	0,00			
	1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	9.277.680		10.810.000,00		0,00				9.277.680			
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar															
						Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan/koordinasi dan visitasi															
	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			100	695.301.709		570.936.350,00		0,00				695.301.709			
						Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi															
						Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA															
						Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan															
						Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga															
						Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)															
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monev terpadu															
						Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan															
						Jumlah program UKM yang mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan															
III	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			76,39	3.160.942.807	90,00	51.820.000	####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
13	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di fasilitas pelayanan kesehatan			100	4.487.500	100	4.680.000	100	-	100,00	0,00	100,00	0,00			
	1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				100	4.487.500		4.680.000,00		0,00						4.487.500	
							Jumlah tenaga kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin															
14	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar			62,5	2.798.649.007	95	-	63	-	65,79	#DIV/0!	65,79	#DIV/0!			
	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				62,5	2.798.649.007	100		62,50		62,50	#DIV/0!	62,50	2.798.649.007			
							Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji temanya					20										
							Tersusunnya perencanaan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi					2										
							Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100										
15	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar			66,67	357.806.300	95	47.140.000	#####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				66,67	357.806.300	100	47.140.000,00		0,00						357.806.300	
							Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan					1										
							Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan					50										

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlahn SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan swasembada					100										
							Jumlahn siswa/manasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian					500										
							Terlaksananya penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi					1										
							Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Bukittinggi					2										
							Tersusunnya data dan informasi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi					100										
							Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100										
IV	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		68,125	142.278.960	90	358.063.900	####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00				
16	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		57,5	8.123.000	90	38.960.000	####	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00				
	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			65	7.163.000	100							7.163.000				
							Frekuensi pertemuan pengendalian ASDAK					2										
							Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat					1										
							Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya					20										
							Jumlah sarana yang terawasi dan terawasi distribusi sediaan farmasi					30										
							Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas					20										

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah terdapatnya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek					30										
							Peningkatan pengetahuan dan pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian					180										
	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			50	960.000	100	38.960.000,00		0,00					960.000			
							Jumlah dokumen data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan					1										
							Jumlah dokumen kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan					1										
							Jumlah pengelola sarana kefarmasian yang patuh terhadap pemenuhan standar dan persyaratan					100										
							Jumlah pengelola sarana yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian					180										
17	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan		60	71.374.500	100	156.440.000	0	- 0,00	0,00			0	0,00			
	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga				60	71.374.500		156.440.000,00		0,00					71.374.500		

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Bimtek DFI bagi petugas pengawas keamanan pangan					1										
							rekrutensi pememksaan sampai					1										
							Jumlah industri rumah tangga yang diaudit					70										
							Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan					60										
18	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan			95	29.988.360	100	26.961.900	0	0	0,00	0,00	0	0,00			
	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM)				95	29.988.360		26.961.900,00		0,00						29.988.360	
							Jumlah Depot yang diawasi															
							Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sanitasi DAMIU															
19	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan ProdukMakanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan			60	32.793.100	100	135.702.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yangBeredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				60	32.793.100		135.702.000,00		0,00						32.793.100	
							Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP															
							Inventarisasi IRTP															
							Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KeamananPangan															
							Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT															
							Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan															
							Pengkajian Ulang SPPIRT															
							Sampling dan Pengujian Pangan Industri RumahTangga															
V	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		90,00	821.355.882	90	408.299.500	90,00	-	100,00	0,00	100,00	0,00				
20	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	383.835.862	100	178.334.000	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan				10											
	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			100	383.835.862		178.334.000,00		0,00				383.835.862				
							Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasimasyarakat, organisasi profesi dan LP/LS															
							Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan															
							Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasimasyarakat, organisasi profesi, dan LP/LS															
21	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota		35	225.278.920	35	145.937.500	35	-	100,00	0,00	100	0,00				
	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			100	225.278.920		145.937.500,00		0,00				225.278.920				
							Jumlah kampanye gemas Tingkat Kota yang dilaksanakan															
							Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye gemas															

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU 2021 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2022 (%)		KET
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12
							Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan															
							Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan															
							Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan															
22	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelurahan Siaga aktif			75	212.241.100	75	84.028.000	75	-	100,00	0,00	100,00	0,00			
	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100	212.241.100		84.028.000,00		0,00					212.241.100		
							Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)															
							Jumlah anggota saka bakti husada yang dibina															
							Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota															
							Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi															
							Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti															
							Jumlah kelurahan siaga aktif															
							Jumlah posyandu yang aktif															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD			A	8623929150	A	1.527.131.775,00	A		-	100%	0,00%	A				DPUPR	
1.03.01.2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			A	25501150	A	36.717.000,00	A		-	100%	0,00%	A	25.501.150,00			DPUPR	
1.03.01.2	01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			2 dokumen	25501150		36.717.000,00			0,00				25.501.150,00				
1.03.01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			A	6972515811	A	0,00	A		-	100%	#DIV/0!	A	6.972.515.811,00			DPUPR	
1.03.01.2	02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN			72 orang	6972515811									6.972.515.811,00			DPUPR	
1.03.01.2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu			1	281174387,5	100%	369.025.000,00	100%		-	100%	0,00%	100%	281.174.387,45			DPUPR	
1.03.01.2	03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang disediakan			6 orang	281174387,5		369.025.000,00			0,00				281.174.387,45			DPUPR	
1.03.01.2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Menggunakan Atribut Pegawai			1	5209500	100%	0,00	100%		-	100%	#DIV/0!	100%	5.209.500,00			DPUPR	
1.03.01.2	05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PP)	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan			7 stel	5209500									5.209.500,00			DPUPR	
1.03.01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu			1	300057253	100%	241.821.225,00	100%		-	100%	0,00%	100%	282.702.533,00			DPUPR	
1.03.01.2	06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli			11 jenis	8472400		4.996.725,00			0,00				8.472.400,00			DPUPR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14070000									14.070.000,00				
1.03.01.2	06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli			58 jenis	17354720		14.999.500,00			0,00							DPUPR	
1.03.01.2	06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PFU)	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli			1 kegiatan	2588000									2.588.000,00			DPUPR	
1.03.01.2	06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PP)	Alat tulis kantor yang dibeli			27 jenis	3952000									3.952.000,00			DPUPR	
1.03.01.2	06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan			13 jenis 67868 lembar	16631620		17.180.000,00			0,00				16.631.620,00			DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5	12	13								
	1.03.01.2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PFU)	Jumlah barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan		1 kegiatan 340000									340.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PP)	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan		12 bulan 698000									698.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah nasi bungkus yang dibeli Jumlah snack berat yang dibeli Jumlah snack biasa		271 porsi 70 porsi 101 porsi 100	3346000	4.026.000,00			0,00				3.346.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PFU)	Makan yang dibeli, snack yang dibeli		12 bulan 0									-					DPUPR	
	1.03.01.2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti		1 lumpsum 12 bulan 205110913		200.619.000,00			0,00				205.110.913,00					DPUPR	
	1.03.01.2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PFU)	Jumlah rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri (1 kegiatan)		1 kegiatan 20338600									20.338.600,00					DPUPR	
	1.03.01.2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PP)	Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		12 bulan 7155000									7.155.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu		1 150535981		100% 275.625.000,00	100%		- 75%	0,00% 0,00%	100% 100%	150.535.981,00						DPUPR	
	1.03.01.2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat		4 jenis 2751000		3.495.000,00			0,00				2.751.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PFU)	Jenis surat menyurati		2 jenis 730000									730.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 130730981		256.800.000,00			0,00				130.730.981,00					DPUPR	
	1.03.01.2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara		1 item 20 unit 16324000		15.330.000,00			0,00				16.324.000,00					DPUPR	
	1.03.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu		1 888935067,2		100% 603.943.550,00	100%		- 100%	0,00% 0,00%	100% 100%	888.935.067,15						DPUPR	
	1.03.01.2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		1 Ls 40353050		39.190.000,00			0,00				40.353.050,00					DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya Kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya			27 unit 19 buah 9 buah	175409225		253.150.000,00		0,00				175.409.225,00			DPUPR	
	1.03.01.2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PP)	Jumlah alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya			41 unit	439922289								439.922.289,00			DPUPR	
	1.03.01.2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan yang disediakan Gedung kantor yang dipelihara Jasa kebersihan yang disediakan Retribusi sampah yang dibayar			16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan	233250503,2		311.603.550,00		0,00				233.250.503,15			DPUPR	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik				2648382753	73	4.392.469.032,00		21.973.396,00	100%	0,50%					DPUPR	
	1.03.02.2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik				2648382753	70%	4.392.469.032,00		21.973.396,00	100%	0,50%					DPUPR	
	1.03.02.2 02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang dibangun				0		519.090.000,00		0,00							DPUPR	
	1.03.02.2 02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen survey Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang direhab			1 laporan 1000 meter	1923645179		3.128.300.000,00		0,00				1.923.645.179,19			DPUPR	
	1.03.02.2 02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara (33,8 km)			3 daerah irigasi 13,45 km	724737574		745.079.032,00		21.973.396,00				746.710.970,00			DPUPR	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Bersih				15295500	93%	3.106.841.000,00		-	0,00%		15.295.500,00				DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13		
	1.03.03.2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Terlayani SPAM Jaringan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan				96,60%		3.106.841.000,00			-	0,00%		15.295.500,00				DPUPR		
	1.03.03.2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen rencana induk air minum			1 dokumen			15295500						15.295.500,00				DPUPR		
	1.03.03.2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perluasan SPAM jaringan perpipaan			-			0			3.106.841.000,00		0,00					DPUPR		
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak				100%		0,00			-	#DIV/0!		118.151.160,00				DPUPR		
	1.03.04.2 01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang Berkondisi Baik				80%		0,00			-	#DIV/0!		118.151.160,00				DPUPR		
	1.03.04.2 01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS3R Pengawasan Perencanaan			1 unit 1 laporan 1 dokumen			118151160						118.151.160,00				DPUPR		
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak				100%		29.696.105.000,00			-	0,00%		7.257.663.294,30				DPUPR		
	1.03.06.2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik				80%		29.696.105.000,00			-	0,00%		7.257.663.294,30				DPUPR		
	1.03.06.2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen			1 paket			107769053,8						107.769.053,76				DPUPR		
	1.03.06.2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun			135 meter			1284943267			4.787.520.000,00		0,00		1.284.943.266,91				DPUPR	
	1.03.06.2 01	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan			482 meter			4794458032			12.466.935.000,00		0,00		4.794.458.032,13				DPUPR	
	1.03.06.2 01	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab												-					DPUPR	
	1.03.06.2 01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk			2240 meter			1070492942			12.441.650.000,00		0,00		1.070.492.941,50				DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis (80 persen)				4193596125	80 persen	43.987.344.250,00			-	0,00%		4.193.596.125,30			DPUPR	
	1.03.08.2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)				4193596125	80%	43.987.344.250,00			-	0,00%		4.193.596.125,30			DPUPR	
	1.03.08.2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB Jumlah rekomendasi SLF Jumlah rekomendasi teknis TABG			rekomendasi 2 rekomendasi 10 rekomendasi	312003500		336.260.250,00		0,00				312.003.500,00			DPUPR	
	1.03.08.2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebing Ford de Kock Dokumen Perencanaan			1 Dokumen 1 dokumen	3818151125		21.825.542.000,00		0,00				3.818.151.125,30			DPUPR	
	1.03.08.2 01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Gambar RAB Usulan biaya			30 Gambar 30 RAB 30 usulan biaya	63441500		21.825.542.000,00		0,00				63.441.500,00			DPUPR	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap				8782481901	100%	23.310.802.555,00		22.380.310,00	0%	0,10%		8.804.862.210,57			DPUPR	
	1.03.10.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap				8782481901	89%	23.310.802.555,00		22.380.310,00	0%	0,10%		8.804.862.210,57			DPUPR	
	1.03.10.2 01 09	Rehabilitasi Jalan	Dokumen perencanaan Laporan pengawasan Panjang jalan yang direhab			1 dokumen 2 laporan 750 m	1034996373		7.183.850.000,00		0,00				1.034.996.373,02			DPUPR	
	1.03.10.2 01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen survey Jumlah laporan pengawasan Panjang jalan yang dipelihara			1 dokumen 2 dokumen 1 laporan	6082992140		13.612.857.411,00		0,00				6.082.992.140,10			DPUPR	
	1.03.10.2 01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara			150 km	1081930347		1.084.095.144,00		22.380.310,00				1.104.310.657,00			DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)	Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ket.							
				K	Rp			K	Rp					K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.03.10.2 01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah laporan pengawasan			1 dokume n 3 unit 1 dokume	582563040,5		1.430.000.000,00		0,00				582.563.040,45				DPUPR	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis				22620250	80%	85.823.000,00		-		0,00%		22.620.250,00				DPUPR	
	1.03.11.2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar				0	80%	74.623.000,00		-		0%	0,00%					DPUPR	
	1.03.11.2 01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan			0	0		74.623.000,00				0,00						DPUPR	
	1.03.11.2 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar				20700250	80%	11.200.000,00		-		0%	0,00%		20.700.250,00			DPUPR	
	1.03.11.2 02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN			5 buku	20700250		11.200.000,00				0,00		20.700.250,00				DPUPR	
	1.03.11.2 03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar				1920000	80%	0,00		-		0%	#DIV/0!		1.920.000,00			DPUPR	
	1.03.11.2 03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rekomendasi penerbitan IUJK			5 rekomendasi	1920000								1.920.000,00				DPUPR	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				899588284,1	77%	953.228.840,00		40.148.918,00		4,21%		939.737.202,08				DPUPR	
	1.03.12.2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang				149375951	80%	206.472.000,00		-		0,00%		149.375.951,00				DPUPR	
	1.03.12.2 01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Perda RDTR			1 perda	149375951		206.472.000,00				0,00		149.375.951,00				DPUPR	
	1.03.12.2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang			0,9	483767693,1	80%	393.815.880,00	90%	22.515.948,00		5,72%	90%	506.283.641,08				DPUPR	
	1.03.12.2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Digitalisasi arsip Pembuatan keterangan rencana kota Pengukuran sempadan nagari Perubahan sertifikat			5 tahun 300 KRK 1 dokume n 5 sertifikat	483767693,1		393.815.880,00		22.515.948,00				506.283.641,08				DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13
	1.03.12.2 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang			266444640	80%	352.940.960,00		17.632.970,00		5,00%	284.077.610,00					DPUPR	
	1.03.12.2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah razia bangunan dan pelanggaran pemanfaatan ruang		166 SP	224569378		219.781.710,00		17.632.970,00			242.202.348,00					DPUPR	
	1.03.12.2 04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah sidang TKPRD		-	41875262		133.159.250,00		0,00			41.875.262,00					DPUPR	
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan			17169650	50%	25.243.000,00		-		0,00%	17.169.650,00					DPUPR	
	2.10.04.2 01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan			17169650	80%	25.243.000,00		-		0,00%	17.169.650,00					DPUPR	
	2.10.04.2 01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang difasilitasi		3 kasus	17169650		25.243.000,00		0,00			17.169.650,00					DPUPR	
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi tanah yang terselesaikan			49951890	100%	16.605.000,00		-		0,00%	49.951.890,00					DPUPR	
	2.10.05.2 01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk PEMDA			49951890	2 kegiatan	16.605.000,00		-		0,00%	49.951.890,00					DPUPR	
	2.10.05.2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengadaan tanah skala kecil Perwako pengadaan tanah skala kecil		1 SKPD 1 dokumen	49951890		16.605.000,00		0,00			49.951.890,00					DPUPR	
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan			54121800	50%	43.227.000,00		-		0,00%	-					DPUPR	
	2.10.07.2 01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan			54121800	80%	43.227.000,00		-		0,00%	-					DPUPR	
	2.10.07.2 01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah ulayat Rancangan teknis materi ranperda		1 dokumen 1	54121800		43.227.000,00		0,00			-					DPUPR	
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang			118703253	77%	133.233.570,00		5.832.444,00		4,38%	-					DPUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5		12	13
	2.10.09.2 01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan				118703253	80%	133.233.570,00		5.832.444,00		4,38%	-				DPUPR	
	2.10.09.2 01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit		14 sertifikat		118703253		133.233.570,00		5.832.444,00							DPUPR	
	2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang				235726606	77%	237.254.340,00		11.122.336,00		4,69%		246.848.942,00			DPUPR	
	2.10.10.2 01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan				235726606	80%	237.254.340,00		11.122.336,00		4,69%		246.848.942,00			DPUPR	
	2.10.10.2 01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Entry data tanah up dating aplikasi		30 data		26792869		25.635.000,00		0,00				26.792.869,00			DPUPR	
	2.10.10.2 01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Masalah tanah konsolidasi by pass yang dtangani		50 persil		208933737		211.619.340,00		11.122.336,00				220.056.073,00			DPUPR	
	2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap				4592430413	100%	0,00		-		#DIV/0!		-			DPUPR	
	2.15.02.2 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Berkondisi Mantap				4592430413	89%	0,00		-		#DIV/0!		-			DPUPR	
	2.15.02.2 02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan perencanaan Panjang trotoar yang dibangun		1 dokumen 1 laporan 0,45 km		725398568,3											DPUPR	
	2.15.02.2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPTD PFU)	Jumlah titik lampu yang diadakan		177 titik		880679023,2											DPUPR	
	2.15.02.2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang trotoar yang direhab/ditingkatkan		2 dokumen 3 laporan		226352605,4											DPUPR	
	2.15.02.2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPTD PFU)	Titik penerangan jalan umum yang terpelihara		4000 titik		2760000216											DPUPR	
							37629812029		107.515.308.362,00		101.457.403,99		0,09%		21.665.896.224,24				

No	Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja-RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s.d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi 2022		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s.d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP																		
	1	04	01	2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	21.828.250		16.770.000	0%	0	0%	0%	0%	0						
	1	04	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja 2021-2026	100%	55.175.000	1	21.828.250		16.770.000		0,00				21.828.250			DPKP		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1	3.094.144.046		0	0%	0	0%	#DIV/0!	0%	3.094.144.046						
	1	04	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	100%	0	1	3.094.144.046								3.094.144.046			DPKP		
	1	04	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	296.601.135		103.152.950	0%	3.375.000	0%	3%	0%	3.375.000						
	1	04	01	2.0	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	100%	0	1	15.618.500								15.618.500			DPKP		
	1	04	01	2.0	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100%	12.900.000	1	8.640.000		5.160.000		0,00				8.640.000			DPKP		
	1	04	01	2.0	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	5.219.875	1	2.408.000		2.087.950		0,00				2.408.000			DPKP		
	1	04	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	100%	13.350.000	1	5.871.400		5.340.000		0,00				5.871.400			DPKP		
	1	04	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan serta biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100%	217.875.000	1	162.416.235		87.150.000		3.375.000,00				165.791.235			DPKP		
	1	04	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%	8.537.500	1	101.647.000		3.415.000		0,00				101.647.000			DPKP		
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.037.500	1	16.418.476		18.415.000	0%	2.029.996	0%	11%	0%	2.029.996					
	1	04	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya yang dibeli	100%	8.537.500	1	3.880.000		3.415.000		0,00				3.880.000			DPKP		
	1	04	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	100%	37.500.000	1	12.538.476		15.000.000		2.029.996,00				14.568.472			DPKP		
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	194.735.882		260.800.700	0%	1.563.600	0%	1%	0%	1.563.600					

No	Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja-RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s.d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1	04	2.0	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, servis, BBM serta pajak yang terbayarkan	100%	265.500.000	1	41.315.500		106.200.000		781.800,00				42.097.300			DPKP	
1	04	01	2.0	08	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan yang dibayarkan Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan	100%	114.451.750	1	39.604.457		45.780.700		0,00				39.604.457			DPKP	
1	04	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	100%	6.550.000	1	7.065.000		2.620.000		0,00				7.065.000			DPKP	
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	100%	265.500.000	1	106.750.925		106.200.000		781.800,00				107.532.725			DPKP	
1	4	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
1	4	02	2		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1	1.763.356.895		1.712.837.220	62%	23.426.539	0%	1%	100%	23.426.539					
1	04	03	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lengkap dan mutakhir	23169	349.800.000	#####	274.079.366		493.166.380		0,00				274.079.366			DPKP	
1	4	02	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	7	1.996.500.000	700%	1.132.101.272		462.777.000		0,00				1.132.101.272			DPKP	
1	4	02	2	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rusun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan Rusunawa yang disediakan Jumlah rekening listrik Rusunawa yang dibayarkan	126	7.088.557.278	100%	357.176.257		756.893.840		23.426.539,00				380.602.796			DPKP	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.488.204.605,00																
1	04	05	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		21.237.981.658	1	6.297.633.459	100%	6.856.247.020	98%	0	98%	0%	100%	0					

No	Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja-RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s.d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi 2022		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s.d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab)	Ket		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1	04	05	2	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan 2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan	100%	1.065.328.423	10	293.804.642								293.804.642				DPKP		
1	04	05	2	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk membuat fungsi hunian	100%	20.172.653.235	39	6.003.828.817		6.856.247.020		0,00				6.003.828.817				DPKP		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																			
1	04	03	2		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																			
1	04	03	2	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pemukiman Kumuh	Dokumen RP2KPKPK	1	35.000.000	1	81.446.671		112.985.000		0,00				81.446.671				DPKP		
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
1	04	03	2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan	21	108.000.000	1	44.494.998		40.618.000		0,00				44.494.998				DPKP		
1	04	03	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
1	04	03	2	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan <i>Detail Engineering Design</i> DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	1	110.000.000	1	28.150.000		94.998.000		0,00				28.150.000				DPKP		
1	04	03	2	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	50	4.073.000.000	47	1.450.777.700												DPKP		
1	04	03	2	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Persentase kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di kawasan permukiman kumuh	5	220.000.000	1	156.273.746		529.473.000		0,00				156.273.746				DPKP		

No	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
	1	05	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.505.868.310		1.045.901.800		5.373.350		0,51		6.511.241.660			Dinas Kebakaran			
I	1	05	04	0,00	00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap penanggulangan kebakaran meningkat		1	2.356.776.195		0		-		#DIV/0!		2.356.776.195			Dinas Kebakaran			
	1	05	04	2,01	00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan lainnya yang Tertib Prosedur		1	2.095.004.955		0		-		#DIV/0!		2.095.004.955			Dinas Kebakaran			
	1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek			57 orang		932.250						932.250			Dinas Kebakaran			
	2	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			63 kejadian		1.604.848.905						1.604.848.905			Dinas Kebakaran			
	3	05	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		1	405.165.300								405.165.300			Dinas Kebakaran			
	3	05	04	2,01	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Prasarana yang Dibeli			3 set		84.058.500						84.058.500			Dinas Kebakaran			
	2	05	04	2,02	00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran peraturan pencegahan kebakaran					25.510.850			-		#DIV/0!	25.510.850			Dinas Kebakaran			
	4	05	04	2,02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran			50 Kegiatan		25.510.850						25.510.850			Dinas Kebakaran			
	3	05	04	2,04	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif dalam pencegahan kebakaran			0,63		236.260.390			-		#DIV/0!	236.260.390			Dinas Kebakaran			
	5	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan			192 orang		49.639.140						49.639.140			Dinas Kebakaran			
	5	05	04	2,04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah Anggota Balakar			480 orang		186.621.250						186.621.250			Dinas Kebakaran			
II	1	05	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				4.149.092.115		1.045.901.800		5.373.350		0,51	4.154.465.465			Dinas Kebakaran			
	4	05	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia		1	18.681.200		15.150.000		-		0,00%		18.681.200			Dinas Kebakaran			
	6	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			2 dokumen		18.681.200		#####		0,00		18.681.200			Dinas Kebakaran			
	5	05	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		1	3.324.638.173		0		-		#DIV/0!		3.324.638.173			Dinas Kebakaran			
	7	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai PNS dan CPNS yang dibayarkan gaji dan tunjangan			31 orang		3.324.638.173						3.324.638.173			Dinas Kebakaran			
	6	05	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi umum Perangkat Daerah			0,8		216.875.375		183.297.000		5.373.350		2,93	222.248.725			Dinas Kebakaran		

No	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
8	1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi Alat listrik/penerangan bangunan kantor			12 item	3.515.000		#####		0,00				3.515.000			Dinas Kebakaran		
9	1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5 item	57.905.000		#####		0,00				57.905.000			Dinas Kebakaran		
10	1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan			1 jenis	9.048.600	950.000,00			0,00				9.048.600			Dinas Kebakaran		
11	1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			29 item	8.042.000		#####		0,00				8.042.000			Dinas Kebakaran		
12	1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			9 item	13.890.000		#####		0,00				13.890.000			Dinas Kebakaran		
13	1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	124.474.775		#####	5.373.350,00					129.848.125			Dinas Kebakaran		
7	1	05	01	2,07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan						0									Dinas Kebakaran		
14	1	05	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan												-			Dinas Kebakaran	Kegiatan di rekofising untuk penanganan covid 19	
8	1	05	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jaspenujang ueusan Pemerintah Daerah			0,8	47.474.867	53.050.000			-				47.474.867			Dinas Kebakaran		
15	1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli			2 jenis	1.365.000		#####		0,00				1.365.000			Dinas Kebakaran		
16	1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar			144 rekening	46.109.867		#####		0,00				46.109.867			Dinas Kebakaran		
9	1	05	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik			0,75	541.422.500	794.404.800			-				541.422.500			Dinas Kebakaran		
17	1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki			6 unit kend	84.219.250		#####		0,00				84.219.250			Dinas Kebakaran		
18	1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki			6 unit kend	416.715.300		#####		0,00				416.715.300			Dinas Kebakaran		
19	1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara			6 jenis	3.355.000		#####		0,00				3.355.000			Dinas Kebakaran		
20	1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			1 unit	37.132.950		#####		0,00				37.132.950			Dinas Kebakaran		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 =6+ 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.907.852.130		4.859.146.800			31.358.457			0,65%		17.939.210.587		Satpol PP
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketertiban Umum					17.907.852.130		4.859.146.800			31.358.457			0,65%		17.939.210.587		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				6.694.359.784		936.453.750			31.358.457			3,35%		6.725.718.241		
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip A			37.179.850		26.245.000			0			0,00%		37.179.850		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	37.179.850		26.245.000,00			0,00					37.179.850		
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip A			5.607.945.498		0			0			#DIV/0!		5.607.945.498		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	14	5.607.945.498										5.607.945.498		
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		15.355.500			0					0		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		0		15.355.500,00			0,00					0		
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip A			1	303.309.473	144.104.250	####		0			0,00%	####	303.309.473		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik yang terbeli	15	15.475.000		10.948.500,00			0,00					15.475.000		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	12	90.271.000										90.271.000		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor	12	26.843.300		15.355.500,00			0,00					26.843.300		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis barang cetakan	5	13.368.200		12.042.250,00			0,00					13.368.200		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Makan minum rapat, tamu dan lembur SPPD dan Rapat-rapat koordinasi yang diikuti	95	157.351.973		105.758.000,00			0,00					157.351.973		
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.878.500		0			0				#DIV/0!	84.878.500		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	491	4.117.000										4.117.000		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	48	80.761.500										80.761.500		
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip A			661.046.463		750.749.000			31.358.457			4,18%		692.404.920		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	36	395.209.700		426.340.000,00			0,00					395.209.700		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	12	52.971.000		19.890.000,00			0,00					52.971.000		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1	212.865.763		304.519.000,00			31.358.457,00					244.224.220		
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA			11.213.492.346		3.922.693.050			0			0,00%		11.213.492.346		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 =6+ 8		11=10/5 x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda			10.913.447.207		3.252.106.400		0		0,00%		10.913.447.207					
	1	05	02	2.01	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah tenaga pengamanan rumah dinas			28	2.401.233.750		1.107.303.500,00		0,00			2.401.233.750					
	1	05	02	2.01	02 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah bulan Operasional SK4, Siaga Kota, Patroli kota			12	8.312.749.107		1.107.303.500,00		0,00			8.312.749.107					
	1	05	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satlinmas yang dibina			120	170.275.350		898.636.000,00		0,00			170.275.350					
	1	05	02	2.01	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti latihan pembinaan kesatuan dan mengikuti HUT Satpol PP			200	29.189.000		138.863.400,00		0,00			29.189.000					
	1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran				300.045.139		670.586.650		0		0,00%		300.045.139				
	1	05	02	2.02	01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada				11.598.625		138.863.400,00		0,00			11.598.625					
	1	05	02	2.02	02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah bulan pengawasan oleh PTI dan Intel			12	169.086.500		378.092.000,00		0,00			169.086.500					
	1	05	02	2.02	03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah bulan penanganan pelanggaran Perda			12	119.360.014		153.631.250,00		0,00			119.360.014					

No	KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10=6+8		10/5x100%			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.577.578.785				223.195.628					223.195.628				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KOTA			1	2.600.707.278				79.961.660	#DIV/0!	#DIV/0!			79.961.660				BPBD
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1	23.167.250				-	#DIV/0!	#DIV/0!			-				BPBD
1	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	23.167.250	14.391.250,00			0,00	80%	0%	0		23.167.250				BPBD
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	1.597.013.500				-	#DIV/0!	#DIV/0!	0		-				BPBD
2	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	1.597.013.500					#DIV/0!	#DIV/0!	0		1.597.013.500				BPBD
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	358.177.950				57.969.050	#DIV/0!	#DIV/0!	0		57.969.050				BPBD
3	1	05	01	2.06	01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan	35	5.919.500	3.020.000,00			3.020.000,00	#DIV/0!	100%	0		8.939.500				BPBD
4	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	132.041.000	41.400.000,00			0,00	#DIV/0!	0%	0		132.041.000				BPBD
5	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang di sediakan	39	11.465.500	6.962.000,00			6.912.000,00	#DIV/0!	99%	0		18.377.500				BPBD
6	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan	12	7.099.500	4.843.500,00			0,00	#DIV/0!	0%	0		7.099.500				BPBD
7	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan	12	13.798.600	3.180.000,00			0,00	#DIV/0!	0%	0		13.798.600				BPBD
8	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbayarnya belanja Rapat-rapat koordinasi	12	187.853.850	115.000.000,00			48.037.050,00	#DIV/0!	42%	0		235.890.900				BPBD
1	05	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	85.785.000				-	#DIV/0!	#DIV/0!	0		-				BPBD
9	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	5	85.785.000	70.500.000,00			0,00	#DIV/0!	0%	0		85.785.000				BPBD
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	8.590.070				3.892.110	#DIV/0!	#DIV/0!	0		3.892.110				BPBD
10	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	125	1.200.000	600.000,00			0,00	#DIV/0!	0%	0		1.200.000				BPBD
11	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/telepon yang dibayarkan	12	7.390.070	8.000.000,00			3.892.110,00	#DIV/0!	49%	0		11.282.180				BPBD
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	527.973.508				18.100.500	#DIV/0!	#DIV/0!	0		18.100.500				BPBD

No	KODE					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp							
1	2					3					4		5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10=6+8		10/5x100%									
12	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan			12	255.516.075			120.810.000,00			18.100.500,00	#DIV/0!	15%	0	273.616.575										BPBD			
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			12	39.575.000							#DIV/0!	#DIV/0!	0	39.575.000													
13	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan, Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor			12	232.882.433			214.925.070,00			0,00	#DIV/0!	0%	0	232.882.433											BPBD		
	1	05	03			PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang terlaksana				1.976.871.507						143.233.968	#DIV/0!		0	143.233.968											BPBD		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana			0,85	105.211.825						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0											BPBD		
14	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen tentang Kajian Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana			1	35.984.000			30.142.800,00			0,00	#DIV/0!	0%	0	35.984.000											BPBD		
15	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah/ masyarakat/badan usaha dll)			1	69.227.825			47.414.700,00			0,00	#DIV/0!	0%	0	69.227.825												BPBD	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana			0,85	1.756.179.182						143.233.968	100%	#DIV/0!	0%	1.899.413.150												BPBD	
16	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana			1	49.670.000			104.980.500,00			0,00	#DIV/0!	0,00%	0	49.670.000											BPBD		
17	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya gaji petugas pusdalops dan operasional pendukung penanggulangan bencana			1	1.403.806.072			832.364.840,00			143.233.968,00	#DIV/0!	17,21%	0	1.547.040.040											BPBD		
18	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase kelompok KBLK yg terbentuk pd 24 Kel, Anggota KBLK yg dilatih pd 24 Kel dan sarana peralatan kebencanaan Tenda 4 unit, Tandu 4 unit, PPPK 4 unit, Radio RIG 4 unit unit dan HT 10 unit serta pakaian Kerja Lapangan untuk 5 kelompok KBLK			1	302.703.110			105.297.800,00			0,00	#DIV/0!	0%	0	302.703.110												BPBD	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana			1	115.480.500						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-												BPBD	
19	1	05	03	2.04	02	Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana Provinsi dan Nasional			2500	115.480.500							#DIV/0!	#DIV/0!	0	115.480.500											BPBD		

NO	KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS SOSIAL					6.182.161.289		2.928.932.868						9.111.094.157		88,86%	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran			95%	2.886.642.754	100%	463.587.960			-	0,00%		3.350.230.714			
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()			100%	20.942.050	100%	20.250.000			-	0,00%		41.192.050			
1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan perubahan Renja	3 Dokumen	20.942.050			20.250.000,00			0,00	0,00%		41.192.050				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.264.525.928		-			-	#DIV/0!		2.264.525.928			
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia		12 bulan		2.264.525.928						#DIV/0!		2.264.525.928			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					215.350.618		114.940.500			-	0,00%		330.291.118			
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruang Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli		12 jenis		1.760.000		1.599.000,00			0,00	0,00%		3.359.000			
4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah ipad terbeli		1 buah		18.290.000						#DIV/0!		18.290.000			
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli		41 jenis		8.926.000		1.599.000,00			0,00	0,00%		10.525.000			
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas		5 jenis, 12 bulan		8.147.930		4.397.500,00			0,00	0,00%		12.545.430			
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur		12 bulan		178.226.688		107.345.000,00			0,00	0,00%		285.571.688			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31.501.581		37.406.000			-	0,00%		68.907.581			
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko, dan benda pos lainnya tersedia		550 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya		2.255.000		2.006.000,00			0,00	0,00%		4.261.000			
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar		7 rek. 12 bulan		29.246.581		35.400.000,00			0,00	0,00%		64.646.581			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95%	354.322.577	100%	290.991.460	95%		-	0,00%		645.314.037			
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara		5 unit kendaraa n roda empat dan 11 unit kendaraa n roda dua		178.977.717		114.950.860,00			0,00	0,00%		293.928.577			
11		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan		8.222.500		10.310.000,00			0,00	0,00%		18.532.500			
12		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor		12 bulan, 4 gedung		167.122.360		165.730.600,00			0,00	0,00%		332.852.960			

NO	KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.295.518.535		2.465.344.908			-	0,00%		5.760.863.443				
II		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial			40%	549.285.550	40%	490.249.700	40%		-	0,00%		1.039.535.250			
			Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian			87%		87%		87%				-				
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota					549.285.550		490.249.700			-	0,00%		1.039.535.250			
13		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)		130 Orang		323.107.300		230.557.700,00			0,00	0,00%		553.665.000			
14		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)		3 Orang		37.614.750		29.645.500,00			0,00	0,00%		67.260.250			
15		Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina		17 LKS		188.563.500		230.046.500,00			0,00	0,00%		230.046.500			
		Peningkatan kemampuan Sumber Daya Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan LK3 yang dilakukan		-		-						#DIV/0!		-			
III		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya			20%	477.952.100	20%	524.377.660	20%		-	0,00%		418.610.000			
			Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan			750 KK		750 KK		750 KK								
			Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial			70%		70%		70%								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					462.932.900		470.157.660			-	0,00%		330.449.910			
16		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta yang dilatih		50 orang		118.816.949		117.067.750,00			0,00	0,00%		-			
			Jumlah penyandang disabilitas yang dibina dan diberi bantuan		200 Orang													
17		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat	Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanan tambahan		50 Orang		184.108.300		99.644.000,00			0,00			99.644.000			
18		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar		12 bulan		123.092.751		122.284.000,00			0,00			99.644.000			
			Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit		5 orang				122.284.000,00			0,00						
19		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar		12 bulan		36.914.900		131.161.910,00			0,00			131.161.910			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					15.019.200		54.220.000			-			54.220.000			

NO	KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12
20		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial			12 bulan	15.019.200		54.220.000,00		0,00				54.220.000			
IV		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.894.401.409		894.386.120		-				894.386.120			
		Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar					6.289.500		69.948.500		-				69.948.500			
21		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar			12 bulan	6.289.500		69.948.500,00		0,00				69.948.500			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					1.888.111.909		824.437.620		-				824.437.620			
22		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah verifikasi data			1 kali/ tahun	290.570.482		529.250.000,00		0,00				529.250.000			
23		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengurus KUBE ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiannya			825 orang 100 orang / 1 kegiatan 50 Orang	1.171.217.896								99.644.000			
24		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT			1419 KK 889 KK	426.323.531		295.187.620,00		0,00				99.644.000			
V		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial				80%	273.247.942	80%	345.747.110	80%	-			345.747.110			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					81.880.200		188.694.500		-				188.694.500			
25		Penyediaan Makanan	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan			12 bulan	55.485.600		76.850.000,00		0,00				76.850.000			
26		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan			12 bulan	26.394.600		111.844.500,00		0,00				111.844.500			
		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota					191.367.742		157.052.610		-				157.052.610			
27		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana			12 bulan	191.367.742		157.052.610,00		0,00				157.052.610			
VI		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.631.534		210.584.318		-				210.584.318			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota					100.631.534		210.584.318		-				210.584.318			
28		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan pemeliharaan TMP			12 bulan	100.631.534		210.584.318,00		0,00				210.584.318			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capain Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7 x 100%	10=6+8	11=10/5 x 100%	12									
							8.790.658.755		5.692.482.060						60.575.435					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.745.221.191		3.137.992.150						33.639.435	1%		33.639.435		
	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				4.503.178.811		409.874.190						3.869.376	1%		3.869.376		DP3APPKB
	2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah				90%		21.866.000						0	0%		0		DP3APPKB
	2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun			2 Dokumen			21.866.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah				100%		3.943.539.705						0	#DIV/0!		0		DP3APPKB
	2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayar			33 Orang			3.943.539.705									0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran				100%		184.403.991						0	0%		0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.			9 Jenis			1.304.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli			5 Unit			31.193.500									0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang terbeli			22 Jenis			9.316.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			7 Jenis			10.294.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah snack tamu tersedia			108 Kotak			864.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia			12 Bulan 205 Porsi			131.432.491						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran				100%		35.704.399						3.869.376	8%		3.869.376		DP3APPKB
	2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli			122 Buah			1.340.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar			36 Rekening			29.114.399						3.869.376,00			3.869.376		DP3APPKB
	2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki			15 Jenis			5.250.000						0,00			0		DP3APPKB
	2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				80%		317.664.716						0	0%		0		DP3APPKB
	2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan R4			1 Unit			39.955.469						0,00			0		DP3APPKB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capain Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7 x 100%	10=6+8	11=10/5 x 100%	12											
							8.790.658.755		5.692.482.060			60.575.435			60.575.435							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.745.221.191		3.137.992.150			33.639.435	1%		33.639.435							
	2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan suku cadang, service BBM serta pajak yang dibayarkan		34 KendaraanR 2 6 Kendaraan		210.417.601		233.018.170,00		0,00				0			DP3APPKB
	2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli. Jumlah Gedung yang terpelihara Jumlah Retribusi terbayar		21 Jenis 1 Kantor 12 Bulan		67.291.646		50.838.270,00		0,00				0			DP3APPKB
	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1. Pratama, 2. Madya, 3.Utama, 4. Mentor)		Utama		316.288.634		563.778.200		18.050.800		3%		18.050.800			DP3APPKB
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PUG Aktif		85%		50.857.000		92.695.000		1.375.500		1%		1.375.500			DP3APPKB
	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pendampingan PPRG, Pokja PUG. Penilaian APE		28 SKPD 1 Monev		50.857.000		92.695.000,00		1.375.500,00				1.375.500			DP3APPKB
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan aktif di organisasi perempuan		0,15		265.431.634		471.083.200		16.675.300		4%		16.675.300			DP3APPKB
	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi		2 Organisasi		142.913.784		235.541.600,00		8.337.650,00				8.337.650			DP3APPKB
	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan		95 orang		122.517.850		235.541.600,00		8.337.650,00				8.337.650			DP3APPKB
	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif		1		139.124.304		198.714.420		0		0%		0			DP3APPKB
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Tangani		98%		31.528.500		50.600.000		0		0%		0			DP3APPKB
	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang Sosialisasi pencegahan KIP		3 Kali 2 Media KIE		31.528.500		50.600.000,00		0,00				0			DP3APPKB
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani		100% 100%		107.595.804		148.114.420		0		0%		0			DP3APPKB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capain Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7 x 100%	10=6+8	11=10/5 x 100%	12									
							8.790.658.755		5.692.482.060			60.575.435			60.575.435					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.745.221.191		3.137.992.150			33.639.435	1%		33.639.435					
	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan. 2. Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban pasca kekerasan. 3. Jumlah Anggota Dasawisma yang Memperoleh Pendampingan tentang KIP (Perubahan)		225 Orang	50.873.304	43.319.420,00			0,00						DP3APPKB
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan Pendampingan untuk Perempuan Korban Kekerasan		21 Kasus	56.722.500	104.795.000,00			0,00						DP3APPKB
	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga		74,35	1.164.708.415	1.303.559.750			5.138.259	0%			5.138.259		DP3APPKB
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga		0,053	1.164.708.415	1.303.559.750			5.138.259	0%			5.138.259		DP3APPKB
	2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang di bina		720 Keluarga	372.906.166	741.679.650,00			0,00				0		DP3APPKB
	2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif		3 Kecamatan	791.802.249	561.880.100,00			5.138.259,00				5.138.259		DP3APPKB
	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)		Utama	14.325.000	17.340.000			0	0%			0		DP3APPKB
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PUG Aktif		75%	14.325.000	17.340.000			0	0%			0		DP3APPKB
	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Update Data Gender dan Anak		11 Jenis	14.325.000	17.340.000,00			0,00				0		DP3APPKB
	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak		65%Madya	377.101.577	317.788.590			3.646.250	1%			3.646.250		DP3APPKB
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		65,00%	261.396.569	265.075.170			3.646.250	1%			3.646.250		DP3APPKB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capain Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7 x 100%	10=6+8	11=10/5 x 100%	12									
							8.790.658.755		5.692.482.060		60.575.435				60.575.435					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.745.221.191		3.137.992.150		33.639.435		1%		33.639.435					
	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Bermain Anak. Jumlah Fasilitas Sekolah Ramah Anak Jumlah Kelurahan Ramah Anak Jumlah Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. Jumlah Peserta Pelatihan Dapat		1 Buah 16 Sekolah 13 Kelurahan 7 Puskesmas		153.286.253 124.022.170,00 3.646.250,00								DP3APPKB	
	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak aktif		4 Forum		108.110.316 141.053.000,00			0,00			0			DP3APPKB
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani		100%100%		115.705.008 52.713.420			0		0%		0		DP3APPKB
	2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan. Penanganan dan pendampingan untuk perempuan dan anak korban pasca kekerasan Jumlah Sekolah yang Memperoleh Pendampingantentang Kasus Anak		20 Sekolah		115.705.008 52.713.420,00			0,00			0			DP3APPKB
	2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus penanganan dan pendampingan korban saat dan pasca kekerasan. Jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi pencegahan KTP/A		0 Kasus 0 orang		-						0			DP3APPKB
	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak		70.72 Rasio100		230.494.450 326.937.000			2.934.750		1%		2.934.750		DP3APPKB
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani		100%50%		65.710.950 96.168.000			2.096.250		2%		2.096.250		DP3APPKB
	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.		145 Orang		38.816.950 33.818.000,00			2.096.250,00			2.096.250			DP3APPKB

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 8/7 X 100%		11 = 10/5 X 100%		12	13
Belanja						33.284.163.015		32.205.060.130		1.473.541.611				1.473.541.611			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					16.304.357.748		9.848.677.240		500.781.075				500.781.075				
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Renja DPA Pergeseran DPA Perubahan				50.001.398		31.851.250		-				-				
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra & Renja Jumlah Dokumen dan Sinkronisasi			2 Dokumen	50.001.398		31.851.250,00		0,00								
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan				11.152.587.102		18.400.000		-				-				
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan			130 orang	11.142.867.102		2.200.000,00		0,00								
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan			12 buah	9.720.000		16.200.000,00		0,00								
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pengamanan barang milik daerah				223.011.891		16.200.000		0				0				
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	pengamanan barang milik daerah			12 bulan	223.011.891		16.200.000,00		0,00								
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai				144.927.000		16.200.000		0				0				
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan			0	144.927.000		16.200.000,00		0,00								
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan			0	-												karena pandemi Covid 19 sub
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya				379.509.268		245.782.500		0				0				
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik			12 jenis	3.075.800		16.200.000,00		0,00								
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor			5 paket	127.790.000												
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga			1 set	19.340.000												
		Pengadaann Dispenser			1 paket													
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat-alat logistik			29 jenis	14.296.100		10.234.500,00		0,00								
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan			12 jenis	7.488.350		6.703.000,00		0,00								
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli			12 bulan	2.009.200		3.251.000,00		0,00								
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah			12 bulan	205.509.818		209.394.000,00		0,00								

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 8/11 X 100%		11=10/5X100%	12	13		
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya				208.285.700		1.749.550.000		0				0					
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2			2 unit	46.106.000		1.535.000.000,00		0,00									
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah			1 paket	162.179.700		214.550.000,00		0,00									
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya				90.930.659		151.485.000		0				0					
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000, materai 3000 dan cek bermaterai						1.535.000,00		0,00									Perubahan target indikator
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik dan telepon						149.950.000,00		0,00									
2.11.01.2.08.02					11 rekening	89.460.659													
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya				4.055.104.730		7.619.208.490		500.781.075				0					
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan			12 bulan	3.853.053.260		7.167.194.950,00		500.781.075,00									Anggaran pemeliharaan dianggarkan perunit
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			12 bulan	8.609.700		28.340.000,00		0,00									
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan			1 paket	193.441.770		423.673.540,00		0,00									
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara			2 gedung			423.673.540,00		0,00									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					801.864.373		219.578.650		0				0					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi				640.393.857		84 219.578.650		0				0					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen studi kajian daya tampung beban pencemaran batang agam			1 dokumen	222.397.099		88.348.650,00		0,00									
		Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat			12 titik pantau														
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina			2 RW	204.746.146		65.615.000,00		0,00									
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji labor			30 kali	213.250.612		65.615.000,00		0,00									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 8		11=10/5X100%		12	13
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi					50.65	0			0			0				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DIKPLHD			2 buku	161.470.516												
		Jumlah media informasi			5 media													
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						5.951.248.160			162.106.296				0				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dipelihara					100%	5.951.248.160		162.106.296				0				
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Profil keaneekaragaman hayati			1 dokumen	42.662.000		97.990.000,00		0,00								
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	taman kota yang dipelihara			5,3 Ha	2.542.951.611		5.853.258.160,00		162.106.296,00								
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							51.798.400		0				0				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi					50.65	51.798.400		0				0				
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPSLB3 dan izin PPLH lainnya			34 usaha/ke	36.134.552		39.903.500,00		0,00								
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang diamati			25 usaha	24.382.500		11.894.900,00		0,00								
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan			19 kasus	6.945.550												
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi					84	103.207.000		0				0				
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stakeholders yang berperanserta					80%	103.207.000		0				0				
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah event-event yang diikuti			2 event	180.161.840		103.207.000,00		0,00								
		Jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP			7 sekolah													
		Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpatru			24 orang													

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 8/7 X 100%		11 = 10/5 X 100%		12	13	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									0				0					
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan timbulan sampah						24%		0				0					
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi																	Belanja perjalanan dinas untuk pengambilan penghargaan di Jakarta tidak terlaksana
					90 orang					21.513.400									
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									17.130.050				0					
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi						50.65		17.130.050				0					
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup			3 pengaduan					17.130.050,00				0,00					
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									16.013.420.630				810.654.240					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase luas wilayah yang terlayani						74%		16.013.420.630				810.654.240					
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah kompos yang dihasilkan			150,253 ton/tahun (januari-november)					776.186.049				946.452.020,00					
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah			1 Dokumen					9.613.581.610,00				774.845.748,00					
		Jumlah kali penekan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah			20 kali														karena covid razia
		Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional			42.264 ton/tahun (1 januari-15 november)														
		Jumlah TPSS dan TPST			68 unit														
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta peran serta dunia usaha			30 orang					137.200.000,00				0,00					
		Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja			6 orang														

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 8		11=10/5X100%		12	13	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan			29 jenis			5.316.187.000,00		0,00									
		pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara			12 bulan														
		Dumptruck			2 unit														
		mobil pickup			8 unit														
		perencanaan pembanguna PDU			1 Paket														
	Jumlah					33.284.163.015		32.205.060.130		1.473.541.611				500.781.075					

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13	
	2	12	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.252.015.865								5.252.015.865				DISDUKCAPIL		
	2	12	02	0,00	00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan			595.830.457								595.830.457				DISDUKCAPIL		
	2	12	02	2,01	00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			569.596.957								569.596.957				DISDUKCAPIL		
	2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan		5642	187.603.700								187.603.700				DISDUKCAPIL		
							Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan		13862										0					
							Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan		13279										0					
							Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat		12237										0					
							Jumlah perekaman data biometrik		2089										0					
							Jumlah surat keterangan pindah yang diterbitkan		4724										0					
	2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan		42770	381.993.257								381.993.257				DISDUKCAPIL		
	2	12	02	2,02	00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			26.233.500								26.233.500				DISDUKCAPIL		
	2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk yang disediakan		5	26.233.500								26.233.500				DISDUKCAPIL		
	2	12	03	0,00	00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan		84	241.167.795								241.167.795				DISDUKCAPIL		
	2	12	03	2,01	00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		0,84	241.167.795								241.167.795				DISDUKCAPIL		
	2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan		3400	68.185.753								68.185.753				DISDUKCAPIL		
							Jumlah akta kematian yang diterbitkan		939										0					
							Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan		75										0					
							Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun		1694										0					

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2					3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13	
	2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan			4414	162.727.542							K	Rp							
	2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil disediakan			3	10.254.500															
	2	12	04	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan			0,9	129.697.140															
	2	12	04	2,01	00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan			0,9	27.227.450															
	2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia			12	11.686.700															
	2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang terintegrasi aplikasi DWH			8	15.540.750															
	2	12	04	2,03	00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan			0,9	102.469.690															
	2	12	04	2,03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi pendukung SIAK yang tersedia			2	102.469.690															
							Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli			26																
							Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dipelihara			8																
							Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koor dinasi			16																
	2	12	04	2,04	00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan			0,9	-															
	2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek terkait PIK dan pendayagunaan data			0	-															
	2	12	05	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan			0,9	42.898.300															

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	12	05	2,01	00	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang tersedia		0,9	42.898.300								42.898.300			DISDUKCAPIL		
	2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak		60	17.895.500								17.895.500			DISDUKCAPIL		
	2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil data perkembangan penduduk yang dicetak		60	25.002.800								25.002.800			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	4.242.422.173								4.242.422.173			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia		1	14.018.500								14.018.500			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	11.997.250	16.557.000,00		0,00					11.997.250			DISDUKCAPIL		
									1	2.021.250								2.021.250					
									0									0					
	2	12	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan		1	3.302.581.043								3.302.581.043			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan		1	3.302.581.043								3.302.581.043			DISDUKCAPIL		
									1	26.681.150								26.681.150					
									445	26.681.150								26.681.150					
	2	12	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan		1	374.641.710								374.641.710			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli		164	2.121.000	2.015.000,00		0,00					2.121.000			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli		8	207.857.000	27.447.000,00		0,00					207.857.000			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang dibayarkan		39	24.005.250	14.907.100,00		0,00					24.005.250			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,06	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kunjungan tamu yang difasilitasi		4	12.898.150	14.300.000,00		0,00					12.898.150			DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,06	09	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli		1	3.832.500	2.800.000,00		0,00					3.832.500			DISDUKCAPIL		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		3	123.927.810	77.205.000,00		0,00					123.927.810					
									100	-								0					
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0									0					

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
	2	12	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan		1	274.809.481							274.809.481					DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli		211	2.392.000		1.640.000,00		0,00			2.392.000					DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayarkan		12	75.578.575		77.080.000,00		5.065.728,00			80.644.303					DISDUKCAPIL		
							Jumlah rekening internet yang dibayarkan		12	-							0							
							Jumlah rekening listrik yang dibayarkan		24	-							0							
							Jumlah rekening telepon yang dibayarkan		24	-							0							
									3	196.838.906						196.838.906								
									7							0								
	2	12	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		1	249.690.289						249.690.289						DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara		11	78.583.441		39.190.000,00		0,00			78.583.441					DISDUKCAPIL		
							Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara		2	-							0							
	2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara		1	22.040.500		180.850.000,00		0,00			22.040.500					DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		1	1.560.000						1.560.000						DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki		3	8.760.350		7.500.000,00		0,00			8.760.350					DISDUKCAPIL		
	2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa petugas kebersihan		12	138.745.998		100.360.000,00		0,00			138.745.998							
							Jumlah iuran retribusi sampah yang dibayarkan		12	-							0							
							Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan		1	-							0							
							Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli		27	-							0						DISDUKCAPIL	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022 (s.d TWI)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+ 8		11=10/5 x100%		12	13
							URUSAN PERHUBUNGAN				12.129.725.555		3.513.084.880		173.400.909				12.303.126.464					
1	2	15	01	0,00	00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip			BB	9.426.615.223		639.836.100		5.065.728		BB	1%	BB	9.431.680.951			DISHUB	
	2	15	01	2,01	00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				18.323.850		16.557.000		-			0%		18.323.850			DISHUB	
	2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan			4 Dokur	18.323.850		4 Dokumen	16.557.000,00		-				18.323.850			DISHUB	
2	2	15	01	2,02	00	Administrasi Keuangan dan Perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				6.076.779.682		-		-	100%	#DIV/0!			6.076.779.682			DISHUB	
	2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan	Jumlah PNS yang dibayar gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibayarkan			64 PNS	6.076.779.682		64 PNS/12 bulan							6.076.779.682			DISHUB	
3	2	15	01	2,03	00	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				298.151.500		80.000.000		-			0%		298.151.500			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia			1 Paket	86.149.000		1 Paket	80.000.000,00		-				86.149.000			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Pengamanan barang milik daerah (UPTD PKB)	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia			1 paket	40.774.200		1 paket							40.774.200			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Pengamanan barang milik daerah (UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia			1 Paket	171.228.300		1 Paket							171.228.300			DISHUB	
4	2	15	01	2,03	00	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				298.821.334		136.659.100		-			0%		298.821.334			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia			6 item	1.928.000		6 item	27.447.000,00		-				1.928.000			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia			6 jenis	5.025.000		6 jenis							5.025.000			DISHUB	
	2	15	01	2,03	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PKB)	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia			7 item	1.220.000		7 item							1.220.000			DISHUB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TWI)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
5	2	15	01	2,06	00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			1 buah	62.295.000	1 buah Laptop, 2 buah Printer dan 1 buah mesin penghancur kertas,1 buah infokus						62.295.000			DISHUB		
	2	15	01	2,06	01	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jenis ATK Terbeli			54 Item	19.365.750	54 Item	14.907.100,00		-			19.365.750			DISHUB		
	2	15	01	2,06	01	Penyediaan bahan logistik Kantor (UPTD PKB)	Jenis ATK Terbeli			32 Item	14.582.500	32 Item						14.582.500			DISHUB		
	2	15	01	2,06	01	Penyediaan bahan logistik Kantor(UPTD Terminal dan Parkir)	Jenis ATK Terbeli			47 jenis	13.580.000	47 jenis						13.580.000			DISHUB		
	2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia			8 itemba	12.606.800	8 itembarang cetakan dan Ls fotocopy dan jilid	14.300.000,00		-			12.606.800			DISHUB		
	2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PKB)	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia			1 jenis	2.776.250	1 jenis						2.776.250			DISHUB		
	2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Terminal dan parkir)	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia			1 Ls dan	41.068.400	1 Ls dan 3 jenis cetakan						41.068.400			DISHUB		
	2	15	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Malan Minum tamu yang tersedia			81 Pors	1.059.200	180 porsi	2.800.000,00		-			1.059.200			DISHUB		
	2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti dan Makan Minum tamu dan lembur yang tersedia			12 bulan	114.363.284	12 bulan dan 300 porsi	77.205.000,00		-			114.363.284			DISHUB		
	2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD PKB)	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti			12 bulan	8.951.150	12 bulan						8.951.150			DISHUB		
6	2	15	01	2,08	00	Penyediaan jasa penunjang umum Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.720.000	5.065.728			6%	220.242.220			DISHUB		
	2	15	01	2,08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah materai prangko, dan Cek teraan yang dibeli			156 mat	1.500.000	156 materai 2000 dan 4 Isjasa pengiriman	1.640.000,00		-			1.500.000			DISHUB		
	2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbayar			13 reket	67.285.471	13 rekening	77.080.000,00		5.065.728			72.351.199			DISHUB		
	2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik (UPTD Terminal dan parkir)	Jumlah Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbayar			1 Ls dan	146.391.021	1 Ls dan 5 rekening						146.391.021			DISHUB		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TWI)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik (UPTD PKB)	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar					1 Rekening											DISHUB		
7	2	15	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang umum pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				2.519.362.365		327.900.000			-			2.519.362.365			0%		DISHUB	
	2	15	01	2,09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 buah	22.268.500			1 buah kendaraan roda 4/12 bulan	39.190.000,00			-			22.268.500			DISHUB	
	2	15	01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			4 bh ket	90.689.975			4 bh kendaraan roda 4 dan 12 buah kendaraan roda 2/12 bulan	180.850.000,00			-			90.689.975			DISHUB	
	2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, HT dan peralatan lainnya yang dipelihara			LS/12 b	9.530.000			LS/12 bulan	7.500.000,00			-			9.530.000			DISHUB	
	2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Tenaha CS dan retribusi Sampah			1 Paket	113.838.500			1 Paket tenaga kebersihan, 1 paket gedung, LS retribusi persampahan	100.360.000,00			-			113.838.500			DISHUB	
	2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD PKB)	BBM, Jasa Kebersihan dan Lembur ram cek			1 Paket	50.602.900			1 Paket tenaga kebersihan, 1 paket gedung, dan LS lemur khusus							50.602.900			DISHUB	
	2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD Terminal dan parkir)	BBM, Rehab Gedung Parkir roda 4, Jasa Kebersihan, Upah dan Lembur PNS dan Non PNS, dan pengadaan peralatan lainnya			32 orang	2.232.432.490			32 orang PNS dan Non PNS, LS Pemeliharaan dan 1 paket jasa kebersihan, pengadaan peralatan kantor dan rehab gedung parkir							2.232.432.490			DISHUB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TWI)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	2	15	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2.703.110.332			2.873.248.780	168.335.181		6%		2.871.445.513			DISHUB		
8	2	15	02	2,02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang		712.309.955			781.639.200	-		0%		712.309.955			DISHUB		
	2	15	02	2,02	02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang diadakan		2 Paket 519.913.005	2 PaketRubber speed hump dan 1 paket cermin tikung	620.000.000,00		-				519.913.005			DISHUB		
	2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Rambu- rambu yang dipelihara		9 bulan 192.396.950	12 Bulan	161.639.200,00		-				192.396.950			DISHUB		
9						Persetujuan hasil analisa dampak lingkungan lalulintas (andaallalin) untuk jalan kab/kota	Persentase pengawasan rekayasa lalulintas						-		#DIV/0!		13.456.250			DISHUB		
	2	15	02	2,07	04	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan		30 reom 13.456.250	75 Rekomendasi							13.456.250			DISHUB		
10	2	15	02	2,06	00	Pelaksanaan dan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase pengawasan rekayasa lalulintas		1.911.922.327			1.880.793.580	168.335.181	100%	9%		2.080.257.508			DISHUB		
	2	15	02	2,06	03	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Jumlah Tenaga Non PNS yang diayar upahnya dan Kembur PNS dan PNS yang dibayarkan lemburnya		30 Non 1.889.744.714	30 Non PNS dan 20 orang PNS/12 bulan	1.873.933.580,00		168.335.181				2.058.079.895			DISHUB		
	2	15	02	2,06	05	Forum lalulintas dan angkutan jalan Kab/Kota	Jumlah Pertemuan rumusan forum LLAJ		2 rumus 22.177.613	3 Rumusam	6.860.000,00		-				22.177.613			DISHUB		
11	2	15	02	2,07	00	Audit dan inspeksi keselamatan jalan	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan		2.751.000			50.061.000	-		0%		2.751.000			DISHUB		
	2	15	02	2,07	04	Pelaksanaan inspeksi , audit dan pemantauan Pemenuhi persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kab/kota	Jumlah Pengemudi angkutan umum teladan yang terpilih		2.751.000	30 orang	50.061.000,00		-				2.751.000			DISHUB		
12	2	15	02	2,11	00	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan		-			160.755.000	-		0%		-			DISHUB		
	2	15	02	2,11	02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sopir/juru mudi yang diberi sosialisasi		-	30 orang	50.163.000,00		-				-			DISHUB		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TWI)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	2	15	02	2,14	00																		
13	2	15	02	2,14	00	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				56.183.300			-	-	0%	#DIV/0!		56.183.300			DISHUB	
	2	15	02	2,14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Informasi jalur trayek angkutan yang diadakan			1078 pa	56.183.300			1078 papan trayek dan 3 rumusan					56.183.300			DISHUB	
14	2	15	02	2,05	00	Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				6.487.500			-	-	100%	#DIV/0!		6.487.500			DISHUB	
	2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara			1 gedung	6.487.500			1 gedung					6.487.500			DISHUB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12				
	2	16	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.800.306.171	6.585.379.548	22.897.869	0%	6.654.879.989		DISKOMINFO
	2	16	02	0,00	00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		1.495.258.051	2.666.346.210	2.780.000	0%	1.498.038.051		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Media Informasi Publik	90%	1.495.258.051	2.666.346.210	2.780.000	0%	1.498.038.051		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan tindak lanjut Pengaduan Publik	2 laporan	690.000.000	2 32.625.315	600.881.020,00	0,00	32.625.315		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Cetak, Elektronik dan media sosial yang dikerjasamakan	7 media	9.850.000.000	7 media/ 10 b 750.695.150	1.579.466.340,00	0,00	750.695.150		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diPublikasikan melalui media elektronik/ online	940 informasi	1.650.000.000	540 informasi 399.867.036	228.655.850,00	0,00	399.867.036		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan Layanan Informasi dan Dokumen Publik	6 Laporan/ 1 DIP	300.000.000	1 23.261.050	22.357.000,00	0,00	23.261.050		DISKOMINFO
	2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Publikasi berita melalui media non elektronik	4.400	2.660.000.000	2100 288.809.500	234.986.000,00	2.780.000,00	291.589.500		DISKOMINFO
	2	16	03	0,00	00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		2.309.147.774	3.789.703.388	3.281.000	0%	2.312.428.774		DISKOMINFO
	2	16	03	2,01	00	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan		1.793.416.264	2.679.351.720	0	0%	1.793.416.264		DISKOMINFO
	2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Akses Internet	125titik jaringan	15.800.000.000	112 titik/ 12 b 1.793.416.264	2.679.351.720,00	0,00	1.793.416.264		DISKOMINFO

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	1	2	3	4						5	6					7	8
	2	16	03	2,02	00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		515.731.510		1.110.351.668		3.281.000		519.012.510			
	2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang diawasi	3 dokumen	200.000.000	1 Dok/ 2 kali	58.875.439	183.827.000,00		3.281.000,00	62.156.439		
	2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	4 unit	1.858.000.000	3 unit /	36.851.804	285.036.670,00		0,00	36.851.804		
	2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	19 Aplikasi	2.805.000.000	4 aplikasi	398.287.117	615.647.998,00		0,00	398.287.117		
	2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi	6 Dokumen	455.000.000	1 laporan	21.717.150	25.840.000,00		0,00	21.717.150		
	2	16	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.881.450.370		2.995.900.346		129.329.950		16.836.869	13%	2.844.413.164	18%
	2	16	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.030.000		17.578.350		18.429.950		0	0%	17.578.350	76%
	2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	12 dokumen	23.030.000	2	17.578.350	18.429.950,00		0,00	17.578.350		
	2	16	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.060.328.120		2.654.513.127		0		0		2.654.513.127	19%
	2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji dan tunjangan	14 bulan	14.060.328.120	14 bulan	2.654.513.127	14 bulan			2.654.513.127		
	2	16	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		876.916.000		168.324.051							
	2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	8 jenis	3.541.000	7 jenis	596.000	7 jenis	701.000,00		0,00	596.000	
	2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 item	34.725.000	31 item	6.493.000	31 item	6.351.000,00		0,00	6.493.000	
	2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	8 jenis	26.100.000	8 jenis	5.027.900	16672 lbs	2.709.000,00		0,00	5.027.900	
	2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan makan minum	12 bulan	812.550.000	12 bulan	156.207.151	12 bulan	97.160.000,00		30.482.250,00	186.689.401	
	2	16	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.815.000		18.510.517		19.200.000		2.030.500	11%	20.541.017	21%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	11=10/5 x100%	12								
1	2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan buku cek	120 materai 10.000	6.040.000	109 materai	1.090.000	109 materai 10.000	1.200.000,00	0,00			1.090.000			DISKOMINFO
	2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening listrik dan telepon terbayar	12 bulan	90.775.000	12 bulan	17.420.517	12 bulan	18.000.000,00	2.030.500,00			19.451.017			DISKOMINFO
	2	16	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			824.361.250		136.974.301		91.700.000	14.806.369	16%		151.780.670	18%		DISKOMINFO
	2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan roda 4 dan 2	5 unit dan 12 unit	541.761.250	5 unit roda 4	83.467.250	5 unit roda 4 dan 1 unit roda 2	39.190.000,00	4.104.850,00			87.572.100			DISKOMINFO
	2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja diperbaiki	12 bulan	40.350.000	12 bulan	5.340.000	12 bulan	7.510.000,00	1.504.000,00			6.844.000			DISKOMINFO
	2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan Kantor		242.250.000	12 bulan	48.167.051	12 bulan	45.000.000,00	9.197.519,00			57.364.570			DISKOMINFO
	2	20	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			55.112.000		14.376.750		55.780.600	0	0%		14.376.750	26%		DISKOMINFO
	2	20	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			55.112.000		14.376.750		55.780.600	0	0%		14.376.750	26%		DISKOMINFO
	2	20	02	2,01	00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			55.112.000		14.376.750		55.780.600	0	0%		14.376.750	26%		DISKOMINFO
	2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Data Statistik Sektoral - Jenis Dokumen yang disinkronkan	2 BDA, 2 Dokumen Data	55.112.000	1 buku, 1 dok	14.376.750		55.780.600,00	0,00			14.376.750			DISKOMINFO
	2	21	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			525.000.000		39.094.815		50.640.000	0	0%		39.094.815	7%		DISKOMINFO
	2	21	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			525.000.000		39.094.815		50.640.000	0	0%		39.094.815	7%		DISKOMINFO
	2	21	02	2,01	00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			525.000.000		39.094.815		50.640.000	-	0%		39.094.815	7%		DISKOMINFO
	2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang dan pelatihan Persandian yang diikuti	3 orang	250.000.000	0	8.217.500		50.640.000,00	0,00			8.217.500			DISKOMINFO
	2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi yang diamankan	2000 dokumen	275.000.000	504 dokumen	30.877.315						30.877.315			DISKOMINFO

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100 %		10=6+8				11 = 10/5 x 100%
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2	17				DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN																DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN		
	2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD			5.634.317.322	A	721.566.554		19.480.479		2,70		5.528.056.513		0				
	2	17	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah		Rp	-	0	15.230.000	0	-			0	-	0	0				
	2	17	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu			3 lap	-	3 lap	15.230.000		-	0	3 lap	-	3 lap	0				
	2	17	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan			4.920.475.261	100	-		-		100%		4.920.475.261		0				
	2	17	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai			53 org		4.920.475.261						4.920.475.261						
	2	17	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		Rp	100	263.855.991	100	198.461.680	100	-	0,00	100	263.855.991	100	0				
	2	17	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor yang dibeli			10 jenis	8.057.300		7.499.700		-			8.057.300						
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan																	
	2	17	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran			10 tbg	6.095.000		6.000.000		-			6.095.000						
	2	17	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli			32 jenis	25.720.720		15.244.000		-			25.720.720						
	2	17	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak			10 jenis	54.160.545		35.639.990		-			54.160.545						
							Penggandaan			2 jenis			35.639.990		-									
	2	17	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Tamu			77 porsi	3.958.400		4.429.000		-			3.958.400						
							Minum Tamu			153 porsi														
	2	17	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum lembur			10 bln	165.864.026		94.009.000		-			165.864.026						
							makan dan minum rapat			10 bln														
							perjalanan dinas dalam dan luar daerah			10 bln														
	2	17	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		Rp	100	140.238.491	100	144.990.000	100	19.480.479			100	159.718.970	100	0			
	2	17	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000			150 bh	1.910.000		1.750.000		-			1.910.000						
							Jumlah Materai 3000			218 bh														
	2	17	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air			2 rek	123.911.091		134.640.000		19.480.479			143.391.570						

No	Kode					Usuran /Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100 %		10=6+8			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							Jumlah rekening internet			1rek													
							Jumlah rekening listrik			6 rek													
							Jumlah rekening telepon			3 rek													
	2	17	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			9 jenis	14.417.400		8.600.000		-				14.417.400				
	2	17	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			Rp 100	309.747.579	100	362.884.874	100	-	0%	100	184.006.291	100	0			
	2	17	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2			14 unit	145.850.991		184.373.074		-				145.850.991				
							Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4			7 unit													
	2	17	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4			3 unit	19.077.650		19.500.000		-				19.077.650				
	2	17	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli			22 jenis	144.818.938		159.011.800		-				19.077.650				
							Jasa kebersihan			2 org													
							Pemeliharaan Gedung kantor			10 bln													
							Retribusi kebersihan			10 bln													
	Koperasi										1.128.155.274		4.579.293.510		-	0%		1.128.155.274		0			
	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat				12.756.500	16	45.368.000		-	0%		12.756.500		0			
	2	17	3	2	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan			Rp 23	12.756.500	23	45.368.000	23	-	0%	23	12.756.500	23	0			
	2	17	3	2,01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yg dibuatkan LHP			4 kop	12.756.500		45.368.000		-				12.756.500				
							jumlah koperasi yg dinilai kesehatannya			44 kop													
							jumlah pengurus koperasi yg diberikan Bimtek SPI koperasi			0													
							jumlah satgas pengawasan yg mengikuti bimtek			3 org													
	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan koperasi sehat				383.234.550	16	195.146.000		-	0%		383.234.550		0			
	2	17	5	2	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengurus koperasi yang terlatih			Rp 50	383.234.550	50	195.146.000	50	-	0%	50	383.234.550	50	0			
	2	17	5	2,01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Akuntansi Koperasi			Rp -	383.234.550		195.146.000		-				383.234.550				
							Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi			0													

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100 %		10=6+8				11 = 10/5 x 100%
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam			0														
	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat			1.430.000	16	182.236.000			-		0%		1.430.000		0			
	2	17	6	2	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya			Rp 60	1.430.000	60	182.236.000	60		-		0%	60	1.430.000	60	0		
	2	17	6	2,01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas			Rp -	1.430.000		182.236.000			-			1.430.000					
							Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Syariah			0														
							Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah			0														
										0														
							Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi			0														
							Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal			0														
							Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengelolaan UEM-SP			0														
	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil			82.485.740	1,04	71.150.000			-		0%		82.485.740		0			
	2	17	7	2	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Volume Usahanya			Rp 5	82.485.740	5	71.150.000	5		-		0%	5	82.485.740	5	0		
	2	17	7	2,01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan			35 org	21.138.200									82.485.740				
							Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang			50 org														
	2	17	7	2,01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro			25 org	61.347.540		71.150.000			-								

No	Kode					Usuran /Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100 %			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang			100 org													
	2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil			648.248.484	1,04	4.085.393.510		-		0%		648.248.484		0			
	2	17	8	2	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas		Rp 10	648.248.484	10	4.085.393.510	10	-		0%	10	648.248.484	10	0			
	2	17	8	2,01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk			25 org	648.248.484	4.085.393.510		-				648.248.484					
							Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang			70 org													
							Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan			100 org													
							Jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis, manajemen bisnis, FGD, bimbingan teknis manajemen, sosialisasi sumber modal, sosialisasi etika bisnis			90 org													
	Perdagangan										26.200.850	525.206.000		-		0%		26.200.850		0			
	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset pedagang		Rp 5	26.200.850	5	37.665.000	5	-		0%	5	26.200.850	5	0			
	3	30	4	2	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tertib Niaga			10.426.000	70	6.953.000		-		0%		10.426.000		0			
	3	30	4	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Agen agen kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan			7 agen	10.426.000	6.953.000		-				10.426.000					
	3	30	4	2	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga			3.715.000	70	8.924.000		-		0%		3.715.000		0			
	3	30	4	2,02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Update harga barang kebutuhan pokok yang dilakukan			95 kali	3.715.000	8.924.000		-				3.715.000					
	3	30	4	2	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga			12.059.850	70%	21.788.000		-		0%		12.059.850		0			
	3	30	4	2,03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan			4 kali	12.059.850	21.788.000		-				12.059.850					
	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset pedagang			-	5	-		-				-		0			

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKKPD (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100 %		10=6+8				11 = 10/5 x 100%
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	3	30	5	2	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran					35									0			
	3	30	5	2,01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Even Promosi/ Pameran yang diikuti oleh Pelaku Usaha			Rp	-													
	3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pedagang					5	487.541.000											
	3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi pameran					35	487.541.000											
	3	30	7	2,01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			Rp	-		487.541.000											
	Pasar											7.859.882.385	9.330.850.279		81.008.453		1%		7.940.890.838		0			
	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah					7.859.882.385	16	9.330.850.279		81.008.453		1%		7.940.890.838		0		
	3	30	3	2	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI					5.563.236.277	5	7.082.169.935		73.932.693		1%		5.637.168.970		0		
						Penyediaan sarana distribusi perdagangan						80.422.500		5.863.228.500		65.727.000				146.149.500				
	3	30	3	2,01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gedung pasar atas				1 item	5.563.236.277		7.082.169.935		73.932.693				5.637.168.970				
							Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar				3 lokasi													
							Pengelolaan gedung pasar atas				10 bln													
	3	30	3	2	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar					2.296.646.108	5	2.248.680.344		7.075.760		0%		2.303.721.868		0		
	3	30	3	2,02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar			Rp	1	1.203.754.465		1.063.718.950		-				1.203.754.465				
							Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar				35org/bln													
							Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar				8670 dok													
	3	30	3	2,02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya				1714 hari	1.092.891.643		1.184.961.394		7.075.760				1.099.967.403				
							Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya				4807 org													

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi 2022 (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (s.d TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10=6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							Jumlah WC Umum yang dikelola			15 unit																
	UPTD									193.470.521		482.229.490			19.480.479			4%		212.012.400		0				
	3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								132.476.467		467.294.490			19.480.479		4%		151.018.346		0	
	3	30	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			86.651.269	100	152.392.690			-		0%		86.651.269		0					
	3	30	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			10 bln		531.500			7.499.700			-		531.500						
	3	30	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan			3 pkt		32.040.000								32.040.000						
	3	30	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor			32 jns		3.162.000			15.244.000			-		3.162.000						
	3	30	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak			9 jenis		7.122.950			35.639.990			-		7.122.950						
							Penggandaan			2 jns																
	3	30	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah			10 bln		43.794.819			94.009.000			-		43.794.819						
	3	30	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran				100	136.390.000			19.480.479			14%		19.670.479		0				
	3	30	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000			20 bh		190.000			1.750.000			-		190.000						
							Materai 6000			23 bh																
	3	30	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar			10 bln					134.640.000			19.480.479		19.480.479						
	3	30	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran				100	178.511.800			-			0%		44.696.598		0				
	3	30	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara			1 ls		938.600			19.500.000			-								
	3	30	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih			22 jenis		44.696.598			159.011.800			-		44.696.598						
							Jasa kebersihan			3 org																
							retribusi pengolahan sampah			10 bln																
	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								60.994.054		14.935.000			-		0%		60.994.054		0	
	3	30	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pemberian logo tera pada alat ukur					60.994.054	40%		14.935.000			-		0%		60.994.054		0		
	3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Operasional UPTD			10 bln		60.994.054			14.935.000			-		60.994.054						
	TOTAL							Rp	-			14.842.026.352			15.639.145.833			119.969.411			14.835.315.875		0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n- 2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2026 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	12	13						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan													DPMPSTP
			Program pelayanan penanaman modal	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik													
			Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik kabupaten/kota													-
			Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses			3 aplikasi 4	939453824		791.004.890,00		0,00				939.453.824	
			Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah dokumen aturan hukumperizinan jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan			2 dokumen	30922212		38.489.500,00		0,00				30.922.212	
			Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani			100 persen	13956093		89.320.000,00		0,00				13.956.093	
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik													-
			Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik daerah kabupaten/kota													-
			Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan			300 berkas	77944605								77.944.605	
			Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi													-
			Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi investasi													-
			Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan realisasi investasi													-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n- 2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2026 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	12	13						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah promosi investasi yang diikuti		1 event	152736500		65.065.000,00		0,00				152.736.500		
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	ICOR											-		
			Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	ICOR											-		
			Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pemantauan penanaman modal Jumlah pengawasan penanaman modal Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		6 kali	247774711								247.774.711		
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal		1 dokumen	57937084								57.937.084		
			Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB											-		
			Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Tingkah kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB											-		
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB					568.020.804,00		0,00				-		
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah IKM yang mengikuti konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk jumlah Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi packing		5 IKM	77711870		133.383.804,00		0,00				77.711.870		
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri		1 unit	416289019								416.289.019		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n- 2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2026 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	12	13						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah(KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu Jumlah peserta pelatihan kain			4 event	117945900		434.637.000,00		0,00				117.945.900		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat pengangguran terbuka												-		
		Kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	Tingkat pengangguran terbuka						56.410.800,00		0,00				-		
		Fasilitasi pengumpulan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data informasi informasi industri				0								-		
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka												-		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka												-		
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tingkat pengangguran terbuka												-		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tat boga			16 orang3	523792170		433.060.900,00		0,00				523.792.170		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka												-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n- 2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2026 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 8	12	13						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengangguran terbuka						35.459.500,00		0,00						
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja			12 laporan	37824750		35.459.500,00		0,00				37.824.750		
		Program Hubungan Industrial	Tingkat pengangguran terbuka												-		
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengangguran terbuka						26.904.784,00		0,00						
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistensi hubungan industrial yang dilaksanakan			10 perusah	35534703		11.661.824,00		0,00				35.534.703		
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani			1	22972249		15.242.960,00		0,00				22.972.249		
									2.734.121.266	000	000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2		3		5		6		7		8,00		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%		12	13	
2	23 00 0,00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				388.706.253				38.887.470		#DIV/0!						DPK		
2	23 02 0,00 00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan			338.117.183				38.887.470		#DIV/0!						DPK		
2	23 02 2,01 00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar nasional perpustakaan			233.308.110				38.887.470		#DIV/0!		256.243.470				DPK		
2	23 02 2,01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Akses point sistem otomatis perpustakaan		1 sistem	1.314.500		131.301.500,00		0,00				1.314.500				DPK		
			Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan		0	-														
			Jumlah buku digital layanan perpustakaan		0	-														
			Jumlah fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan		1 Tahun	-														
			Jumlah website layanan perpustakaan		1 sistem	-														
2	23 02 2,01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke perpustakaan dilingkungan Pemko Bukittinggi		75 kali	15.952.110												DPK		
2	23 02 2,01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung ke perpustakaan		3382 or	13.309.700		137.058.000,00		35.697.470,00				49.007.170				DPK		
2	23 02 2,01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah		75 ekse	202.731.800		10.676.500,00		3.190.000,00				205.921.800				DPK		
			Jumlah buku yang diadakan		2 paket	-														
			Jumlah Buku yang dirawat		81 ekse	-														
2	23 02 2,01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pemustaka		0	-		51.365.500,00		0,00				0				DPK		
			Laporan Data Stock Opname		0	-														
2	23 02 2,02 00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat		0	104.809.073				0		#DIV/0!	0,00	104.809.073				DPK		
2	23 02 2,02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kunjungan Pustaka Keliling Dalam Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi		215 kali	42.859.450		50.527.400,00		0,00				42.859.450				DPK		
2	23 02 2,02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemenang lomba bercerita bagi siswa SD		6 Peme	61.949.623		204.965.000,00		0,00				61.949.623				DPK		
			Pemenang lomba melukis bagi siswa SMP		6 Peme	-														
			Pemenang lomba menulis cerita rakyat		6 Peme	-														
			Telaksananya Mendengar dongeng bagi siswa/I,TK/PAUD		0	-														
2	23 02 2,02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta bimtek		0	-		45.132.750,00		0,00				0				DPK		
2	23 03 0,00 00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan		0	50.589.070				0		#DIV/0!	0,00					DPK		
2	23 03 2,01 00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat mengetahui tentang sejarah		0	50.589.070				0		#DIV/0!	0,00	0				DPK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			5			6			7			8,00		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			11=10/5 x100%	
2	23	03	2,01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dialih medikan														
2	23	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	9 bulan	1.255.456.566			0,00	35.104.990	#DIV/0!	0,00					DPK	
2	23	01	2,01	00	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		0	17.527.450			0	#DIV/0!	0,00	17.527.450				DPK	
2	23	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang tersusun tepat waktu (dokumen)		1 Dokur	17.527.450	10.405.000,00		0,00			17.527.450				DPK	
2	23	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran		9 bulan	957.078.981			0,00	0	#DIV/0!	0,00	957.078.981				DPK
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia		9 bulan	957.078.981						957.078.981				DPK	
2	23	01	2,05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Pemko Bukittinggi mendapat pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan			0	-			0	#DIV/0!	0,00	0				DPK
2	23	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek			0	-					0				DPK	
2	23	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran			0	120.952.766			17.315.750	#DIV/0!	0,00	138.268.516				DPK
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terbeli		6 Jenis	763.000	1.019.750,00		0,00			763.000				DPK	
2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli		29 Jenis	1.890.000	10.422.000,00		4.401.000,00			6.291.000				DPK	
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan		5 Jenis	2.768.800	10.502.200,00		3.336.250,00			6.105.050				DPK	
2	23	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia		450 Por	3.706.600	10.460.000,00		616.000,00			4.322.600				DPK	
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti		12 Bula	111.824.366	160.372.000,00		8.962.500,00			120.786.866				DPK	
2	23	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran			0	44.071.380			12.967.740	#DIV/0!	0,00	57.039.120				DPK
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Cek yang dibeli		1 Buah	935.000						935.000				DPK	
						Jumlah Materai yang dibeli		183 Bua	-	965.000,00		870.000,00			870.000					
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air terbayar		12 Bula	11.400.887	55.020.000,00		10.283.740,00			21.684.627				DPK	
						Jumlah rekening internet terbayar		12 Bula	-											
						Jumlah rekening listrik terbayar		12 Bula	-											
						Jumlah rekening telepon terbayar		12 Bula	-											
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli		6 Jenis	31.735.493	91.742.476,00		1.814.000,00			33.549.493				DPK	
						Upah tenaga kebersihan		2 Orang	-											
2	23	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran			0	115.825.989			4.821.500	#DIV/0!	0,00	120.647.489				DPK
2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perencanaan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara (unit)		13 Unit	62.536.715	39.190.000,00		2.521.500,00			65.058.215				DPK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			5			6			7			8,00		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			11=10/5 x100%
2																			
2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bula	-	12.000.000,00	2.300.000,00			7.240.000					DPK	
2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa keamanan kantor	12 Bula	48.349.274	193.430.000,00	0,00			48.349.274					DPK	
						Pemeliharaan gedung yang dilakukan	12 Bula	-											
2	24	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			0	267.384.295			58.492.600	#DIV/0!	0,00				DPK	
2	24	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserongan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan		0	248.848.745			58.207.600	#DIV/0!	0,00				DPK	
2	24	02	2,01	00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bahan evaluasi SKPD, Kelurahan, Unit/Sekolah yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru		0	58.695.646			18.501.500	#DIV/0!	0,00	20.862.070			DPK	
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Evaluasi penyelenggaraan kearsipan SKPD, Kelurahan, Unit/ Sekolah	1 Laporan	2.360.570	55.960.650,00	18.501.500,00			20.862.070					DPK	
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bertambahnya pengetahuan peserta bimtek tentang pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis bagi Lembaga Masyarakat dan Perorangan	100 ora	56.335.076										DPK	
2	24	02	2,02	00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya arsip-arsip yang mempunyai nilai guna dimasa datang		0	81.832.900			19.853.050	#DIV/0!	0,00	101.685.950			DPK	
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Daftar Pencarian Arsip	1 Berka	81.832.900	102.486.250,00	19.853.050,00			101.685.950					DPK	
2	24	02	2,03	00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya akses data base, informasi, akses dan layanan arsip kepada masyarakat		0	108.320.199			19.853.050	#DIV/0!	0,00	128.173.249			DPK	
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Arsip statis yang terinput	500 lem	76.933.699	102.486.250,00	19.853.050,00			96.786.749					DPK	
						Jumlah kunjungan SIKN JIKN	75 oran	-											
						Unit server terinstal	1 unit se	-											
2	24	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek	30 Oran	31.386.500	199.356.900,00	0,00			31.386.500					DPK	
						Jumlah peserta monev	30 Oran	-											
						Louncing Implementasi Aplikasi SIKD Tingkat Kota	0	-											
2	24	03	0,00	00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan		0	18.535.550			285.000	#DIV/0!	0,00				DPK	
2	24	03	2,01	00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah SKPD dan masyarakat yang menerapkan arsip sesuai aturan yang berlaku		0	18.535.550			285.000	#DIV/0!	0,00	0			DPK	
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku	5 SKPD	18.535.550	39.252.600,00	285.000,00			18.820.550					DPK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW 4)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2			3		5		6		7		8,00		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%	12	13
2	24 04 0,00 00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Peserorangan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan			0	-				0		#DIV/0!	0,00				DPK	
2	24 04 2,01 00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan arsip			0	75.208.800				22.786.000		#DIV/0!	0,00	97.994.800			DPK	
2	24 04 2,01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP layanan kearsipan arsip dinamis			2 SOP	42.194.200		39.776.250,00		1.898.000,00				44.092.200			DPK	
2	24 04 2,01 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah layanan arsip statis			1 Jenis	33.014.600		33.373.000,00		20.888.000,00				53.902.600			DPK	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	02																			
	2	19	02																			
	2	19	02	2.01																		
	2	19	02	2.01	01																	
	2	19	02	2.01	02																	
	2	19	02	2.01	03																	
	2	19	02	2.02																		
	2	19	02	2.02	01																	
	2	19	03																			
	2	19	03	2.02																		
	2	19	03	2.02	01																	
	2	19	03	2.02	02																	
	2	19	03	2.03																		
	2	19	03	2.03	01																	
	2	19	03	2.05																		
	2	19	03	2.05	01																	
	2	19	03	2.05	02																	
	2	19	04																			
	2	19	04	2.01																		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%				12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	2	19	04	2.01	01	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi			0,99	200.000.000														
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.784.336.249		1.462.607.780			-		-							
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.365.000		23.702.000			-		-							
	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu			0,95	20.478.100		23.702.000,00			0,00									
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.400.327.660		-			-		-							
	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji			0,93	6.914.345.818														
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					32.788.800		120.300.000			-		-							
	3	26	01	2.03	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengaman kantor				121.507.123		120.300.000			0,00									
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.652.639		191.786.100			-		-							
	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli			1	1.914.500		1.589.100			0,00									
	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ipad terbeli			1	29.955.000														
	3	26	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli			0,39	25.670.000		23.747.000			0,00									
	3	26	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan			1	7.191.920		16.750.000			0,00									
	3	26	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi.			0,99	202.421.434		149.700.000			0,00									
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					179.946.953		629.005.000			-		-							
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000, buku cek, benda lainnya terbeli			0,99	3.720.000		3.430.000			0,00									
	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)			0,78	670.076.682		625.575.000			0,00									
	3	26	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.255.197		497.814.680			-		-							
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara			0,83	255.759.186		299.326.340			0,00									
	3	26	01	2.08	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara			0,52	1.335.500		22.200.000			0,00									
	3	26	01	2.08	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service yang dibayarkan			0,98	92.510.482		90.360.000			0,00									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	3	26	01	2.08	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			955	94.790.802			85.928.340		0,00									
	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																			
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
	3	26	02	2.02	01	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembangunan Kandang Zona II			0,94	226.017.924			3.223.561.642		0,00									
	3	26	02	2.02	02	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah flora dan fauna yang bertambah							3.590.500.200		0,00									
	3	26	02	2.02	02	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah satwa yang dirawat			0,92	5.563.686.702														
	3	26	02	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Peserta Pelatihan Kebersihan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 2. Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana 3. Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi																		
	3	26	02	2.02	03	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM tentang Geopark			0,8	40.020.850			2.725.217.000		179.657.100,00									
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
	3	26	02	2.03	01	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Study Kelayakan Kotobarangai			0,91	88.925.550														
	3	26	02	2.03	02	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Peserta Pelatihan Kebersihan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 2. Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana 3. Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi			0,71	264.388.100														
	3	26	02	2.03	03	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Terkelolanya Destinasi Pariwisata			0,95	3.240.797.322			3.947.048.345		55.407.434,00									
	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																			
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial)			0,73	536.411.165			472.883.950		0,00									
	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah event Pemasaran yang diikuti			0,6	15.079.268			571.141.000		0,00									
	3	26	03	2.01	02	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data pelaku wisata dan ekraf Jumlah data pelaku Wisata			0,9	56.732.300														
	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																			
											28.116.451			0		-		-		-					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (s.d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%		12	13
	3	26	05	2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				28.116.451													
	3	26	05	2,01	01 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1.Jumlah peserta pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran pada desa			-													
	3	26	05	2,01	02 Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.Jumlah peserta pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran dan penjualan pada desa wisata Homestay/ Pondok		0,74	183.694.375													
	3	26	05	2,01	02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1. Jumlah Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 2. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis		0,79	195.149.500	598.337.500		0,00										
	3	26	05	2,01	02 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta festival marandang Jumlah promosi ekraf yang diikuti Festival Seni dan Pameran Ekraf			-	896.600.430		0,00										
	3	26	05	2,01	02 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian Fasilitasi Kesenian Masyarakat		0,9	314.884.002	337.298.500		0,00										
								0	6.169.138.932	25.304.998.362		290.471.968		-	-	290.471.968						

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 +8		11=10/5 x100%		12	13
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.891.559.200		9.267.705.031		980.780.156		10,6%		10.281.297.975			Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				100 %	8.891.559.200		9.267.705.031		980.780.156		10,6%		10.281.297.975			Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	9.636.647.211	A	8.192.735.205		9.267.705.031		980.780.156		10,6%		9.582.473.980		0,994378415	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP SKPD			2 Dokum	19.521.750		17.150.000		-		0,0%		19.521.750			Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja dan keuangan			2 dokum	19.521.750		17.150.000,00		0,00				19.521.750			Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan			66 orang	7.154.910.715		8.218.903.171		962.374.370		11,7%		8.839.701.401			Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			66 orang	7.877.327.031		8.218.903.171		962.374.370		11,7%		8.839.701.401			Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			18 item	348.973.344		189.411.600		9.700.200		5,1%		358.673.544			Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan			18 item	7.565.275		7.283.800,00		0,00				7.565.275			Dinas Pertanian dan Pangan	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ipad diadakan Jumlah kursi kerja staf diadakan Jumlah laptop diadakan Jumlah printer diadakan			1 unit 2 unit 6 unit 4 unit	123.374.999		7.283.800,00		0,00				123.374.999			Dinas Pertanian dan Pangan	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis kantor yang terbeli			38 item	24.599.000		24.039.000,00		0,00				24.599.000			Dinas Pertanian dan Pangan	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah penggandaan surat dan dokumen			6 item 58843 lembar 400	20.431.200		14.930.000,00		1.482.750,00				21.913.950			Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasi untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan sosialisasi ke luar daerah Snack untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia		379 bungkus 173.002.870 651 kotak	135.875.000,00	8.217.450,00		181.220.320		Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		1 buah 15 kali 534 buah 550	49.209.667	59.980.000	8.705.586	14,5%	57.915.253	Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Kiriman Paket / Kilat Khusus Materai 3000 Materai 6000		1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	5.082.000	5.380.000,00	2.000.000,00		7.082.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan		108 rekening	44.127.667	54.600.000,00	6.705.586,00		50.833.253	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik		51 unit 5 unit 8 unit	620.119.729	782.260.260	-	0,0%	306.662.032	Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		51 unit 5 unit 8 unit 3 unit 3unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit	267.672.032	260.753.420,00	0,00		267.672.032	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah AC yang diperbaiki Jumlah Camera yang diperbaiki Jumlah Infocus yang diperbaiki Jumlah Komputer yang diperbaiki Jumlah Laptop yang diperbaiki Jumlah Peripherals komputer yang terbeli Jumlah Printer yang diperbaiki Jumlah TV yang diperbaiki Jumlah Videotron yang diperbaiki		1	38.990.000	260.753.420,00	0,00		38.990.000		Dinas Pertanian dan Pangan
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service Jumlah pintu,jendela,lantai, saluran air, dan tanaman yang diperbaiki Luas dinding kantor yang dicat ulang Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli		12 bulan 1 LS 300 m2 1 LS 22 item	313.457.697	260.753.420,00	0,00				Dinas Pertanian dan Pangan
				1			0,0%				Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	2112,9 kkal/kap/hr	2150 kkal/kap/th	662.369.995	-	#DIV/0!	662.369.995			Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka konsumsi energi perkapita		1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	18.678.650	-	#DIV/0!	18.678.650			Dinas Pertanian dan Pangan
01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah komoditi bazar yang dilaksanakan Jumlah Laporan		1 dokumen 12 bulan 9 jenis 12 Laporan	18.678.650			18.678.650			Dinas Pertanian dan Pangan

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket	
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13	
		Jumlah Kelompok yang dibantu		2150 kkal/kap/t						Dinas Pertanian dan Pangan		
2 09 03 2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi perkapita		10.000 btg 1 kali	643.691.345		-	#DIV/0!	643.691.345	Dinas Pertanian dan Pangan		
02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota Bukittinggi yang diselenggarakan		1000 btg 1 kali	641.178.845				641.178.845	Dinas Pertanian dan Pangan		
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu		1 dokumen	2.512.500				2.512.500	Dinas Pertanian dan Pangan		
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan cadangan pangan	2000 ton	10.000.000	20.311.750		-	#DIV/0!	20.311.750	2,031175	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 04 2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Angka konsumsi energi perkapita		1 dokumen	20.311.750		-	#DIV/0!	20.311.750	Dinas Pertanian dan Pangan		
01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG		1 dokumen	20.311.750				20.311.750	Dinas Pertanian dan Pangan		
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi di atas ambang batas	23%	50.000.000	23%	16.142.250		-	#DIV/0!	16.142.250	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 05 2	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi energi perkapita		14 jenis	16.142.250		-	#DIV/0!	16.142.250	Dinas Pertanian dan Pangan		
04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji		9 jenis	16.142.250				16.142.250	Dinas Pertanian dan Pangan		
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				6.923.830.913	4.511.128.210		6.705.586	0,0%		Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100 %	925.389.804	1.830.046.760		-	0,0%	888.637.804	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		1	47.280.400	260.753.420		-	0,0%	10.528.400	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan
3 25 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		27 set	36.752.000					Dinas Pertanian dan Pangan		

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Penanggung Jawab	Ket
			5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13							
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah kursi tamu terbeli Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli			1 set 27 set seprai 15 buah spring bed	36.752.000		36.765.000		36.752.000		100,0%		73.504.000			Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25 01 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik			11 item 1 paket	10.528.400		260.753.420		-		0,0%		10.528.400			Dinas Pertanian dan Pangan	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah pintu, jendela, lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang			500 ton	10.528.400		260.753.420,00		0,00				10.528.400			Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya		300.000.000	1020000 0 rupiah	817.047.100		1.357.421.000		-		0,0%		817.047.100		2,723490335	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25 04 2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Ikan			1paket 1 paket 1250 kg	817.047.100		1.357.421.000		-		0,0%		817.047.100			Dinas Pertanian dan Pangan	
02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan / rehab kolam dan kelengkapannya Pengadaan induk Nila Pengadaan Pakan			1 paket 1 paket 1250 kg	250.531.701		210.439.000,00		0,00				250.531.701			Dinas Pertanian dan Pangan	
03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih Ikan / Induk Ikan Pengadaan Pakan Ikan Peningkatan SDM Kelompok			120000 ekor 2500 Kg 1 kali	274.499.100		573.491.000,00		0,00				274.499.100			Dinas Pertanian dan Pangan	
03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih ikan			470000	292.016.299		573.491.000,00		0,00				292.016.299			Dinas Pertanian dan Pangan	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengembangan produk perikanan	6,50%	26.147.500.000	1	61.062.304		211.872.340		-		0,0%		61.062.304		0,002335302	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13
3 25 06 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan mutu hasil perikanan		1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 Sampel	61.062.304	211.872.340	-	0,0%	61.062.304		Dinas Pertanian dan Pangan
01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba Forikan dan Lomba PAUD Tk.Kota dan Tk. Propinsi Lomba Masak Ikan, Inovasi dan Cipta Lagi Tk. Propinsi Lomba Masak Ikan Tk. Kota		2% 2% 2% 50 sampel	61.062.304	211.872.340,00	0,00		61.062.304		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100 %	5.998.441.109	2.681.081.450	6.705.586	0,3%	6.005.146.695		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A		65.109.914	860.899.260	6.705.586	0,8%	71.815.500	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	3.242.000	-	-	#DIV/0!	3.242.000		Dinas Pertanian dan Pangan
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Face Shield Masker Pakaian Dinas Sarung Tangan		1	3.242.000				3.242.000		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		22 Item	3.450.000	24.039.000	-	0,0%	3.450.000		Dinas Pertanian dan Pangan
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlengkapinya belanja alat tulis kantor		33 item	3.450.000	24.039.000,00	0,00		3.450.000		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		12 Rekening 12 Rekening 12	26.912.584	54.600.000	6.705.586	12,3%	33.618.170		Dinas Pertanian dan Pangan
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air yang dibayarkan Jumlah Rekening internet yang dibayarkan Jumlah Rekening listrik yang dibayarkan		12 rekening 12 rekening 12 rekening	26.912.584	54.600.000,00	6.705.586,00		33.618.170		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13
3 27 01 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik		1 ls	31.505.330	782.260.260	-	0,0%	31.505.330		Dinas Pertanian dan Pangan
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service dan penggantian alat komputer / Laptop, Mesin TIK, Printer, TV dan Pengisian Freon AC		1 Paket	1.752.000	260.753.420,00	0,00		1.752.000		Dinas Pertanian dan Pangan
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan kantor yang diperbaiki		1 paket	26.791.330	260.753.420,00	0,00		26.791.330		Dinas Pertanian dan Pangan
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli		0,8	2.962.000	260.753.420,00	0,00		2.962.000		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan produk pertanian	3%	200.000.000	0,8	2.299.129.214	-	0,0%	2.299.129.214	11,49564607	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian		15 unit 3 Dokumen	428.379.625	339.508.450	-	0,0%	428.379.625		Dinas Pertanian dan Pangan
01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah dokumen data rencana defenitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi)		10 unit 3 dokumen	328.558.970	279.877.300,00	0,00		328.558.970		Dinas Pertanian dan Pangan
02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok UP3HP penerimaan bantuan		1 kelompok	99.820.655	59.631.150,00	0,00		99.820.655		Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi bahan pangan		0,4 Ha	1.837.615.439	1.204.991.270	-	0,0%	1.837.615.439		Dinas Pertanian dan Pangan
01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lahan Pertanian yang ditanami benih berlabel		0,4 Ha	36.612.650	93.688.000,00	0,00		36.612.650		Dinas Pertanian dan Pangan
02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Ternak itik Bantuan Ternak Ayam Bantuan Ternak Kambing Jumlah perkawinan kuda bibit pejantan		3 paket 1 paket 2 paket 40 kali	684.100.884	750.203.400,00	0,00		684.100.884		Dinas Pertanian dan Pangan

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13
03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Pelatihan tanaman hias Pembangunan rumah lindung/green house Pengadaan bibit buah-buahan		2% 2% 1 kali 1 paket 1 paket 15 kali	1.116.901.905	361.099.870,00	0,00		1.116.901.905	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu bibit ternak		1kali		113.749.300	0,0%			Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah acara promosi peternakan tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti		0,8		113.749.300,00	0,00			Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan obat hewan		5 sampel 20 orang	10.074.500	-	-	#DIV/0!	10.074.500	Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi pedagang obat hewan		5 sampel 20 orang	10.074.500				10.074.500	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan penyediaan benih ternak		2 Dokume n 2 Laporan 2 Laporan	23.059.650	-	-	#DIV/0!	23.059.650	Dinas Pertanian dan Pangan	
05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg.Kandang Laporan Sikomandan laporan Statistik Peternakan		1 dokumen 1 laporan 1 laporan 12 laporan 2 laporan	23.059.650				23.059.650	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	laju konversi lahan pertanian	0,05 ha	100.000.000	6,8 ton/ha	2.989.630.660	73.859.000	0,0%	2.989.630.660	29,8963066	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03 2	Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan produktivitas padi		1 Dokume n 4	192.763.974	73.859.000	-	0,0%	192.763.974		Dinas Pertanian dan Pangan
01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun		1 dokumen	156.050.674	51.090.000,00	0,00		156.050.674	Dinas Pertanian dan Pangan	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan UPSUS LTT		12 laporan	36.713.300	22.769.000,00	0,00		36.713.300	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket	
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13	
3 27 03 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase sarana pertanian terbangun		306 m 100 m	2.796.866.686	-	-	#DIV/0!	2.796.866.686		Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian jaringan irigasi di RW 02 dan RW 05 di kel.Campago Guguk Bulek Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian sambungan Banda Baru di Kubu Tanjung		2 paket 1 paket	673.702.150				673.702.150		Dinas Pertanian dan Pangan	
03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang mesjid istiqomah Sumua		1 paket	444.088.384				444.088.384		Dinas Pertanian dan Pangan	
07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH Terbangun		1 unit	1.679.076.152				1.679.076.152		Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 04 2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan	8,50%	330.000.000	0,8	444.881.300	88.074.170	-	0,0%	444.881.300	1,348125152	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04 2	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian penyakit hewan menular		1 kali 50 orang	69.357.429	65.706.170	-	0,0%	69.357.429		Dinas Pertanian dan Pangan	
01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penangkapan, Penertiban Anjing liar Sosialisasi tentang penyakit zoonosis		1 kali 50 orang	69.357.429	65.706.170,00	0,00		69.357.429		Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 04 2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	Pelayanan kesehatan hewan		1.500 ekor 750 ekor 30 ekor	168.360.967	-	-	#DIV/0!	168.360.967		Dinas Pertanian dan Pangan	
02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di LIPTD		4000 ekor	168.360.967				168.360.967		Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	URAIAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022(n-1)	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)	Penanggung Jawab	Ket	
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 +8	11=10/5 x100%	12	13	
3 27 04 2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	pengawasan pemotongan hewan secara ASUH		6.175 ekor	207.162.904	22.368.000	0,0%	207.162.904		Dinas Pertanian dan Pangan		
01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau		6175 ekor	197.522.904	22.368.000,00	0,00	197.522.904		Dinas Pertanian dan Pangan		
03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan dalam rangka persiapan memperoleh sertifikat NKV dan Halal		25 unit usaha	9.640.000			9.640.000		Dinas Pertanian dan Pangan		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan		
3 27 05 2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	penanggulangan bencana pertanian		3 lokasi 3 kali		-	#DIV/0!	-		Dinas Pertanian dan Pangan		
01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah pelatihan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		0,05				-		Dinas Pertanian dan Pangan		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase peningkatan kelas kelompok tani	15%	125.000.000	45 kelompok	199.690.021	-	199.690.021	1,597520168	Dinas Pertanian dan Pangan		
3 27 07 2	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani pemula, lanjut, madya, utama			12 Bulan 12 Bulan 3 Demplot	199.690.021	-	199.690.021		Dinas Pertanian dan Pangan		
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi keperluan BPP Gaji pegawai kontrak Media percontohan Tanaman			12 bulan 12 bulan 3 demplot	199.690.021		199.690.021		Dinas Pertanian dan Pangan		
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gaji pegawai kontrak Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kemampuannya dari			12 bulan 10 poktan 12 kali	117.924.754	102.740.370,00	0,00	117.924.754		Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%		12	13
		Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung				59.50%	31.885.835.683		310.080.542		19.107.578	6,16%	0	19.107.578				Sekretariat DPRD	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD				19.336.020.684		310.080.542		19.107.578	6,16%		19.107.578				Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia			1	58.268.610		68.698.000		1.994.500	2,90%	0,00%	1.994.500				Sekretariat DPRD	
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan disusun			2 dokumen	58.268.610		68.698.000,00		1.994.500,00			-				Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan Daerah tersedia			75%	3.237.596.221		-		-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang disediakan gaji dan tunjangan nya			42000%	3.237.596.221											Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia			0%	0		-		-	#DIV/0!	0	-				Sekretariat DPRD	
		Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi keulangannya apabila meninggal dunia di luar daerah pada saat dinas			0%	0											Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah yang tersedia			25%	1.768.411.813		140.241.790		10.520.000	7,50%	0,00%	10.520.000				Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan			900%	12.044.800		3.492.500,00		1.870.000,00							Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan			100%	18.305.000											Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			300%	1.600.000											Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan			5000%	15.981.590		22.574.800,00		1.624.000,00							Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			70000 lembar ft copy, 100 plakat	144.978.625		10.999.490,00		1.856.000,00							Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%		12	13	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			45000%	341.032.100												Sekretariat DPRD	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	1.076.778.862												Sekretariat DPRD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35kali rapat - rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah	157.690.836		103.175.000,00		5.170.000,00								Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	0%	0		-		-	#DIV/0!	0	-				Sekretariat DPRD	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan diadakan	-	0											Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	75%	204.157.124		41.975.000		4.968.078	11,84%	0,00%	4.968.078				Sekretariat DPRD	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah materai dan jasa pengiriman disediakan	200 buah materai dan 2 buku cek	1.340.000		2.375.000,00		500.000,00							Sekretariat DPRD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah rekening listrik, air, telepon , tv kabel, dan langganan internet dibayar	84 rekening	202.817.124		39.600.000,00		4.468.078,00							Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	75%	1.282.094.087		59.165.752		1.625.000	2,75%	0,00%	1.625.000				Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dipelihara			100%	493.181.418											Sekretariat DPRD	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			100%	637.219.169		59.165.752,00		1.625.000,00							Sekretariat DPRD	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara			4 jenis	148.491.500											Sekretariat DPRD	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dipelihara			10 jenis	3.202.000											Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase tertib administrasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD			0,75	11.818.380.955		-		-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah gaji dan tunjanganPimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan pertahun			350 orang/tahun	11.633.235.555											Sekretariat DPRD	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah stel pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan			125	159.005.400											Sekretariat DPRD	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi MCU			17	26.140.000											Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase tertib administrasi layanan Administrasi DPRD			75%	967.111.874		-		-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah honor tenaga administrasi penyelenggaraan keanggotaan DPRD yang dibayarkan honorinya			60 orang /tahun	197.420.824											Sekretariat DPRD	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD			12 bulan	769.691.050											Sekretariat DPRD	
			2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD			0,75	12.549.814.999		-		-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase produk hukum yang dibahas DPRD sesuai rencana kerja			1	1.995.643.484		-		-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Propempera disusun			1 dokumen	90.496.130											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rapat pembahasan rancangan perda difasilitasi sesuai rencana			100rapat , 100 risalah rapat	1.604.955.401											Sekretariat DPRD	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Jumlah kajian per UU dilaksanakan			7 kajian	272.268.453											Sekretariat DPRD	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik disusun			2 naskah ak	27.923.500											Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan raperda APBD tepat waktu			0	832.840.120			-	-	#DIV/0!	0	-				Sekretariat DPRD	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS disediakan			7 kali rapat	225.139.946											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS Perubahan disediakan			7 kali rapat	156.528.645											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan APBD	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan APBD disediakan			7 kali rapat	59.770.761											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan APBD Perubahan disediakan			7 kali rapat	6.857.800											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan Laporan Semesteran difasilitasi			1 kali rapat	35.320.139											Sekretariat DPRD	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat - rapat dan risalah rapat terkait pembahasan Pertanggung jawaban APBD disediakan			3 kali rapat	349.222.829											Sekretariat DPRD	
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi kegiatan pengawasan Dewan sesuai rencana kerja			0,75	2.201.912.379			-	-	#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dilaksanakan			4 laporan	804.257.902												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pemerintahan bidang infrastruktur dilaksanakan			3 laporan	531.066.268												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dilaksanakan			3 laporan	452.197.068												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pemerintahan bidang perekonomian dilaksanakan			1 laporan	5.533.500												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam dilaksanakan			-	0												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK dilaksanakan			1 laporan	1407500												Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan kegiatan pengawasan penggunaan anggaran			2 laporan	407.450.141												Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan Kapasitas DPRD sesuai rencana kerja			0,75	3.071.378.139			-		-	#DIV/0!	0,00%		-			Sekretariat DPRD	
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimbingan teknis DPRD difasilitasi			6 kali	1.516.521.893												Sekretariat DPRD	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah berita dewan dipublikasikan dalam media cetak dan elektronik			900 berita	726.366.750												Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah honor tenaga ahli fraksi disediakan			72	171.400.000												Sekretariat DPRD	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat - rapat penyusunan program kerja dan laporan kinerja DPRD difasilitasi			40 kali rapat	657089496												Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2022(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2022 (TW IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (s.d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan			0,7	297977900	-	-			#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
		Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan Reses yang didokumentasikan			9 laporan	297977900											Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengawasan kode etik dilaksanakan			0,5	87808089	-	-			#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik disusun			0	0											Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode Etik DPRD disusun			1 laporan	87808089											Sekretariat DPRD	
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan dan Anggota sesuai rencana kerja			0,7	4062254888	-	-			#DIV/0!	0,00%	-				Sekretariat DPRD	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat - rapat koordinasi konsultasi DPRD dilaksanakan			275 kali	3799720938											Sekretariat DPRD	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah rapat - rapat pariuma istimewa dilaksanakan			7 kali rapat	262533950											Sekretariat DPRD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			2		3		4		5		6		7		8				9=8/7x100%		10 = 6 + 8
5	02	00	0,00	00	KEUANGAN			16.805.352.751		34.269.468,00	#DIV/0!		34.269.468,00					Badan Keuangan			
5	02	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kualitas Perencanaan Penganggaran		1 4.128.034.675		0,00	#DIV/0!		0,00					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan		1 971.940.609		0,00	#DIV/0!		0,00					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang dihasilkan		2 Buku 199.104.335		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan		2 Buku 131.853.050		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA dan DPPA SKPD diverifikasi		28 SKPD 49.715.000		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD 2. Perwako APBD		1 Perda 1 Pe 297.378.075		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perda PAPBD 2. Perwako PAPBD 3. Perwako Pergeseran		1 Perda2 Pe 203.821.754		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun		1 Dokumen 90.068.395		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan		1 530.765.166		-	#DIV/0!		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti		600 Dokume 51.692.050		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD yang diterbitkan		4 SPD 4.544.000		0,00	#DIV/0!		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan		9 Laporan 120.890.954		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemma		168 penyeto 10.312.250		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito		7 Transaksi 62.032.416		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan		12 Berita Ac 38.587.400		0,00	-		-					Badan Keuangan			
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji		2000 SP2D 242.706.096		0,00	-		-					Badan Keuangan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			2		3		4		5		6		7		8				9=8/7x100%		10 = 6 + 8
5	02	02	2,03	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah			1	773.969.510			-	#DIV/0!					Badan Keuangan		
5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah			28 SKPD	52.488.400			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya			12 Informasi	151.111.997			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Perda	507.596.013			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP			6 Laporan	62.773.100			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,04	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan			1	1.851.359.390			-	#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan			2 laporan	7.252.200			0,00	#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia			1 Tahun	1.844.107.190				#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	03	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan			1	1.573.769.293			-	#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan			1	1.573.769.293			-	#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun			1 buku	86.423.800			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBMd			1 Buku1 Buk	8.489.000			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honornya			145 orang	1.147.495.637			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir			28 laporan	105.813.250				#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan			-	-			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangkan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan			2 Jenis1 Lap	101.822.054			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status			29 penetapa	102.232.502			0,00	-	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang			2 Kali	3.686.000				#DIV/0!	-				Badan Keuangan		
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan			4 laporan	17.807.050				#DIV/0!	-				Badan Keuangan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	02	04	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan PAD		1	996.152.721		-	#DIV/0!		-		Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Realisasi PAD		1	996.152.721		-	#DIV/0!		-		Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan Objek Pajak Baru		10 Objek	199.653.796	92.381.444,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Data Pajak Online Terintegrasi		10 Data Onli	4.810.000	219.816.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Termutakhirkan Data PBB P2		-	-	208.405.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Dokumen Pajak yang Ditetapkan		3000 SPPT,	192.248.796	148.907.244,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah		Laporan Penagihan Pajak		1 Laporan	597.118.729	523.932.244,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Berita Acara Pemeriksaan			2.321.400	132.501.200,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP		BB	10.107.396.062		34.269.468,00	#DIV/0!	34.269.468,00			Badan Keuangan	
5	02	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program dan kegiatan yang selaras		1	14.059.097		-	#DIV/0!		-		Badan Keuangan	
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan		3 Dokumen	14.059.097	20.149.950,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kualitas pelayanan internal		1	8.733.894.920		0,00	#DIV/0!	0,00			Badan Keuangan	
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan		64 orang	8.733.894.920			#DIV/0!		-		Badan Keuangan	
5	02	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kualitas pelayanan internal		1	200.341.337		0,00	#DIV/0!	0,00			Badan Keuangan	
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jasa pengamanan kantor terbayarkan		5 orang	200.341.337	200.000.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kualitas pelayanan internal		1	431.758.086		0,00	#DIV/0!	0,00			Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia		3 Jenis	9.154.000	2.492.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Piring, gelas, sendok tersedia		1 Paket	3.567.000			#DIV/0!		-			
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat Tulis Kantor		46 jenis;	32.414.000	24.566.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak		8 Jenis12 Bu	213.753.000	244.886.500,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1. Snack tamu 2. Makanan ringan pimpinan 3. Makan dan minum		500 Porsi12	22.817.300	22.000.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1. Perjalanan dinas terlaksana 2. Makanan dan minuman rapat		12 Bulan12	150.052.786	134.600.000,00	0,00	-	-	-	-	Badan Keuangan	
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kualitas pelayanan internal		1	153.540.000		0,00	#DIV/0!	0,00				
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tablet dan CCTV Tersedia		2 Jenis	153.540.000	16.800.000,00	0,00	-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2022 (TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			2		3		4		5		6		7		8				9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%
5	02	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal			1	114.916.427			0,00	#DIV/0!		0,00			Badan Keuangan				
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia 2. Paket pengiriman tersedia			150 lembar	1.660.000			0,00	-		-			Badan Keuangan				
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan			12 Bulan	113.256.427			0,00	-		-			Badan Keuangan				
5	02	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal			1	458.886.195			34.269.468,00	#DIV/0!		34.269.468,00			Badan Keuangan				
5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharannya			1 unit	24.429.394			0,00	-		-			Badan Keuangan				
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharannya			39 unit	195.791.316			0,00	-		-			Badan Keuangan				
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi			2 unit	14.015.610			0,00	-		-			Badan Keuangan				
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia 2. Jasa cleaning service tersedia 3. Retribusi sampah terbayarkan 4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara			14 jenis	4 ora 224.649.875			34.269.468,00	13,52		34.269.468,00			Badan Keuangan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10=8		11 = 10/5 x 100%		13
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					6.843.454.363		0		0,00%		6.625.980.332				
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD bernilai BB				100%	6.269.485.410		0	0,00%		6.112.484.232				
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat			43 Orang	5.490.546.232		0	0,00%		5.490.546.232				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayar		43 Orang	5.490.546.232					5.490.546.232				
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan dan pelatihan / bimbingan teknis pengawasan				37.833.600		0	0,00%		45.315.000				
6	01	01	2.05	09	5	Jumlah pegawai yang dikirim untuk pelatihan (pengembangan/teknis)		5 Orang	29.120.000					29.120.000				
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri		4 kali	16.195.000,00		0,00			16.195.000				
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%	427.484.028		0	0,00%		242.313.000				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli		7 item	4.432.000,00		0,00			4.432.000				
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli		5 jenis						0				
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli		5 jenis						0				
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli		17 item	20.012.000,00		0,00			20.012.000				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, Jumlah lembar tergandakan		1000 buah, 3845 lembar 6	14.594.000,00		0,00			14.594.000				
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase makanan dan minuman tamu tersedia		360 orang	5.500.000,00		0,00			5.500.000				
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat / pertemuan / diklat / tamu / kegiatan tersedia, Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi yang dihadiri		100%	197.775.000,00		0,00			197.775.000				
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%	37.917.200		0	0,00%		36.600.000				
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli, Persentase pengiriman paket terbayar.		2 item	1.380.000,00		0,00			1.380.000				
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar		12 bulan/rekening	35.220.000,00		0,00			35.220.000				
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peralatan dan Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	275.704.350		0	0,00%		297.710.000				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara		1 unit	39.190.000,00		0,00			39.190.000				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara		7 unit	75.400.000,00		0,00			75.400.000				
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak		1 Paket	3.200.000,00		0,00			3.200.000				
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		16 item	11.890.000,00		0,00			11.890.000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10=8		11 = 10/5 x 100%		13
6	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli. Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.					1 paket, 10 item, 1 paket.	168.030.000,00		0,00				168.030.000			
6	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal					33,9%	462.317.374		0		0,00%		356.073.600			
6	01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai PKPT					100%	439.685.474		0		0,00%		328.447.600			
6	01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan evaluasi pelayanan publik, Laporan evaluasi SAKIP, Laporan evaluasi SPIP, Laporan evaluasi ZIWBK					laporan 1 laporan 28 n 28 laporan 1 n laporan	144.914.000,00		0,00				144.914.000			
6	01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan hasil pengawasan reguler, laporan hasil review DAK, laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan review penyerapan anggaran, laporan review perencanaan penganggaran responsif gender					laporan 59 laporan 27 laporan 7 laporan 8 n 4 laporan laporan	70.361.600,00		0,00				70.361.600			
6	01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu					2 laporan	8.634.000,00		0,00				8.634.000			
6	01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu					1 laporan	58.998.000,00		0,00				58.998.000			
6	01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan pemantauan TLHP					12 laporan	45.540.000,00		0,00				45.540.000			
6	01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan					100%	22.631.900		0		0,00%		27.626.000			
6	01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan					5 laporan	15.296.000,00		0,00				15.296.000			
6	01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus					20 LHP	12.330.000,00		0,00				12.330.000			
6	01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					70,9 Skor	111.651.579		0		0,00%		157.422.500			
6	01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dilayani					100%	111.651.579		0		0,00%		157.422.500			
6	01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan					1 laporan	20.738.000,00		0,00				20.738.000			
6	01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan UPG, Laporan hasil money rencana aksi pencegahan korupsi					laporan 4 n UPG 4 Laporan n MPC	85.995.000,00		0,00				85.995.000			
6	01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan terpenuhi					1 laporan	50.689.500,00		0,00				50.689.500			

2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 diidentifikasi secara makro dan identifikasi berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana uraian berikut ini.

1.3.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan secara makro di Kota Bukittinggi maka dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 bidang pembangunan yaitu bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

Permasalahan Bidang Ekonomi

Tidak berbeda dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, pandemi Covid 19 berdampak besar terhadap ekonomi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 terkoreksi sampai ke angka -1,74 persen dari 5,88 pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan selama tahun 2021 selain terlihat dari kembali tumbuhnya ekonomi kota ke angka yang cukup menggembirakan, juga dapat dilihat dari meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk dari 13,28 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,33 juta rupiah tahun 2021, dan angka ini adalah angka tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Meskipun pada tahun 2021 ekonomi Bukittinggi berhasil tumbuh sampai dengan 3,61 persen dengan pengeluaran perkapita tertinggi di Sumatera Barat, namun angka ini masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi dimana pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi berkisar antara 5 sampai dengan 6 persen pertahun. Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang bertumpu pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha lain yang berkaitan dengan aktifitas wisata sangat terpuruk atas pandemi yang terjadi masih menjadi perhatian utama untuk pemulihan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2023. Meningkatkan daya tarik wisata, pengembangan kawasan wisata baru, penataan kawasan pusat ekonomi masyarakat, serta perbaikan akses transportasi kota perlu dilakukan untuk mendongkrak untuk meningkatkan aktivitas wisata daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha yang berkaitan.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 6,09 persen berada di atas target capaian yang ditetapkan sebesar 7,16 persen dirasa masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan kualitas pencari kerja serta fasilitasi penyediaan lapangan kerja yang layak dan memadai.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Bukittinggi yang sudah mencapai 74,50 tahun pada tahun 2021, merupakan angka tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi dari AHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,59 tahun. Meskipun demikian, karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, maka peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan tetap jadi fokus pemerintah Kota Bukittinggi ke depan, terutama dalam hal penyediaan akses, sarana prasarana, dan jaminan kesehatan masyarakat selain penanganan pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi telah memberi dampak baik terhadap penanganan pandemi Covid 19 di Kota Bukittinggi, terutama untuk pasien yang membutuhkan penanganan rawatan

Beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang landai beberapa tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi meningkat 0,01 tahun dari tahun 2020 sebesar 14,97 menjadi 14,98 tahun 2021. Meskipun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 14,02 tahun, tetapi angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi lebih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 15,07 tahun dan 16,53 tahun. Demikian juga dengan indikator rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi yang hanya mengalami peningkatan 0,01 tahun dari tahun 2020 sebesar 11,33 tahun menjadi 11,34 tahun pada tahun 2021. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun angka ini masih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 11,63 tahun dan 11,59 tahun.

Berdasarkan data beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia Kota Bukittinggi sebagaimana uraian diatas maka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2023, terutama pembangunan bidang pendidikan daerah.

Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bukittinggi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan pada dua tahun terakhir. Indeks SAKIP Kota Bukittinggi selama 2 (dua) tahun terakhir adalah BB, indeks ini sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan 2 (dua) kota lain di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah Kota Bukittinggi berkeinginan mendapat predikat A pada tahun depan, hal ini

penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Predikat capaian penilaian SAKIP Kota Bukittinggi belum seiring dengan capaian penilaian Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Penilaian Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi masih berpredikat B pada beberapa tahun terakhir. Demikian juga dengan capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sampai dengan tahun 2021, belum ada unit kerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

1.3.2 Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk merumuskan program pembangunan daerah tahun 2023. Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dikelompokkan atas permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pilihan dan permasalahan urusan pendukung, penunjang, dan pengawas pemerintahan.

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan belum mencapai 100 persen (APM SD/MI sebesar 99,38 persen dan SMP/MTs sebesar 81,46 persen, dan APK SMP/MTs 84,76% tahun 2021)
2. Angka partisipasi kasar PAUD masih rendah (APK PAUD dibawah 45,20 persen tahun 2021)
3. Kondisi bangunan sekolah kondisi baik (sudah mencapai 98,46 persen bangunan SD/MI berkondisi baik dan 93,33 persen bangunan SMP/MTs berkondisi baik pada tahun 2021)
4. Belum semua anak usia 13-15 tahun terserap pada SMP/MTs (APS SD/MI sebesar 99,90 dan SMP/MTs sebesar 98,40 tahun 2021)
5. Belum seluruh guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/DIV (guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tahun 2021 sebesar 87,94 persen)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

1. Pemenuhan gizi anak balita masih rendah (persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan dari 0,14 tahun 2020 menjadi 0,15 tahun 2021)
2. Cakupan peserta KB aktif masih rendah (Cakupan peserta KB aktif hanya 70 persen tahun 2021)
3. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2021 (target persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 88,62 persen berada dibawah target capaian sebesar 100 persen)
4. Persentase orang yang berumur 15 tahun keatas yang menerima konseling dan testing HIV masih berada dibawah target daerah (target persentase orang yang berumur 15 tahun keatas yang menerima konseling dan testing HIV tahun 2021 sebesar 10 persen dan pencapaian hanya 1,8 persen)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan masih kurang
2. Ketersediaan sumber air baku Kota Bukittinggi belum memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan belum menyeluruh terpenuhi
4. Ketersediaan sarana air limbah belum memadai
5. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bukittinggi belum memenuhi target (Persentase luas ruang terbuka publik terhadap luasan RTH publik sudah mencapai 78% tahun 2020 dan itu masih belum memenuhi UU Nomor 26 Tahun 2017)
6. Luas kawasan tertutup pepohonan semakin berkurang setiap tahunnya (Persentase luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha) menurun sebesar 6,48 persen selama 2 tahun terakhir).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

1. Masih banyak masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni (Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga baru mencapai 75 persen tahun 2020)
2. Belum tuntas penanganan rumah kumuh kawasan perkotaan (Persentase rumah tangga kumuh perkotaan)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Cakupan linmas per-kelurahan belum memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota (sebesar 36 persen dari ketentuan 100 persen)
2. Pelanggaran Perda belum semua terselesaikan pada tahun bersangkutan (persentase kasus pelanggaran perda terselesaikan pada tahun 2021 sebesar 93 persen)
3. Ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran belum memenuhi standar International Fire Chiefs Association of Asia/ IFCAA (cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk masih 49,58 persen tahun 2021)
4. Masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran masih sedikit (belum terbentuknya relawan kebakaran).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

1. Capaian percepatan penanggulangan kemiskinan belum memenuhi target dan bahkan meningkat (persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 5,14% jauh dibawah target yaitu 4,59 pada tahun 2021)
2. Angka PPKS di Kota Bukittinggi masih tinggi, terutama lanjut usia terlantar, pengemis, pemulung, perempuan rawan sosial, fakir miskin, dan keluarga bermasalah psikologi (Tahun 2021 menunjukkan angka lanjut usia terlantar sebanyak 450 orang, pengemis sebanyak 1 orang, pemulung sebanyak 19 orang, perempuan rawan sosial sebanyak 632 orang dan fakir miskin sebanyak 4.977 orang, dan keluarga bermasalah psikologi sebanyak 19 keluarga).

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

1. Capaian pengentasan pengangguran belum optimal (pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 6,09 persen)
2. Capaian peningkatan partisipasi angkatan kerja belum optimal (angka partisipasi angkatan kerja tahun 2020 sebesar 69 persen, di bawah target, yakni sebesar 73,45 persen)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 1. Partisipasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah (hanya 17,86 persen pada tahun 2021)
 2. Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal (belum terbentuk UPT PPA dan rumah perlindungan)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
 1. Tingginya ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap suplai pangan utama (beras) dari luar Kota Bukittinggi (ketersediaan pangan utama Kota Bukittinggi sebesar 4,91 kg/ penduduk/ tahun).
 2. Pola konsumsi masyarakat Kota Bukittinggi masih belum sesuai B2SA/ Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (skor pangan harapan/ PPH mengalami penurunan tahun 2017 dari 91,8 sampai tahun 2021 menjadi 81,5)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Belum semua persil tanah yang dikuasai Pemerintah Kota memiliki sertifikat (dari total 420 persil tanah yang dikuasai, hanya 137 persil dengan luas 385.121,80 M² telah memiliki sertifikat dan sebanyak 283 persil dengan luas 757.946,46 M² belum memiliki sertifikat)

- **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
 1. Timbunan/produksi sampah terus mengalami peningkatan (produksi sampah tahun 2017 sebanyak 432 m³ dan meningkat mencapai 45.068 ton tahun 2021)
 2. Banyak usaha /kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan izin lingkungan. Jumlah izin lingkungan usaha kegiatan yang dikeluarkan s.d. tahun 2017 sebanyak 74 usaha kegiatan, yang taat dan memenuhi hanya sebanyak 4 usaha kegiatan.
 3. Pencemaran air sungai masih tinggi (skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52 yaitu termasuk pada Kelas D: buruk).
 4. Belum ada taman keanekaragaman hayati.

- **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Belum seluruh penduduk Kota Bukittinggi memiliki akte kelahiran (rasio cakupan penerbitan akte kelahiran sebesar 65,53 persen tahun 2021).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 1. Penyediaan kebijakan pengendalian penduduk belum optimal (belum tersusun Kebijakan Pengendalian Penduduk/Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang meliputi 5 (lima) bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk di Kota Bukittinggi).
 2. Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dalam Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui jalur formal, informal dan nonformal, belum efektif.

- **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
 1. Budaya *zero accident* belum terukur (rasio jumlah kecelakaan terhadap jumlah kendaraan masih 1:500).
 2. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor belum optimal (Tahun 2021, persentase kepemilikan KIR angkutan umum hanya 79 persen dengan jumlah uji KIR terhadap jumlah angkutan umum sebanyak 4.150, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya gedung pengujian, kendaraan bermotor yang representatif, dan UPPPKB yang belum terakreditasi).
 3. Rendahnya pemenuhan kebutuhan rambu dan marka lalu lintas (persentase pemenuhan rambu lalu lintas tahun 2021 sebesar 41,4 persen).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
 1. Belum seluruh kelurahan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM (Rasio KIM terhadap jumlah kelurahan sebesar 62,5 persen tahun 2020).
 2. Pengelolaan isu publik dan aduan masyarakat belum optimal (belum tersedia aplikasi pengelola isu publik dan hubungan masyarakat).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
 1. Cakupan koperasi aktif masih rendah (persentase koperasi aktif sebesar 75,5 persen berada dibawah target sebesar 87 persen pada tahun 2021).
 2. Masih rendahnya keterampilan dan modal pelaku usaha mikro.
 3. Masih terbatasnya pemasaran hasil usaha mikro.

- **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**
 1. Terbatasnya SDM pengelola statistik (belum ada fungsional stastisian dan geodesi).

2. Pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) belum optimal (regulasi/kebijakan pengelolaan SDI di tingkat daerah belum berbentuk Perkada, dan aplikasi SDI Kota belum berjalan optimal).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

1. Kebijakan pengamanan informasi belum tersedia (perlu penyusunan Rencana strategis pengamanan informasi dan tata kelola keamanan informasi).
2. Layanan keamanan informasi belum optimal (hanya 2 SKPD yang menerapkan tanda tangan elektronik).
3. Terbatasnya sumber daya pengelola keamanan informasi (tidak ada pejabat fungsional pengelola persandian).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

1. Tingkat kunjungan perpustakaan di Kota Bukittinggi masih rendah (hanya 6,75 persen kunjungan dibandingkan populasi dan berada di bawah target kunjungan yang telah ditetapkan tahun 2021).
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional pustakawan (jumlah pustakawan tahun 2021 sebanyak 7 orang dari 9 orang tenaga pustakawan yang dibutuhkan).

- **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang diakuisisi (belum ada arsip statis yang diakuisisi selama 5 tahun terakhir).

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Pilihan

- **Urusan Pilihan Pariwisata**

1. Belum tersedianya sistem informasi kepariwisataan terintegrasi.
2. Belum tersedianya gedung kesenian dan pementasan yang representatif.
3. Belum optimalnya pengembangan kawasan wisata baru.

- **Urusan Pilihan Pertanian**

1. Pengembangan agrowisata dan konsep pertanian perkotaan belum optimal.
2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menalami penurunan terus menerus dari 1,37 persen tahun 2017 menjadi 1,18 pada tahun 2021).

3. Rendahnya PAD sektor peternakan dan kesehatan hewan (belum tersedianya pet hotel sebagai tempat layanan penitipan satwa, tidak tersedia pasar ternak yang representatif, tidak ada agrowisata berkonsep edukasi peternakan).

- **Urusan Pilihan Perikanan dan kelautan**

Pengembangan perikanan perkotaan (ikan hias) dan penciptaan wirausaha baru perikanan belum optimal.

- **Urusan Pilihan Perindustrian**

Kontribusi sektor industri pengolahan menurun selama 5 (lima) tahun terakhir (Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016 sebesar 6,07 persen mengalami penurunan secara terus menerus hingga 5,12 persen pada tahun 2021).

Permasalahan Pembangunan Urusan Pendukung, Penunjang, dan Pengawas Pemerintahan

- **Sekretariat Daerah**

Belum akuratnya batas wilayah, nama jalan dan penomoran rumah (ketidaksesuaian data batas wilayah, nama jalan, dan penomoran rumah sebesar 20 persen).

- **Fungsi Keuangan**

Manajemen data dan informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan masih lemah (Pada tahun 2019 jumlah temuan BPK terhadap sistem pengendalian intern sebanyak 3 temuan, dan jumlah temuan BPK terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah sebanyak 2 temuan).

- **Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Masih rendahnya penerapan inovasi daerah oleh perangkat daerah (hanya 17,86 persen perangkat daerah yang menerapkan inovasi daerah tahun 2021).

- **Fungsi Pengawasan**

Optimalisasi pembinaan internal pemerintah daerah terkait pengawasan melekat (masih ada temuan atas pemeriksaan BPK sebanyak 10 temuan pada tahun 2020).

2.3.3. Isu Strategis Berdasarkan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD :

- Isu Strategis Pembangunan Ekonomi :

1. Percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid 19;
2. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan renovasi/perbaiki sarana aktifitas ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin dalam mengembangkan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan potensi UMKM melalui pelatihan penguatan manajemen maupun produk UMKM;
5. Meningkatkan peran koperasi untuk kesejahteraan anggota;
6. Mengembangkan diversifikasi produk UKM;
7. Menciptakan usaha perdagangan yang kondusif;
8. Mengembangkan dukungan untuk meningkatkan skala usaha mikro;
9. Pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
10. Pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar.

- Isu Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas layanan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peningkatan pengarusutamaan gender dengan melakukan pemberdayaan diberbagai aspek sosial, budaya dan agama;
5. Pengembangan literasi, termasuk penggunaan literasi digital guna peningkatan kualitas membaca dan menulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Peningkatan aktifitas seni dan pelestarian budaya.

- **Isu Strategis Pemerintahan :**

1. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3.4. Isu Strategis RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023

Setelah menganalisis kondisi daerah, permasalahan pembangunan, dan telaahan pokok-pokok pikiran DPRD maka ditetapkan isu strategis Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Penanganan Stunting
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
6. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas
7. Peningkatan infrastruktur perkotaan
8. Pelestarian lingkungan hidup
9. Mewujudkan Ketahanan Pangan

- **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**

Dampak Covid 19 pada perekonomian nasional juga berdampak pada perekonomian daerah. Pandemi Covid 19 berdampak pada perlambatan semua komponen PDRB sampai dengan tahun 2021. Sejalan dengan program pemerintah pusat, peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Bukittinggi kedepan juga difokuskan pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Peningkatan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid 19 menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi tahun-tahun ke depan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan perlu untuk ditingkatkan akibat melemahnya *demand* terhadap produk unggulan daerah atas melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat. Melalui program pemberdayaan dan bantuan langsung diharapkan konsumsi dan daya beli masyarakat

meningkat dan akan memberikan multiplier efek terhadap tumbuh kembang usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, anjloknya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak pandemi Covid 19 perlu disikapi melalui pemberian insentif dan stimulus serta kebijakan yang berpihak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama yang bergerak pada sektor unggulan yaitu sektor-sektor pendukung pariwisata perlu untuk percepatan dalam rangka pemulihan perekonomian daerah.

- **Percepatan Penggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Capaian percepatan penanggulangan kemiskinan belum memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi meningkat menjadi 6.980 jiwa, yang juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi 5,14 persen dengan target 4,59 persen. Kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat sehingga menjadi isu pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023 kedepan.

Berbeda halnya dengan capaian kemiskinan, capaian tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi berada diatas target yang ditetapkan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar 6,09 persen berada diatas target capaian yang ditetapkan sebesar 7,16 persen. Namun demikian, isu pengurangan pengangguran tetap menjadi isu strategis Kota Bukittinggi tahun 2023 karena selain berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, penanganan pengangguran berdampak luas kepada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Penciptaan wirausaha baru menjadi prioritas melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan kewirausahaan sekaligus mendukung program unggulan Provinsi Sumatera Barat terkait penciptaan milenial entrepreneur.

Selain itu, sesuai agenda pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca-MDGs, relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2023, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat

kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan: 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; dan 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

- **Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan**

Perkembangan saat ini menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat setelah sandang, pangan, dan papan. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian, namun beberapa tantangan perlu menjadi perhatian diantaranya terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemerataan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, dan kualitas serta kesejahteraan tenaga pengajar.

Penyediaan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas penerapan agama dan kearifan lokal perlu diintervensi melalui pembangunan pendidikan dengan menambahkan muatan lokal keagamaan dan kearifan lokal sehingga selain menghasilkan tamatan yang unggul secara akademis, juga memiliki moral dan budi pekerti yang baik.

- **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanganan Stunting**

Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor

lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan kesehatan menjadi isu strategis pembangunan Kota Bukittinggi pada tahun 2023. Selain penanganan stunting yang menjadi isu global, penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah pada sektor ini. Masih tingginya prevalensi balita yang menderita pendek, prevalensi balita mengalami kurus, kasus anemia pada ibu hamil perlu disikapi melalui penanganan yang tepat. Selain itu, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyalahgunaan narkoba menjadi isu yang harus ditangani secara baik pada beberapa tahun kedepan. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil

aparatus yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat pada tahun depan.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang dibuat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Kota Bukittinggi mendapatkan nilai tertinggi pada kegiatan Monitoring Corruption of Prevention (MCP) sebagaimana penghargaan yang diberikan KPK RI pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama terkait dengan pencegahan korupsi. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu tetap ditingkatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dan berorientasi pada pelayanan.

- Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas.

Fungsi kodrat hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan gender,

perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan setiap warga negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan eksekutif perlu ditangani secara tepat. Masih rendahnya indeks ketahanan keluarga, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya pelayanan dan penanganan 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan. Kondisi ini harus diakui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

- Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Belum tuntasnya penyediaan akses sanitasi dan air minum layak dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sumber air baku, pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, penanganan genangan dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi ke depan selain penanganan rumah tangga kumuh dan rumah tidak layak huni, serta sektor transportasi seperti penanganan kemacetan dan penyediaan rambu dan marka jalan, serta perbaikan sarana dan prasarana aktifitas ekonomi masyarakat.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

- **Pelestarian Lingkungan Hidup**

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota, penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat, dan buruknya kualitas air sungai perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan Daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2023.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Dunia

Pandemi Covid 19 yang berlanjut dengan munculnya varian Delta dan varian Omicron pada tahun 2022 menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity*.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan

perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 setelah berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020.

Selain itu, harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga *Crude Palm Oil* (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid 19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan Covid 19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022.

Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi Covid 19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

Namun demikian, di balik optimisme perekonomian dunia pascapandemi, konflik antara Rusia dan Ukraina juga berdampak terhadap perekonomian dunia di antaranya :

- Melambungnya harga minyak dan gas akibat kekhawatiran pasokan karena Rusia adalah salah satu produsen dan pengeksportor bahan bakar fosil terbesar di dunia.
- Meningkatnya harga bahan pangan terutama gandum dan komoditas turunannya karena Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia yang menyumbang 30 persen dari ekspor gandum global.
- Terguncang pasar saham global akibat sanksi yang melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia
- Perlambatan pemulihan ekonomi global tahun 2022 dari 4,9 persen proyeksi awal IMF menjadi 4,4 persen.

3.1.2. Perkembangan Perekonomian Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid 19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat pandemi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid 19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat.

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid 19 pada tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid 19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid 19 mendorong fenomena terjadinya "*pent up demand*" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021.

Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu

tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid 19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan *real estate* tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

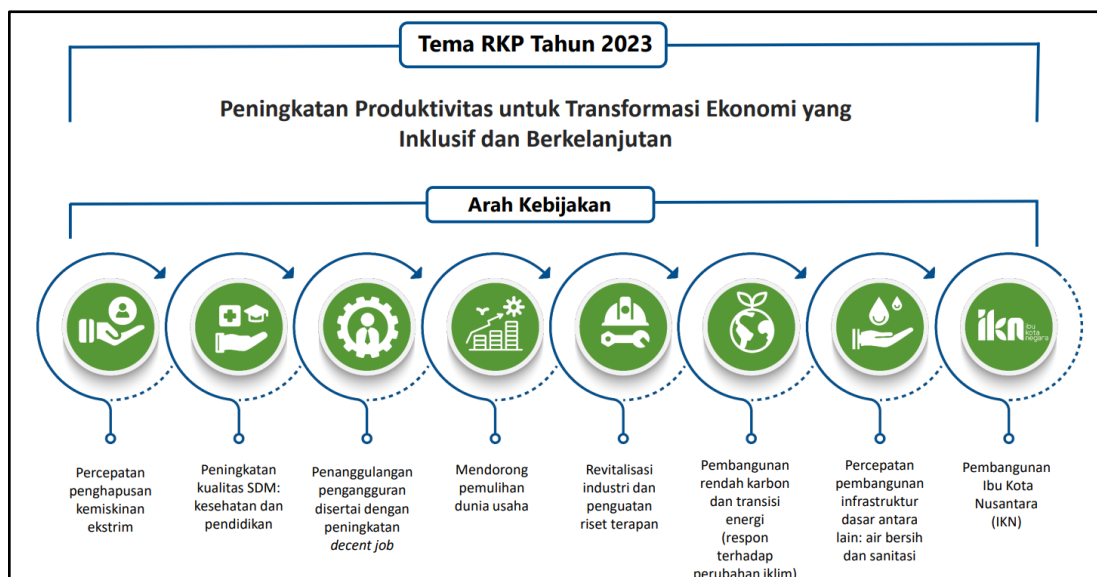
Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid 19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Melalui tema peningkatan produktivitas diharapkan mampu menaikkan *output* potensial sehingga *trajectory* ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan. Tema ini sesuai dengan tantangan pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2023 yaitu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi Covid.

RKP 2023 disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *middle income trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 3.1
Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Bappenas, 2022

Di samping menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan Nasional untuk tahun 2023, Pemerintah Pusat juga menetapkan target ekonomi makro Nasional. Target dimaksud dituangkan dalam RKP Tahun 2023, yang terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3—5,9 persen; (2) Tingkat pengangguran terbuka berkisar 5,3—6,0 persen; (3) Tingkat kemiskinan berkisar 7,5—8,5 persen; (4) Rasio Gini dengan nilai berkisar 0,375—0,378; serta (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar di angka 73,31—73,49.

Dibandingkan realisasi target ekonomi makro tahun 2021 serta proyeksi pada tahun 2022, target ekonomi makro untuk tahun 2023 yang ditetapkan Pemerintah berada pada kisaran angka yang moderat di tengah pemulihan kondisi perekonomian dunia pascapanemi Covid 19, dan dengan masih berlangsungnya konflik antara Rusia dan Ukraina.

Namun, jika ditinjau dari target ekonomi makro yang ditetapkan dalam RPJMN, target ekonomi makro tahun 2023 yang ditetapkan Pemerintah pada beberapa indikator cukup menggambarkan optimisme bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut dapat tercapai, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	2023	
			RPJMN	RKP 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,69	5,0 – 5,5	5,7 – 6,0	5,3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 – 6,3	4,0 – 4,6	5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 – 9,0	7,0 – 7,5	7,5 – 8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 – 0,378	0,374 – 0,377	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67 – 72,69	74,77	73,31 – 73,49

Sumber : Rancangan RKP 2023

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2023, juga terdapat 14 *major project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

3.1.4. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera

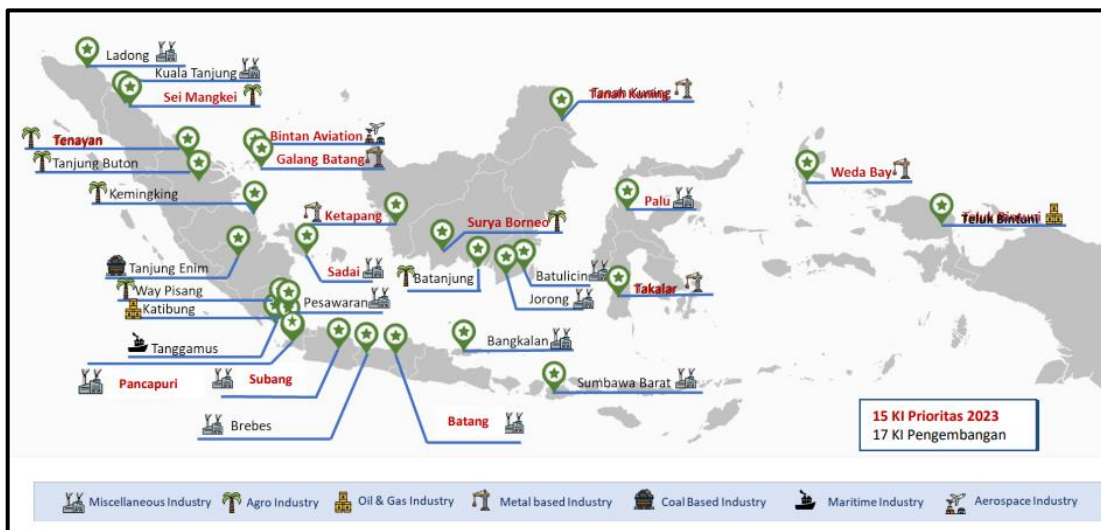
Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan peran Sumatera dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Wilayah Sumatera merupakan penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, serta salah satu wilayah penghasil utama batubara, migas, dan timah.

Pada tahun 2023, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera. Di samping itu, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat.

Pengembangan wilayah Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah di Metropolitan Medan dan Palembang, serta kota-kota besar lainnya seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multimoda yang efisien dan terintegrasi, khususnya di kawasan Metropolitan Medan dan Palembang.

Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, permukiman, air bersih dan listrik di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan seperti Nias, Simeuleu, Mentawai, Anambas; serta memperkuat konektivitas antarkawasan dengan meningkatkan aksesibilitas kota-kota kecil dan menengah, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; serta memperkuat keterkaitan antara kawasan penghasil komoditas di perdesaan dan kawasan industri pengolahan serta pasar di kota-kota besar.

Gambar 3. 2
Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Pengembangan Tahun 2023



Sumber : Bappenas, 2022

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kebakaran lahan yang menurunkan kualitas udara dan memicu infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan daerah pasca bencana, mengurangi risiko kerugian ekonomi, meningkatkan mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat

dan masyarakat, serta memperluas kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan budaya sadar bencana.

Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2023 diprioritaskan antara lain pada:

- (1) pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- (2) pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
- (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- (4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;
- (5) pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan
- (6) penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya.

3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh tren positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah mencanangkan *Visit Beautiful West Sumatra 2023* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 5,72% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pascapandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi Covid 19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 mampu bangkit setelah terkoreksi karena pandemi Covid 19 tahun 2020 dari angka -1,74 persen menjadi 2,67 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini jauh di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada angka 2,67 persen, bahkan melawati target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 3,00 persen. Sektor pariwisata dan sektor perdagangan sebagai sektor ekonomi unggulan Kota Bukittinggi kembali terus membaik sebagai dampak keberhasilan pengendalian pandemi secara nasional dan daerah.

Di samping itu, imbas dari pertumbuhan ekonomi tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi, dari 4,74 persen tahun 2020 turun menjadi 4,59 persen di tahun 2021. Beberapa program prioritas Kota Bukittinggi tahun 2022 seperti revitalisasi pusat-pusat ekonomi masyarakat dan penciptaan akses permodalan perbankan melalui program Tabungan Ustman diharapkan semakin dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 ini.

Sama halnya dengan tingkat kemiskinan, indeks gini masyarakat Kota Bukittinggi juga mengalami penurunan dari 0,265 di tahun 2020 menjadi 0,262 di tahun 2021. Meskipun indeks gini Kota Bukittinggi tahun 2021 masih terkategori baik karena dibawah 0,3, namun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah tahun 2023 agar target capaian yang telah

ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,264 dan 0,263 dapat dicapai.

Sementara tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2021 mencapai angka 7,35 persen di tahun 2021. Angka ini sedikit lebih baik dari angka di tahun 2020, yakni 7,51. Melalui program-program peningkatan kewirausahaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 diharapkan capaian ini terus membaik pada tahun 2022.

Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Kota Bukittinggi Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74	2,67	3,00	4,29
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	49,95	48,47	49,32	50,82
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	71,29	71,76	75,16	78,73
4	TPT (%)	7,51	7,35	7,18	6,96
5	IPM	80,58	80,86	81,14	81,57
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,56	11,67
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746
6	Kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	5,74	5,88	5,81	5,72
8	Gini Rasio	0,265	0,262	0,264	0,263

Dalam rangka mewujudkan target makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2023 maka dirumuskan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat pada kesempatan usaha, akses permodalan dan kesempatan kerja
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar, dan perluasan jangkauan pasar usaha mikro melalui peningkatan kemampuan pemasaran digital.
3. Meningkatkan kunjungan wisata melalui peningkatan jumlah dan revitalisasi kawasan pariwisata kota.
4. Meningkatkan jumlah, ragam usaha, serta kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
5. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan.

6. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
7. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja dan berkomitmen dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konsep ini sejalan dengan konsep *agency theory* yang menempatkan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori ini menuntut setiap tindakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Tidak terkecuali keuangan daerah dalam bentuk APBD sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan pembangunan tercapai secara optimal, maka kebijakan keuangan perlu disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arah kebijakan keuangan dijabarkan secara sistematis, yaitu:

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh

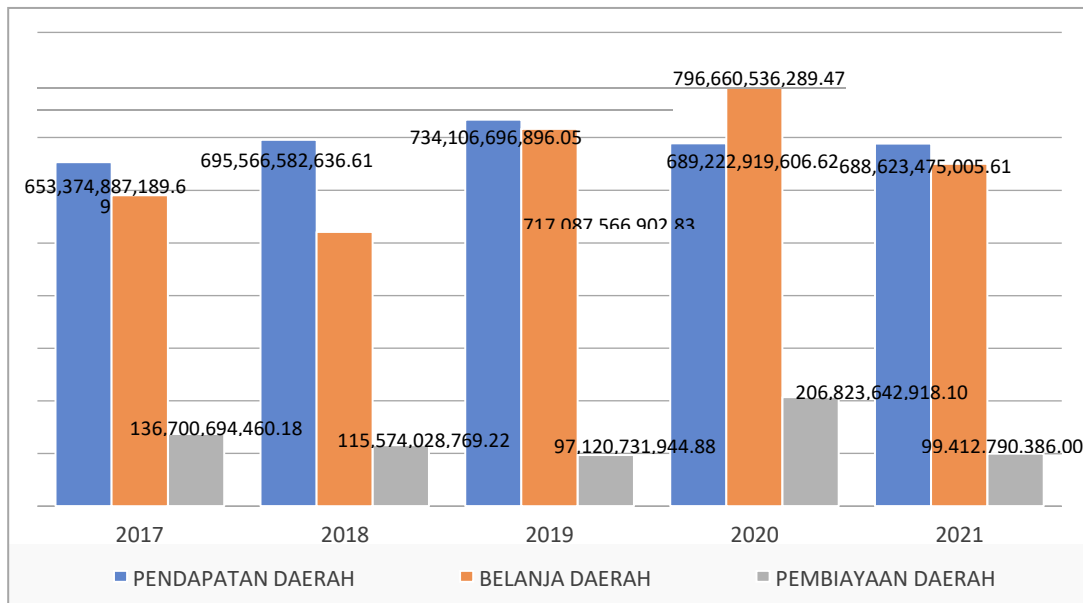
berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 telah merontokkan struktur ekonomi masyarakat sampai tahun 2021. Saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum pulih secara utuh seperti kondisi tahun 2019, masa sebelum pandemi Covid 19. Hal ini sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah ke depan. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada Tahun 2021 di antaranya:

1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada masa pandemi ini menjadi terganggu karena pemerintah pusat mengurangi transfernya ke daerah guna fokus pada upaya-upaya dalam penanganan Covid.
2. Perekonomian Kota Bukittinggi yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata sangat tergantung pada arus pengunjung keluar/masuk kota yang terdampak karena aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional maupun daerah.
3. Usaha perhotelan dan restoran pada awal kebijakan PSBB secara total ditutup sejak Maret 2020. Walaupun telah dibuka kembali, namun belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal.
4. Usaha hiburan dan pariwisata baik pemerintah maupun swasta resmi tidak boleh dibuka pada hari libur baik pada akhir minggu maupun libur nasional yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan daerah dari Pajak Hiburan maupun Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. *Event-event* hiburan yang menimbulkan kerumunan seperti *road race*, pacuan kuda, dan tontonan-tontonan lainnya masih belum diizinkan sampai akhir 2020.
6. Dengan berkurangnya aktivitas usaha maupun masyarakat, berdampak pada turunnya konsumsi listrik sektor usaha maupun rumah tangga sehingga menurunnya potensi sumber pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan.
7. Berkurangnya omset pedagang pasar tradisional, pertokoan maupun pasar grosir membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi.
8. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah Pusat terkait penggunaan/alokasi APBD guna penanganan covid di daerah, sehingga membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran baik di sisi belanja daerah maupun pendapatan daerah.

Hal-hal di atas tentu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2023. Secara lebih terperinci gambaran Realisasi APBD Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada grafik berikut,

Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Pengelompokan akun APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Untuk akun pendapatan terjadi pertumbuhan yang cukup baik dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Realisasi pendapatan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4,46% atau Rp42.217.180.580,92. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,54% atau Rp38.514.629.125,44. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6,11% atau Rp(44.883.777.289,43). Penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah Republik Indonesia. Pandemi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga daya beli dan lumpuhnya beberapa sektor-sektor ekonomi. Intervensi yang dilakukan dalam berbagai cara seperti vaksinasi, pemberian stimulus ekonomi, perlindungan sosial, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berdampak sangat positif. Tahun 2021 telah sektor-sektor ekonomi mulai tumbuh sehingga terjadi pendapatan mulai mengalami perbaikan yaitu penurunan 0,09% atau Rp(599.444.601,01).

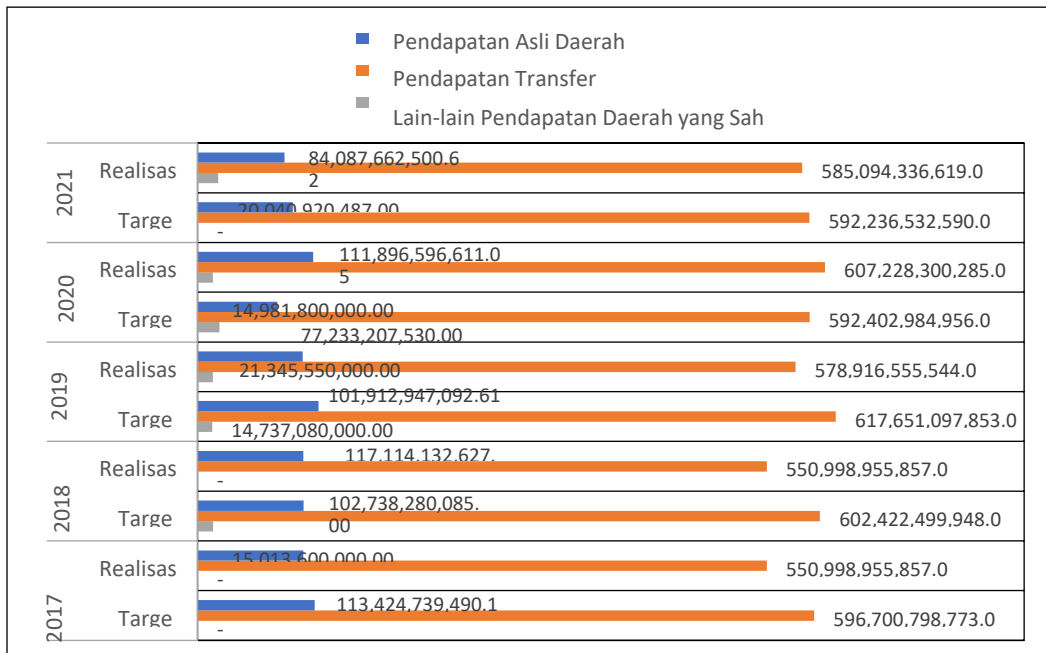
Pada akun belanja pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 19,15% atau Rp113.095.250.512,30. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 2,10% atau Rp14.772.100.254,88. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan 10,87% atau Rp78.105.150.719,14.

Di akhir periode tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 18,40% atau Rp(146.623.049.560,54). Pada awal Covid19 pertumbuhan belanja masih cukup baik yaitu 10,87% hal ini disebabkan pelaksanaan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid19. Untuk Tahun 2021 selain refocusing anggaran penanganan pandemi Covid 19 juga digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Penurunan belanja yang cukup signifikan ini dipengaruhi rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diterima pada tahun berjalan.

Untuk akun pembiayaan pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 370,34% atau Rp83.127.604.107,04. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 8,01% atau Rp 8.453.296.824,34. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan 112,96% atau Rp109.702.910.973,. Di akhir periode tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 51,93% atau Rp (107.410.852.532,43). Akun pembiayaan untuk tahun 2017 hingga tahun 2018 terdiri dari penerimaan pembiayaan yakni sisa lebih perhitungan anggaran dan pengeluaran pembiayaan yaitu pencairan dana cadangan. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran. Pengertian dari sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dikurangi belanja dan ditambah pembiayaan tahun sebelumnya.

Akun pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perbandingan target dan realisasi pendapatan periode tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

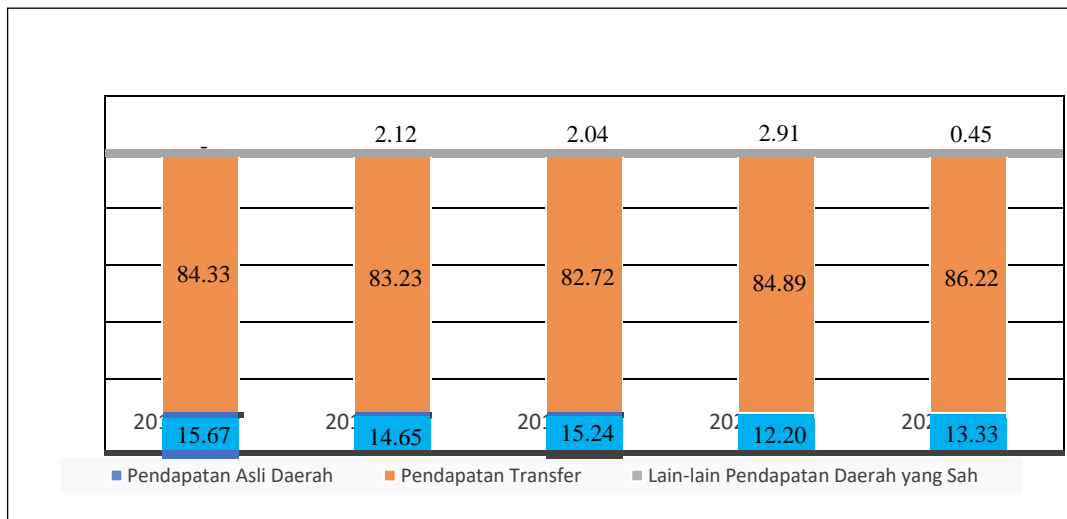
Grafik 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. Tahun 2021



Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Dilihat dari kontribusi realisasi dari kelompok akun pembentuk pendapatan daerah periode tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut,

Grafik 3.3
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

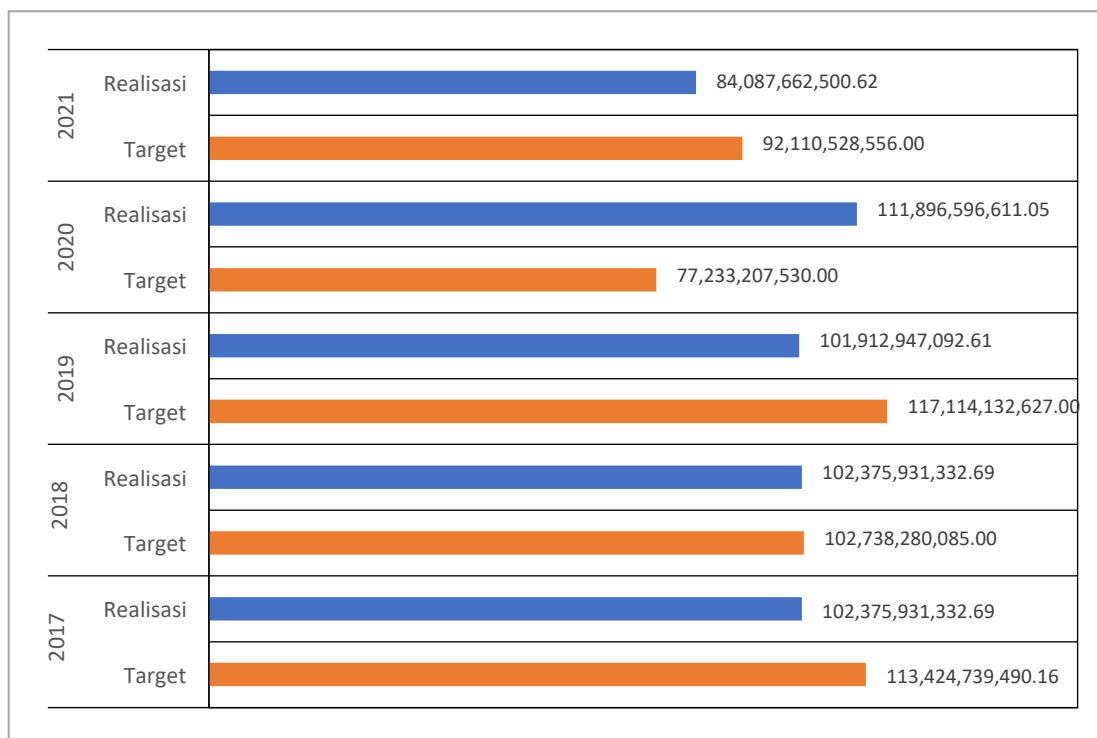


Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa pendapatan transfer memberikan kontribusi yang besar yaitu berkisar antara 82,46% hingga 86,22%. Disusul oleh pendapatan asli daerah dari 10,20% hingga 15,67%. Terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah berkisar antara 0% hingga 2,91%.

Pada hakekatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah telah menetapkan target dari potensi yang ada. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada grafik 3.4 berikut,

Grafik 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

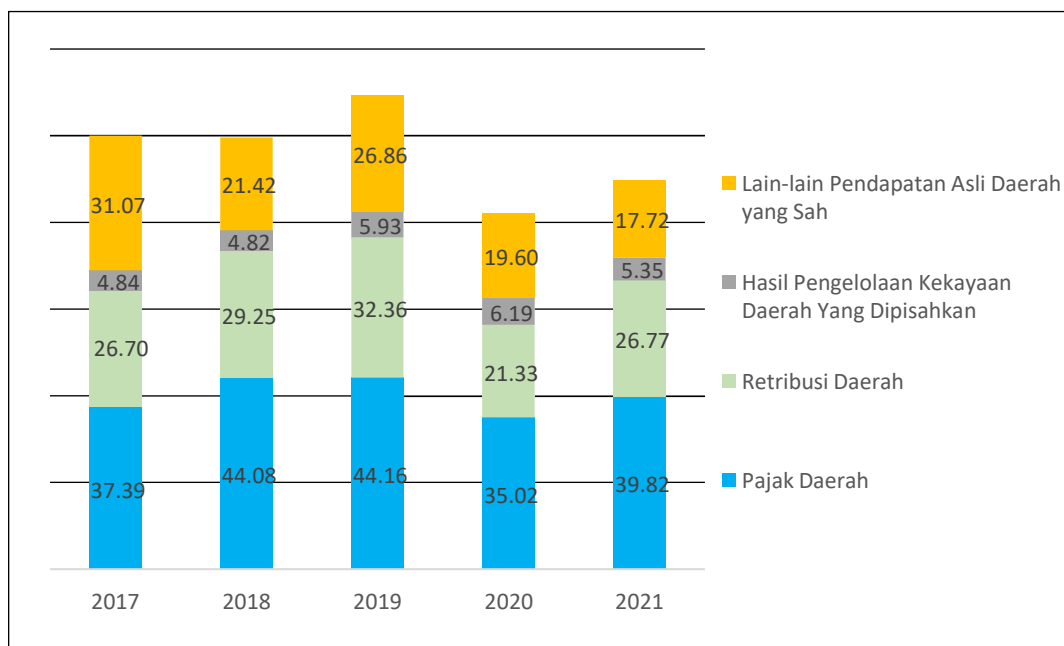
Tabel 3.4
Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 (dibanding Tahun 2020)

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	%
4.1.01	Pajak Daerah	35.857.033.610,00	40.765.025.893,00	13,69
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.995.854.765,00	12.296.289.161,00	53,78
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.494.925.670,00	6.052.919.004,00	10,15
4.1.01.08	Pajak Hiburan	497.643.625,00	712.031.108,00	43,08
4.1.01.09	Pajak Reklame	847.491.000,00	648.480.050,00	(23,48)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	5.577.303.507,00	5.902.665.599,00	5,83
4.1.01.11	Pajak Parkir	299.749.710,00	298.836.265,00	(0,30)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	60.190.419,00	69.419.188,00	15,33
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.408.363.288,00	3.768.254.822,00	10,56
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.675.511.626,00	11.016.130.696,00	(5,65)
4.1.02	Retribusi Daerah	21.833.603.342,00	27.401.880.331,00	25,50
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.610.234.008,00	5.943.255.352,00	5,94
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	433.045.700,00	493.338.000,00	13,92
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.133.909.800,00	1.251.957.040,00	10,41
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.600.000,00	4.675.000,00	29,86
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.197.759.000,00	1.193.391.000,00	(0,36)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	890.950.908,00	1.194.622.812,00	34,08
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.222.500,00	-	(100,00)
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.592.268.000,00	1.720.804.000,00	8,07
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.478.100,00	10.107.500,00	19,22
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	74.360.000,00	100,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	15.499.134.960,00	20.997.071.142,00	35,47
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	176.579.728,00	138.576.300,00	(21,52)
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.927.738.950,00	2.055.531.348,00	(29,79)
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	180.410.000,00	179.782.000,00	(0,35)
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.018.968.000,00	1.495.068.000,00	46,72
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	314.994.000,00	236.398.000,00	(24,95)
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.805.080.957,00	16.810.153.684,00	55,58
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.363.325,00	81.561.810,00	8,22
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	724.234.374,00	461.553.837,00	(36,27)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	693.999.374,00	437.483.837,00	(36,96)
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.235.000,00	24.070.000,00	(20,39)

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Kelompok pendapatan asli daerah di bentuk dari jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi dari tiap-tiap objek terhadap kelompok pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terlihat pada grafik berikut,

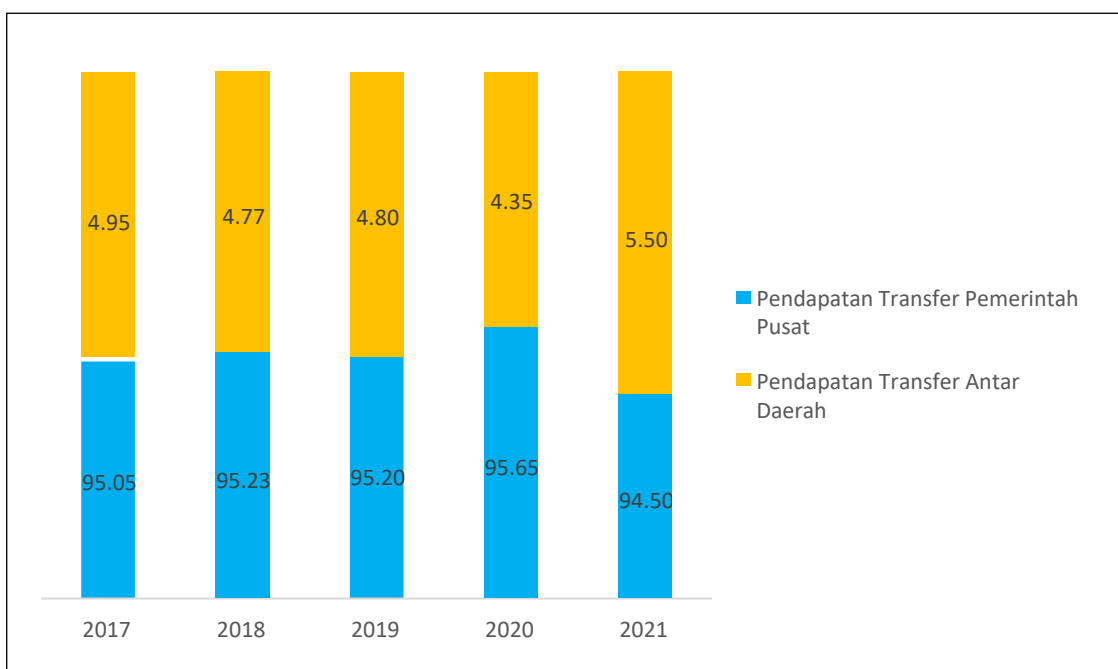
Grafik 3.5
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021



Sumber: Badan Keuangan, 2022

Pada grafik di atas dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berada pada kisaran 35,02% hingga 44,16%, kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah berada pada kisaran 21,33% hingga 32,36%, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada kisaran 4,82% hingga 6,19%, dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah berada pada kisaran 17,72% hingga 31,07%. Selain dari Pendapatan Asli Daerah, Komponen pendapatan daerah lainnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Gambaran kontribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada grafik berikut,

Grafik 3.6
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021

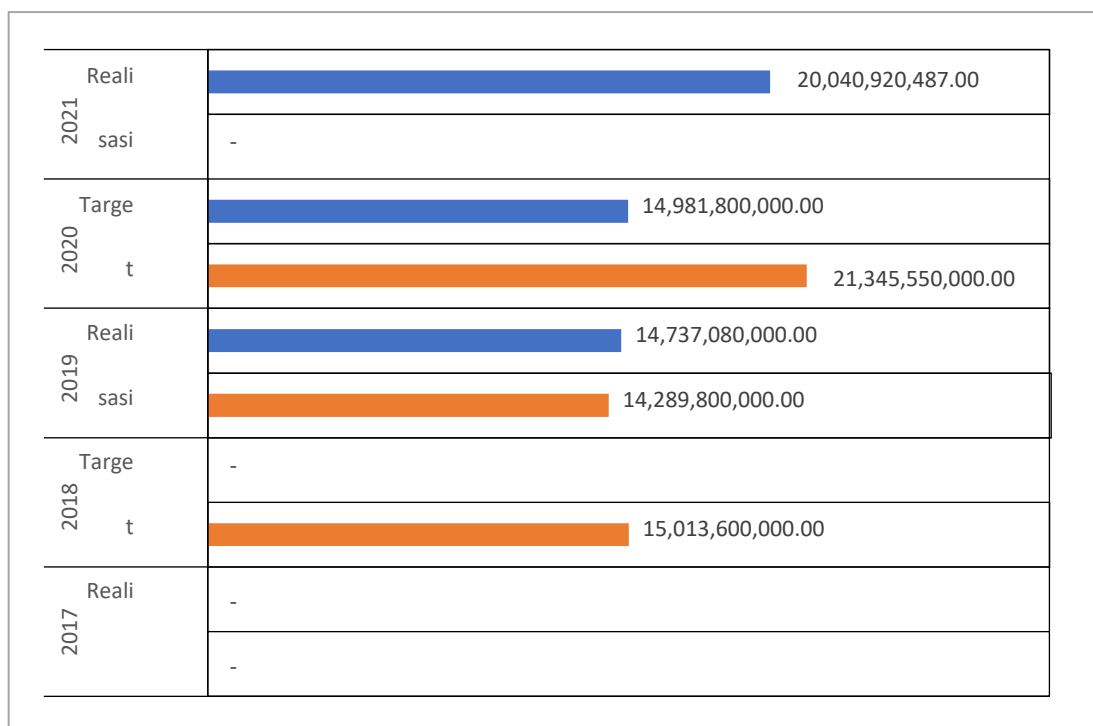


Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Pada grafik di atas dapat dilihat kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat berada pada kisaran 94,50% hingga 95,65% sedangkan pendapatan transfer antar pemerintah daerah berada pada kisaran 4,35% hingga 5,50%.

Kelompok akun pendapatan yang ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbandingan target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 3.7
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Pada grafik di atas tergambar perbandingan target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp0, tahun 2018 sebesar Rp14.738.720.000,00 yaitu pendapatan hibah, tahun 2019 sebesar Rp14.981.800.000,00 yaitu dari pendapatan hibah, tahun 2020 sebesar Rp20.040.920.487,00 dari pendapatan hibah, dan tahun 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00 dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akun kedua dalam konteks pendanaan adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Gambaran target dan realisasi belanja selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

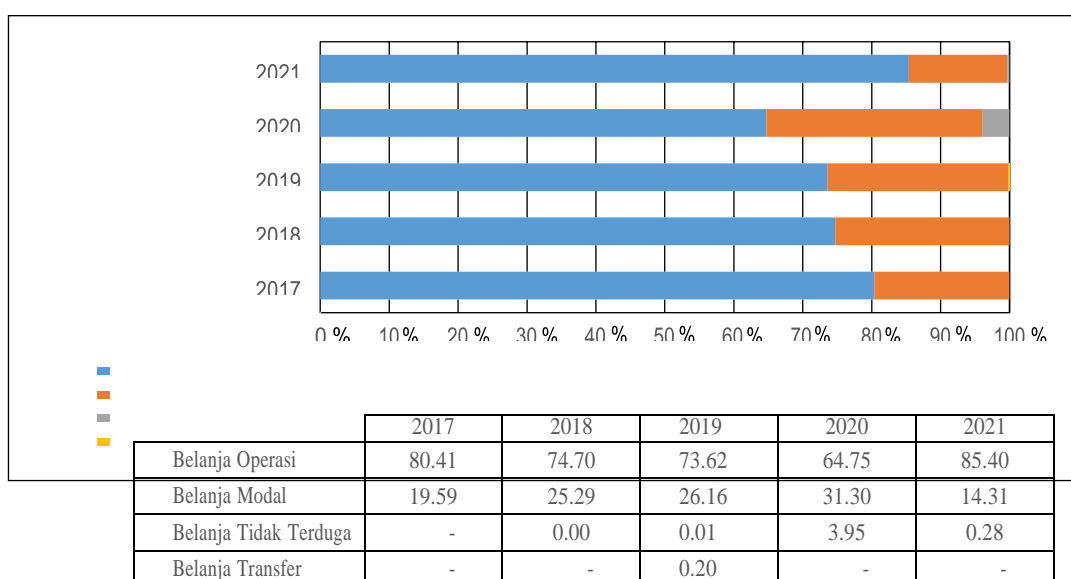
No	Tahun	Belanja Daerah		Pertumbuhan Realisasi (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2017	735.291.320.634,34	590.688.034.803,65	(6,41)
2	2018	839.898.354.079,22	695.592.067.770,61	17,76
3	2019	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	3,09
4	2020	883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	11,10
5	2021	783.759.843.834,00	650.037.486.729,43	(18,40)

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar Rp113.095.250.512,30 atau 19,15%, tahun 2019 sebesar Rp14.772.100.254,88 atau 2,10%, tahun 2020 sebesar Rp78.105.150.719,14 atau 10,87% dan tahun 2021 sebesar minus Rp(146.623.049.560,54) atau minus 18,48%.

Belanja daerah diatas terdiri dari komponen belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kontribusi realisasi belanja daerah kota bukittinggi tertinggiterdapat pada belanja operasi, selanjutnya belanja modal dan diikuti oleh belanja tidak terduga. Kontribusi tiap-tiap komponen belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 3.8
Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

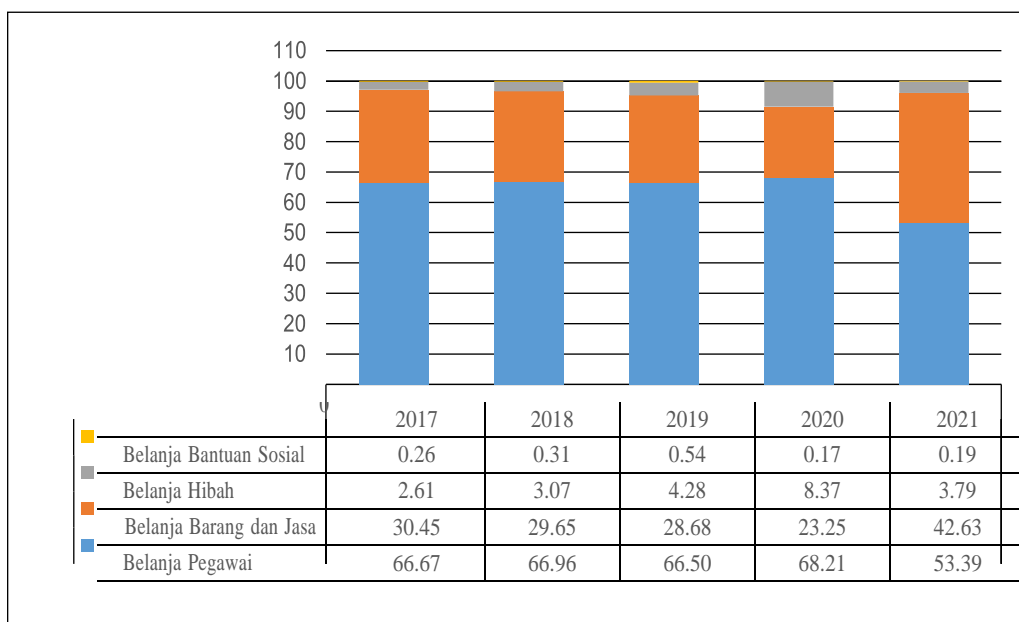


Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Pada grafik di atas dapat disampaikan bahwa belanja terbesar adalah belanja operasi yaitu berkisar antara 64,75% hingga 85,40%, selanjutnya belanja modal berkisar antara 14,31% hingga 31,30%, kemudian belanja tidak terduga berkisar antara 0% hingga 3,95%, dan terakhir belanja transfer berkisar antara 0% hingga 0,20%.

Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kontribusi dari jenis belanja tersebut terhadap belanja operasi periode tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan pada grafik di bawah ini,

Grafik 3.9
Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

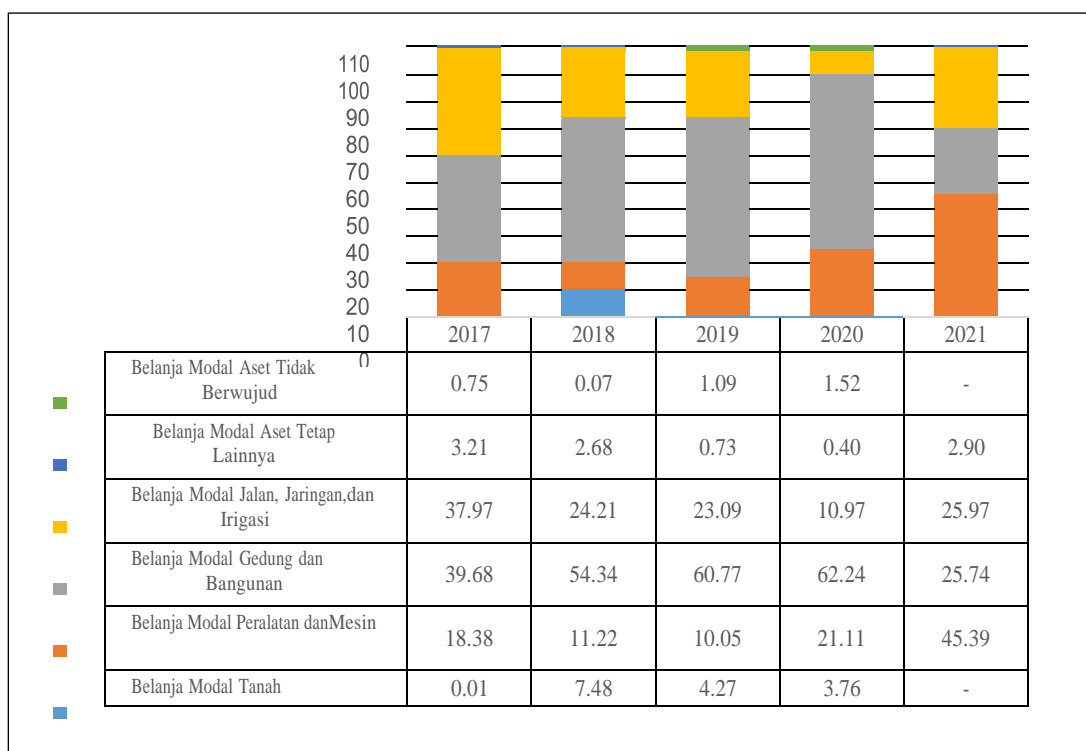


Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Kontribusi terbesar selama tahun 2017 hingga tahun 2021 pada belanja operasi adalah belanja pegawai yang berada pada kisaran 53,39% hingga 68,21%, belanja barang dan jasa berada pada kisaran 23,25% hingga 42,63%, belanja bunga tidak ada anggaran dan realisasi, belanja subsidi tidak ada anggaran dan realisasi, belanja hibah berada pada kisaran 2,61% hingga 8,37%, dan terakhir adalah belanja bantuan sosial yaitu sebesar 0,17% hingga 0,54%.

Kelompok belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud. Kontribusi dari jenis belanja tersebut terhadap belanja modal periode tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan pada grafik di bawah ini,

Grafik 3.10
Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Keuangan tahun 2022

Kontribusi selama tahun 2017 hingga tahun 2021 pada belanja modal adalah belanja modal tanah berada pada kisaran 0% hingga 7,48%, belanja modal peralatan dan mesin berada pada kisaran 10,05% hingga 45,39%, belanja modal gedung dan bangunan berada pada kisaran 25,74% hingga 62,24%, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berada pada kisaran 10,97% hingga 37,97%, belanja modal aset tetap lainnya berada pada kisaran 0,40% hingga 3,21%, dan belanja modal aset tidak berwujud berada pada kisaran 0% hingga 1,52%.

Kelompok belanja tidak terduga hanya terdiri dari jenis belanja tidak terduga. Selama tahun 2017 realisasi belanja tidak terduga adalah Rp0, tahun 2018 sebesar Rp16.223.500,00, tahun 2019 sebesar Rp97.094.060,08, tahun 2020 sebesar Rp31.485.489.291,50, dan tahun 2021 sebesar Rp1.844.107.190,00.

Untuk kelompok belanja transfer hanya terdiri dari jenis belanja bantuan keuangan. Pada rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 hanya ada realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp1.467.818.668,00.

Untuk memudahkan dalam memahami kondisi keuangan dalam rentang periode tertentu digunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan organisasi dalam riviui hasil suatu organisasi dengan panduan perbandingan data keuangan

yang ada di dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas. analisis rasio keuangan yang digunakan antara lain rasio lancar, rasio cepat, rasio total hutang, dan rasio hutang terhadap modal. Analisis rasio keuangan dalam rentang periode tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio lancar	28,98	15,36	46,58	33,86	14,60
2	Rasio cepat	30,67	16,49	50,97	36,18	15,05
3	Rasio total hutang	0,2261	0,4580	0,1658	0,2107	0,6060
4	Rasio hutang terhadap modal	0,2267	0,4601	0,1660	0,2190	0,8004

Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

A. Rasio Likuiditas

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar atau rasio modal kerja atau dalam sering disebut dengan *current ratio* adalah suatu metrik keuangan yang digunakan dengan mengukur uang tunai jangka pendek yang tersedia pada organisasi. Hal ini akan mengukur kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, yaitu mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghapus seluruh utangnya yang sedang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun. Rasio lancar tahun 2017 adalah 28,98, tahun 2018 sebesar 15,36, tahun 2019 sebesar 46,5, tahun 2020 sebesar 33,86 dan tahun 2021 sebesar 14,60.

2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Quick ratio atau biasa disebut rasio cepat atau *acid-test* rasio berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan, atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, ini menguji seberapa banyak perusahaan memiliki aset untuk melunasi semua kewajibannya. Aset termasuk uang tunai, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan. Rasio cepat menawarkan tes likuiditas perusahaan yang lebih ketat daripada rasio lancar. Rasio cepat tahun 2017 adalah 30,67, tahun 2018 sebesar 16,49, tahun 2019 sebesar 50,97, tahun 2020 sebesar 36,18, dan tahun 2021 sebesar 15,05.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi

rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 0,2261, tahun 2018 sebesar 0,4580, tahun 2019 sebesar 0,1658, tahun 2020 sebesar 0,2107, dan tahun 2021 sebesar 0,6060.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio hutang terhadap modal pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017 sebesar 0,2267, tahun 2018 sebesar 0,4601, tahun 2019 sebesar 0,1660, tahun 2020 sebesar 0,2190, dan tahun 2021 sebesar 0,8004.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai organisasi sektor public, Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pada penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pemerintah diberikan kewenangan berupa kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengelola seluruh sumber keuangan daerah untuk pencapaian tujuannya secara efektif, efisien dan ekonomis, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu komponen dari LKPD adalah Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 posisi neraca Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	ASET	1.515.282.417.304,37	1.445.331.498.036,00	1.620.883.912.558,68	1.691.506.943.232,61	2.148.300.689.351,12
2	KEWAJIBAN	3.426.642.672,67	6.619.770.671,00	2.686.736.009,00	3.562.600.613,00	13.019.546.302,53
3	EKUITAS	1.511.855.774.631,70	1.438.711.727.365,00	1.618.197.176.549,68	1.687.944.342.619,61	1.626.720.736.338,46

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Dalam rentang periode tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan aset sebesar Rp633.018.272.046,75 atau 41,78%, kewajiban mengalami kenaikan Rp9.592.903.629,86 atau 279,95% dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp114.864.961.706,76 atau 7,60%. Lebih rinci pertumbuhan neraca digambarkan pada tabel berikut,

Tabel 3.8
Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	ASET	1,56	(4,62)	12,15	4,36	27,01
2	KEWAJIBAN	23,24	93,19	(59,41)	32,60	265,45
3	EKUITAS	1,52	(4,84)	12,48	4,31	(3,63)

Sumber: Badan Keuangan, 2020

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan membandingkan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 3.9
Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)	RasioKetergantungan Daerah (%)
1	2017	550.998.955.857,00	653.374.887.189,69	84,33
2	2018	578.916.555.544,00	734.106.696.896,05	78,86
3	2019	607.228.300.285,00	734.106.696.896,05	82,72
4	2020	585.094.336.619,00	689.222.919.606,62	84,89
5	2021	593.750.837.738,00	688.623.475.005,61	86,22

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi rata-rata masih mendekati 85%. Selain dilihat dari Rasio Ketergantungan Daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 3.10
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s.d. 2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	2017	102.375.931.332,69	550.998.955.857,00	18,58
2	2018	101.936.792.226,61	578.916.555.544,00	17,61
3	2019	111.896.596.611,05	607.228.300.285,00	18,43
4	2020	84.087.662.500,62	585.094.336.619,00	14,37
5	2021	91.786.008.737,61	593.750.837.738,00	15,46

Sumber: Badan Keuangan, 2022

Rasio kemandirian keuangan daerah selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 berada pada kisaran 14,37% hingga 18,58%. Tingkat kemandirian keuangan ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan keuangan terhadap pendapatan transfer terutama transfer dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan ini didominasi akibat alokasi belanja pegawai dari yang dibiayai oleh pendapatan transfer yakni sebesar 57,22%.

Adapun kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 dapat disajikan pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan terhadap APBD
Tahun 2017 s.d. 2021

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	92,01	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	99,75	684.347.061.146,00	688.623.475.005,61	100,62
4.1	Pendapatan Asli Daerah	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	90,26	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	95,54	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	108,88	92.110.528.556,00	91.786.008.737,61	99,65
4.1.01	Pajak Daerah	46.068.135.193,00	38.282.140.327,00	83,10	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97
4.1.02	Retribusi Daerah	33.868.949.414,00	27.329.451.324,00	80,69	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	67,18	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.953.910.645,00	4.953.910.645,00	100,00	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.533.744.238,16	31.810.429.036,69	111,48	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46	23.948.534.818,00	18.137.070.905,61	75,73
4.2	Pendapatan Transfer	596.700.798.773,00	550.998.955.857,00	92,34	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	96,10	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	98,31	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	98,77	592.236.532.590,00	593.750.837.738,00	100,26
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	572.830.425.613,00	523.728.868.598,00	91,43	563.542.061.948,00	551.311.869.776,00	97,83	588.960.303.000,00	578.077.148.512,00	98,15	567.964.438.500,00	559.635.238.910,00	98,53	562.370.143.182,00	561.075.580.504,00	99,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.870.373.160,00	27.270.087.259,00	114,24	38.880.438.000,00	27.604.685.768,00	71,00	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	101,60	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	-	3.086.628.530,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.086.628.530,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	92,01	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	99,75	684.347.061.146,00	688.623.475.005,61	100,62
5	BELANJA DAERAH	735.291.320.634,34	590.688.034.803,65	80,33	839.898.354.079,22	703.783.285.315,95	83,79	892.665.572.816,88	718.555.385.570,83	80,50	883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	90,15	783.759.843.834,00	650.037.486.729,43	82,94
5.1	BELANJA OPERASI	540.833.477.400,34	474.951.481.949,65	87,82	594.679.811.973,22	525.756.244.621,95	88,41	586.118.663.315,88	529.004.017.745,96	90,26	574.243.632.962,10	515.857.433.183,13	89,83	642.962.609.606,00	555.154.744.426,11	86,34
5.1.1	Belanja Pegawai	346.504.996.336,34	316.650.194.485,00	91,38	350.279.328.106,42	352.055.439.698,03	100,51	369.010.273.081,61	351.766.532.641,00	95,33	369.287.193.295,00	351.883.126.992,57	95,29	322.664.639.155,00	296.369.653.565,25	91,85
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.078.902.296,00	144.646.454.921,65	81,68	221.822.906.198,80	155.879.355.960,03	70,27	180.909.779.341,88	151.737.192.012,07	83,87	154.876.579.791,10	119.939.780.304,50	77,44	295.562.732.925,00	236.689.663.677,43	80,08
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	15.236.436.768,00	12.410.690.543,00	81,45	20.229.277.668,00	16.165.519.500,89	79,91	30.476.825.892,39	22.666.133.092,89	74,37	47.721.418.276,00	43.169.467.886,06	90,46	23.655.237.526,00	21.015.427.183,43	88,84
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.013.142.000,00	1.244.142.000,00	61,80	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	70,52	5.721.785.000,00	2.834.160.000,00	49,53	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36,68	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	192.584.978.133,00	115.736.552.854,00	60,10	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	73,95	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	95,66	123.125.748.792,00	93.038.635.113,32	75,56
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.270.870.248,00	9.040.000,00	0,28	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	72,93	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	61,32	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88,82	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.364.865.376,00	21.269.912.183,00	63,75	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	85,34	22.061.523.690,00	18.898.237.285,00	85,66	55.774.850.654,00	52.624.388.116,00	94,35	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	84,46
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.564.175.673,00	45.929.632.710,00	53,68	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	70,27	213.979.710.955,00	114.238.250.879,55	53,39	157.880.086.158,00	155.184.517.345,15	98,29	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	81,80

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.103.343.405,00	43.948.486.000,00	67,51	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	77,44	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	85,14	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87,20	40.886.820.001,00	24.162.072.116,00	59,10
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.821.508.431,00	3.710.075.961,00	97,08	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	91,82	1.723.439.080,00	1.367.290.326,00	79,33	1.019.120.000,00	1.004.355.100,00	98,55	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	91,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.460.215.000,00	869.406.000,00	59,54	563.000.000,00	130.163.301,00	23,12	2.247.368.633,00	2.052.610.053,00	91,33	4.055.616.250,00	3.784.792.557,00	93,32	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.872.865.101,00	-	-	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,44
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.872.865.101,00	-	-	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,44
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	100,00	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	735.291.320.634,34	590.688.034.803,65	80,33	839.898.354.079,22	703.783.285.315,95	83,79	892.665.572.816,88	718.555.385.570,83	80,50	883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	90,15	783.759.843.834,00	650.037.486.729,43	82,94
6	PEMBIAYAAN DAERAH	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	96,07	119.723.974.046,22	105.574.028.769,22	88,18	142.142.723.668,88	97.120.731.944,88	68,33	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	107,31	99.412.782.688	99.412.790.386	100,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	88,65	142.142.723.668,88	97.120.731.944,88	68,33	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	107,31	99.412.782.688,00	99.412.790.386,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	84.419.892.263,22	84.419.892.263,22	100,00	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	100,00	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	100,00	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	64,89	53.552.400.871,00	8.530.409.147,00	15,93	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	116,59	26.756.453,00	26.764.151,00	100,03
6.1.03	Hasil Penjualan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	88,65	142.142.723.668,88	97.120.731.944,88	68,33	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	107,31	99.412.782.688,00	99.412.790.386,00	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan, 2022

3.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk kepentingan penyusunan program kerja pemerintah di masa yang akan datang perlu dilaksanakan proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan tidak diberlakukan sama untuk seluruh komponen pendapatan. Hal ini dilakukan mengingat karakteristik yang berbeda-beda dari setiap kelompok pendapatan. Penyusunan proyeksi ini dilaksanakan menggunakan dasar pemikiran dan asumsi sebagai berikut:

1. Program pemerintah yang dilaksanakan dalam penanggulangan Covid 19 yang dilaksanakan secara komprehensif meliputi kesehatan, ekonomi dan sosial budaya telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dibandingkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pada kisaran 5 sampai 5,5%.
2. Proyeksi pendapatan asli daerah menggunakan dasar dokumen riset potensi daerah (Risipoda). Selain itu pendapatan asli daerah pada periode tahun 2019 digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kondisi normal dari pendapatan asli daerah. Dasar pemikirannya adalah pandemik Covid 19 dimulai pada tahun 2020. Pertumbuhan pendapatan asli daerah pada periode 2021 juga digunakan sebagai dasar untuk proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2023.
3. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar pemerintah daerah. Pendapatan transfer pusat terdiri dari dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH), dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU), dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan dana insentif daerah. Proyeksi untuk DBH diperkirakan pertumbuhan sebesar 3%, untuk dana alokasi umum diperkirakan terjadi penurunan sebesar 3% hal ini merujuk penurunan realisasi DAU pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik tidak dapat diproyeksikan hal ini disebabkan karakteristik khususnya dan ketidakpastian. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang diperhitungkan adalah BOS Reguler, TPG PNSD, tamsil guru PNSD, BOP Paud, dan BOP Pendidikan kesetaraan. Bagian terakhir transfer pusat yaitu DID tidak dapat diproyeksikan karena terkait dengan instrumen penilaian yang tidak dapat diperkirakan hasilnya.
4. Pendapatan transfer antar daerah, yaitu pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi diperkirakan mengalami kenaikan 3%. Hal ini didukung dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
5. Komponen pendapatan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diproyeksi tidak ada pada tahun 2023-2024.

Rincian realisasi pendapatan tahun 2020 dan 2021 beserta proyeksi pendapatan tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2020 s.d 2024

Rek	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2020	Realisasi Th 2021	Proyeksi/ Target pada Th 2022	Proyeksi/ Target pada Th 2023	Proyeksi/ Target Th 2024
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH	689.222.919.606,62	688.623.475.005,61	717.647.532.987,00	639.822.332.029,52	656.125.337.224,43
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	84.087.662.500,62	91.786.008.737,61	139.976.857.262,00	136.898.567.264,36	139.636.538.609,65
4.1.01	Pajak Daerah	35.857.033.610,00	40.765.025.893,00	50.549.852.262,00	50.851.590.749,52	51.868.622.564,51
4.1.02	Retribusi Daerah	21.833.603.342,00	27.401.880.331,00	55.190.619.000,00	52.826.412.684,00	53.882.940.937,68
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	5.482.031.608,00	7.505.000.000,00	7.505.000.000,00	7.655.100.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	20.065.069.357,62	18.137.070.905,61	26.731.386.000,00	25.715.563.830,84	26.229.875.107,46
4.2.	Pendapatan Transfer	585.094.336.619,00	593.750.837.738,00	577.670.675.725,00	502.923.764.765,16	516.488.798.614,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.635.238.910,00	561.075.580.504,00	547.804.286.317,00	470.748.246.084,00	483.669.769.560,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	25.459.097.709,00	32.675.257.234,00	29.866.389.408,00	32.175.518.681,16	32.819.029.054,78
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.040.920.487,00	3.086.628.530,00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.040.920.487,00	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	3.086.628.530,00	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2022

3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan-kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2023 masih disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui pengaturan pola Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023

pembelanjaan, antara lain:

- 1) Alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi covid 19 dengan prioritas:
 - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup
 - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.
 - d. Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dari Virus Corona.
- 2) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 3) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah maka perlu dilakukan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- 4) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- 5) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 6) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 8) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
- 9) Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan

- pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Secara khusus untuk tahun 2023 dan 2024 alokasi anggaran hibah juga disediakan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - f. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas *output* dan *outcomenya*.
 - g. Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarannya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - i. Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
 - j. Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut,

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 s.d 2024

		Jumlah		
		Proyeksi/	Proyeksi/	Proyeksi/

No	Uraian	Realisasi Th 2020	Realisasi Th 2021	Target pada Th2022	Target pada Th2023	Target pada Th2024
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	814.003.533.985,47	650.037.486.729,43	842.475.552.719,00	656.671.843.083,90	688.958.929.378,63
5.1.	Belanja Operasi	515.857.433.183,13	555.154.744.426,11	644.478.069.153,00	562.646.632.627,00	592.380.033.276,00
5.1.01	Belanja Pegawai	351.883.126.992,57	296.369.653.565,25	318.163.326.162,00	324.526.592.690,00	340.482.839.654,00
5.1.02	Belanja Barangdan Jasa	119.939.780.304,50	236.689.663.677,43	282.737.745.465,00	190.381.369.909,00	199.741.996.200,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	1.575.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	42.463.410.896,06	21.015.427.183,43	38.916.997.526,00	45.334.051.130,00	49.632.348.790,00
5.1.06	Belanja BantuanSosial	865.058.000,00	1.080.000.000,00	3.085.000.000,00	2.404.618.898,00	2.522.848.632,00
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan	706.056.990,00	-	-	-	-
5.2.	Belanja Modal	249.317.613.815,34	93.038.635.113,32	173.660.159.826,00	68.701.020.530,90	72.078.896.102,63
5.2.01	Belanja ModalTanah	9.377.400.000,00	-	200.000.000,00	-	-
5.2.02	Belanja ModalPeralatan dan Mesin	52.624.388.116,00	42.231.774.799,80	47.903.216.756,00	22.835.024.359,00	23.957.771.450,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung danBangunan	155.184.517.345,15	23.949.425.057,52	67.127.577.909,00	22.322.931.110,90	23.420.499.722,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.342.160.697,19	24.162.072.116,00	53.954.508.161,00	22.055.115.074,00	23.139.515.769,00
5.2.05	Belanja ModalAset Tetap Lainnya	1.004.355.100,00	2.695.363.140,00	4.474.857.000,00	1.487.949.987,00	1.561.109.161,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.784.792.557,00	-	-	-	-
5.3.	Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	1.844.107.190,00	15.070.657.073,00	15.824.189.926,00	15.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	15.070.657.073,00	15.824.189.926,00	15.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	-	-	9.266.666.667,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00
5.4.1	Belanja BagiHasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	9.266.666.667,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
3. Pencairan Dana Cadangan;
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
5. Penerimaan Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
7. Penerimaan Piutang Daerah; dan
8. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2023 yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran silpa untuk tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2% dari belanja tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5%.
2. Pengeluaran pembiayaan proyeksikan tidak ada pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 serta Proyeksi 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.14
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. 2021 dan Proyeksi/Target Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2020	Realisasi Th 2021	Proyeksi/Target pada Th 2022	Proyeksi/Target pada Th 2023	Proyeksi/Target pada Th 2024
1	2	3	4	5	6	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	206.823.642.918,43	99.412.790.386,00	124.828.019.732,00	16.849.511.054,38	32.833.592.154,20
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	206.823.642.918,43	99.412.790.386,00	134.828.019.732,00	16.849.511.054,38	32.833.592.154,20
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	107.773.841.835,10	99.386.026.235,00	134.828.019.732,00	16.849.511.054,38	32.833.592.154,20
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	99.049.801.083,33	26.764.151,00	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	10.000.000.000,00	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal	-	-	10.000.000.000,00	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai langkah intervensi yang harus dilakukan dalam mencapai target kinerja pembangunan, menyelesaikan permasalahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan evaluasi tahun berjalan RKPD 2022 sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026. Analisis ini berkaitan dengan identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah merujuk kepada capaian terhadap target yang telah ditetapkan ataupun kemungkinan pencapaian target sampai akhir tahun 2021. Begitu juga halnya dengan isu strategis nasional, kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan Sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga berangkat dari analisis terhadap pencapaian kinerja kota yang diturunkan ke tiap-tiap SKPD sesuai bidang urusan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Rumusan dan usulan tiap-tiap SKPD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan; relevansi dan keterkaitannya terhadap pencapaian prioritas nasional, provinsi, visi dan misi kota yang termaktub dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006—2025, serta isu strategis daerah lainnya. Analisis ini juga dikaitkan dengan visi misi serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sehingga segera dapat diimplementasikan sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

bottom up dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (penduduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%
3. Penanggulangan penanganan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.

4. Mendorong pemulihan dunia usaha. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim). Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;

- d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%;
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A;
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang hendak dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,31-73,49;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5%-8,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021—2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021—2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid 19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima subsektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing, arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada:
 - a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan

- b) Pemenuhan terhadap pencapaian Imunisasi Dasar dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada keluarga kelompok sasaran.
 - c) Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur
 - d) Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
 - e) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
 - f) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
 - g) Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
 - h) Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
 - i) Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
 - j) Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah*. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada:
- a) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Subbidang Trantib dan Damkar)
 - b) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
 - c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
 - d) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
 - e) Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

- f) Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
 - g) Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat
 - h) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
 - i) Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - j) Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari pengarusutamaan pembangunan untuk semua
3. Prioritas pembangunan meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada:
- a) Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
 - b) Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
 - c) Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
 - d) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
 - e) Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
 - f) Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
 - g) Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
 - h) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan produksi pangan
 - i) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
 - j) Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional
 - k) Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
4. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital. Arah kebijakan pada prioritas ini pada Tahun 2023 difokuskan pada :
- a) Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.

- b) Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan.
 - c) Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya.
 - d) Pemberian isentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
 - e) Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
 - f) Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
 - g) Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
 - h) Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
 - i) Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
 - j) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
5. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata, Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada tahun 2023 difokuskan pada:
- a) Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
 - b) Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
 - c) Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
 - d) Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
 - e) Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
 - f) Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
 - g) Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
 - h) Melakukan strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat

- i) Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/standar internasional lainnya
6. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:
- a) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
 - c) Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
 - d) Membangun jalan Provinsi baru menuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
 - e) Membangun jalan Provinsi baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
 - f) Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistik
 - g) Mendukung akses pada destinasi wisata guna peningkatan daya saing Kawasan wisata
 - h) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana
 - i) Meningkatkan indeks ketahanan daerah
 - j) Meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi pendukung sector pertanian guna meningkatkan produksi pertanian
 - k) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi
 - l) Mengurangi luasan kawasan kumuh
 - m) Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu
 - n) Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar
 - o) Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat
7. Prioritas Pembangunan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:
- a) Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah

melalui peningkatan kompetensi ASN dan *stakeholder* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b) Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- c) Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
- d) Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kebijakan internal manajemen data, kebijakan internal manajemen keamanan informasi, kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e) Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- f) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
- h) Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
- i) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- j) Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
- k) Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
- l) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi yang disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026, dengan misi: ***“Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 memuat misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	T.1	Terciptanya ekonomi kerakyatan	IT.1	Pertumbuhan Ekonomi	S.1	Meningkatnya daya beli masyarakat	IS.1	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	14.680
					S.2	Meningkatnya investasi hijau	IS.2	Pertumbuhan PMTB (%)	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	6,1
							IS.3	Persentase realisasi investasi hijau (%)	na	55	60	65	70	75	80	80
	S.3	Terbangunnya infrastruktur hijau	IS.4	Indeks daya saing infrastruktur	na	75	76	77	78	79	80	80	80			
	T.2	Terciptanya ekonomi yang merata	IT.2	Indeks Gini	S.4	Menurunnya kemiskinan	IS.5	Tingkat kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	3,99
				S.5	Meningkatnya kesempatan kerja	IS.6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20	
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	T.3	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	IT.3	Indeks Pembangunan Manusia	S.6	Meningkatnya kualitas pendidikan	IS.7	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,40	11,47	11,54	11,61	11,69	11,76	11,76
							IS.8	Harapan lama sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03
							IS.9	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	na	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00
					S.7	Meningkatnya kehidupan keagamaan	IS.10	Indeks kesalehan sosial (%)	na	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,0
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	T.4	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	IT.4	Indeks Pembangunan Manusia	S.8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.11	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76
							IS.12	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	na	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	0,7271
							IS.13	Prevalensi Stunting (%)	14,9	14,7	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,6

Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	T.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IT.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S.9	Meningkatnya kualitas air	IS.14	Indeks kualitas air	47,33	49,37	51,42	53,46	55,50	57,54	59,59	59,59
S.10					Meningkatnya kualitas tutupan lahan	IS.15	Indeks kualitas tutupan lahan	37,11	39,44	41,76	44,09	46,41	48,74	51,00	51,00	
S.11					Meningkatnya kualitas udara	IS.16	Indeks kualitas udara	83,54	83,95	84,36	84,77	85,18	85,59	86,00	86,00	
S.12					Meningkatnya pengelolaan sampah	IS.17	Persentase sampah terkelola (%)	na	3	4	6	7	8	10	10	
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataa, Seni Budaya dan Olahraga	T.6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	IT.6	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	S.13	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif dan berkembangnya UMKM ekonomi kreatif	IS.18	Indeks Pembangunan Pariwisata	na	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	4,50
			IT.7	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang ekonomi kreatif			IS.19	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	na	2	2	3	3	4	4	4
	T.7	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	IT.8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	S.14	Berkembangnya Ekspresi dan ekonomi pembangunan budaya daerah	IS.20	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	na	0,0128	0,0131	0,0134	0,0137	0,0140	0,0143	0,0143
									IS.21	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	na	75	80	85	90	95
	T.8	Terwujudnya masyarakat berbudaya olah raga.	IT.9	Indeks pembangunan olah-raga	S.15	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	IS.22	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	na	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2
									IS.23	Rasio kelompok olah raga per 1000 penduduk	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32
							IS.24	Persentase ruang terbuka untuk olah raga								

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026					
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	T.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.1 0	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	S.16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	IS.25	Indeks SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
							IS.26	Nilai EKPPD	3,2293	3,2308	3,2323	3,2338	3,2353	3,2368	3,2383	3,2383
					S.17	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	IS.27	Indeks integritas pemerintah daerah	na	75	76	76	77	77	78	78
					S.18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.28	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	90,00
			S.19	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	IS.29	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	12,2	13,0	13,5	14,0	15,0	15,5	16,0	16,0		
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	T.10	Meningkatnya kesejahteraan sosial	IT.1 1	Indeks Kesejahteraan Sosial	S.20	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	IS.30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00
					S.21	Meningkatnya Kenyamanan Kota	IS.31	Indeks Kenyamanan Kota	na	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	3,55
					S.22	Meningkatnya kehidupan Sosial	IS.32	Persentase Penurunan PPKS (%)	na	5	5	5	5	5	5	5
					S.23	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	IS.33	Indeks Pembangunan Keluarga	na	56,56	58,04	59,52	61,00	62,48	63,96	63,96
Misi 7 Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian	T.11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	IT.1 2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	S.24	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	IS.34	Indeks Ketahanan Pangan	na	88,59	88,87	89,15	89,43	89,72	90,00	90,00
			IT.1 3	Nilai Tukar Petani	S.25	Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	IS.35	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	na	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

Berdasarkan arah pembangunan yang termuat dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi tahun 2021—2026, dengan memperhatikan dampak dari pandemi Covid 19 baik di tingkat global maupun domestik sehingga berdampak terhadap pelemahan ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksinya pada tahun 2020, penguatan yang terjadi pada tahun 2021, maka sejalan dengan tema pembangunan RKP dan Pemerintah Provinsi tahun 2023, maka tema pembangunan Kota Bukittinggi adalah: **“Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi.”**

Dari tinjauan ekonomi makro daerah, berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026, maka target ekonomi makro yang akan dicapai pada melalui RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan target tingkat provinsi pada RKPD Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi 4,84%
2. Tingkat Inflasi 2,80%
3. Indeks Gini 0,263
4. Tingkat Kemiskinan 4,46%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,86%
6. Indeks Pembangunan Manusia 81,57

Pencapaian kinerja daerah berdasarkan sasaran SKPD dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1			
Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan			
Terciptanya ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid	Memperluas akses kesempatan berusaha
		Mengembangkan dukungan untuk meningkatkan skala usaha mikro	Membuka akses pasar produk lokal
			Memperkuat akses modal Usaha mikro terdampak
			Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
			Standarisasi produk Usaha Mikro
Meningkatkan kejasama pengembangan usaha			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan Peran Koperasi untuk kesejahteraan anggota	Meningkatkan kinerja usaha koperasi
		Menciptakan Usaha Perdagangan yang kondusif	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
			Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung
			Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal
			Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan
			Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar
			Meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan
		Mengembangkan diversifikasi produk UKM	Menciptakan kawasan One Village One Product
			Penumbuhan wirausaha baru
		Peningkatan produksi industri	Menerapkan praktek prinsip industri hijau
			Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan
	Meningkatnya investasi hijau	Meningkatkan kemudahan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi
		Memperbaiki iklim investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
	Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Meningkatkan kualitas dan penataan infrastruktur pasar	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan bangunan pelengkap untuk menunjang akses antar pusat kegiatan	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana dasar publik	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
			Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
			Meningkatkan cakupan sanitasi layak
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan	Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkap
	Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas
			Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan
Terciptanya ekonomi yang merata	Menurunnya kemiskinan	Perluasan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
			Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
		Meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin dalam mengembangkan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
			Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin		
Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas	
Misi 2			
Hebat dalam Sektor Pendidikan			
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi
		Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
		Meningkatkan lama sekolah	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar
			Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
		Meningkatkan pelestarian naskah kuno	
		Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pendukung pendidikan	Meningkatkan akses teknologi dan informasi		
	Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Optimalisasi pengelolaan PAUD	Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD
		Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan
		Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis-ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK
			Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah
		Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa
		Meningkatkan budaya baca masyarakat	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan
	Meningkatkan pembinaan lembaga adat	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya	
Meningkatnya kehidupan keagamaan	Mengembangkan sumber pendanaan dan Meningkatkan kompetensi pembelajaran agama	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK	

Misi 3

Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mengembangkan sistem surveillance penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular
			Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu
			Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular
		Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfer untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat
		Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam Meningkatkan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
		derajat kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang
		Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan kemitraan dengan berbagai stakeholder	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di faskes	Meningkatkan kualitas sarana dan prasyaran layanan kesehatan dan tenaga kesehatan
		Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia
		Meningkatkan status gizi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil
		Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Meningkatkan akses masyarakat pada sistem jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatkan pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah cair industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak
			Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat
		Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dan pengolahannya yang memenuhi standar	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat
		Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten Agam	Meningkatkan kerjasama antar daerah
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih
Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
		Meningkatkannya kualitas lingkungan dengan pemberdayaan multisektoral	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman	
		Meningkatkan ketersediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku	
		Memperluas akses jaringan perpipaan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Meningkatkan keragaman hayati tutupan lahan		Meningkatkan luas RTH
				Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat
	Meningkatnya kualitas udara	Mengendalikan pencemaran udara		Meningkatkan perlindungan kawasan lindungan
			Mengurangi kebiasaan membakar sampah	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber
	Meningkatnya pengelolaan sampah			Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah
			Mengembangkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
			Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Meningkatkan sistem pengelolaan sampah
			Internalisasi budaya 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R
Misi 4				
Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	
			Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	
			Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	
			Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung teknologi informasi kepariwisataan	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband	
			Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi	
Meningkatnya teknologi informasi sektor kepariwisataan	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika			
Meningkatkan destinasi wisata ramah keluarga ramah lingkungan	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisata dalam pemanfaatan IT
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan
		Meningkatkan olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi
		Meningkatkan kenyamanan wisatawan	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata
		Mengembangkan atmosfir dan insentif bagi berkembang Usaha Mikro ekonomi kreatif	Mengembangkan kreatifitas generasi millennial dalam pengembangan industri kreatif Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya	Pelaksanaan even budaya
Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olahraga	Meningkatkan olahraga prestasi tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional
		Menumbuhkembangkan dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia muda	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah
		Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok olahraga	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan
		Membiasakan kegiatan olahraga	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
Misi 5			
Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah
		Memperkuat basis penerimaan dari BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD
		Meningkatkan profesionalisme ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN
		Meningkatkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan aparatur Negara untuk kinerja yang paripurna	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Menyempurnakan Peraturan (Perda & Perkada) terkait Perencanaan	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kedewanan Meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan dan pengembangan kota Menerapkan prinsip pengelolaan pemerintah yang beradab dan religius	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah
Misi 6			
Hebat dalam Sektor Sosial Masyarakat			
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
		Meningkatkan kesempatan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan
			Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kenyamanan Kota	Mensinergikan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan kumuh dan rawan kumuh (padat penduduk)	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi
		Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk fasilitasi relokasi	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana
		Penyebarluasan informasi terkait ketentuan pemanfaatan ruang	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif
			Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif
		Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal	
		Penyediaan pengaduan masyarakat	
	Meningkatnya kehidupan Sosial	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penurunan PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS
			Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS
		Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja
Meningkatkan kapasitas Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas		Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 7			
Hebat dalam Sektor Pertanian			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Meningkatkan teknologi pertanian
			Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan
		Mengembangkan sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan
	Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran dan manfaat konsumsi beras organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik
		Mengarusutamakan bercocok tanam secara organik	Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik
			Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik

4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah: **“Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pascapandemi”**. Selanjutnya mengacu kepada prioritas Nasional dan Provinsi, serta untuk pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi covid semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk tahun 2023 secara lebih konkrit diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi. Kegiatan prioritas untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Peningkatan akses pelaku usaha kecil terhadap permodalan dengan penyediaan akses permodalan tanpa bunga melalui inovasi daerah berupa “Tabungan Ustman” dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan penataan pedagang pada kawasan strategis daerah melalui inovasi daerah berupa aplikasi “Bukittinggi Hebat”
- c. Penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin
- d. Penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat

- e. Revitalisasi pasar
- f. Peningkatan kemampuan pemasaran digital bagi usaha mikro
- g. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat
- h. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja

2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan masyarakat Minang umumnya, dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional. Prioritas ini untuk tahun 2023 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kecerdasan sosial peserta didik melalui penerapan pendidikan berkarakter berbasis agama dan kearifan lokal.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat melalui bantuan iuran pendidikan.
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
- d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- e. Mendorong tumbuh kembang perguruan tinggi
- f. Peningkatan penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa program prioritanya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- b. Penyediaan pembiayaan iuran kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
- d. Pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang adil, prima dan merata
- e. Peningkatan infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan
- f. Mewujudkan konsep kota ramah lingkungan
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berbasis kelurahan
- h. Peningkatan koordinasi penyediaan tempat pengolahan akhir sampah dengan daerah tetangga

4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan sumber secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan *spending of money* wisatawan di Bukittinggi. Beberapa program prioritas tahun 2023 terkait hal ini antara lain:

- a. Pengembangan wisata taman kota dan ruang terbuka publik, berupa:
 - 1) Revitalisasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan melalui pengembangan *night zoo*
 - 2) Meningkatkan daya tarik objek wisata, taman kota dan kawasan ekonomi malam hari melalui penyediaan atraksi dan fasilitasi wisata malam hari.
- b. Revitalisasi kawasan wisata alam dan keluarga, dengan penguatan destinasi wisata yang telah ada, seperti Ngarai Sianok, Lobang Jepang, dan Benteng Fort De Kock
- c. Pembangunan kawasan objek wisata baru di Koto Barangai
- d. Penyediaan sarana dan prasarana atraksi seni dan budaya
- e. Peningkatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi
- f. Pengembangan wisata sentra produksi lokal melalui konsep *one village one product* berupa sentra pembuatan sanjai, sentra pembuatan kopi Bukit Apit, dan
- g. Pengembangan industri kreatif daerah
- h. Pengembangan wisata kuliner dan fasilitasi produk halal usaha mikro.
- i. Wisata acara (*event*), berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, baik *event* seni budaya maupun olahraga
- j. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat pada kawasan pemukiman

5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, diupayakan berupa:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada mall pelayanan publik.
- b. Pengaplikasian konsep *smart city* untuk penyediaan pelayanan berbasis teknologi informasi.
- c. Pembangunan baru kantor pemerintahan seperti kantor camat, kantor lurah serta perencanaan pembangunan kantor bersama pemerintah daerah.
- d. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
- e. Pengelolaan pemerintahan yang beradab dan religious.

- f. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota sangat inovatif.
- g. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- h. Pengembangan konsep spasial pada penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- i. Optimalisasi peran kelurahan dalam rangka penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat

6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, *Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat, berupa:

- a. Peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan sekolah keluarga.
- b. Mewujudkan kota ramah disabilitas melalui penyediaan infrastruktur kota ramah disabilitas.
- c. Penerapan pengarusutamaan gender dan peningkatan keberdayaan perempuan melalui optimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap kekerasan dalam keluarga melalui optimalisasi peran kelurahan.
- e. Peningkatan kegiatan masyarakat melalui program berbasis masjid.
- f. Meningkatkan kenyamanan kota melalui penegakan Perda secara persuasif.
- g. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan.
- b. Pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan.
- c. Mendorong terciptanya agro industri dan kawasan agro wisata perkotaan.
- d. Fasilitasi budidaya tanaman hias sebagai produk unggulan daerah.
- e. Operasional rumah potong hewan modern.
- f. Mendorong terciptanya wirausaha baru bidang perikanan dan peternakan.
- g. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan petani.

Program prioritas yang disusun pada setiap prioritas pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan terjemahan dari visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

MISI	PRIORITAS
MISI 1 Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan	PRIORITAS 1 Peningkatan ekonomi kerakyatan
MISI 2 Hebat dalam sektor pendidikan	PRIORITAS 2 Pengembangan sektor pendidikan
MISI 3 Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan	PRIORITAS 3 Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
MISI 4 Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya, dan olahraga	PRIORITAS 4 Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
MISI 5 Hebat dalam tata kelola pemerintahan	PRIORITAS 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan
MISI 6 Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan	PRIORITAS 6 Pengembangan sosial kemasyarakatan
MISI 7 Hebat dalam sektor pertanian	PRIORITAS 7 Pengembangan sektor pertanian

Setelah menelaah kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 dengan visi dan misi daerah, selanjutnya disajikan kesesuaian prioritas daerah tahun 2023 dengan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Tabel kesesuaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-

2026 ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 4.4
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas akses kesempatan berusaha - Membuka akses pasar produk lokal

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat akses modal Usaha mikro terdampak - Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro - Standarisasi produk Usaha Mikro - Meningkatkan kejasama pengembangan usaha - Meningkatkan kinerja usaha koperasi - Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen - Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung. - Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal - Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan - Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar - Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro - Menciptakan kawasan One Village One Product - penumbuhan wirausaha baru - Menerapkan praktek prinsip industri hijau - Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan - Meningkatkan kualitas layanan investasi - Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau - Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal - Meningkatkan penataan pasar dan pedagang - Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan - Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapannya - Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum - Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak - Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan - Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik - Meningkatkan cakupan sanitasi layak - Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas - Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan - Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial - Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja - Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin - Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas - Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasiskan filantropi

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
2.	Pengembangan Sektor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi - Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan - Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK - Meningkatkan akses teknologi dan informasi - Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi - Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah - Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK - Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar - Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) - Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK - Meningkatkan pelestarian naskah kuni - Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan - Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya - Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan
3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular - Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular - Meningkatkan atmosfer untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat - Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan - Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif - Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang - Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas - Meningkatkan kualitas sarana dan prasyaran layanan kesehatan dan tenaga kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil - Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan - Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik - Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri - Meningkatkan edukasi sanitasi layak - Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat - Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat - Meningkatkan kerjasama antar daerah - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air - Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih - Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih - Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman - Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku - Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan - Meningkatkan luas RTH - Meningkatkan perlindungan kawasan lindungan - Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat - Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber - Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah - Meningkatkan sistem pengelolaan sampah - Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R
4.	Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif - Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE - Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan - Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan - Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband - Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika - Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat - Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi - Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisata dalam pemanfaatan IT

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas - Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan - Mengembangkan even-even olahraga rekreasi - Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata - Mengembangkan kreatifitas generasi millennial dalam pengembangan industri kreatif - Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif - Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi - Meningkatkan pelestarian budaya daerah - Pelaksanaan even budaya - Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga - Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional - Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah - Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan - Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat
5.	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD - Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD - Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi - Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD - Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN - Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN - Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai - Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan - Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK - Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan - Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan - Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas - Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah - Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan - Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat - Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana - Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif - Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif - Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan - Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana - Mengembangkan kelompok pengaman lokal - Penyediaan pengaduan masyarakat - Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi
6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan dasar PPKS - Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS - Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja - Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. - Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan teknologi pertanian - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan - Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan - Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik - Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik - Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi
Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	No	Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.	Pengembangan sektor pertanian
		4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1.	Peningkatan ekonomi kerakyatan
		5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	4.	Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	2.	Pengembangan sektor pendidikan
				3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
				6.	Pengembangan sosial kemasyarakatan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	6.	Pengembangan sosial kemasyarakatan
				2.	Pengembangan sektor pendidikan
				4.	Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
				1.	Peningkatan ekonomi kerakyatan
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan yang dirumuskan. Oleh karena prioritas pembangunan Kota Bukittinggi disusun dengan mempedomasi prioritas nasional, maka seluruh program dan kegiatan yang disusun harus bersinergi dan mendukung terhadap pencapaian prioritas Nasional tahun 2023. Untuk melihat sinergitas dan dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terhadap pencapaian prioritas Nasional tahun 2023 maka disusun tabel berikut,

Tabel 4. 6
Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		57,785,995,717	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7,896,965,126	DKUMKP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,755,320,214	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	13,631,000	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390,304,000	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	4,465,000	
		Program Pengembangan UMKM	733,244,912	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8,671,154,087	DKUMKP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160,664,492	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8,414,324,141	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30,672,000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	65,493,454	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	678,262,170	DPMPSTPTK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,357,600	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	675,904,570	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21,033,282,002	DISPARPORA		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	,202,458,974			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10,171,009,957	
		Program Pemasaran Pariwisata	820,141,917	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	839,671,154	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10,144,219,755	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,371,991,555	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	732,496,400	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	21,095,000	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	18,636,800	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8,377,452,711	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,460,150	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,450,367,411	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5,025,746,300	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	483,323,042	
		Program Penyuluhan Pertanian	336,555,808	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	984,659,866	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,774,600	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	860,451,962	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70,433,304	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		28,000,655,382	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19,509,488,596	DPMPTSPTK
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17,678,377,105	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	133,977,450	
		Program Promosi Penanaman Modal	153,749,000	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1,080,108,368	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	384,856,673	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	78,420,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	746,685,212	DPUPR
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40,839,900	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	64,334,000	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	127,637,500	
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	153,638,154	
		Program Penatagunaan Tanah	360,235,658	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2,759,667,192	DINSOS
		Program Pemberdayaan Sosial	601,653,000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2,158,014,192	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	85,423,750	DKUKMP
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	85,423,750	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	702,012,350	DPMPTSPTK
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	581,233,850	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	42,878,500	
		Program Hubungan Industrial	77,900,000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4,197,378,282	DINSOS
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,149,038,919	
		Program Rehabilitasi Sosial	586,912,787	
		Program Penanganan Bencana	352,831,742	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	108,594,834	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		322,018,538,319	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	173,865,351,356	DISDIKBUD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	111,670,566,465	
		Program Pengelolaan Pendidikan	61,959,144,891	
		Program Pengembangan Kurikulum	235,640,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,401,055,706	DINAS PUSTAKA DAN KEARSIPAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,675,425,656	
		Program Pembinaan Perpustakaan	642,264,050	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	83,366,000	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	20,597,618,000	SETDA
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20,597,618,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	112,328,116,880	DINAS KESEHATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,140,461,147	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64,155,897,407	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,614,405,426	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	398,335,500	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,019,017,400	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,444,855,407	DP3APPKB
		Program Perlindungan Perempuan	205,955,054	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,179,571,871	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	385,395,318	
		Program Perlindungan Khusus Anak	305,479,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,035,834,414	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	318,294,750	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14,325,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,381,540,970	DP3APPKB
		Program Pengendalian Penduduk	122,884,200	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,144,476,770	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	114,180,000	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		7,864,944,589	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3,467,557,832	DISDIKBUD
		Program Pengembangan Kebudayaan	963,620,000	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	420,990,000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	172,881,500	
		Program Pengelolaan Permuseuman	1,910,066,332	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,397,386,757	DISPARPORA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,819,309,287	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,375,597,470	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	202,480,000	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		87,866,698,691	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51,729,979,455	DPUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,733,523,539	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3,122,696,801	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	250,755,000	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	904,539,518	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19,800,386,635	
		Program Penataan Bangunan Gedung	5,906,252,150	
		Program Penyelenggaraan Jalan	10,590,850,814	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	123,679,950	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,297,295,048	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16,008,868,567	DINAS PERKIM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,875,480,098	
		Program Pengembangan Perumahan	2,163,165,264	
		Program Kawasan Permukiman	2,154,781,600	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	7,815,441,605	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20,127,850,669	DISHUB
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,724,711,679	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,966,852,684	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,436,286,306	
6	Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		51,241,179,431	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	38,906,547,343	DLH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,581,749,091	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	836,431,944	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3,067,889,040	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,932,000	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	21,004,100	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	75,871,650	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	201,101,400	
		Program Pengelolaan Persampahan	15,083,568,118	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7,358,231,548	DISKAR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,700,042,894	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,658,188,654	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,976,400,540	BPBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,858,054,482	
		Program Penanggulangan Bencana	2,118,346,058	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		226,635,129,323	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,435,593,816	DISKOMINFO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,267,034,074	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,790,854,180	
		Program Aplikasi Informatika	2,377,705,562	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	40,112,600	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40,112,600	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	44,150,250	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44,150,250	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	684,487,150	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Program Pengelolaan Arsip	571,949,750	
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	26,208,000	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	86,329,400	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6,556,280,290	BAPELITBANG
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,164,690,040	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,079,524,550	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	312,065,700	
		KEPEGAWAIAN	6,480,775,527	BKPSDM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,006,986,428	
		Program Kepegawaian Daerah	2,473,789,099	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,396,297,704	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	720,208,204	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	676,089,500	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80,133,941,663	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,562,957,163	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,769,467,963	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,252,607,702	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19,548,908,835	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		KEUANGAN	38,793,965,052	BK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,328,216,264	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	22,037,466,840	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,162,732,158	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,265,549,790	
		INSPEKTORAT DAERAH	7,679,523,388	INSPEKTORAT
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,885,417,953	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	595,078,935	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	199,026,500	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,820,605,050	DISDUKCAPIL
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,716,875,122	
		Program Pendaftaran Penduduk	648,908,166	
		Program Pencatatan Sipil	264,064,012	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145,403,250	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45,354,500	
		KECAMATAN	44,804,963,709	KECAMATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,811,484,247	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1,954,344,954	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,185,327,400	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	198,806,512	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,940,195,537	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,024,305,804	KANTOR KESBANGPOL
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,969,212,904	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	314,640,900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,195,993,627	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1,473,638,012	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,436,318,954	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	300,694,858	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,384,953,582	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,950,692,602	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	113,072,000	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,151,496,276	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68,014,550	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	654,206,400	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	447,471,754	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20,379,479,542	SATPOL PP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,792,356,219	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	12,587,123,323	

Selain selaras dengan prioritas Nasional dan RPJMD Kota Bukittinggi, pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2023 juga mengakomodir pencapaian target SPM yang ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan setiap bidang SPM pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut,

Tabel 4.7
Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	1 Program Pengelolaan Pendidikan	52.393.386.512	
						1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.021.522.295	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.785.641.574	
						2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.901.950.000	
						3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	342.382.000	
						4 Pengadaan Mebel Sekolah	307.910.000	
						5 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 01 Campago Ipuh)	101.710.000	
						6 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 03 Pulai Anak Air)	101.710.000	
						7 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 04 Garegeh)	101.710.000	
						8 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 06 Pulai Anak Air)	174.710.000	
						9 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 07 Kubu Gulai Banchah)	101.710.000	
						10 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 08 Campago Ipuh)	101.710.000	
						11 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 09 Manggis Ganting)	101.710.000	
						12 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 10 Puhun Pintu Kabun)	101.710.000	
						13 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 11 Campago Guguk Bulek)	101.710.000	
						14 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 15 Pulai Anak Air)	101.710.000	
						15 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 18 Campago Guguk Bulek)	101.710.000	
						16 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 01 Benteng Pasar Atas)	101.710.000	
						17 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 02 Percontohan Kayu Kubu)	101.710.000	
						18 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 05 Tarok Dipo)	101.710.000	
						19 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 08 Tarok Dipo)	101.940.000	
						20 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 12 Bukit Cangang)	101.710.000	
						21 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 13 Bukit Apit Puhun)	101.710.000	
						22 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 01 Ladang Cakiah)	101.710.000	
						23 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 02 Aur Kuning)	101.710.000	
						24 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 07 Belakang Balok)	101.710.000	
						25 Pengadaan Mebel Sekolah (SDN 09 Belakang Balok)	101.710.000	
						26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	203.540.000	
						27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SDN 10 Puhun Pintu Kabun)	22.527.000	
						28 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SDN 05 Tarok Dipo)	78.220.000	
29 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.140.680.000							
30 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	41.854.000							

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						31 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Campago Ipuh)	15.330.000	
						32 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Campago Guguk Bulek)	15.630.000	
						33 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Pulai Anak Air)	17.430.000	
						34 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Garegeh)	15.330.000	
						35 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun)	18.330.000	
						36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 06 Pulai Anak Air)	16.230.000	
						37 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 07 Kubu Gulai Bancah)	25.230.000	
						38 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 08 Campago Ipuh)	24.030.000	
						39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 09 Manggis Ganting)	18.930.000	
						40 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 10 Puhun Pintu Kabun)	15.330.000	
						41 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 11 Campago Guguk Bulek)	15.630.000	
						42 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 12 Puhun Pintu Kabun)	9.930.000	
						43 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 13 Kubu Gulai Bancah)	21.330.000	
						44 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 14 Tanjung Alam)	8.730.000	
						45 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 15 Pulai Anak Air)	19.530.000	
						46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 16 Campago Ipuh)	17.430.000	
						47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 17 Manggis Ganting)	18.330.000	
						48 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 18 Campago Guguk Bulek)	19.530.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						49 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Benteng Pasar Atas)	15.330.000	
						50 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Percontohan Kayu Kubu)	45.330.000	
						51 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Pakan Kurai)	60.380.000	
						52 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Bukit Apit Puhun)	27.330.000	
						53 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik(SDN 05 Tarok Dipo)	17.130.000	
						54 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah)	25.830.000	
						55 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 07 Teladan Bukit Cangang)	16.530.000	
						56 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 08 Tarok Dipo)	32.730.000	
						57 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah)	24.330.000	
						58 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 11 Bukit Apit Puhun)	38.730.000	
						59 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 12 Bukit Cangang)	15.030.000	
						60 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 13 Bukit Apit Puhun)	15.030.000	
						61 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah)	27.330.000	
						62 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 16 Tarok Dipo)	26.130.000	
						63 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 17 Pakan Kurai)	43.230.000	
						64 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 18 Tarok Dipo)	10.230.000	
						65 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah)	27.930.000	
						66 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Ladang Cakiah)	18.330.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						67 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Aur Kuning)	45.330.000	
						68 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Pakan Labuah)	24.030.000	
						69 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Birugo)	27.030.000	
						70 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Birugo)	18.330.000	
						71 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 06 Parit Antang)	17.730.000	
						72 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 07 Belakang Balok)	13.530.000	
						73 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 08 Kubu Tanjung)	13.230.000	
						74 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 09 Belakang Balok)	6.930.000	
						75 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 10 Sapiran)	21.330.000	
						76 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 11 Aur Kuning)	10.830.000	
						77 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	46.508.750	
						78 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	313.382.500	
						79 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 04 Garegeh)	51.710.000	
						80 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 06 Pulau Anak Air)	51.710.000	
						81 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 02 Percontohan Kayu Kubu)	176.580.000	
						82 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 07 Teladan Bukit Cangang)	50.970.000	
						83 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 08 Tarok Dipo)	76.710.000	
						84 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 14 Aur Tajunggang Tengah Sawah)	50.970.000	
						85 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 16 Tarok Dipo)	92.710.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						86 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SDN 07 Belakang Balok)	51.740.000	
						87 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.082.480.971	
						88 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	457.740.200	
						89 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.259.335.300	
						90 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Campago Ipuh)	153.000.000	
						91 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Campago Guguk Bulek)	159.300.000	
						92 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Pulai Anak Air)	104.400.000	
						93 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Garegeh)	284.400.000	
						94 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun)	183.600.000	
						95 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 06 Pulai Anak Air)	146.700.000	
						96 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 07 Kubu Gulai Bancah)	191.700.000	
						97 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 08 Campago Ipuh)	131.400.000	
						98 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 09 Manggis Ganting)	155.700.000	
						99 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 10 Puhun Pintu Kabun)	117.000.000	
						100 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 11 Campago Guguk Bulek)	144.000.000	
						101 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 12 Puhun Pintu Kabun)	96.300.000	
						102 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 13 Kubu Gulai Bancah)	108.000.000	
						104 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 14 Tanjung Alam)	114.300.000	
						105 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 15 Pulai Anak Air)	131.400.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						106 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 16 Campago Ipuh)	136.800.000	
						107 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 17 Manggis Ganting)	135.000.000	
						108 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 18 Campago Guguk Bulek)	132.300.000	
						109 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Benteng Pasar Atas)	472.500.000	
						110 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Percontohan Kayu Kubu)	481.500.000	
						111 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Pakan Kurai)	522.900.000	
						112 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Bukit Apit Puhun)	112.500.000	
						113 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Tarok Dipo)	162.000.000	
						114 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 06 Aur Tajunggang Tengah Sawah)	161.100.000	
						115 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 07 Teladan Bukit Cangang)	277.200.000	
						116 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 08 Tarok Dipo)	319.500.000	
						117 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 10 Aur Tajunggang Tengah Sawah)	126.900.000	
						118 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 11 Bukit Apit Puhun)	146.700.000	
						119 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 12 Bukit Cangang)	130.500.000	
						120 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 13 Bukit Apit Puhun)	148.500.000	
						121 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 14 Aur Tajunggang Tengah Sawah)	331.200.000	
						122 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 16 Tarok Dipo)	285.300.000	
						123 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 17 Pakan Kurai)	286.200.000	
						124 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 18 Tarok Dipo)	129.600.000	
						125 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 19 Aur Tajunggang Tengah Sawah)	116.100.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						126 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Ladang Cakiah)	141.300.000	
						127 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Aur Kuning)	303.300.000	
						128 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Pakan Labuah)	263.700.000	
						129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Birugo)	513.000.000	
						130 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Birugo)	106.200.000	
						131 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 06 Parit Antang)	126.900.000	
						132 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 07 Belakang Balok)	161.100.000	
						133 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 08 Kubu Tanjung)	149.400.000	
						134 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 09 Belakang Balok)	219.600.000	
						135 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 10 Sapiran)	261.900.000	
						136 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 11 Aur Kuning)	145.800.000	
						2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.371.864.217	
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	108.850.000	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.442.249.619	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.068.651.500	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	454.741.900	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	249.378.600	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	81.787.000	
						Pengadaan Mebel Sekolah	326.710.000	
						Pengadaan Mebel Sekolah (SMPN 4)	127.580.000	
						Pengadaan Mebel Sekolah (SMPN 5)	127.580.000	
						Pengadaan Mebel Sekolah (SMPN 6)	127.580.000	
						Pengadaan Mebel Sekolah (SMPN 7)	127.580.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 1)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 2)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 3)	12.830.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 4)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 5)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 6)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 7)	12.830.000	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMPN 8)	12.830.000	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	907.385.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	22.304.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	86.980.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	117.015.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	68.980.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	72.980.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	107.015.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	98.980.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	70.980.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	81.405.000	
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.099.250	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	359.288.200	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMPN 1)	152.580.000	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.411.474.698	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	178.600.650	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	495.849.800	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	750.200.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	1.037.300.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	589.600.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	907.500.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	633.600.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	634.700.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	487.300.000	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	534.600.000	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	162.819.000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.851.742.358	
						1 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	235.640.000	
						Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	235.640.000	
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap Tahun	2 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.616.102.358	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan (SPNF SKB Kota Bukittinggi)	93.180.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (SPNF SKB Kota Bukittinggi)	503.784.938	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	336.967.420	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	23.845.000	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	311.325.000	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (SPNF SKB Kota Bukittinggi)	347.000.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100%	Setiap Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.838.910.186	
						1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.838.910.186	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	103.670.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (UPTD TK NEGERI PEMBINA)	81.440.000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (UPTD TK NEGERI 1)	128.600.000	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.464.740.436	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	92.321.000	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.723.438.750	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.104.300.000	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD (UPTD TK NEGERI PEMBINA)	114.000.000	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD (UPTD TK NEGERI 1)	26.400.000	
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.392.000	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	280.372.000	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.135.000	
		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	39.423.500	
		Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiapa tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.735.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.120.986.600	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	55.852.000	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	107.350.000	
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	671.518.000	
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	671.518.000	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.646.000	
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	36.777.000	
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	240.927.568	
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan kebutuhan pokok	Jumlah warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap tahun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250.755.000	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
		minum sehari-hari	kebutuhan pokok air minum sehari-hari.			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	250.755.000	
						1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	250.755.000	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	188.025.000	
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	62.730.000	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.154.781.600	
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.154.781.600	
						1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	103.700.000	
						Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	103.700.000	
						2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	81.214.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	81.214.000	
						3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.969.867.600	
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	30.440.000	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.725.782.600	
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	214.145.000	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	100%	Setiap tahun	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.588.495.508	
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.588.495.508	

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
	Perlindungan Masyarakat		penegakan hukum Perda dan Perkada			1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.187.629.508	
						Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	2.860.074.500	
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	9.122.097.058	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176.208.950	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	29.249.000	
						2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	400.866.000	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.053.000	
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	178.264.000	
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	207.549.000	
						1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	105.469.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	36.048.000						
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	69.421.000						
	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.897.177.558						
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	49.870.000						
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.543.477.558						
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	303.830.000							
3 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	115.699.500							
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	115.699.500							
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun				
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	Setiap tahun				
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	Setiap tahun				

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Ket
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.260.562.404	
						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	990.000	
						Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1.706.863.054	
						Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	467.811.750	
						Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	84.897.600	
	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	Setiap tahun	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	448.361.487	
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	Setiap tahun	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.540.000	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	42.350.000	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	Pemberian Layanan Kedaruratan	193.770.437	
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana daerah	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun	Pemberian Layanan Rujukan	61.701.050	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023 dan perkiraan maju 2024 sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Bukittinggi, pada tahun 2022 telah ditetapkan pagu indikatif menurut indikator sasaran yang diformulasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk pencapaian sasaran. Penetapan pagu indikatif ini dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Realisasi terhadap target indikator sasaran sampai dengan tahun 2021
- b. Kontribusi SKPD dalam pencapaian sasaran
- c. Besaran alokasi dana yang telah di anggarkan melalui Prioritas, Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD.

Secara rinci program dan kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 berikut :

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						170,327,513,207						199,560,521,462				
1	01	01											A -	135,662,317,158			
1	01	01	2.01										100 Persen	64,691,000			
1	01	01	2.01	01				2 Dokumen	56,889,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	2 Dokumen	64,691,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02						100 %					100 %	118,805,637,828		
1	01	01	2.02	01				919 orang / tahun	105,532,742,702	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	919 orang / tahun	118,805,637,828	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05						100 %					100 %	64,350,000		
1	01	01	2.05	02				90 stel	87,582,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	90 stel	64,350,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06						100 %					100 %	723,023,950		
1	01	01	2.06	01				6 item	5,610,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	6 item	6,834,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04				0 Paket	36,283,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan 2. Pengembangan sektor pendidikan	0	0 Paket	41,205,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05				10 item	11,655,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 item	13,491,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum yang Dibeli				12 bulan	4,125,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 bulan	14,569,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan lembur yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan				12 bulan	168,192,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 bulan	190,423,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	208,099,608	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	4 Dokumen	456,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15,000,000,000							15,000,000,000	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan		1 Unit	15,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa urusan Pemerintah yang Disediakan	Jasa		Jasa	2 Jasa	148,450,000						2 Jasa	165,319,000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli				3220 buah	7,450,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	3220 buah	8,866,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik DISDIKBUD				6 Rekening / bulan	141,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	6 Rekening / bulan	156,453,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	850,604,900						100 Persen	839,295,380	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Unit	43,109,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	219,350,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	36 Unit	242,638,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	15,660,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 bulan	17,842,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direnovasi jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihan yang disediakan				12 bulan	576,404,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 bulan	535,706,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	47,899,344,497						84.25 %	63,187,722,304	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,092,563,229						80 %	32,618,256,177	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Lainnya Yang Dibangun				10 Paket	8,677,390,611	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 Paket	9,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Di rehab				2 Paket	32,200,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	2 Paket	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli				1 Ls	996,437,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Ls	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah alat rumah tangga SD yang dibeli				2 Paket	208,205,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	2 Paket	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang di Beli				3147 siswa	1,003,924,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	3147 siswa	1,045,489,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				16 Paket	671,889,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	16 Paket	2,579,445,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				65 Satuan Pendidikan	164,465,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	65 Satuan Pendidikan	176,573,650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				65 Satuan Pendidikan	33,758,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	65 Satuan Pendidikan	38,223,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				80 Satuan Pendidikan	547,932,150	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	80 Satuan Pendidikan	469,888,738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				668 Orang	13,828,336,968	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	668 Orang	16,385,985,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				484 Orang	164,283,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	484 Orang	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				65 Satuan Pendidikan	763,740,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	65 Satuan Pendidikan	962,515,389	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	13,034,402,696						60 %	21,390,248,857	
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dibangun				4 Paket	3,934,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	4 Paket	10,548,010,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Di rehab				1 ls	203,550,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 ls	259,820,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang dibeli				1 Ls	796,506,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Ls	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang di Beli				1360 siswa	603,721,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1360 siswa	608,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan priose belajar dan ujian bagi peserta didik				15 Satuan Pendidikan	137,245,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	15 Satuan Pendidikan	154,273,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang akan dievaluasi				25 Satuan Pendidikan	17,673,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	25 Satuan Pendidikan	19,343,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	639,740,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	100 Peserta Didik	885,453,057	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Honorarium dan Insentif bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorariuym pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama				278 orang	5,333,063,696	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	278 orang	6,304,485,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				351 Orang	172,646,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	351 Orang	187,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Satuan Pendidikan	1,195,855,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	50 Satuan Pendidikan	1,057,043,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sekolah PAUD Akreditasi A	Persen		Persen	15 Persen	7,097,751,032						15 Persen	8,354,497,850	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	147,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Unit	147,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif dan dikontrak sekolah				464 orang	4,029,294,432	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	464 orang	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pemeriksaan berkas TPG, PPG dan angka kredit guru				3 Dokumen	133,224,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	3 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				117 Satuan Pendidikan	2,788,232,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	117 Satuan Pendidikan	2,808,747,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah Kesetaraan Akreditasi A	%		%	60 %	674,627,540						60 %	824,719,420	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	50,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Paket	115,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di SPNF				10 orang	531,618,040	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 orang	555,734,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemeriksaan berkas TPG dan PPG serta Angka Kredit				19 orang	28,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	19 orang	32,334,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	64,009,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	7 Satuan Pendidikan	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	%		%	20 %	267,933,800						20 %	371,407,000	
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Kurikulum		Kurikulum	1 Kurikulum	267,933,800						1 Kurikulum	371,407,000	
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				16 Dokumen	67,367,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	16 Dokumen	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				24 Dokumen	53,636,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	24 Dokumen	149,237,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 2.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD dan SMP yang Tersedia				9 Dokumen	146,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	9 Dokumen	152,170,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SNP	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	50,000,000						100 % 100 Persen	306,075,000	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	306,075,000	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sistem Pendataan dan Pemetaan GTK				4 Dokumen	50,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	4 Dokumen	306,075,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,993,389,244						2,604,213,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	22	02																	
2	22	02	2.01																
2	22	02	2.01	01															
2	22	02	2.03																
2	22	02	2.03	02															
2	22	03																	
2	22	03	2.01																
2	22	03	2.01	03															
2	22	05																	
2	22	05	2.01																

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					10 Objek	13,246,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	10 Objek	16,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan					4 Objek	31,920,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	4 Objek	50,916,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya Yang dikelola	Cagar budaya			Cagar budaya	10 Cagar budaya	191,261,300							10 Cagar budaya	218,513,000		
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan					1 Objek	86,696,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	1 Objek	96,888,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan					5 Objek	104,564,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	5 Objek	121,625,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang Di kelola dan Dimanfaatkan	Museum			Museum	2 Museum	685,682,344							2 Museum	1,012,000,000		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Yang Dikelola	Museum			Museum	2 Museum	685,682,344							2 Museum	1,012,000,000		
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dikelola					200 koleksi	121,306,608	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	200 koleksi	148,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah museum yang aktiv dikelola					2 museum	496,622,236	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	2 museum	660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sara dan prasarana museum yang tersedia					2 museum	67,753,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	0	2 museum	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600										27,885,000	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-			-	A -	10,350,600							A -	9,295,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	18,590,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	18,590,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	18,590,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						22,258,200							27,335,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	8,758,200						A -	7,865,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	8,758,200						100 %	7,865,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	8,758,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	11 Paket	7,865,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	19,470,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	19,470,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	19,470,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							21,340,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	12,760,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	12,760,000		
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	12,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						45,312,600							51,095,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	18,312,600							A -	16,445,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	18,312,600							100 %	16,445,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	18,312,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	23 Paket	16,445,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000							84.25 %	34,650,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000							80 %	34,650,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	34,650,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						33,635,400							34,485,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	13,535,400							A -	12,155,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	13,535,400							100 %	12,155,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	13,535,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	17 Paket	12,155,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	20,100,000						84.25 %	22,330,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	20,100,000						80 %	22,330,000		
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	20,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	22,330,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							21,462,000							25,080,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	7,962,000							A -	7,150,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	7,962,000							100 %	7,150,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	7,962,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 Paket	7,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000							84.25 %	17,930,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000							80 %	17,930,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	17,930,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							33,635,400							35,805,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	13,535,400							A -	12,155,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	13,535,400							100 %	12,155,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	13,535,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	17 Paket	12,155,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	20,100,000						84.25 %	23,650,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	20,100,000						80 %	23,650,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	20,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	23,650,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						24,646,800							25,630,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	11,146,800						A -	10,010,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	11,146,800						100 %	10,010,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	11,146,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	14 Paket	10,010,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	15,620,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	15,620,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	15,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						21,462,000							26,180,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	7,962,000						A -	7,150,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	7,962,000						100 %	7,150,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	7,962,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 Paket	7,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	19,030,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	19,030,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	19,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400						22,660,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	14,080,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	14,080,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	14,080,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600						26,895,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	%		%	A %	10,350,600						A %	9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	17,600,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	17,600,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	17,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						21,462,000						21,175,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,962,000							9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,962,000							9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	7,962,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan		10 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	11,880,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	11,880,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	11,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400						21,560,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	12,980,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	12,980,000		
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	12,980,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							10,869,600							19,800,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	6,369,600							A -	5,720,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	6,369,600							100 %	5,720,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	6,369,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	8 Paket	5,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	4,500,000							84.25 %	14,080,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	4,500,000							80 %	14,080,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	4,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	14,080,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							22,258,200							23,835,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	8,758,200							A -	7,885,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	8,758,200							100 %	7,885,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	8,758,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	11 Paket	7,885,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	15,950,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	15,950,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	15,950,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400						25,410,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	16,830,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	16,830,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	16,830,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						21,462,000						23,650,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	7,962,000						A -	7,150,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	7,962,000						100 %	7,150,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	7,962,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	10 Paket	7,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	16,500,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	16,500,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	16,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						22,258,200							23,925,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	8,758,200						A -	7,865,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	8,758,200						100 %	7,865,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	8,758,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	11 Paket	7,865,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	16,060,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	16,060,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	16,060,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						65,182,200							79,475,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	24,682,200						A -	22,165,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	24,682,200						100 %	22,165,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	24,682,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	31 Paket	22,165,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	40,500,000						84.25 %	57,310,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	40,500,000						80 %	57,310,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	40,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	57,310,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						68,367,000						80,765,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	27,867,000						A -	22,025,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	27,867,000						100 %	22,025,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	27,867,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	35 Paket	22,025,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	40,500,000						84.25 %	58,740,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	40,500,000						80 %	58,740,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	40,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	58,740,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73,663,200						90,090,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	28,663,200						A -	25,740,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	28,663,200						100 %	25,740,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	28,663,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	36 Paket	25,740,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	45,000,000						84.25 %	64,350,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	45,000,000						80 %	64,350,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	45,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	64,350,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600							23,155,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	10,350,600						A -	9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	13,860,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	13,860,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	13,860,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							28,380,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	19,800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	19,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	19,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600						28,765,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	a -	10,350,600						a -	9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	19,470,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	19,470,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	19,470,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						46,108,800						51,040,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	a -	19,108,800						a -	17,160,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	19,108,800						100 %	17,160,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	19,108,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	24 Paket	17,160,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	33,880,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	33,880,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	33,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						43,720,200							54,175,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	16,720,200							A -	15,015,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	16,720,200							100 %	15,015,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	16,720,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	21 Paket	15,015,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000							84.25 %	39,160,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000							80 %	39,160,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	39,160,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							24,200,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400							A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400							100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000							84.25 %	15,620,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000							80 %	15,620,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	15,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							26,730,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	18,150,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	18,150,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	18,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600							25,025,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	10,350,600						A -	9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	15,730,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	15,730,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	15,730,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							26,730,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	18,150,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	18,150,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	18,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						52,201,200							59,070,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	20,701,200						A -	18,590,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	20,701,200						100 %	18,590,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	20,701,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	26 Paket	18,590,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	31,500,000						84.25 %	40,480,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	31,500,000						80 %	40,480,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	31,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	40,480,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						44,516,400							51,040,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	17,516,400						A -	15,730,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	17,516,400						100 %	15,730,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	17,516,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	22 Paket	15,730,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	35,310,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	35,310,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	35,310,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						42,924,000							49,060,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	15,924,000						A -	14,300,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	15,924,000						100 %	14,300,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15,924,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	20 Paket	14,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	34,760,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	34,760,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	34,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						22,258,200							23,485,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	8,758,200						A -	7,865,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	8,758,200						100 %	7,865,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	8,758,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	11 Paket	7,865,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	15,620,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	15,620,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Satuan Pendidikan	15,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							22,990,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	a -	9,554,400						a -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	14,410,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	14,410,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	14,410,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							25,850,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	17,270,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	17,270,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	17,270,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						42,924,000							51,260,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	15,924,000						A -	14,300,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	15,924,000						100 %	14,300,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15,924,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	20 Paket	14,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	36,960,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	36,960,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	36,960,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						42,924,000							46,970,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	a -	15,924,000						a -	14,300,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	15,924,000						100 %	14,300,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15,924,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	20 Paket	14,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	32,670,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	32,670,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	32,670,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						71,274,600							86,185,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	26,274,600						A -	23,595,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	26,274,600						100 %	23,595,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	26,274,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	33 Paket	23,595,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	45,000,000						84.25 %	62,590,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	45,000,000						80 %	62,590,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	45,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	62,590,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							21,780,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	13,200,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	13,200,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	13,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400							24,200,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	15,620,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	15,620,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	15,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						24,646,800						30,360,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	11,146,800						A -	10,010,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	11,146,800						100 %	10,010,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	11,146,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	14 Paket	10,010,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	20,350,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	20,350,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	20,350,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,054,400						26,840,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	9,554,400						A -	8,580,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	9,554,400						100 %	8,580,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9,554,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	12 Paket	8,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	18,260,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	18,260,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	18,260,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						33,635,400							37,155,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	13,535,400						A -	12,155,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	13,535,400						100 %	12,155,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	13,535,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	17 Paket	12,155,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	20,100,000						84.25 %	25,000,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	20,100,000						80 %	25,000,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	20,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						42,924,000							46,860,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	15,924,000						A -	14,300,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	15,924,000						100 %	14,300,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	15,924,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	20 Paket	14,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	27,000,000						84.25 %	32,560,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	27,000,000						80 %	32,560,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	32,560,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						23,850,600							26,895,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	10,350,600						A -	9,295,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	10,350,600						100 %	9,295,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	13 Paket	9,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	13,500,000						84.25 %	17,600,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	%		%	80 %	13,500,000						80 %	17,600,000	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	13,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	17,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						89,310,000							148,115,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	39,810,000						A -	35,750,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	39,810,000						100 %	35,750,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	39,810,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	50 Paket	35,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	49,500,000						84.25 %	112,365,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	49,500,000						60 %	112,365,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	49,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	112,365,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						121,641,600							204,244,700	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	54,141,600						A -	48,620,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	54,141,600						100 %	48,620,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	54,141,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	68 Paket	48,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	67,500,000						84.25 %	155,624,700	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	67,500,000						60 %	155,624,700	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	67,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	155,624,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						74,736,600							119,163,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	34,236,600						A -	30,745,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	34,236,600						100 %	30,745,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	34,236,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	43 Paket	30,745,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	40,500,000						84.25 %	88,418,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	40,500,000						60 %	88,418,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	40,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	88,418,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						108,383,400							176,874,500	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	45,383,400						A -	40,755,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	45,383,400						100 %	40,755,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket	45,383,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	57 Paket	40,755,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	63,000,000						84.25 %	136,119,500	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	63,000,000						60 %	136,119,500	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	63,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	136,119,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						80,032,800							124,632,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	35,032,800						A -	31,460,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	35,032,800						100 %	31,460,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	35,032,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	44 Paket	31,460,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	45,000,000						84.25 %	93,172,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	45,000,000						60 %	93,172,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	45,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	93,172,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						77,632,800							126,343,800	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	35,032,800						A -	31,460,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	35,032,800						100 %	31,460,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	35,032,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	44 Paket	31,460,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	42,600,000						84.25 %	94,883,800	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	42,600,000						60 %	94,883,800	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	42,600,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	94,883,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						72,151,800							101,299,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	31,051,800						A -	27,885,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	31,051,800						100 %	27,885,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	31,051,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	39 Paket	27,885,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	41,100,000						84.25 %	73,414,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	41,100,000						60 %	73,414,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	41,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	73,414,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						64,651,800							107,910,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	31,051,800						A -	27,885,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	31,051,800						100 %	27,885,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	31,051,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	39 Paket	27,885,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A	%		%	84.25 %	33,600,000						84.25 %	80,025,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	%		%	60 %	33,600,000						60 %	80,025,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	33,600,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	80,025,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,827,604							123,585,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	15,127,800						A -	13,585,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	15,127,800						100 %	13,585,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	15,127,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	19 Paket	13,585,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Akreditasi A	Persen		Persen	84.25 Persen	96,699,804						84.25 Persen	110,000,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan	bulan		bulan	12 bulan	96,699,804						12 bulan	110,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	96,699,804	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,865,508							116,434,991	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	-		-	A -	7,165,800						A -	6,435,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	7,165,800						100 %	6,435,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	7,165,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	9 Paket	6,435,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Akreditasi A	Persen		Persen	84.25 Persen	96,699,708						84.25 Persen	109,999,991	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan	bulan		bulan	12 bulan	96,699,708						12 bulan	109,999,991	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Peserta Didik	96,699,708	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Peserta Didik	109,999,991	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,146,600							158,510,000	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD Nilai SAKIP SKPD	- -		- -	a - A -	11,146,800						a - A -	10,010,000	
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	%		%	100 %	11,146,800						100 %	10,010,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	11,146,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	0	14 Paket	10,010,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah	% Peresen		% Peresen	1 % 1 Peresen	99,999,800						1 % 1 Peresen	148,500,000	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	99,999,800						12 bulan 12 Bulan	148,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	99,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,240,999,832						990,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	800,000,000						A	800,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	800,000,000						100 %	800,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	800,000,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	800,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	440,999,832						98 % 90 % 94 % 100 %	190,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	440,999,832						100 % 90 % 100 % 100 %	190,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	440,999,832	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,160,809,020						1,015,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	850,000,000						A	850,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	850,000,000						100 %	850,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	850,000,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	850,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	310,809,020						98 % 90 % 94 % 100 %	165,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	310,809,020						100 % 90 % 100 % 100 %	165,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	310,809,020	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							649,920,416						489,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	379,000,000						A	379,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	379,000,000						100 %	379,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	379,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	379,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	270,920,416						98 % 90 % 94 % 100 %	110,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	270,920,416						100 % 90 % 100 % 100 %	110,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	270,920,416	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,156,134,972							915,500,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	723,000,000						A	723,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	723,000,000						100 %	723,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	723,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	723,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	433,134,972					98 % 90 % 94 % 100 %	192,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	433,134,972					100 % 90 % 100 % 100 %	192,500,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	433,134,972	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	192,500,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						596,000,220							410,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	300,000,000					A	300,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	300,000,000					100 %	300,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	300,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %	% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %		296,000,220						98 % 90 % 94 % 100 %	110,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %	% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %		296,000,220						100 % 90 % 100 % 100 %	110,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	296,000,220	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,076,829,728							792,500,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	600,000,000						A	600,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	600,000,000						100 %	600,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	600,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	476,829,728						98 % 90 % 94 % 100 %	192,500,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	476,829,728						100 % 90 % 100 % 100 %	192,500,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	476,829,728	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	192,500,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						594,645,096							424,645,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	259,645,200						A	259,645,200	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	259,645,200						100 %	259,645,200	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	259,645,200	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat, ASN	1 Unit Kerja	259,645,200	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 98 % 100 %	334,999,896						98 % 90 % 98 % 100 %	165,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	334,999,896						100 % 90 % 100 % 100 %	165,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	334,999,896	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						842,234,148						810,000,000					
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	% %	% %	95 % 90 %			95 % 90 %	810,000,000				
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi pengawasan pemakaian obat rasional di fasyankes Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	kali paket	kali paket	12 kali 10 paket			12 kali 10 paket	660,000,000				
1	02	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			50 Paket	299,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	50 Paket	330,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			50 Paket	239,445,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	50 Paket	330,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %	% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %					100 % 90 % 100 % 100 %	150,000,000		
1	02	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	302,788,448	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							747,999,818		660,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %		% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %	747,999,818					98 % 90 % 94 % 100 %	660,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %	747,999,818					100 % 90 % 100 % 100 %	660,000,000		
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	747,999,818	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	660,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						31,000,010,280						33,000,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	11,000,000,000					A	11,000,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	%		%	100 %	11,000,000,000					100 %	11,000,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	11,000,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit Kerja	11,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	% % % %	% % % %	98 % 90 % 94 % 100 %		20,000,010,280						98 % 90 % 94 % 100 %	22,000,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatansesuai standar persentase mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %	% % % %	100 % 90 % 100 % 100 %		20,000,010,280						100 % 90 % 100 % 100 %	22,000,000,000	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	20,000,010,280	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	22,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							61,256,629,907							58,992,936,252
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	%	%	A 90 %		42,522,891,737							A 90 %	44,038,236,252

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	dokumen % %		dokumen % %	6 dokumen 90 % 100 %	20,227,460						6 dokumen 90 % 100 %	56,850,000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20,227,460	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	6 Dokumen	56,850,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	dokumen %		dokumen %	6 dokumen 100 %	40,410,585,249						6 dokumen 100 %	39,901,986,252	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				391 Orang/bulan	40,410,585,249	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	391 Orang/bulan	39,901,986,252	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pakaian dinas ASN	%		%	100 %	316,887,600						100 %	258,700,000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				398 Paket	316,887,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	398 Paket	258,700,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	228,621,100						90 %	234,000,000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14,992,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	12 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	17,838,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	25 Paket	18,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				4 Paket	35,369,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	4 Paket	36,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,996,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	12 Laporan	5,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	155,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	80 Laporan	160,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	42,544,600						90 %	50,000,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	42,544,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	2 paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	306,350,000						90 %	307,700,000	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,500,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	2 Laporan	1,700,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				44 Laporan	304,850,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	44 Laporan	306,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	1,197,675,728						90 %	3,229,000,000	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	380,573,608	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	33 Unit	390,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	52,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	65 Unit	54,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	725,512,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	1 Unit	2,750,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	% % 0%	% % 0%		80 % 90 % 90 0%	17,719,837,618						80 % 90 % 90 0%	13,194,700,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standar	%	%		90 %	8,116,385,000						90 %	22,000,000	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	7,563,120,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat, ASN	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	516,335,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat, ASN	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance Siaga Yang Dipelihara				1 unit	36,930,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat, ASN	1 unit	22,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang melaksanakan klas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	% %		% %	100 % 100 %	9,028,614,690					100 % 100 %	12,551,200,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1995 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1995 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1910 Orang	132,161,804	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1910 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1870 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1870 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9550 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	9550 Orang	122,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4720 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	4720 Orang	122,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64920 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	64920 Orang	143,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8500 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	8500 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31900 Orang	99,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	31900 Orang	143,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1150 Orang	99,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1150 Orang	143,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				300 Orang	75,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	300 Orang	122,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7450 Orang	99,999,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	7450 Orang	122,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1410 Orang	517,999,816	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1410 Orang	613,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah antropometri kit (pengukur Berat Badan, Tinggi Badan Balita) terstandar yang tersedia di Posyandu (rakorembang) Jumlah cetak media promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah paket PMT Balita Gizi Buruk Dan Wasting Jumlah remaja putri yang diberikan sosialisasi tentang Gizi Remaja (rakorembang) Lomba kader peduli stunting Orientasi bagi petugas kabupaten kota dalam penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi Orientasi pemanfaatan penggunaan buku KIA/KMS Pelatihan PMBA dan Pembentukan Pos Gizi Pertemuan Monev				134 set 4 paket 12 Dokumen 3 paket 11.628 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	410,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	134 set 4 paket 12 Dokumen 3 paket 11.628 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	506,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023																
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
			Terintegrasi dalam percepatan penurunan stunting Pertemuan validasi dan desiminasi hasil surveilans gizi Rapat Koordinasi Program Tablet Tambah Darah Remaja Putri Rapat LP/LS dalam rangka penguatan surveilands gizi Rapat tim pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk Sosialisasi Regulasi Asi Eksklusif Sosialisasi Tatalaksana Pemberian makanan Tambahan Untuk Balita Gizi Buruk Up Date Surveilands Gizi melalui aplikasi EPPGBM dalam rangka penanggulangan stuntingam gizi													
1	02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	49,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	12 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	236,999,854	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri yankestrad Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan peayanan yankestrad				7 puskesmas 7 puskesmas	24,985,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	7 puskesmas 7 puskesmas	37,500,000	Dinas Kesehatan
1	02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	136,999,904	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	29,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	100 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2 Dokumen	582,663,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	2 Dokumen	650,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan pada lokasi bencana Jumlah pertemuan pengendalian krisis kesehatan Persentase data faktor resiko bencana yang terkumpul pada saat bencana dan pasca bencana				100 % 1 kali 100 %	10,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	100 % 1 kali 100 %	11,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	136,999,804	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	24 Dokumen	143,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	5,240,820,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	2 Dokumen	7,700,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	383,986,408	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	12 Dokumen	440,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	20,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	306,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				9 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	9 Unit	33,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	9,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	99,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase sistem informasi pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	% %		% %	90 % 85 %	44,870,600						90 % 85 %	49,500,000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	14,970,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	16,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	29,900,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD	% % % %		% % % %	100 % 94 % 100 % 100 %	529,967,328						100 % 94 % 100 % 100 %	572,000,000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	19,992,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	1 Unit	22,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				8 Unit	509,974,928	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	8 Unit	550,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja	%		%	80 %	408,000,152						80 %	605,000,000	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	%		%	80 %	8,000,100						80 %	0	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				200 Dokumen	8,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	200 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	% %		% %	90 % 80 %	300,000,052						90 % 80 %	385,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				300 Orang	300,000,052	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	300 Orang	385,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bukittinggi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	dokumen %		dokumen %	1 dokumen 90 %	100,000,000						1 dokumen 90 %	220,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				20 Orang	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	20 Orang	220,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	% % %	% % %	90 % 70 % 85 %		255,900,400						90 % 70 % 85 %	605,000,000	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Frekuensi pembinaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah paket pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	kali paket		kali paket	12 kali 10 paket	100,900,400						12 kali 10 paket	192,500,000	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	50,000,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Apotik, Toko Obat, Toko Alkes,Optik, UMOT	12 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				200 Sarana	50,900,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Apotik, Toko Obat, Toko Alkes,Optik, UMOT	200 Sarana	82,500,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	%		%	70 %	60,000,000						70 %	198,000,000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	60,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Industri Rumah Tangga Pangan	12 Dokumen	198,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	%		%	70 %	45,000,000						70 %	49,500,000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	45,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Depot Air Minum, Tempat Pengolahan Makanan	12 Dokumen	49,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	%		%	70 %	50,000,000						70 %	165,000,000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	50,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Industri Rumah Tangga	20 Unit	165,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	% % %		% % %	80 % 100 % 65 %	350,000,000					80 % 100 % 65 %	550,000,000		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif	% % %		% % %	15 % 75 % 100 %	100,000,000					15 % 75 % 100 %	165,000,000		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat umum dan komunitas	12 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	% % % %		% % % %	35 % 100 % 100 % 90 %	150,000,000					35 % 100 % 100 % 90 %	220,000,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	150,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat dan ASN	12 Dokumen	220,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	% % % %		% % % %	80 % 100 % 90 % 65 %	100,000,000					80 % 100 % 90 % 65 %	165,000,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	100,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	12 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3,253,300							6,038,563	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP SKPD	0		0	A 0	3,253,300					A 0	6,038,563		
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	3,253,300					100 %	6,038,563		
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	2,879,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	15 Paket	4,831,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	373,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	2 Paket	1,207,313	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6,284,753,724							6,127,191,613	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	%		%	85 %	6,284,753,724					85 %	6,127,191,613		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya laik fungsi jalan	%		%	80 %	6,284,753,724					80 %	6,127,191,613		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Unit	3,437,079,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	110 Unit	1,044,819,002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4200 Unit	2,847,674,524	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4200 Unit	5,082,372,611	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,020,953,320							1,258,864,531	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	0		0	A 0	1,020,953,320						A 0	1,258,864,531		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	4,020,500						100 %	7,245,200		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	4,020,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	9 Paket	7,245,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	5,247,400						100 %	41,117,960		
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	4,479,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	27 Paket	9,045,610	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	767,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	2 Paket	1,810,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	150,355,600						100 %	0		
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150,355,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	5 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	861,329,820						100 %	1,208,701,371		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				15 Unit	861,329,820	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	15 Unit	1,208,701,371	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						83,534,149,750							53,121,906,927	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP SKPD	0		0	A 0	11,911,547,801						A 0	2,724,438,003	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	34,429,100						100 %	44,226,963	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun				2 dokumen	34,429,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 dokumen	44,226,963	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%		%	100 %	10,131,571,101						100 %	40,700,000	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	10,104,380,901	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	72 Orang/bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	27,190,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	19 Laporan	40,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	440,000,000						100 %	507,806,650	
1 03 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan				1 ls	440,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	1 ls	507,806,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	98,728,800						100 %	156,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				114 Paket	98,728,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	114 Paket	156,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	307,546,800						100 %	656,371,395	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	8,174,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	15 Paket	24,056,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	75,977,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	6 Paket	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				58 Paket	17,699,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	58 Paket	36,156,395	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17,180,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	2 Paket	42,181,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	4,675,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	50 Laporan	12,043,640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	183,840,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	30 Laporan	421,933,590	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	167,110,000						100 %	353,044,960	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2,710,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	4 Laporan	6,038,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	164,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	4 Laporan	347,006,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	732,162,000						100 %	966,288,035	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	1 Unit	60,427,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	257,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	29 Unit	422,628,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15,330,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	10 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	420,642,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur	1 Unit	483,232,435	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi yang berkondisi baik	%		%	74,71 %	6,631,912,326						74,71 %	3,700,000,000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana irigasi	%		%	80 %	111,814,000						80 %	500,000,000	
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	111,814,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	50 Orang	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana prasarana irigasi yang berkualitas untuk mendukung infrastruktur pangan	%		%	80 %	6,520,098,326						80 %	3,200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1,982,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	3,472,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara				1 KM	884,387,374	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 KM	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				11 Unit	181,160,952	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	11 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga	%		%	97 %	1,795,782,600						97 %	600,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan SPAM jaringan perpipaan	%		%	80 %	1,795,782,600						80 %	600,000,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	445,928,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				15 Liter/Detik	1,349,854,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	15 Liter/Detik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah	%		%	60 %	213,309,400						60 %	0	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%		%	80 %	213,309,400						80 %	0	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	213,309,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengurangan titik genangan	%		%	100 %	18,848,770,248						100 %	12,422,962,574	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas prasarana lingkungan	%		%	80 %	18,848,770,248						80 %	12,422,962,574	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	208,054,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				642 M	466,539,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	642 M	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				677 M	17,116,337,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	677 M	8,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				1200 M	1,057,839,248	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1200 M	3,122,962,574	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung hijau	%		%	5 %	32,233,065,000						5 %	24,323,666,350	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	%		%	80 %	32,233,065,000					80 %	24,323,666,350		
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				300 Dokumen	332,103,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	300 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	31,838,455,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Dokumen	23,410,908,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				30 Dokumen	54,425,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	30 Dokumen	62,757,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				300 Unit	8,081,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	300 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	%		%	89,45 %	8,915,582,127						89,45 %	7,100,000,000	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya laik fungsi jalan	%		%	80 %	8,915,582,127						80 %	7,100,000,000	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	90,050,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6 KM	7,173,800,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	6 KM	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				10 KM	1,128,852,127	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	10 KM	1,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				600 M	300,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	600 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				241.3 M	222,880,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	241.3 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase bangunan gedung hijau	%		%	80 %	45,780,200						80 %	470,840,000	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	%		%	80 %	45,780,200						80 %	470,840,000	
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	13,100,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				4 Dokumen	12,599,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4 Dokumen	70,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi				1 Dokumen	20,080,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%		%	62 %	2,938,400,048						62 %	1,780,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan	%		%	80 %	1,999,999,900						80 %	470,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,999,999,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%		%	80 %	426,373,832						80 %	640,000,000		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				300 Dokumen	426,373,832	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	300 Dokumen	640,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%		%	80 %	512,026,316						80 %	670,000,000		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				200 Dokumen	258,055,316	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	200 Dokumen	470,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				5 Dokumen	253,971,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1,461,922,516							672,932,791	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	%		%	80 %	34,797,900							80 %	49,416,279	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	%		%	80 %	34,797,900							80 %	49,416,279	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	34,797,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	10 Dokumen	49,416,279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	%		%	100 %	17,654,000							100 %	42,108,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	%		%	80 %	17,654,000						80 %	42,108,000	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	17,654,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	2 Dokumen	42,108,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	%		%	80 %	48,297,800						80 %	51,157,700	
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	%		%	80 %	48,297,800						80 %	51,157,700	
2 10 07 2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				10 Dokumen	48,297,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	10 Dokumen	51,157,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	%		%	80 %	263,366,108						80 %	179,861,846	
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tertatanya ruang kota	%		%	80 %	263,366,108						80 %	179,861,846	
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				70 Dokumen	263,366,108	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	70 Dokumen	179,861,846	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	%		%	80 %	1,097,806,708						80 %	350,388,966	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya ruang kota	%		%	80 %	1,097,806,708						80 %	350,388,966	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	859,757,796	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						50 Dokumen	238,048,912	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	50 Dokumen	350,388,966	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						26,809,040,197						28,352,727,801										
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	0		0	A 0	4,944,988,241								A 0	5,224,232,888		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	35,890,000									2 dokumen	40,414,000	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35,890,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPKP		2 Dokumen	40,414,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,348,178,937										4,540,405,718	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4,348,178,937			PENDAPATAN TRANSFER		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0		33 Orang/bulan	4,540,405,718	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36,184,500										29,250,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	36,184,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40 Paket	29,250,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						280,832,500										327,771,370	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2,371,700			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7 Paket	2,654,245	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	102,628,100			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4 Paket	120,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	15,011,700			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			34 Paket	18,201,625	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7,671,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4 Paket	9,936,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah laporan kunjungan yang difasilitasi				0 Laporan 36 Laporan	4,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		0 Laporan 36 Laporan	6,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan 127096000 Rupiah	148,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		42 Laporan 127096000 Rupiah	170,979,500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,300,000							19,832,800	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang diadakan				2 item	3,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		2 item	4,320,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	15,512,800	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227,602,304							266,559,000	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Unit	45,760,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 unit 16 unit 0 Unit	137,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 unit 16 unit 0 Unit	164,329,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	7,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	14 Unit	8,549,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah honor pegawai kontrak yang dibayarkan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli				12 bulan 40 item	43,562,304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 bulan 40 item	47,921,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1,115,569,208							3,169,150,111	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						40,795,900							0	
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	40,795,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						1,074,584,308							3,126,800,111	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah paket pengelolaan rumah susun yang difasilitasi				0 Laporan 3 paket	77,299,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		0 Laporan 3 paket	1,815,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				42 unit	997,284,508		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42 unit	1,311,800,111	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						189,000						0.24 %	42,350,000	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 bulan	189,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Rusunawa	12 bulan	42,350,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						556,404,800							1,439,900,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						50,764,600						0		
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	50,764,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		4 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						505,640,200						1,331,000,000		
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				1 Ha	504,017,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		1 Ha	998,250,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 aplikasi	1,622,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		1 aplikasi	199,650,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Layak	%		%	0.24 %	4,048,531,300						0.24 %	181,500,000	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah layak Huni Persentase Rumah Layak Huni	% %		% %	0.24 % 0.24 %	4,048,531,300						0.24 % 0.24 %	181,500,000	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	4,048,531,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan			Kota Bukittinggi	0 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang layak	%		%	90 %	16,143,546,648						90 %	18,337,944,802	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Drainase lingkungan yang berkondisi mantap	%		%	90 %	16,143,546,648						90 %	18,337,944,802	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	783,000,613		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	5 Dokumen	603,342,300	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah TPU yang Dipelihara panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun Panjang Drainase Lingkungan yang Dipelihara Panjang Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi Panjang Jalan Lingkung yang Dibangun Panjang Jalan Lingkung yang Dipelihara Panjang Jalan Lingkung yang Direhabilitasi/ Ditingkatkan				0 Lokasi 1 TPU 1250 meter 400 meter 2710 meter 2350 meter 2500 meter 4600 meter	15,266,616,732		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	0 Lokasi 1 TPU 1250 meter 400 meter 2710 meter 2350 meter 2500 meter 4600 meter	17,629,167,722	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	93,929,303		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	105,434,780	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						26,087,250,341							29,213,205,900		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sakip	-		-	BB -	7,483,631,181							BB -	8,493,205,900	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,230,000								38,780,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP	6 Dokumen	38,780,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan	bulan		bulan	14 bulan	6,326,395,081							14 bulan	7,039,316,900	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	6,326,395,081		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP	65 Orang/bulan	7,039,316,900	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						101,126,400								100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	101,126,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	65 Paket	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						200,665,100							265,000,000	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	15,474,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	14 Paket	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	29,182,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	37 Paket	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	17,512,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	6 Paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	1 Laporan	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah porsi makan minum lembur				1 Laporan 12 Laporan 1 ls	132,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Anggota Satpol PP	1 Laporan 12 Laporan 1 ls	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142,330,000							157,000,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		1 Laporan	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	117,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		48 Laporan	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		12 Laporan	22,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						692,884,600							893,109,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43,109,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		1 Unit	43,109,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	322,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		21 Unit	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	9,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		25 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah paket tenaga kebersihan				0 Unit 1 Unit 1 paket	317,365,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		0 Unit 1 Unit 1 paket	320,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	persen		persen	90 persen	18,603,619,160						90 persen	20,720,000,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penegakan perda Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	persen persen		persen persen	95 persen 95 persen	17,396,253,660						95 persen 95 persen	19,300,000,000	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				0 Kasus	1,761,124,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	0 Kasus	2,300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Titik rawan gangguan trantibum				0 Kasus 10 titik	12,575,039,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	0 Kasus 10 titik	13,600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1,725,039,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	12 Dokumen	1,800,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	1,335,049,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	200 Orang	1,600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan perlindungan masyarakat	persen		persen	55 persen	990,465,500						55 persen	1,200,000,000	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				12 Laporan	259,266,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	12 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 Laporan	388,751,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	12 Laporan	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				12 Laporan	342,448,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi	12 Laporan	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase anggota PPNS yang di fasilitasi	persen		persen	100 persen	216,900,000						100 persen	220,000,000	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				12 Laporan	216,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	PPNS Satpol PP	12 Laporan	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6,415,145,276						6,835,777,047	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	2,678,754,450					A	2,787,377,454		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	20,565,800					100 %	23,341,500		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja yang disusun				4 Dokumen	20,565,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	4 Dokumen	23,341,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	1,928,711,450					100 %	1,836,771,450		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/Bulan	1,928,711,450	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	16 Orang/Bulan	1,836,771,450	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35,200,000						39,820,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	35,200,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	64 Paket	39,820,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	196,967,000					100 %	226,473,500		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	3,014,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	16 Paket	3,624,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				39 Paket	7,436,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	39 Paket	8,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				13 Paket	4,888,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	13 Paket	5,995,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				306 Laporan	3,350,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	306 Laporan	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53 Laporan	178,278,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	53 Laporan	202,554,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	13,200,000						100 %	14,460,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun				60 Surat	600,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	60 Surat	600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,600,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	12 Laporan	13,860,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	%		%	100 %	484,110,200						100 %	530,288,084	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	1 Unit	25,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	229,686,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	9 Unit	247,689,960	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	68,210,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	40 Unit	80,887,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	166,213,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	1 Unit	176,510,324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Persentase pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana Persentase Pembanguan Kembali Semua Prasarana dan Sarana Kelembagaan pada Wilayah Pasca Bencana Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat Persentase Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik dan Masyarakat Persentase respon cepat kejadian bencana Persentase Respon Cepat Kejadian Bencana	% % % % % % % %		% % % % % % % %	87 % 90 % 87 % 90 % 87 % 90 % 87 % 90 %	3,736,390,826					87 % 90 % 87 % 90 % 87 % 90 % 87 % 90 %	4,048,399,593		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Informasi dan Data Dampak Bencana	%		%	90 %	197,048,500					90 %	226,206,540		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				2 Dokumen	140,158,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	138,528,915	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				3600 Orang	56,889,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	3600 Orang	87,677,625	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat yang Teredukasi tentang Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Relawan dan Badan Usaha yang Terlibat dan Dilatih dalam Kebencanaan	% %		% %	90 % 90 %	3,529,342,326					90 % 90 %	3,811,168,053		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	80,019,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				64 Orang	334,472,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	64 Orang	329,046,480	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,290,468,396	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	12 Dokumen	1,373,628,940	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				31 Unit	143,152,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	31 Unit	230,585,250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				3 Kawasan	481,550,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	3 Kawasan	587,952,750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kerugian Akibat Bencana yang Tertanggulangi				12 Dokumen	36,678,350	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	12 Dokumen	51,690,450	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				20 Orang	1,163,000,880	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	20 Orang	1,238,264,183	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Terselamatkan dan Terevakuasi	%		%	90 %	10,000,000					90 %	11,025,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bahan Logistik yang disediakan				2 jenis/tahun	10,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	2 jenis/tahun	11,025,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8,144,335,501							10,645,342,593		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	.	.	.	A.	5,635,717,911							A.	6,363,552,169	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	22,069,800							100 Persen	24,277,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	22,069,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	3 Dokumen	24,277,000	Dinas Kebakaran	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	4,387,005,161							100 Persen	4,427,393,622	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4,387,005,161	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	34 Orang/bulan	4,427,393,622	Dinas Kebakaran	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	108,729,800							100 Persen	195,234,000	
1 05 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	36,377,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	1 Unit	12,000,000	Dinas Kebakaran	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Stel	72,352,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	68 Stel	183,234,000	Dinas Kebakaran	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	113,243,400							100 Persen	349,796,050	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	3,584,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	3 Jenis	13,414,500	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				39 Jenis	8,119,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	39 Jenis	27,785,450	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Jenis	13,889,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	10 Jenis	26,368,100	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				25 Laporan	4,913,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	25 Laporan	32,000,000	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum yang Disediakan (Nasi) Jumlah Makan dan Minum yang Disediakan (Snack)				60 Laporan 295 Bungkus 170 Kotak	82,735,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	60 Laporan 295 Bungkus 170 Kotak	250,228,000	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	55,150,000						100 Persen	59,702,500	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai dan Buku Cek Terbeli				0 Laporan 3 Jenis	1,050,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	0 Laporan 3 Jenis	1,798,500	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				144 Laporan	54,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	144 Laporan	57,904,000	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	949,519,750						100 Persen	1,307,148,997	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	1 Unit	167,158,200	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	692,396,250	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	19 Unit	1,091,259,147	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Jenis	10,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	3 Jenis	0	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit 6 Unit	56,533,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	5 Unit 6 Unit	6,270,000	Dinas Kebakaran
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Tenaga Kebersihan				1 Unit 2 Orang	151,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur	1 Unit 2 Orang	42,461,650	Dinas Kebakaran
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	menit menit		menit menit	10,5 menit 10,5 menit	2,508,617,590						10,5 menit 10,5 menit	4,281,790,424	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan lainnya yang Tertib Prosedur	Persen		Persen	100 Persen	2,370,409,140						100 Persen	3,802,508,049	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran				1 Dokumen 6 Jenis	25,106,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	1 Dokumen 6 Jenis	114,625,000	Dinas Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				60 Kejadian	2,049,324,640	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	60 Kejadian	1,531,471,209	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				140 Dokumen	79,927,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	140 Dokumen	128,359,440	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				4 Jenis	50,748,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	4 Jenis	1,626,350,000	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Peserta Bimtek/Diklat/Pelatihan				3 Orang 60 Orang	43,580,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	3 Orang 60 Orang	211,961,200	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				100 Dokumen	121,722,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	100 Dokumen	189,741,200	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Pengawasan Pencegahan Kebakaran	Persen		Persen	48 Persen	26,985,500						48 Persen	95,849,050	
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikah Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				60 Dokumen	26,985,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	60 Dokumen	95,849,050	Dinas Kebakaran
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi kebakaran yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	19,113,000						100 Persen	22,432,300	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				50 Dokumen	19,113,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	50 Dokumen	22,432,300	Dinas Kebakaran	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen		Persen	65 Persen	92,109,950						65 Persen	361,001,025		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				250 Orang	43,791,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	250 Orang	136,514,950	Dinas Kebakaran	
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				24 Desa/Kelurahan	48,318,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat	24 Desa/Kelurahan	224,486,075	Dinas Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							14,350,889,947							21,966,047,882	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	3,370,438,872							100 %	5,969,435,034	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	21,033,400							100 %	45,000,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	21,033,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	3 Dokumen	45,000,000	Dinas Sosial	
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu ()	%		%	100 %	2,783,610,368							100 %	3,026,552,908	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 14 Orang/bulan	2,759,543,568		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang/bulan 14 Orang/bulan	2,996,552,908	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran tersusun				0 Laporan 6 Bulan	24,066,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Laporan 6 Bulan	30,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian kantor	%		%	100 %	26,000,100						100 %	6,000,000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	26,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Paket	6,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi kantor	%		%	90 %	171,936,600						90 %	385,500,000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Jenis 0 Paket	1,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Jenis 0 Paket	3,500,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis AKT terbeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				41 Jenis 0 Paket	5,968,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	41 Jenis 0 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4,707,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	5 Paket	7,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas				12 Bulan 12 Bulan	159,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Bulan 12 Bulan	300,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	57,400,000						90 %	59,400,000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan beda pos lainnya tersedia				500 Lembar	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	500 Lembar	6,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar				7 Rekening	35,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	7 Rekening	35,400,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Bulan 0 Laporan	18,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		%	90 %	310,458,404						90 %	403,000,000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	119,111,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	16 Unit	165,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor				12 Bulan	22,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Bulan	18,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 4 Unit	168,536,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Bulan 4 Unit	220,000,000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	%		%	70 %	1,762,235,000						70 %	4,104,440,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	75 %	1,762,235,000						75 %	4,104,440,000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pilar-Pilar Sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)				0 Orang 260 Orang	855,397,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang 260 Orang	2,589,680,000	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)				3 Orang	47,535,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	3 Orang	119,760,000	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	125,890,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Keluarga	220,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	670,964,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Lembaga	1,075,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Sertifikat	62,446,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	40 Sertifikat	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	%		%	70 %	2,091,416,002						70 %	3,030,951,192	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar	%		%	80 %	1,393,681,152						80 %	2,055,951,192	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,790,300					0	0 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	195,973,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	442,340,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Lanjut Usia Miskin non Produktif yang diberi permakanaan tambahan Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi bantuan usaha. Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				275 Orang 24 Orang 0 Orang	573,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	275 Orang 24 Orang 0 Orang	722,890,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	59,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Orang	120,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	294,032,148		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	380,052,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	169,887,404		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	80 Orang	300,669,192	Dinas Sosial
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial	%		%	70 %	697,734,850						70 %	975,000,000	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	39,141,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	57,681,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	75,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks warga binaan LP yang ditingkatkan kemandiriannya Jumlah pengurus dan anggota KUBE ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiriannya (anak terlantar)				24 Orang 775 Orang 0 Orang 50 Orang	600,911,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	24 Orang 775 Orang 0 Orang 50 Orang	800,000,000	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%		%	70 %	5,756,737,907						70 %	4,232,282,000	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar dipelihara	%		%	75 %	167,838,823						75 %	200,000,000	
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	81,825,423		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.01 03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	86,013,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akurasi Data Penduduk Miskin	%		%	80 %	5,588,899,084						80 %	4,032,282,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				0 Orang	658,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	600,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	2,632,281,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Keluarga	800,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	2,298,617,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	2,632,282,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	%		%	100 %	984,707,472						100 %	2,479,039,842	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	%		%	100 %	598,274,900						100 %	1,430,010,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	142,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	750,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 0 Orang	71,362,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		0	0 Orang 0 Orang	100,010,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	183,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan		0	12 Orang	230,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	201,527,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	%		%	80 %	386,432,572						80 %	1,049,029,842	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Kampung	96,506,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kampung	250,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	289,925,972		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	799,029,842	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	%		%	80 %	385,354,694						80 %	2,149,899,814	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman makam pahlawan	Bulan		Bulan	12 Bulan	385,354,694						12 Bulan	2,149,899,814	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan TMP Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				12 Bulan 0 Makam	242,417,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Bulan 0 Makam	499,899,814	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	142,936,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Laporan	150,000,000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						10,170,103,850						11,565,200,574		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Tingkatan		Tingkatan	A Tingkatan	6,803,244,226						A Tingkatan	7,365,200,574	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	87 Persen	36,739,800						87 Persen	40,414,000	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	36,739,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	2 Dokumen	40,414,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan.	Persen		Persen	100 Persen	5,825,516,905						100 Persen	6,075,536,574	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5,825,516,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	39 Orang/bulan	6,075,536,574	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	34,449,900						100 Persen	46,750,000	
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	34,449,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	55 Paket	46,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	177,790,601						90 Persen	289,500,000	
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,003,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	22,999,701	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	2 Paket	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	11,800,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai	3 Paket	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	12,190,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	2 Paket	18,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	4,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	7 Laporan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	124,415,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pegawai	60 Laporan	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	%		%	70 %	43,246,900						70 %	175,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	43,246,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Unit	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	155,173,412						100 %	242,000,000	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	101,486,412	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Laporan	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	%		%	80 %	530,326,708						80 %	496,000,000	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,741,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Unit	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit R2 6 Unit	264,212,804	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	34 Unit R2 6 Unit	315,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	225,372,904	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Unit	121,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender	%		%	21,43 %	949,947,800						21,43 %	775,000,000	
2 08 02 2.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Focal Point Aktif	%		%	90 %	79,992,700						90 %	175,000,000	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Perangkat Daerah	79,992,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	28 Perangkat Daerah	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Aktif di Organisasi Perempuan	%		%	10 %	869,955,100						10 %	600,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	349,955,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	2 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	520,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Organisasi	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Rasio		Rasio	7,21 Rasio	70,374,404						7,21 Rasio	200,000,000	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang terlayani	%		%	100 %	70,374,404						100 %	200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang	70,374,404	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	%		%	80 %	1,502,611,212						80 %	1,750,000,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	%		%	10.15 %	1,502,611,212						10.15 %	1,750,000,000	
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				384 Dokumen	752,611,504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	384 Dokumen	950,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 12 Laporan	749,999,708		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Dokumen 12 Laporan	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak	%		%	100 %	14,867,800						100 %	90,000,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/SKPD yang menyediakan data terpilah	Lembaga		Lembaga	30 Lembaga	14,867,800						30 Lembaga	90,000,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	14,867,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pokja KLA aktif	Pokja		Pokja	15 Pokja	484,058,908						15 Pokja	875,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator Pemenuhan Hak Anak	%		%	60 %	359,999,704						60 %	575,000,000	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	199,999,904	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	50 Organisasi	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	159,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	%		%	90 %	124,059,204						90 %	300,000,000	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	124,059,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	30 Orang	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak)	%		%	0,26 %	344,999,500						0,26 %	510,000,000	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang membutuhkan Perlindungan khusus yang terlayani	%		%	70 %	109,999,900						70 %	60,000,000	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Perangkat Daerah	109,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	27 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak)	%		%	0.26 %	234,999,600						0.26 %	450,000,000	
2 08 07 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	99,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	5 Laporan	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Dokumen	134,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	24 Dokumen	285,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,593,121,324						2,383,666,030	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks		Indeks	0,43 Indeks	166,999,300						0,43 Indeks	290,000,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sinkronisasi Kebijakan yang mengatur tentang Kualitas dan Kuantitas Penduduk	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	96,999,600						1 Kebijakan	200,000,000	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				1 Dokumen	64,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	11,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	12 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk	Penduduk		Penduduk	127 Penduduk	69,999,700						127 Penduduk	90,000,000	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	14,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	54,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR).	%		%	68,35 %	1,240,397,316						68,35 %	1,448,807,035	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	1,049,999,616						100 %	1,200,625,000	
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				4 Organisasi	24,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	4 Organisasi	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0 Orang 24 PPKBK 95 Poktan 165 Sub PPKBK	1,024,999,716	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	0 Orang 24 PPKBK 95 Poktan 165 Sub PPKBK	1,050,625,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS yang Ingin BerKB Tidak Terpenuhi (unmetneed)	%		%	21.57 %	165,397,900						21.57 %	169,682,035	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				1.835 Orang	165,397,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1.835 Orang	169,682,035	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Paripurna	Kampung KB		Kampung KB	1 Kampung KB	24,999,800						1 Kampung KB	78,500,000	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				7 Laporan	24,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	7 Laporan	78,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	PPKS		PPKS	2 PPKS	1,185,724,708						2 PPKS	644,858,995	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Fungsi Reproduksi, Fungsi Perlindungan dan Fungsi Ekonomi	%		%	100 %	475,723,808						100 %	527,500,000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				99 Unit	24,990,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	99 Unit	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				60 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	60 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	207,368,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	2 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	133,362,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	2 Laporan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	50,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan tahapan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	%		%	30 %	710,000,900						30 %	117,358,995	
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				3 Laporan	710,000,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	0	3 Laporan	117,358,995	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						49,712,488,147							54,694,798,317	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sasaran, program kegiatan renja skpd yang selaras dengan renstra SKPD	%		%	96 %	21,361,153,339						96 %	20,987,716,912	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	%		%	95 %	36,740,000						95 %	54,951,250	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	36,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 4 Dokumen	54,951,250	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya persentase laporan keuangan tepat waktu	%		%	95 %	13,052,039,789						95 %	12,442,646,906	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/bulan	13,052,039,789		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	143 Orang/bulan	12,425,486,906	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	%		%	97 %	297,735,000						97 %	297,735,000	
2 11 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah unit yang dilakukan penjagaan				0 Dokumen 2 unit	297,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 2 unit	297,735,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	% % % %		% % % %	93 % 97 % 94 % 83 %	81,000,000					93 % 97 % 94 % 83 %	335,000,000		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	81,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	2 Paket	335,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	% % % %		% % % %	93 % 97 % 94 % 83 %	170,722,000					93 % 97 % 94 % 83 %	237,212,500		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penarangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 jenis 0 Paket	3,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	15 jenis 0 Paket	3,270,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 jenis 0 Paket	15,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	40 jenis 0 Paket	10,554,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				10 jenis 0 Paket	8,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	10 jenis 0 Paket	6,788,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makanan dan minuman tamu				0 Laporan 12 bulan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Laporan 12 bulan	3,336,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan 0 Laporan	138,467,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	12 bulan 0 Laporan	213,264,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	% % % %	% % % %		93 % 97 % 94 % 83 %	111,720,000						93 % 97 % 94 % 83 %	151,485,000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat pos yang diadakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket pengiriman yang dibayarkan				131 buah 0 Laporan 9 kali	1,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	131 buah 0 Laporan 9 kali	1,535,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan rekening telepon / fax yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan				0 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	110,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	149,950,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	% % % %	% % % %		93 % 97 % 94 % 83 %	7,611,196,550						93 % 97 % 94 % 83 %	1,837,557,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan 0 Unit	39,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	12 bulan 0 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 12 bulan	7,099,993,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Unit 12 bulan	275,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara mlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 bulan	29,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Unit 12 bulan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	442,018,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	2 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha kegiatan yang diawasi	%		%	42 %	680,864,800						42 %	795,000,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan air Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	% %		% %	100 % 6 %	332,778,600						100 % 6 %	395,000,000	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen DDDTLH Dokumen RPPLH Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen	188,092,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DIKPLHD Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen	144,686,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	1 Dokumen 0 Dokumen	145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						348,086,200							400,000,000	
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	348,086,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan 3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		2 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	% %		% %	65 % 87.5 %	235,556,100						65 % 87.5 %	1,093,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase parameter dibawah baku mutu air Persentase parameter dibawah baku mutu udara	% %		% %	65 % 87.5 %	235,556,100						65 % 87.5 %	1,093,000,000	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen kajian daya tampung daya dukung beban sungai Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat				1 dokumen 0 Dokumen 12 titik pantau	91,507,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	1 dokumen 0 Dokumen 12 titik pantau	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah kampung iklim yang dibina				0 Dokumen 3 kelompok	68,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 3 kelompok	297,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Jumlah sampel air yang diperiksa kualitasnya				0 Dokumen 50 sampel	75,234,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 50 sampel	601,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	% %		% %	20 % 20 %	2,146,779,770						20 % 20 %	8,733,178,160	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah tanaman di taman kehati Persentase penyisipan tanaman di RTH	% %		% %	30 % 30 %	2,146,779,770						30 % 30 %	8,733,178,160	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Identifikasi Pohon Pelindung Luas RTH yang dikelola Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Perencanaan taman kehati Ranperda Pengelolaan RTH				1 Dokumen 5.9 Ha 0 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen	2,146,779,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	1 Dokumen 5.9 Ha 0 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen	8,733,178,160	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang dikelola	%		%	7 %	16,500,000						7 %	32,000,000	
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin yang melakukan pengelolaan LB3	%		%	7 %	16,500,000						7 %	32,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah usaha / kegiatan yang dikelola limbah B3 yang dikelola				0 Dokumen 50 Usaha / Kegiatan	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 50 Usaha / Kegiatan	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase PPLH tersertifikasi Persentase usaha kegiatan yang diawasi	% %		% %	22 % 42 %	73,715,400						22 % 42 %	92,000,000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pengelolaan air Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	% % %		% % %	11 % 100 % 5 %	73,715,400						11 % 100 % 5 %	92,000,000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan (SKKLH, PPKLH, Persetujuan Teknis)				0 Dokumen 100 %	59,999,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 100 %	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha / kegiatan yang diawasi				0 Laporan 50 usaha / kegiatan	13,716,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Laporan 50 usaha / kegiatan	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengurangan sampah dimasyarakat	%		%	27 %	72,128,200						27 %	80,000,000	
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	%		%	5 %	72,128,200						5 %	80,000,000	
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen data kebijakan dan kearifan lokal (inventarisasi kebijakan dan kearifan lokal terkait PPLH di Kecamatan Guguak Panjang) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen 0 Dokumen	72,128,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	1 Dokumen 0 Dokumen	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH Persentase pengurangan sampah di masyarakat Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	% % %		% % %	20 % 27 % 10 %	239,356,650						20 % 27 % 10 %	480,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah Persentase penyisipan tanaman di RTH Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	% % %		% % %	8 % 30 % 5 %	239,356,650					8 % 30 % 5 %	480,000,000		
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD dan SLTP Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru				0 Dokumen 10 sekolah 30 siswa	109,356,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 10 sekolah 30 siswa	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah media informasi				0 Orang 5 media	129,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Orang 5 media	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	%		%	10 %	185,556,900					10 %	475,000,000		
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah	%		%	8 %	185,556,900					8 %	475,000,000		
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah penilaian lingkungan hidup				0 Entitas 6 kali penilaian	185,556,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Entitas 6 kali penilaian	475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha kegiatan yang diawasi	%		%	42 %	18,999,800					42 %	25,414,900		
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%		%	6 %	18,999,800					6 %	25,414,900		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPHL yang ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				20 pengaduan 0 Dokumen	18,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 pengaduan 0 Dokumen	25,414,900	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah di masyarakat Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah Persentase timbulan sampah	% % %		% % %	27 % 5 % 100 %	24,681,877,188						27 % 5 % 100 %	21,901,488,345	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah Persentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah Persentase perkantoran swasta yang melakukan pengelolaan sampah Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah sesuai standar Persentase sarana dan prasarana pengurangan sampah sesuai standar Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	% % % % % % % %		% % % % % % %	8 % 5 % 88 % 4 % 5 % 80 % 70 % 5 %	24,681,877,188						8 % 5 % 88 % 4 % 5 % 80 % 70 % 5 %	21,901,488,345	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah kompos yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				300 ton/ tahun 0 Laporan	1,191,757,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	300 ton/ tahun 0 Laporan	1,154,390,400	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA Regional Jumlah TPSS dan TPST yang disemprot				24 kali 0 Ton 45.625 ton/tahun 68 unit	14,719,784,888		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	24 kali 0 Ton 45.625 ton/tahun 68 unit	12,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan Kendaraan operasional yang dipelihara				0 Dokumen 26 Jenis 12 Bulan	8,770,334,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	0	0 Dokumen 26 Jenis 12 Bulan	8,489,361,945	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7,923,728,042						5,319,634,000		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	.		.	BB .	5,747,834,851						BB .	4,578,804,000	
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	%		%	100 %	20,110,800						100 %	22,250,000	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20,110,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	22,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	12	01	2.02																
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD yang diberikan	%												
2	12	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang diberikan	%												
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang diberikan	%												
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	5,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	146,600,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Laporan	165,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang dilaksanakan	%		%	100 %	50,825,600						100 %	0	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	26,244,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	24,581,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%		%	100 %	123,104,000						100 %	133,354,000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,400,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	2,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106,560,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	114,584,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14,144,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	15,870,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	%		%	100 %	457,760,333						100 %	496,950,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	43,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	102,350,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Unit	143,950,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	316,220,333	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	310,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%		%	88 %	753,082,536						88 %	0	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%		%	88 %	718,931,336						88 %	0	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah penduduk lahir dan mati yang dicatat Jumlah perekaman data biometrik Jumlah SKDWN yang diterbitkan Jumlah SKPWN yang diterbitkan				29500 Dokumen 5000 Dokumen 8000 Dokumen 10000 Dokumen 2000 Orang 500 Orang 2000 Dokumen 2000 Dokumen	231,703,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	29500 Dokumen 5000 Dokumen 8000 Dokumen 10000 Dokumen 2000 Orang 500 Orang 2000 Dokumen 2000 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan				12 Laporan 20000 Pelayanan	487,228,036	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	12 Laporan 20000 Pelayanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%		%	88 %	34,151,200						88 %	0	
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				8 Dokumen	34,151,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	8 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%		%	88 %	518,143,220						88 %	0	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%		%	88 %	518,143,220						88 %	0	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan, Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perceraian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Jumlah data perkawinan yang dihimpun dari KUA Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				3000 akta 500 akta 10 akta 50 akta 800 data 4360 Dokumen	231,845,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	3000 akta 500 akta 10 akta 50 akta 800 data 4360 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan				4 Layanan 5000 pelayanan	286,297,420	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	4 Layanan 5000 pelayanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	%		%	92 %	828,558,735						92 %	620,830,000	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	%		%	92 %	198,474,600						92 %	205,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	103,224,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	12 Dokumen	125,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	95,250,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	5 Dokumen	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	%		%	92 %	630,084,135						92 %	357,400,000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jasa Pengelolaan Aplikasi Pendukung SIAK yang tersedia Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Peralatan Pendukung SIAK yang dibeli Jumlah Peralatan Pendukung SIAK yang dipelihara Jumlah SDM Pengelola SIAK yang mengikuti Bimtek/Diklat/ Sosialisasi/ Koordinasi				2 Paket 12 Laporan 26 Unit 8 Jenis 8 Orang	372,289,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	2 Paket 12 Laporan 26 Unit 8 Jenis 8 Orang	137,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				3 Laporan	257,795,135	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi	3 Laporan	220,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	%		%	92 %	76,108,700						92 %	120,000,000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dipublikasikan	%		%	92 %	76,108,700						92 %	120,000,000	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				80 Dokumen	34,735,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Stakeholder pemanfaat data kependudukan	80 Dokumen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				60 Dokumen	41,373,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Stakeholder pemanfaat data kependuduka n	60 Dokumen	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						12,409,224,608							6,337,516,947	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,856,470,096							712,726,558	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19,948,600							23,241,500	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	19,948,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		4 Dokumen	23,241,500	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,979,150,796							0	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	7,962,837,296	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		65 Orang/bulan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Dokumen	16,313,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		5 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						95,050,000							96,074,000	
2 15 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia				0 Dokumen 1 paket	95,050,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		0 Dokumen 1 paket	96,074,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125,302,300							0	
2 15 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	36,377,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		3 Unit	0	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	88,924,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	1 Paket	0	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						176,962,300						255,277,638		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Item	1,991,400	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	6 Item	2,332,880	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	37,932,700	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	3 Paket	93,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Item	20,399,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	50 Item	23,190,530	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Item	13,846,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	12 Item	15,254,228	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,992,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	12 Laporan	5,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum tamu dan lembur yang tersedia Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang diikuti				300 porsi 12 bulan	97,800,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	300 porsi 12 bulan	115,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39,496,100						0		
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	39,496,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	5 Unit	0	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	15	01	2.08					77,020,000						83,219,420					
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko dan cek teraan yang dibeli				3 jenis	1,640,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		3 jenis	1,804,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Air dan Listrik yang terbayar				13 rekening	75,380,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		13 rekening	81,415,420	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343,540,000							254,914,000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		1 Unit	47,201,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	180,850,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		24 Unit	207,713,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer, printer, HT dan peralatan lainnya				1 Ls	14,890,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		1 Ls	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						108,610,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	% % % %	% % % %	86 100 % 60 % 55 % 70 % C	3,552,754,512						86 100 % 60 % 55 % 70 % C	5,624,790,389		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	%	%	65 %	382,645,800						65 %	3,893,735,450		
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			3 jenis	188,526,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 jenis	1,498,285,250	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			1485 Jenis	194,119,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1485 Jenis	2,395,450,200	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					2,805,162,410							1,571,815,376		
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan			200 peserta	117,212,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		200 peserta	137,489,660	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah tenaga Non PNS dan PNS yang dibayarkan Upah dan Lembur			0 Laporan 50 PNS & Non PNS	2,664,190,510	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		0 Laporan 50 PNS & Non PNS	1,377,939,716	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Rumusan	23,759,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	3 Rumusan	56,386,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						21,078,100						16,282,063		
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				75 Rekomendasi	21,078,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	75 Rekomendasi	16,282,063	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						204,998,900						0		
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	204,998,900	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0 Laporan	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						54,222,700						72,957,500		
2 15 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sopir/juru mudi yang diberi sosialisasi				0 Dokumen 30 Peserta	54,222,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0 Dokumen 30 Peserta	72,957,500	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						84,646,602						70,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	84,646,602		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Laporan	70,000,000	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							192,510,800						222,162,463	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							160,730,800						196,026,463	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							37,250,800						51,981,463	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Item	1,338,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	8 Item	1,476,200	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Item	7,859,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	28 Item	8,646,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3,053,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	3 Paket	3,359,263	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang diikuti dan makan minum lembur yang tersedia				0 Laporan 1 Ls	25,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0 Laporan 1 Ls	38,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,200,000						6,644,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan				0 Laporan 1 Rekening	4,200,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0 Laporan 1 Rekening	6,644,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119,280,000						90,409,000		
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BBM, Jasa Kebersihan dan lembur ramchek				1 Ls	119,280,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	1 Ls	90,409,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						31,780,000						26,136,000		
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						31,780,000						26,136,000		
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Gedung	31,780,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	1 Gedung	26,136,000	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3,674,144,784							10,084,514,446	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,674,144,784							10,084,514,446	
2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						615,000,000						693,379,500		
2 15 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia				0 Dokumen 1 Paket	615,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0 Dokumen 1 Paket	693,379,500	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,784,200						82,846,550		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	5,222,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	6 Jenis	5,751,900	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Jenis	13,612,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	47 Jenis	15,033,150	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis	10,949,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	3 Jenis	12,061,500	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang diikuti dan makan minum lembur yang tersedia				0 Laporan 12 Bulan	38,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		0 Laporan 12 Bulan	50,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199,100,000							220,000,000		
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, Listrik dan Internet yang dibayarkan				5 Rekening	199,100,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		5 Rekening	220,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,792,260,584							9,088,288,396		
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BBM, Rehab gedung parkir roda 4, jasa kebersihan, Upah dan lembur PNS dan Non PNS, dan pengadaan peralatan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Paket 0 Unit	2,792,260,584	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		4 Paket 0 Unit	9,088,288,396	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8,307,694,131							14,984,000,000		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	nilai		nilai	BB nilai	3,649,969,567							BB nilai	4,059,000,000	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen peloparan perencanaan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Jumlah laporan keuangan tepat waktu	dokumen dokumen bulan		dokumen dokumen bulan	3 dokumen 2 dokumen 12 bulan	36,739,900							3 dokumen 2 dokumen 12 bulan	40,000,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	36,739,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	0 Dokumen 2 Dokumen	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan ADM Kepegawaian sesuai SOP	buah		buah	4 buah	3,223,424,611							4 buah	3,400,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3,223,424,611		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Orang/bulan	3,400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25,478,400							30,000,000	
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25,478,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		25 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarpras yang tersedia	buah		buah	4 buah	146,522,000						4 buah	272,000,000	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	657,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	1 Paket	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6,944,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	0 Paket	12,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	2 Paket	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	133,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	25 Laporan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan sarpras sesuai SOP	buah		buah	4 buah	19,200,000						4 buah	32,000,000	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	200 Laporan	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	2 Laporan	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aseet yang dipelihara	buah		buah	20 buah	198,604,656						20 buah	285,000,000	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	1 Unit	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	103,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	6 Unit	135,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	7,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	0 Unit 20 Unit	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	48,444,656		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo	4 Unit	90,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	persen		persen	85 persen	1,755,145,048						85 persen	4,775,000,000	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga komunikasi sosial yang dilakukan pendampingan Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti	informasi konten		informasi konten	1500 informasi 400 konten	1,755,145,048						1500 informasi 400 konten	4,775,000,000	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	559,999,820	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	711,582,908	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	2 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	194,557,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen 1 Dokumen	39,904,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	0 Dokumen 1 Dokumen	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	197,101,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	2 Layanan	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	51,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat/Publik	2 Dokumen	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Layanan Indeks Domain Layanan e-government Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar	skor skor		skor skor	03.2 skor 3,2 skor	2,902,579,516					03.2 skor 3,2 skor	6,150,000,000		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan Jumlah infrastruktur jaringan yang dipelihara Jumlah Infrastruktur TIK yang diadakan Jumlah regulasi terkait aplikasi yang ditetapkan Jumlah SKPD dan Area Publik yang terhubung dengan jaringan FO kapasitas bandwith yang ditingkatkan	aplikasi titik unit buah koneksi Mbps		aplikasi titik unit buah koneksi Mbps	4 aplikasi 120 titik 3 unit 1 buah 50 koneksi 500 Mbps	2,149,999,808					4 aplikasi 120 titik 3 unit 1 buah 50 koneksi 500 Mbps	5,000,000,000		
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				120 Unit	2,149,999,808		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	120 Unit	5,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monev SPBE yang dilaksanakan Jumlah regulasi tentang aplikasi yang ditetapkan	kali buah		kali buah	1 kali 4 buah	752,579,708						1 kali 4 buah	1,150,000,000	
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	146,665,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	79,914,904		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	2 Unit	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	445,999,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	3 Unit	475,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						119,999,800							230,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	persen		persen	70 persen	119,999,800							70 persen	230,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Buku Bukittinggi Dalam Angka Jumlah Data Sektoral ekonomi dan infrastruktur tersedia	buku buah		buku buah	1 buku 5 buah	119,999,800							1 buku 5 buah	230,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	119,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						132,198,900							150,000,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Aplikasi dan Infrastruktur yang lulus uji BSSN	persen		persen	48 persen	132,198,900							48 persen	150,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi Pemda yang diamankan Jumlah sertifikat digital yang ditindak lanjuti	informasi SKPD		informasi SKPD	450 informasi 4 SKPD	132,198,900							450 informasi 4 SKPD	150,000,000	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	43,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	1 Laporan	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				4 Perangkat Daerah	88,568,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	4 Perangkat Daerah	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						20,159,520,224							13,620,905,788		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB	9,659,502,124					BB	9,290,498,810		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	73,518,608					100 %	103,100,470		
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	73,518,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Dokumen	80,870,470	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%		%	100 %	8,330,168,564					100 %	8,082,982,470		
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	8,256,649,956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	53 Orang/bulan	8,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	73,518,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Laporan	82,982,470	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	161,628,600					100 %	190,000,000		
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				53 Paket	161,628,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	53 Paket	190,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	% %		% %	100 % 100 %	264,738,200					100 % 100 %	313,915,870		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	8,312,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	7 Paket	10,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	6,454,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	15 Paket	8,500,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	23,803,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	32 Paket	30,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	39,955,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	11 Paket	45,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,901,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	7,500,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	181,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	265,289,412						100 %	185,500,000	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	98,265,412		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	3,500,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	157,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	170,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9,524,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	12,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	564,158,740						100 %	415,000,000	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	71,351,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	16 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	133,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Unit	15,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	358,906,936		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%		%	18 %	29,999,900						18 %	33,000,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Pelaksanaan Aktivasnya sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	%		%	18 %	29,999,900						18 %	33,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	29,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	50 Unit Usaha	33,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi	%		%	2 %	32,000,000						2 %	720,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						32,000,000							400,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	32,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	0 Orang	400,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi	%		%	13 %	960,073,300						13 %	260,842,450	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu Persentase koperasi yang taat SOP	% %		% %	48 % 63 %	960,073,300						48 % 63 %	260,842,450	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				125 orang	960,073,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	125 orang	260,842,450	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro	%		%	10 %	1,291,436,700						10 %	873,568,797	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah kontrak yang terjalin pada event pameran Jumlah pelaku usaha mikro yang menjalin kemitraan	kontrak umkm		kontrak umkm	4 kontrak 10 umkm	1,291,436,700						4 kontrak 10 umkm	873,568,797	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				40 Unit Usaha	799,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	40 Unit Usaha	320,329,297	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				70 Unit Usaha	491,436,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	70 Unit Usaha	553,239,500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%		%	1 %	8,186,508,200						1 %	2,442,995,731	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pelatihan	%		%	3 %	8,186,508,200						3 %	2,442,995,731	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				2593 Unit Usaha	8,186,508,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	2593 Unit Usaha	2,442,995,731	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						29,163,455,300						32,327,557,542		
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase tertib niaga	%		%	49 %	24,298,100						49 %	37,507,800	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin gudang	pelaku usaha		pelaku usaha	10 pelaku usaha	12,199,900						10 pelaku usaha	18,665,900	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	12,199,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	10 Dokumen	18,665,900	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha waralaba dalam negeri	pelaku usaha		pelaku usaha	10 pelaku usaha	12,098,200						10 pelaku usaha	18,841,900	
3 30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	12,098,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Dokumen	18,841,900	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar	%		%	20 %	28,183,540,592						20 %	30,445,289,672	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan kriteria pasar ber SNI Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan pasar ber SNI	% %		% %	20 % 80 %	23,131,970,652						20 % 80 %	28,300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	14,463,669,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4 Unit	13,400,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	8,668,301,452		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4 Unit	14,900,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang telah mentaati aturan	%		%	85 %	5,051,569,940						85 %	2,145,289,672	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				8670 Dokumen	2,834,662,032		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	8670 Dokumen	248,940,568	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	2,216,907,908		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Dokumen	1,896,349,104	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting	%		%	80 %	201,488,008						80 %	210,218,500	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kota	%		%	80 %	41,854,800						80 %	47,820,300	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				8 Laporan	41,854,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	8 Laporan	47,820,300	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang pokok dan barang penting yang terkendali di tingkat kota	%		%	80 %	117,123,408						80 %	115,398,200	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				240 Laporan	73,123,508		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	240 Laporan	15,552,900	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	43,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4 Laporan	39,845,300	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	%		%	100 %	42,509,800						100 %	47,000,000	
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	42,509,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Laporan	47,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk ekspor	%		%	0 %	392,636,200						0 %	486,899,930	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Pameran Produk Ekspor Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Pameran Produk Ekspor	0 kali		0 kali	0 0 2 kali	392,636,200						0 0 2 kali	486,899,930	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	334,336,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	6 Pelaku Usaha	367,770,040	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	58,299,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	2 Pelaku Usaha	64,129,890	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri	%		%	5 %	361,492,400						5 %	1,147,641,640	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah mitra usaha yg terjalin pada iven perdagangan	orang		orang	5 orang	361,492,400						5 orang	1,147,641,640	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				47 UMKM	361,492,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	47 UMKM	397,641,640	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							470,512,712						607,500,000	
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB	301,979,412						BB	418,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	% %		% %	100 % 100 %	104,853,200					100 % 100 %	118,500,000		
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,804,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Paket	3,500,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	35,195,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Paket	40,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	4,239,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	32 Paket	6,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	7,893,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	11 Paket	9,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	54,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	12 Laporan	60,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	24,930,000					100 %	30,300,000		
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	200 Laporan	300,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	3 Laporan	30,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	172,196,212					100 %	270,000,000		
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	91,094,204		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	4 Unit	100,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	81,102,008		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1 Unit	170,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan	%		%	63 %	168,533,300						63 %	188,700,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang bertanda sah Persentase BDKT yg beredar sesuai standar	% %		% %	55 % 70 %	168,533,300						55 % 70 %	188,700,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1100 Unit	141,678,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	1100 Unit	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	26,854,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	0	100 Orang	38,700,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1,560,470,800							1,015,515,020	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	%		%	2 %	1,517,700,900						2 %	825,515,020	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan dan keterampilan	persen		persen	55 persen	1,517,700,900						55 persen	825,515,020	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				320 Orang	1,517,700,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	320 Orang	825,515,020	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	orang		orang	150 orang	21,720,800						150 orang	95,000,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	persen		persen	100 persen	21,720,800						100 persen	95,000,000	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				60 Orang	21,720,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	masyarakat	60 Orang	95,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	%		%	0 %	21,049,100						0 %	95,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani dengan baik Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	persen persen		persen persen	100 persen 60 persen	21,049,100						100 persen 60 persen	95,000,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30 Perkara	10,545,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Perusahaan dan Tenaga kerja	30 Perkara	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	10,503,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Perusahaan dan Tenaga kerja	30 Perkara	45,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						10,860,635,375						15,923,120,812		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	BB BB	9,194,814,592						BB BB	13,692,530,298	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi Program dan kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	21,758,800						100 Persen	23,747,850	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21,758,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	2 Dokumen	23,747,850	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	7,095,981,016						100 persen	8,710,877,196	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	7,095,981,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN DPMPTSPPTK	57 Orang/bulan	8,710,877,196	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	295,336,236						100 Persen	392,631,120	
2 18 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah jasa pengamanan kantor				12 bulan 0 Dokumen 9 orang	295,336,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	12 bulan 0 Dokumen 9 orang	392,631,120	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	310,457,700						100 Persen	934,883,728	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan Listrik yang dibeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				45 Jenis 0 Paket	6,122,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	45 Jenis 0 Paket	6,762,735	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Jenis 0 Paket	55,710,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		SKPD	1 Jenis 0 Paket	551,250,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 jenis 0 Paket	23,439,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		SKPD	46 jenis 0 Paket	25,846,018	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				7 Jenis 30050 Jenis 90 lbr 0 Paket	20,225,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		SKPD	7 Jenis 30050 Jenis 90 lbr 0 Paket	22,303,575	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum tamu difasilitasi Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur jumlah makan minum tamu difasilitasi				0 Laporan 200 Porsi 12 Bulan	19,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		SKPD	0 Laporan 200 Porsi 12 Bulan	9,503,550	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri				0 Laporan 90 %	185,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan		SKPD	0 Laporan 90 %	319,217,850	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	90 persen	832,240,000						90 persen	1,911,360,150	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10000				12 Bulan 4 Buah 0 Laporan 200 Buah	3,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	12 Bulan 4 Buah 0 Laporan 200 Buah	4,035,150	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rek air internet listrik telepon yang dibayar				12 Bulan 1 Laporan 4 rekening	829,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	12 Bulan 1 Laporan 4 rekening	1,907,325,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	639,040,840						100 persen	878,105,655	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	1 Unit	45,434,025	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara				14 Unit 6 unit	173,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	14 Unit 6 unit	175,221,869	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	5,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	12 Bulan 0 Unit	6,240,150	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah tenaga kontrak cleaning service				12 Jenis 0 Unit 1 Unit 10 orang	420,060,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD DPMPTSPPTK	12 Jenis 0 Unit 1 Unit 10 orang	651,209,611	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	%		%	100 %	187,437,215						100 %	0	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal	persen		persen	100 persen	187,437,215						100 persen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	187,437,215	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	masyarakat/ investor	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi hijau	Milyar Rupiah		Milyar Rupiah	60 Milyar Rupiah	145,534,000						60 Milyar Rupiah	310,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi Persentase penambahan jumlah investor	persen persen		persen persen	55 persen 8 persen	145,534,000						55 persen 8 persen	310,000,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti				1 Dokumen 0 kerjasama 2 event	145,534,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pelaku Usaha	1 Dokumen 0 kerjasama 2 event	255,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase unsur pelayanan berkategori baik	%		%	80 %	1,194,992,368						80 %	1,628,590,514	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan online tepat waktu Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizinan Persentase pengaduan perizinan selesai tepat waktu	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	1,194,992,368						100 persen 100 persen 100 persen	1,628,590,514	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan secara online Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengembangan yang dilakukan Jumlah Tenaga kontrak				3 Aplikasi 100 % 0 Pelaku Usaha 1 Laporan 20 orang	940,849,768		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	3 Aplikasi 100 % 0 Pelaku Usaha 1 Laporan 20 orang	1,398,590,514	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan Jumlah rancangan produk hukum				3 dokumen 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Dokumen	148,193,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	3 dokumen 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Dokumen	125,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen IKM Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan persentase pengaduan yang tertangani				2 dok 50 Orang 100 %	105,949,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat	2 dok 50 Orang 100 %	105,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	%		%	55 %	117,000,000						55 %	120,000,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian LPKM yang dilaksanakan	persen		persen	55 persen	117,000,000						55 persen	120,000,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha.	117,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	pelaku usaha	0 Kegiatan Usaha.		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi perizinan secara online	%		%	100 %	20,857,200						100 %	172,000,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan dan informasi perizinan tepat waktu	persen		persen	100 persen	20,857,200						100 persen	172,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Arsip yang dikelola secara digital Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah laporan data perizinan				1 Arsip 300 berkas 48 Laporan	20,857,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	masyarakat	1 Arsip 300 berkas 48 Laporan	172,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						908,526,392							7,922,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	% %		% %	60 % 2 %	820,199,400						60 % 2 %	7,722,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen	IKM IKM IKM		IKM IKM IKM	150 IKM 150 IKM 235 IKM	820,199,400						150 IKM 150 IKM 235 IKM	7,722,000,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah IKM yang difasilitasi label halal Jumlah IKM yang difasilitasi packing Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi Jumlah peserta pelatihan diversifikasi makanan olahan Jumlah peserta pelatihan manajemen IKM				0 Dokumen 20 IKM 15 IKM 0 Orang 10 orang 10 ikm	305,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	IKM	0 Dokumen 20 IKM 15 IKM 0 Orang 10 orang 10 ikm	2,582,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	515,199,400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	IKM	0 Dokumen	5,140,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	%	%		55 %	88,326,992							55 %	200,000,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data dan informasi industri	%	%		80 %	88,326,992							80 %	200,000,000	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Indeks Kemudahan Berusaha Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Persentase Realisasi Investasi Hijau Pertumbuhan PMTB				65 % 0 Dokumen 5 % 4 %	88,326,992			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	IKM	65 % 0 Dokumen 5 % 4 %	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						453,146,720							352,500,000		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	% %	% %		60 % 2 %	453,146,720							60 % 2 %	352,500,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen	IKM IKM IKM	IKM IKM IKM		150 IKM 150 IKM 235 IKM	453,146,720							150 IKM 150 IKM 235 IKM	352,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Operasional UPTD Yang Dikelola Jumlah organisasi Yang Difasilitasi Jumlah Pemeliharaan Gedung UPTD Jumlah Tenaga kontrak UPTD kerajinan industri				0 Dokumen 1 UPTD 1 Organisasi 1 Gedung 5 orang	453,146,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	IKM	0 Dokumen 1 UPTD 1 Organisasi 1 Gedung 5 orang	352,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6,970,530,400							67,518,317,655	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A		A	A A	5,645,002,808						A A	65,860,364,069	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	36,739,800						100 %	20,230,000	
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	36,739,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	20,230,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,338,453,172						12 Bulan	4,535,594,453	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4,338,453,172		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	30 Orang/bulan	4,535,594,453	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai EKPPD	%		%	100 %	207,690,000						100 %	207,690,000	
2 23 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	207,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	207,690,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Harian ASN	Stel		Stel	29 Stel	110,849,300						29 Stel	110,850,000	
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				29 Paket	24,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29 Paket	24,850,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				70 Orang	85,999,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70 Orang	86,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	23	01	2.06																	
2	23	01	2.06	01																
2	23	01	2.06	04																
2	23	01	2.06	05																
2	23	01	2.06	08																
2	23	01	2.06	09																
2	23	01	2.08																	
2	23	01	2.08	01																
2	23	01	2.08	02																
2	23	01	2.08	03																
2	23	01	2.08	04																
2	23	01	2.09																	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	40,910,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	231,440,936		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Unit	231,440,936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	262,340,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	262,350,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat "Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan "	BAIK BAIK BAIK		BAIK BAIK BAIK	A BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	1,275,676,592						A BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	1,562,953,586	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar	%		%	40 %	960,677,500						40 %	997,953,586	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				3 Layanan	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	3 Layanan	140,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	112,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	5 Perpustakaan	113,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar 100 Eksemplar	62,736,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	0 Eksemplar 100 Eksemplar	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	61,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	10 Perpustakaan	61,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	5 Perpustakaan	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	58,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	30 Orang	58,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				3 Layanan	144,992,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	3 Layanan	145,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				100 Eksemplar	284,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	100 Eksemplar	285,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	14,998,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	100 Eksemplar	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	70,953,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	1 Dokumen	70,953,586	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat"	BAIK		BAIK	80 BAIK	314,999,092						80 BAIK	565,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus 3 Lokus	54,999,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	0 Lokus 3 Lokus	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang 6 Orang	149,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	0 Orang 6 Orang	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				20 Perpustakaan	109,999,992		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	20 Perpustakaan	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	"Meningkatnya koleksi perpustakaan "	%		%	10 %	49,851,000						10 %	95,000,000	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	"Tercapainya Penyelamatan Bahan Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara " Tercapainya Penyelamatan Bahan Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara	File File		File File	3 File 3 File	25,980,000						3 File 3 File	26,000,000	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				25 Orang	5,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	25 Orang	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				25 Eksemplar	19,981,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka	25 Eksemplar	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Tercapainya Penyelamatan Bahan Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara "	File		File	3 File	23,871,000						3 File	69,000,000		
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				0 Eksemplar 50 Eksemplar	23,871,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	0	0 Eksemplar 50 Eksemplar	24,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						915,554,950						1,132,156,600			
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "	%		%	53,57 %	745,556,550							53,57 %	745,556,600	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Sumber Daya Kearsipan Sesuai Standar " "Meningkatnya Sumber Daya Kearsipan Sesuai Standar " "Meningkatnya Sumber Daya Kearsipan Sesuai Standar "	Ormas Boks SKPD		Ormas Boks SKPD	3 Ormas 10 Boks 28 SKPD	379,921,550							3 Ormas 10 Boks 28 SKPD	379,921,600	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	82,421,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan	1 Berkas	82,421,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas 1 Berkas	269,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan	0 Berkas 1 Berkas	270,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	27,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan	1 Laporan	27,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	Daftar		Daftar	1 Daftar	173,135,000							1 Daftar	173,135,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI								1 Arsip 1 Arsip	173,135,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Pelayanan Kearsipan "	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	192,500,000				1 Dokumen	192,500,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	17,500,000		2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD/Ormas/ Orpol/Perora ngan	10 Pengguna	17,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	175,000,000		2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD/Ormas/ Orpol/Perora ngan	1 Laporan	175,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	"Meningkatnya Perlindungan Kearsipan "	%		%	0,8 %	124,998,400				0,8 %	273,600,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	"Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	SKPD		SKPD	3 SKPD	74,998,400				3 SKPD	223,600,000	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	74,998,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SKPD	1 Arsip	223,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	SKPD		SKPD	3 SKPD	50,000,000				3 SKPD	50,000,000	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				1 Arsip	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD	1 Arsip	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	"Persentase Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip "	%		%	40 %	45,000,000						40 %	113,000,000	
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	"Persentase Meningkatnya Regulasi Kearsipan "	%		%	20 %	45,000,000						20 %	113,000,000	
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				2 SOP	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD	2 SOP	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						21,795,708,928							21,241,000,000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi	%		%	25 %	2,495,960,350						25 %	2,500,000,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	%		%	25 %	1,677,380,750						25 %	1,500,000,000	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	350,079,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	50 Orang	420,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				10 Orang	78,129,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	10 Orang	80,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang dibina Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah peserta pelatihan paskibraka Jumlah Upacara yang dilaksanakan				40 orang 0 Orang 100 orang 3 upacara	746,501,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	40 orang 0 Orang 100 orang 3 upacara	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				90 Orang	502,670,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	90 Orang	800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	%		%	50 %	818,579,600						50 %	1,000,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan Organisasi kepemudaan (KNPI)				0 Dokumen 40 orang	818,579,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	0 Dokumen 40 orang	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Sportourism dan Olahraga Prestasi	Event Olahraga		Event Olahraga	3 Event Olahraga	18,798,952,078						3 Event Olahraga	18,141,000,000	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sportourism dan olahraga Prestasi	event		event	3 event	9,901,127,450						3 event	10,600,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan				0 Dokumen 25 tim	2,619,049,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	masyarakat	0 Dokumen 25 tim	3,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				100 orang 0 Dokumen	7,282,077,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	masyarakat	100 orang 0 Dokumen	7,600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Peningkatan Sportourism	%		%	85 %	7,324,608,200						85 %	3,600,000,000	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan jumlah cabor yang difasilitasi/bina				0 Orang 23 Cabor	7,324,608,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	0 Orang 23 Cabor	3,600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Sportourism dan olahraga Prestasi	event		event	3 event	1,573,216,428						3 event	3,941,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional Olahraga yang difasilitasi				0 Dokumen 40 kali	826,456,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	masyarakat	0 Dokumen 40 kali	941,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana olahraga yang diberikan kepada masyarakat Jumlah sarana olahraga yang di pelihara dan direvitalisasi				5 paket 5 sarana	746,760,028		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	masyarakat	5 paket 5 sarana	1,400,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi	%		%	85 %	500,796,500						85 %	600,000,000		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Kegiatan Kepramukaan Presentase Organisasi Kepemudaan	% %		% %	85 % 85 %	500,796,500						85 % 85 %	600,000,000		
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi				85 Persen	500,796,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Siswa	85 Persen	600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						42,345,209,332							71,338,502,224		
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	8,416,559,454							0 BB	12,933,502,224	
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	22,454,900							0 BB	40,250,000	
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja perubahan yang tersusun tepat waktu				3 dokumen	22,454,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	3 dokumen	40,250,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	6,562,145,634							0 BB	9,447,617,376	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	6,562,145,634		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	66 Orang/bulan	9,447,617,376	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3 26 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	125,565,900							0 BB	135,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jasa pengaman kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 bulan 0 Dokumen	125,565,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	12 bulan 0 Dokumen	135,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						49,364,400							50,000,000	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	49,364,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga		130 Paket	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	238,099,600						0 BB	454,425,000	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan listrik terbeli				5 Item	2,088,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	5 Item	2,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis ATK terbeli				25 item	25,669,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	25 item	27,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				5 item 10500 lembar	7,891,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	5 item 10500 lembar	21,102,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti				95 Persen 75 Persen	202,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	95 Persen 75 Persen	231,322,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	817,660,000						0 BB	993,312,500	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10000 terbeli				370 buah	3,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	370 buah	4,312,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)				36 rekening	813,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	36 rekening	989,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB		BB	0 BB	601,269,020						0 BB	612,897,348	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yang terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara				10 unit 1 unit 6 unit	309,713,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	10 unit 1 unit 6 unit	361,500,899	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	24 Unit	29,026,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service yang dibayarkan				2 orang	186,845,412		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	2 orang	107,927,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	1 Unit	114,442,949	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	%		%	75 %	29,934,681,842						75 %	36,845,000,000	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	%		%	75 %	2,300,000,000						75 %	2,350,000,000	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	2 Dokumen	750,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	1 Lokasi	1,600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	%		%	68 %	18,057,032,596						68 %	23,385,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Pegawai kontrak yang dibayarkan gajinya Lembur jam kerja, lembur hari libur dan lembur khusus Outsourcing Keamanan Outsourcing Kebersihan				0 Kawasan 20 orang 1 Ls 1 paket 1 paket	3,285,567,796		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	0 Kawasan 20 orang 1 Ls 1 paket 1 paket	3,825,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota "Lanjutan kandang Zona Karnivora Pengamanan tebing TMSBK"				0 Unit 1 Zona	11,517,475,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	0 Unit 1 Zona	15,600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis				80 orang	261,724,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	80 orang	360,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Makan Hewan dan pemeliharaan satwa penambahan koleksi satwa				130 spesies 6 Jenis	2,992,264,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	130 spesies 6 Jenis	3,600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	%		%	68 %	9,577,649,246						68 %	11,110,000,000	
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	2 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lobang Jepang Menyala Pengembangan Wisata Kotobarangai				0 Lokasi 1 Objek 1 DTW	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	0 Lokasi 1 Objek 1 DTW	5,060,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang terkelola Kebersihan dan keamana jumlah Pegawai Kontrak yang dibayarkan gajinya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Destinasi 27 orang 0 Unit	3,552,649,246		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	3 Destinasi 27 orang 0 Unit	4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM tentang Geopark Ngarai Sianok Maninjau				50 orang	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN dan Masyarakat	50 orang	950,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Orang		Orang	538777 Orang	1,911,948,870						538777 Orang	5,110,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Pasar		Pasar	4 Pasar	1,911,948,870						4 Pasar	5,110,000,000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial) Promosi Pariwisata yang dilaksanakan dan Promosi Bersama				0 Dokumen 3 media	744,350,820		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	0 Dokumen 3 media	2,200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 event 0 Laporan 5 Laporan	1,167,598,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	5 event 0 Laporan 5 Laporan	2,650,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pesar Ekraf	Pasar		Pasar	5 Pasar	2,082,019,166						5 Pasar	4,450,000,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pasar Ekraf	Pasar		Pasar	5 Pasar	2,082,019,166						5 Pasar	4,190,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang	246,294,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	50 Orang	260,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				40 Orang	182,440,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	40 Orang	260,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah penampilan kesenian yang difasilitasi dan di tampilkan				40 kali 5 Laporan 50 kali	1,460,204,566		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	40 kali 5 Laporan 50 kali	2,950,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang 500 Orang	193,079,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat	0 Orang 500 Orang	720,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						10,635,352,565							11,999,000,000		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	nilai		nilai	A nilai	10,161,935,265							A nilai	10,270,000,000	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	dokumen		dokumen	2 dokumen	22,230,000							2 dokumen	23,000,000	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22,230,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	23,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	%		%	100 %	9,009,956,911						100 %	9,000,000,000	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	9,009,956,911	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	70 Orang/bulan	9,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan Kinerja SKPD	%		%	100 %	291,748,200						100 %	316,000,000	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8,325,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	2 Paket	9,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	99,093,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	4 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,064,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	30,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16,595,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	17,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140,670,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	160,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan SKPD	%		%	100 %	59,730,000						100 %	61,000,000	
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,590,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	54,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja dan Program Kegiatan SKPD	%		%	100 %	778,270,154						100 %	820,000,000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	326,067,554		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	36 Unit	350,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	49,619,400	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	10 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	402,583,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	2 Unit	420,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita Konsumsi Energi per Kapita Konsumsi protein perjkapita Konsumsi Protein per Kapita Margin tataniaga pangan utama Margin Tataniaga Pangan Utama	kkal/kap/hr kkal/kap/hr gr/kap/hari gr/kap/hr % %		kkal/kap/hr kkal/kap/hr gr/kap/hari gr/kap/hr % %	2112,9 kkal/kap/hr ≥ 2100 kkal/kap/hr 61,9 gr/kap/hari ≥57 gr/kap/hr 7,69 % ≤10 %	428,417,300						2112,9 kkal/kap/hr ≥ 2100 kkal/kap/hr 61,9 gr/kap/hari ≥57 gr/kap/hr 7,69 % ≤10 %	944,000,000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase peningkatan ketersediaan pangan menurut produksi (ton) 2. Persentase peningkatan ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) 3. Persentase peningkatan ketersediaan protein dan lemak (gram/kapita/hari) 4. Persentase pemantauan harga	% %		% %	80 % 100 %	16,867,400						80 % 100 %	680,000,000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen kajian pasokan bahan pangan Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Harga Pangan				12 Laporan 1 Dokumen 1 dokumen 12 bulan	16,867,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	12 Laporan 1 Dokumen 1 dokumen 12 bulan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						25,000,000						100,000,000		
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	25,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat Kota Bukittinggi	10 Ton	100,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian skor polapangan harapan	%		%	100 %	386,549,900						100 %	164,000,000	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah kelurahan yang dibantu Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah peserta lomba B2SA Jumlah peserta lomba pengolahan pangan lokal Jumlah peserta sosialisasi B2SA				5000 bibit 24 kelurahan 9 Laporan 24 kelurahan 24 kelurahan 720 org	369,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	5000 bibit 24 kelurahan 9 Laporan 24 kelurahan 24 kelurahan 720 org	139,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	17,549,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan energi dan protein perkapita Ketersediaan pangan utama Ketersediaan pangan utama	Ton; Kkal/kap/hari; ton ton		Ton; Kkal/kap/hari; ton ton	"18.974 ≥ 2400, ≥ 63 Ton; 10 ton 20000 ton	25,000,000						"18.974 ≥ 2400, ≥ 63 Ton; Kkal/kap/hari; 10 ton 20000 ton	230,000,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase aspek ketersediaan pangan; Persentase aspek akses pangan; Persentase aspek pemanfaatan pangan	%		%	80 %	25,000,000						80 %	30,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta FSVA Jumlah peta SKPG Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Bukittinggi	1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	30,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi diatas ambang batas	%		%	24 %	20,000,000						24 %	85,000,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi PSHT yang aman dikonsumsi Persentase komoditi yang aman dikonsumsi	% %		% %	90 % 90 %	20,000,000						90 % 90 %	85,000,000	
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi yang diuji Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				11 jenis 720 org 1 Dokumen	20,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota bukittinggi	11 jenis 720 org 1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						560,000,408						795,000,000		
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	ribuan rupiah		ribuan rupiah	9471120 ribuan rupiah	435,000,400						9471120 ribuan rupiah	570,000,000	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Nilai produksi perikanan budidaya	ribuan rupiah		ribuan rupiah	9471120 ribuan rupiah	435,000,400						9471120 ribuan rupiah	520,000,000	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit 1 Unit	50,000,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	1 Unit 1 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				440 ton 1 Unit	385,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	440 ton 1 Unit	220,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengembangan produk perikanan Persentase pengembangan produk perikanan	% %		% %	5 % 5% %	125,000,008						5 % 5% %	225,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengembangan produk perikanan	%		%	5 %	125,000,008						5 %	175,000,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Angka konsumsi ikan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				44 Kg/kap/th 1 Unit Usaha	125,000,008		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	44 Kg/kap/th 1 Unit Usaha	175,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11,057,248,716						12,008,000,000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian (padi) Nilai produksi pertanian (padi) Nilai produksi pertanian (tanaman hias) Nilai produksi pertanian (tanaman hias) persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian Persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian Persentase pengembangan produk pertanian Persentase pengembangan produk pertanian	Ton/Ha ton/ha % % % % % %		Ton/Ha ton/ha % % % % %	6.7 Ton/Ha 6,8 ton/ha 3 % 3,5 % 3 % 2 % 1 % 2 %	2,064,089,304						6.7 Ton/Ha 6,8 ton/ha 3 % 3,5 % 3 % 2 % 1 % 2 %	3,693,000,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok penerima bantuan alsin Jumlah kelompok pengelola pangan lokal yang dibina	kelompok kelompok		kelompok kelompok	11 kelompok 16 kelompok	660,910,300						11 kelompok 16 kelompok	185,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bantuan alsintan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah rekomendasi pupuk bersubsidi yang disalurkan				10 unit 1 laporan 0 Laporan 200 ton	660,910,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	10 unit 1 laporan 0 Laporan 200 ton	60,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai produksi pertanian	ton/ha		ton/ha	6.7 ton/ha	1,360,364,704						6.7 ton/ha	3,350,000,000	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi unggul yang disalurkan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Luas sawah padi organik				0.4 Ha 0 VUB 1 VUB 0.05 Ha	48,231,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan 1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	0.4 Ha 0 VUB 1 VUB 0.05 Ha	110,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit ternak yang disalurkan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Terlayannya perkawinan kuda bibit Tersedianya SDG kuda bibit baru				4 paket 1 Dokumen 35 kali 0 ekor	496,794,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	4 paket 1 Dokumen 35 kali 0 ekor	2,800,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pameran hortikultura Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura Ubinan				2 kelompok 2 kali 6 paket 21 kali	815,338,204		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	2 kelompok 2 kali 6 paket 21 kali	440,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	27	02	2.03															
3	27	02	2.03	01														
3	27	02	2.05															
3	27	02	2.05	06														
3	27	03																
3	27	03	2.01															
3	27	03	2.01	03														
3	27	03	2.02															
3	27	03	2.02	03														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	7,000,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	1 Unit	5,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus Penyakit hewan	persen %		persen %	8 persen 4 %	59,999,904						8 persen 4 %	245,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%		%	4 %	59,999,904						4 %	165,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah peserta sosialisasi penyalit hewan Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Zero kasus penyakit menular hewan dan zoonosis				25 org 1 Laporan 0 kasus	59,999,904		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	25 org 1 Laporan 0 kasus	165,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%		%	15 %	540,173,908						15 %	590,000,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	%		%	25 %	540,173,908						25 %	590,000,000	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Diikutinya Pekan Nasional Tani Tingkat Nasional Jumlah kategori penghargaan yang diberikan kepada penyuluh dan kelembagaan Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah poktan yang ditingkatkan kelasnya				1 kali 10 kategori 10 Unit 10 poktan	315,461,504		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	KTNA, Petani dan Pendamping	1 kali 10 kategori 10 Unit 10 poktan	240,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi kebutuhan BPP Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan demplot cabe Pelaksanaan kursus teknologi budidaya bawang merah Pelaksanaan training penyuluhan Penyusunan dokumen programa kecamatan , kota				12 bulan 1 Unit 1 demplot 1 demplot 34 kali 2 dokumen	224,712,404		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	KTNA, Petani dan Pendamping	12 bulan 1 Unit 1 demplot 1 demplot 34 kali 2 dokumen	350,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	A Nilai	81,870,000						A Nilai	85,000,000	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan Kegiatan SKPD	%		%	100 %	56,920,000						100 %	60,000,000	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	56,920,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan PAngan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	24,950,000						100 %	25,000,000	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24,950,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Unit	25,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus hewan	% %		% %	8 % 4 %	249,992,408						8 % 4 %	320,000,000	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk peternakan yang dioalh	%		%	8 %	249,992,408						8 %	320,000,000	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				6201 ekor 0 Laporan	249,992,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	6201 ekor 0 Laporan	320,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
							279,998,708							405,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	Nilai		Nilai	A Nilai	29,998,700						A Nilai	55,000,000	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan SKPD	%		%	100 %	4,999,300						100 %	5,000,000	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,999,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	5,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan SKPD	%		%	100 %	24,999,400						100 %	50,000,000	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24,999,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus penyakit hewan	% %		% %	8 % 4 %	250,000,008						8 % 4 %	350,000,000	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase maningkatnya kesehatan hewan	%		%	50 %	250,000,008						50 %	350,000,000	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah vaksinasi rabies Pemeriksaan hewan Kurban Pemeriksaan kesehatan hewan besar Pengobatan hewan kesayangan Sterilisasi HPR				0 Laporan 1000 ekor 1000 ekor 30 ekor 4200 ekor 20 ekor	250,000,008		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	0 Laporan 1000 ekor 1000 ekor 30 ekor 4200 ekor 20 ekor	350,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						334,986,812						625,000,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	A Nilai	15,991,300						A Nilai	40,000,000	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	15,991,300						100 %	40,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,991,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Unit	10,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	ribuan rupiah		ribuan rupiah	9471120 ribuan rupiah	318,995,512						9471120 ribuan rupiah	585,000,000	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Nilai produksi perikanan budidaya	ribuan rupiah		ribuan rupiah	9471120 ribuan rupiah	318,995,512						9471120 ribuan rupiah	585,000,000	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				239430 ekor 1 Unit	318,995,512	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi	239430 ekor 1 Unit	385,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						69,365,042,468							78,237,121,423	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	0		0	BB 0	40,540,086,326						BB 0	45,305,850,646	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan	dok		dok	3 dok	19,293,800						3 dok	29,997,945	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	19,293,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 4 Dokumen	29,997,945	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rencana anggaran terhadap realisasi anggaran	%		%	80 %	13,638,113,700						80 %	17,026,655,886	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/bulan	13,617,701,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	116 Orang/bulan	16,996,728,085	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14,931,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Dokumen	22,078,628	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,481,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Laporan	7,849,173	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan per UU	laporan		laporan	1 laporan	77,231,400						1 laporan	75,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				97 Paket	77,231,400	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	97 Paket	75,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	4,010,445,210						12 bulan	5,284,803,483	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	76,121,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	50 Paket	91,524,400	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	837,308,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Paket	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	99,730,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	133,951,840	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	114,704,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	201,353,680	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	59,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	14 Dokumen	87,502,464	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,380,506,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	922,434,299	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,442,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	1,348,036,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,879,560,700						12 bulan	1,067,401,840	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	3,732,625,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	146,935,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	67,401,840	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	397,520,000						12 bulan	541,791,536	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				202 Laporan	27,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	202 Laporan	40,696,656	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	370,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Laporan	501,094,880	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,330,705,960						12 bulan	3,947,672,177	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				101 Unit	1,974,190,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	101 Unit	1,711,242,582	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 5 Unit	14,135,220	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	54,091,840	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1,243,515,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Unit	2,034,661,335	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	35 Unit	33,541,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,332,590,968						12 bulan	1,151,368,197	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	780,619,968		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Orang/Bulan	776,106,057	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	551,971,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Paket	375,262,140	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	9,215,790,470						12 bulan	10,609,687,623	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Sarana dan prasarana rumah dinas Walikota				7 orang 0 Paket 17 Paket 1 unit	5,733,961,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7 orang 0 Paket 17 Paket 1 unit	8,532,463,777	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah upah pegawai kontrak				0 Paket 17 Paket 5 orang	2,933,582,470		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Paket 17 Paket 5 orang	2,009,822,006	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	548,246,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	6 Paket	67,401,840	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%		%	100 %	454,256,500						100 %	675,623,447	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	155,139,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Dokumen	225,376,197	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik				1 laporan	194,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 laporan	140,247,250	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan Peraturan/keputusan tentang standar kompetensi jabatan				1 Dokumen 1 dokumen	104,117,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Dokumen 1 dokumen	310,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kehumasan dan tamu	%		%	90 %	4,184,577,618						90 %	4,895,848,512	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan uang lembur PNS dan Non PNS				12 Laporan 50 orang 50 orang	3,119,994,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan 50 orang 50 orang	3,744,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	131,073,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	117,331,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	933,509,308		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	1,034,517,312	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0 Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan	0 %		0 %	0 0 80 %	26,226,328,834						0 0 80 %	30,464,770,777	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan penyelenggaraan pemerintahan	laporan		laporan	3 laporan	1,130,853,200						3 laporan	640,516,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan kalender penyelenggaraan pemerintahan kota bukittinggintahan				0 Dokumen 165 Dokumen	187,782,200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 165 Dokumen	106,900,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan jumlah kelurahan yang difasilitasi jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan pembinaan kelurahan untuk tnhkat propinsi				0 Dokumen 2 kel 24 kel 3 kali 1 kel	748,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 2 kel 24 kel 3 kali 1 kel	326,359,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan SPM dan Monev laporan EKPPD LKPJ Pemerintah Kota Bukittinggi LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Upacara hari pahlawan				1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 78 BB 1 kali	195,051,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 78 BB 1 kali	207,257,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	%		%	80 %	24,216,438,292						80 %	28,843,337,751	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	frekuensi rapat koordinasi bidang bina mental Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual jumlah fasilitator kegiatan pengiriman kafilah dan peninjau lomba tingkat propinsi dan nasional jumlah kafilah utusan MTQ tingkat Propinsi Jumlah kegiatan Khatam qur jumlah masjid/mushallah yang dikunjungi pada pelaksanaan safari ramadhan kota bukittinggi jumlah pengurus masjid yang di latih jumlah peserta pembinaan dan pelatihan remaja masjid jumlah tabligh akbar jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi dai/mubalig wirid pengajian				5 kali 0 Dokumen 7 orang 90 orang 70 lembaga 150 masjid/mushalla 150 masjid/mushalla 50 orang 50 orang 3 event 25 orang 10 kali	3,076,982,792		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 kali 0 Dokumen 7 orang 90 orang 70 lembaga 150 masjid/mushalla 150 masjid/mushalla 50 orang 50 orang 3 event 25 orang 10 kali	2,110,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB jumlah kalender hijriyah jumlah lembaga yang menerima bantuan sosial dan hibah jumlah lembaga yang mengikuti lomba DDS kota bukittinggi				5 kali 0 Dokumen 900 bh 40 lembaga 6 lembaga	11,219,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 kali 0 Dokumen 900 bh 40 lembaga 6 lembaga	15,833,337,751	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas jumlah guru garin yang diberi bantuan jumlah jamaah haji yang difasilitasi jumlah kelurahan yang pendidikan keagamaan yang dibina pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat				0 Dokumen 881 orang 300 orang 24 kelurahan 5 kali	9,920,095,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 881 orang 300 orang 24 kelurahan 5 kali	10,900,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda, Perwako, dan SK yang tertib administrasi	produk		produk	335 produk	772,287,342						335 produk	866,276,026	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah penyusunan perda yang difasilitasi jumlah penyusunan perwako tyang difasilityasi jumlah penyusunan SK yang difasilitasi Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 perda 30 perwako 300 SK 0 Dokumen	150,849,642		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 perda 30 perwako 300 SK 0 Dokumen	174,893,400	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum jumlah laoran perkara yang difasilitasi laporan rencana aksi hak asasi manusia di kota bukittinggi				0 Kasus 4 laporan 1 laporan	472,560,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kasus 4 laporan 1 laporan	519,816,726	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	buku lembaran daerah dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIIH jenis produk hukum yang didokumentasikan				200 buku 50 peraturan 3 jenis	148,877,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	200 buku 50 peraturan 3 jenis	171,565,900	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Mou pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	MOu		MOu	5 MOu	106,750,000						5 MOu	114,641,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	luran APEKSI Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri MOU Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lainri				1 kali 0 Dokumen 3 MOU	106,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 kali 0 Dokumen 3 MOU	114,641,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan	rekomendasi		rekomendasi	20 rekomendasi	2,598,627,308						20 rekomendasi	2,466,500,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan pelaksanaan	laporan		laporan	1 laporan	697,996,200						1 laporan	579,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	96,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				105 Laporan	289,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	105 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	120,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	139,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	190,946,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Realisasi anggaran belanja modal dan pelaksanaan barang dan jasa SKPD sesuai regulasi	%		%	80 %	494,079,800						80 %	415,000,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Nilai SAKIP				0 Dokumen 1 Dokumen	79,502,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 1 Dokumen	135,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak Pelaksanaan monitoring belanja modal				0 Laporan 600 dokumen 50 BM	196,484,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Laporan 600 dokumen 50 BM	130,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan jumlah SKPD yang real anggarannya lebih dari 80%				0 Laporan 26 Laporan	218,092,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Laporan 26 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai aturan	%		%	91 %	1,245,932,708						91 %	1,332,500,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket barang dan jasa Pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun				120 paket	849,933,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	120 paket	900,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui LPSE				120 paket	299,999,808		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	120 paket	330,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa				1 laporan	95,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan	102,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan monitoring evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	laporan		laporan	1 laporan	160,618,600						1 laporan	140,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	56,748,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	49,623,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				4 Dokumen	54,246,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD						48,171,151,295						36,415,912,296		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP SKPD Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	persen persen		persen persen	83 persen 100 persen	21,638,716,425						83 persen 100 persen	9,257,299,191	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	22,229,900						100 persen	22,230,000	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	22,229,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	22,230,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	orang orang laporan		orang laporan	39 orang 18 laporan	3,975,204,507						39 orang 18 laporan	3,732,022,451	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3,945,204,707	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	28 Orang/bulan	3,702,022,451	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	29,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	4 Dokumen	30,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah tenaga pengamanan kantor	orang		orang	5 orang	200,000,000						5 orang	250,000,000	
4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	200,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	250,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						131,776,900							114,750,000	
4 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	14,967,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		2 Unit	15,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket 25 Paket	39,810,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		25 Paket 25 Paket	22,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	76,999,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		2 Laporan	77,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah tamu yang dilayani	jenis buah buah dokumen lembar buah orang		jenis buah buah dokumen lembar buah orang	16 jenis 51 buah 21 buah 115 dokumen 103403 lembar 3 buah 5000 orang	1,695,985,416					16 jenis 51 buah 21 buah 115 dokumen 103403 lembar 3 buah 5000 orang	1,718,740,620		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	17,340,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Paket	17,353,350	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	293,543,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	8 Paket	305,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8,098,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Paket	8,101,832	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	17,555,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	25 Paket	17,579,749	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	129,007,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Paket	129,026,953	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	429,793,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	429,793,540	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	580,147,216	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Laporan	591,378,581	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	220,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Laporan	220,506,615	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas / jabatan	unit		unit	3 unit	697,269,600						3 unit	647,869,231	
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	697,269,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	3 Unit	647,869,231	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening listrik, air telepon dan internet dibayar Jumlah surat - surat masuk dan surat - surat keluar dalam 1 tahun	jenis surat		jenis surat	12 jenis 500 surat	214,360,000						12 jenis 500 surat	222,438,836	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	12 Laporan	1,474,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	212,900,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	10 Laporan	220,964,836	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab	unit unit unit jenis jenis		unit unit unit jenis jenis	2 unit 19 unit 14 unit 20 jenis 11 jenis	1,534,861,912					2 unit 19 unit 14 unit 20 jenis 11 jenis	1,449,191,018		
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	163,090,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	12 Unit	182,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	413,485,412	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	12 Unit	336,736,485	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	672,180,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Unit	672,316,285	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	245,785,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Unit	202,103,685	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	40,320,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Unit	56,034,563	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD yang tersedianya	orang orang stel		orang orang stel	25 orang 25 orang 125 stel	12,381,058,206						25 orang 25 orang 125 stel	313,743,456	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	12,079,304,206	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	25 Orang/Bulan	11,989,206	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	232,605,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	25 Paket	232,605,450	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	69,148,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	25 Orang	69,148,800	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD yang dikelola Jumlah kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi	dokumen jenis		dokumen jenis	25 dokumen 12 jenis	785,969,984						25 dokumen 12 jenis	786,313,579	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				2 Dokumen	182,670,850	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	182,686,611	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	603,299,134	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi	3 Paket	603,626,968	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persetase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen		persen	100 persen	26,532,434,870						100 persen	27,158,613,105	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen propemperda yang disusun Jumlah rapat - rapat pansus, gabungan komisi, paripurna internal dan paripurna yang difasilitasi Jumlah rapat terkait kajian perundangan - undangan yang difasilitasi Jumlah rapat yang difasilitasi terkait penyusunan naskah akademik	dokumen kali kali kali		dokumen kali kali kali	1 dokumen 50 kali 5 kali 10 kali	4,317,810,916						1 dokumen 50 kali 5 kali 10 kali	4,379,945,730	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	249,053,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	1 Dokumen	258,844,785	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	3,217,393,216	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	10 Dokumen	3,239,862,978	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	692,739,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	5 Dokumen	708,231,738	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	158,625,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	1 Dokumen	173,006,229	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	50,679,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	6 Laporan	50,679,465	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	342,091,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	1 Dokumen	342,097,465	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	500,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	1 Dokumen	500,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	490,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	4 Dokumen	531,927,741	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah bimbingan teknis DPRD yang diikuti dalam 1 tahun Jumlah dokumen program kerja DPRD Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	kali dokumen buah fraksi		kali dokumen buah fraksi	8 kali 1 dokumen 1000 buah 6 fraksi	4,059,799,174						8 kali 1 dokumen 1000 buah 6 fraksi	4,140,634,253	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2,445,004,012	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	6 Dokumen	2,492,523,569	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				100 Dokumen	709,970,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	100 Dokumen	709,970,684	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	204,824,662	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	5 Orang	238,140,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	699,999,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	700,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pikir yang disusun dan disampaikan tepat waktu ke Bapelitbang Jumlah reses yang dilaksanakan dalam 1 tahun	dokumen kali		dokumen kali	50 dokumen 84 kali	3,226,532,000						50 dokumen 84 kali	3,377,013,470	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				25 Dokumen	1,308,838,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	25 Dokumen	1,381,237,670	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				15 Dokumen	1,917,693,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	15 Dokumen	1,995,775,800	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah peraturan DPRD terkait kode etik tersusun Jumlah rapat, koordinasi dan kunjungan kerja terkait pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan	kali kali		kali kali	84 kali 12 kali	505,775,000						84 kali 12 kali	505,775,000	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	505,775,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	12 Laporan	505,775,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun Jumlah rapat badan musyawarah Jumlah rapat paripurna istimewa DPRD yang dilaksanakan dalam 1 tahun	laporan dokumen kali kali		laporan dokumen kali kali	200 laporan 1 dokumen 15 kali 6 kali	5,791,655,800						200 laporan 1 dokumen 15 kali 6 kali	5,797,830,192	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Dokumen	4,610,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	4,616,674,099	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				2 Laporan	759,033,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	2 Laporan	759,034,168	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2 Dokumen	422,121,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DPRD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	422,121,925	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01	PERENCANAAN							7,356,400,102						10,052,842,900	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	Bb Nilai	5,814,428,802						Bb Nilai	7,998,350,000	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang sinkron dengan Dokumen Perencanaan Kota	%		%	100 %	22,230,000						100 %	35,000,000	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22,230,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	2 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	%		%	100 %	4,680,049,344						100 %	6,396,000,000	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4,680,049,344	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	32 Orang/bulan	6,396,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	28,050,800						100 %	40,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	28,050,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	34 Paket	40,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	494,054,100						100 %	454,750,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,020,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Paket	5,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	243,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	3 Paket	111,100,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,005,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	3 Paket	23,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Paket	23,200,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Laporan	6,850,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	201,700,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Laporan	285,100,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	78,265,000						100 %	169,100,000	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,790,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Laporan	2,600,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68,940,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	12 Laporan	102,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7,535,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Laporan	64,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	%		%	100 %	511,779,558						100 %	903,500,000	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	75,291,804	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Unit	111,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	161,237,750	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	12 Unit	277,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	275,250,004	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Bapelitbang	1 Unit	515,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	%		%	80 %	822,685,100						80 %	1,199,742,900	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan	% %		% %	84 % 84 %	647,710,400						84 % 84 %	911,242,900	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita acara konsultasi publik				1 dokumen	109,512,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 dokumen	24,042,900	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	78,996,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Berita Acara	27,200,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	123,287,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP/ RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	335,914,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	860,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	%		%	84 %	97,370,700						84 %	115,500,000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				28 Orang	97,370,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	28 Orang	115,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	%		%	85 %	77,604,000						85 %	173,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	77,604,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	7 Laporan	173,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	%		%	100 %	719,286,200						100 %	854,750,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Proviinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	Dok Dok		Dok Dok	5 Dok 9 Dok	324,559,800						5 Dok 9 Dok	392,450,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP/ RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJP/ RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	50,349,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	7 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				7 Laporan	38,786,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	7 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	82,438,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	7 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	152,985,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	6 Laporan	142,450,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Proviinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	Dok Rekomendasi		Dok Rekomendasi	10 Dok 6 Rekomendasi	163,325,300						10 Dok 6 Rekomendasi	231,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	38,099,300	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	27,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	72,092,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	82,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	28,318,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	48,400,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan	24,816,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	6 Laporan	72,600,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Proviinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	Dok Rekomendasi		Dok Rekomendasi	4 Dok 6 Rekomendasi	231,401,100						4 Dok 6 Rekomendasi	231,300,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	38,968,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	96,800,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	192,433,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	3 Laporan	134,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1,072,201,600						1,237,500,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset	%		%	100 %	1,072,201,600						100 %	1,237,500,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi	Dok		Dok	1 Dok	130,929,800						1 Dok	220,000,000	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	130,929,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	220,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang umlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	Penelitian Penelitian		Penelitian Penelitian	0 Penelitian 5 Penelitian	149,822,000						0 Penelitian 5 Penelitian	330,000,000	
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	149,822,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	330,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi umlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	Penelitian Penelitian		Penelitian Penelitian	2 Penelitian 2 Penelitian	611,457,400						2 Penelitian 2 Penelitian	330,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 05 02 2.03 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	491,051,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	120,406,200	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	330,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	Skor		Skor	40 Skor	179,992,400						40 Skor	357,500,000		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	179,992,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	357,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN							26,625,707,469							59,215,240,800	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Persen		Persen	100 Persen	12,261,098,995							100 Persen	16,753,284,000	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	Persen		Persen	100 Persen	22,039,950							100 Persen	33,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	22,039,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badn Keuangan	0 Dokumen 2 Dokumen	33,000,000	Badan Keuangan	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	Persen		Persen	100 Persen	10,534,353,451							100 Persen	14,400,000,000	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	10,534,353,451	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	69 Orang/bulan	14,400,000,000	Badan Keuangan	
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	266,740,000							100 Persen	320,088,000	
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan				5 Orang	266,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	5 Orang	320,088,000	Badan Keuangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	40,952,999						100 Persen	73,080,000	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	40,952,999	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	87 Paket	73,080,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	528,902,595						100 Persen	712,200,000	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Paket	4,200,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,655,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Paket	60,000,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				1 Paket	254,831,195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Paket	318,000,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	30,000,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	199,916,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	300,000,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	150,940,000						100 Persen	182,400,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	2,400,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	148,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	12 Laporan	180,000,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	Persen		Persen	100 Persen	717,170,000						100 Persen	828,516,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Unit	50,916,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	269,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	39 Unit	291,600,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Unit	24,000,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	20 Unit	28,800,000	Badan Keuangan
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	361,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Unit	433,200,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu Persentase penyerapan belanja daerah Persentase penyerapan dana transfer Sistem terintegrasi	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	10,003,649,719					100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	35,509,298,400		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,464,090,000					100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	2,314,704,000		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	306,834,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan	2 Dokumen	425,148,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	245,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Dokumen	367,152,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	98,311,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	28 Dokumen	70,770,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	71,915,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	28 Dokumen	270,300,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	311,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Dokumen	469,524,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	306,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	0 Dokumen 2 Dokumen	440,160,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	123,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	0 Dokumen 1 Dokumen	207,600,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dana DAK yang dapat diserap Kontribusi optimalisasi kas Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima	Persen Persen Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	910,480,000						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,350,576,000	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				600 Dokumen	84,928,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	600 Dokumen	78,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	64,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	48,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				9 Dokumen	235,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	9 Dokumen	330,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				168 Laporan	81,071,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	168 Laporan	78,000,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				12 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	12 Dokumen	84,000,000	Badan Keuangan
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	85,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	12 Dokumen	132,576,000	Badan Keuangan
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	295,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan	50 Orang	396,000,000	Badan Keuangan
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret	temuan Temuan Persen Persen		temuan Temuan Persen Persen	0 temuan 0 Temuan 100 Persen 100 Persen	1,499,479,245						0 temuan 0 Temuan 100 Persen 100 Persen	3,085,200,000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	93,503,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	12 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				14 Laporan	188,143,031	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	14 Laporan	228,000,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				37 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	37 Laporan	132,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	655,837,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Dokumen	660,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	31,067,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	127,200,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	35,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	22,005,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	126,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	41,405,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	308,756,014	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	50 Orang	840,000,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				8 Lembaga	73,661,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan	8 Lembaga	192,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata kelola keuangan	Persen		Persen	100 Persen	5,400,000,000						100 Persen	28,291,818,400	
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	5,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	126,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	Bidang		Bidang	6 Bidang	729,600,474						6 Bidang	467,000,000	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				6 Dokumen	245,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	6 Dokumen	312,000,000	Badan Keuangan
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	484,600,474	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	50 Orang	155,000,000	Badan Keuangan
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD	jenis temuan %		jenis temuan %	12 jenis 0 temuan 0,5 %	2,472,000,000						12 jenis 0 temuan 0,5 %	3,306,757,200	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah informasi data pengelolaan BMD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD	Dokumen Temuan Persen		Dokumen Temuan Persen	12 Dokumen 0 Temuan 0.1 Persen	2,472,000,000						12 Dokumen 0 Temuan 0.1 Persen	3,306,757,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	146,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	146,400,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	18,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Dokumen	18,600,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	1,355,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Laporan	1,800,000,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	60,000,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	90,000,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	2 Laporan	300,000,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	132,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	5 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	385,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	50 Orang	480,000,000	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah jenis pajak memakai sistem online Jumlah penambahan objek pajak baru Persentase Pajak Tertagih Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan retribusi daerah Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	Objek Persen Persen Persen Persen Persen		Objek Persen Persen Persen Persen Persen	10 Objek 100 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen 0.5 Persen 100 Persen	1,888,958,755						10 Objek 100 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen 0.5 Persen 100 Persen	3,645,901,200	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak memakai sistem online Jumlah penambahan objek pajak baru Persentase Pajak Tertagih Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan retribusi daerah Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	Objek Persen Persen Persen Persen Persen		Objek Persen Persen Persen Persen Persen	10 Objek 20 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen 0.5 Persen 100 Persen	1,888,958,755						10 Objek 20 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen 0.5 Persen 100 Persen	3,645,901,200	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	113,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	73,608,000	Badan Keuangan
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	85,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	37,000,000	Badan Keuangan
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	75,027,755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	6 Unit	771,133,200	Badan Keuangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	113,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	135,600,000	Badan Keuangan	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	221,691,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Laporan	218,000,000	Badan Keuangan	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				7500 Obyek Pajak	223,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	7500 Obyek Pajak	268,608,000	Badan Keuangan	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4600 Dokumen	181,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	4600 Dokumen	218,280,000	Badan Keuangan	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	695,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	1 Dokumen	1,200,000,000	Badan Keuangan	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	12 Dokumen	287,112,000	Badan Keuangan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 03	KEPEGAWAIAN						6,878,606,227							10,105,523,687		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Persen		Persen	84.00 Persen	4,383,940,766							84.00 Persen	6,011,036,689	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	36,618,400							100 Persen	34,500,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	36,618,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	5 Dokumen	34,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	3,968,988,366							100 Persen	5,159,870,291	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3,968,988,366		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	33 Orang/bulan	5,124,870,291	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	72,064,000						100 Persen	24,500,000	
5 03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	36,377,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				33 Paket	20,701,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	33 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	14,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	156,590,600						100 Persen	295,700,000	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	972,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	11 Paket	2,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	7,943,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	18 Paket	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3,656,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	6 Paket	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Laporan	4,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	139,019,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	3 Laporan	197,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	8,870,000						100 Persen	11,250,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	2,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	6,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	3,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	87 Persen	140,809,400						87 Persen	149,785,398	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Unit	41,671,343	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	98,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	12 Unit	100,614,055	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	10 Unit	4,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	1,599,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	11 Unit	3,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK	Persen		Persen	72,0 Persen	2,494,665,461						72,0 Persen	4,094,486,998	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	832,910,187						100 Persen	935,847,598	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	43,873,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	52,026,363	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	292,611,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	308,105,788	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	37,339,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	44,778,730	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	186,837,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Lembaga	265,468,378	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	272,249,237		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	265,468,339	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	503,134,987						100 Persen	592,534,882	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan				2 Dokumen 2 Rekomendasi	95,155,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	2 Dokumen 2 Rekomendasi	140,997,188	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	79,322,387		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	2 Dokumen	96,968,601	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	328,656,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN	2 Dokumen	354,569,093	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen Persen		Persen Persen	2 Persen 11 Persen	934,426,200						2 Persen 11 Persen	1,801,042,183	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				195 Orang	607,781,300		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	195 Orang	1,390,090,246	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan				2 Dokumen 150 Orang	291,677,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen 150 Orang	316,831,034	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0 Orang 2 Dokumen	34,967,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	0 Orang 2 Dokumen	94,120,903	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai e-Lapkin Persentase Penurunan ASN yang mendapat Hukuman Disiplin	Persen Persen		Persen Persen	91 Persen 0.8 Persen	224,194,087						91 Persen 0.8 Persen	765,062,335	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	34,994,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	26,592,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	36,057,875	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	18,793,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	11,141,883	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				15 Orang	34,576,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	15 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	24,764,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	150 Orang	25,065,374	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan dan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan				0 Orang 10 Orang 24 Rekomendasi	45,527,587		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	0 Orang 10 Orang 24 Rekomendasi	46,205,592	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				9 Laporan	10,524,700		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	9 Laporan	76,066,611	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				10 Dokumen	28,420,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	10 Dokumen	35,525,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							919,819,087						2,411,228,000		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas Aparatur	Persen		Persen	55,25 Persen	919,819,087						55,25 Persen	2,411,228,000		
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen		Persen	11 Persen	919,819,087						11 Persen	2,390,928,000		
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	919,819,087		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kota Bukittinggi	3 Laporan	2,390,928,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							8,100,623,343							9,140,235,938	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	6,710,795,143						100 %	7,445,827,880		
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai Persentase Tertib Administrasi Keuangan	% %		% %	100 % 100 %	5,413,505,635						100 % 100 %	6,199,772,932		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5,413,505,635	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Aparatur Inspektorat	40 Orang/bulan	6,199,772,932	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam Peningkatan Kompetensi	orang		orang	39 orang	487,582,700						39 orang	461,400,667	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	31,848,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Aparatur Inspektorat	40 Paket	30,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	402,035,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Aparatur Inspektorat	40 Orang	407,226,973	Inspektorat
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	53,699,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Aparatur Inspektorat	40 Orang	24,173,694	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	263,891,900						100 %	290,651,988	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,494,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	1 Paket	5,053,223	Inspektorat
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	52,043,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	1 Paket	25,500,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	23,260,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	4 Paket	22,942,901	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	20,557,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	7 Paket	16,510,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	35,336,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	50 Laporan	6,260,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	127,200,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	100 Laporan	214,385,864	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	101,511,900						100 %	0	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	101,511,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	3 Unit	0	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	36,685,000						100 %	42,442,390	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,465,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	2 Laporan	1,554,670	Inspektorat
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35,220,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	12 Laporan	40,887,720	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	%		%	100 %	407,618,008						100 %	451,559,903	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	71,351,804	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	1 Unit	44,030,000	Inspektorat
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	86,950,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	10 Unit	200,338,573	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	4,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	50 Unit	3,455,000	Inspektorat
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	12,380,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	50 Unit	13,343,130	Inspektorat
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232,936,204	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kantor Inspektorat	1 Unit	190,393,200	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	%		%	29 %	892,703,000						29 %	1,186,581,401	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	%		%	100 %	721,887,000						100 %	1,149,392,303	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				31 Laporan	170,884,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	31 Laporan	223,809,808	Inspektorat
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				99 Laporan	237,671,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	99 Laporan	648,422,015	Inspektorat
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	32,484,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	2 Laporan	34,212,514	Inspektorat
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	73,380,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	1 Laporan	24,650,197	Inspektorat
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	136,206,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	1 Kesepakatan	145,330,355	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	71,259,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	2 Dokumen	72,967,414	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	%		%	100 %	170,816,000						100 %	37,189,098	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	67,580,100	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintah Kota Bukittinggi	2 Laporan	21,359,412	Inspektorat
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	103,235,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintah Kota Bukittinggi	20 Laporan	15,829,686	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	%		%	100 %	497,125,200						100 %	507,826,657	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	%		%	100 %	497,125,200						100 %	507,826,657	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				28 perangkat daerah	241,298,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	28 perangkat daerah	243,625,920	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	75,157,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	10 perangkat daerah	76,719,096	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	75,956,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	2 Kegiatan	73,129,716	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				8 perangkat daerah	104,712,400	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	OPD Kota Bukittinggi	8 perangkat daerah	114,351,925	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	14,176,645,859						A	16,102,291,197	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	84 %	20,230,000						84 %	22,253,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	20,230,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	22,253,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase tertib administrasi keuangan	% Tahun		% Tahun	84 % 1 Tahun	13,661,751,573						84 % 1 Tahun	15,535,900,227	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	13,661,751,573	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	89 Orang/bulan	15,535,900,227	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	43,845,800						100 %	48,235,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah				1 Laporan	43,845,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	48,235,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	% %		% %	84 % 100 %	68,899,300						84 % 100 %	75,790,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas & Atribut ASN				0 Paket 100 Orang	68,899,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Paket 100 Orang	75,790,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	146,911,200						100 %	161,603,365	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1,759,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Paket	1,936,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	15,654,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	55 Paket	17,219,510	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan				34731 Paket	22,837,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	34731 Paket	25,121,855	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	101,659,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	111,826,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	57,500,600						100 %	63,251,100	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1,110,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,222,100	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	39,989,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	43,989,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	16,399,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	18,040,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	177,507,386						100 %	195,258,505	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	67,299,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7 Unit	74,030,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 Unit	11,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4,999,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	95,207,686	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	104,728,505	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	2,153,498,121						82 % 82 % 82 %	2,808,188,917	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	2,058,898,300						3 Dokumen 100 %	2,347,398,917	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	221,184,400	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Laporan	246,398,917	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	1,837,713,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Dokumen	2,101,000,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Jenis		Jenis	8 Jenis	94,599,821						8 Jenis	460,790,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan 0 Laporan	94,599,821	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan 0 Laporan	460,790,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	%		%	100 %	531,300,000						100 %	545,584,178	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	100 %	30,000,000						100 %	82,154,178	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan				2 Laporan	30,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Laporan	82,154,178	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	501,300,000						100 %	463,430,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Honor RT, RW, LPM. Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	501,300,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	463,430,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Penegakan Perda	% %		% %	100 % 100 %	101,572,000						100 % 100 %	257,044,975	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus penegakan perda	Kali Kali		Kali Kali	6 Kali 6 Kali	101,572,000						6 Kali 6 Kali	257,044,975	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	101,572,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Laporan	257,044,975	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						373,555,754							4,744,910,432	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	28,631,900						A	197,426,405	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	15,334,000						100 %	17,495,940	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1,179,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Paket	1,298,330	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	6,499,100	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	29 Paket	7,404,540	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang tersedia yang Disediakan				7 Paket	3,929,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7 Paket	4,658,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	2,226,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	2,561,570	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	5,059,800						100 %	5,775,550	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	450,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	522,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	3,889,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	4,400,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	720,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	853,050	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	8,238,100						100 %	174,154,915	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,830,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,408,100	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	116,706,040	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	129,291,300						82 % 82 % 82 %	199,610,127	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	129,291,300						3 Dokumen 100 %	116,820,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	129,291,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	116,820,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	%		%	100 %	215,632,554						100 %	4,347,873,900	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	67,082,554						55 %	4,206,468,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	4,210,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	6,818,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	62,872,554	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	4,199,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	148,550,000						100 %	141,405,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	148,550,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	141,405,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,504,577,116							1,455,650,091	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	176,853,454						A	204,178,964	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	18,872,400						100 %	20,764,304	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	912,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Paket	1,003,750	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	10,698,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	22 Paket	11,845,130	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan				11768 Paket	3,186,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	11768 Paket	3,505,700	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	2,575,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	2,836,724	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	9,470,000						100 %	9,888,450	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	680,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	748,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	6,600,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	7,150,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	2,190,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,990,450	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	148,511,054						100 %	173,526,210	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40,026,250	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,960,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105,524,804	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	116,077,335	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	763,161,804						82 % 82 % 82 %	169,140,127	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	731,000,000						3 Dokumen 100 %	86,350,000			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	731,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	86,350,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	32,161,804						100 %	82,790,127			
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	32,161,804	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	82,790,127	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	%		%	100 %	564,561,858						100 %	1,082,331,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	104,962,058						55 %	609,771,000			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	8,689,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	10,121,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	96,272,558	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	459,599,800						100 %	472,560,000			
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	459,599,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	472,560,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN							587,124,289								1,161,932,239	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	220,414,771							A	242,848,012		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	43,850,000						100 %	48,235,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah				1 Laporan	43,850,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	48,235,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	24,371,900						100 %	26,809,805	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	683,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Paket	752,400	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	9,798,700	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	27 Paket	10,778,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan				8375 Paket	3,740,400	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8375 Paket	4,114,605	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,430,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,499,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	6,219,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	6,840,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	14,595,000						100 %	16,057,250	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	245,200	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	272,250	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	12,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	13,200,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1,595,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,754,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan				0 Laporan 1 Rekening	754,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Laporan 1 Rekening	830,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	137,597,871					100 %	151,745,957		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	43,876,250	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,998,700	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85,722,921	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	94,297,082	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	121,763,397					82 % 82 % 82 %	89,940,127		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	46,499,900						3 Dokumen 100 %	7,150,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	46,499,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	7,150,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	75,263,497					100 %	82,790,127		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	75,263,497	Kota Bukittinggi, Mandiangin Koto Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	82,790,127	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	244,946,121						100 %	829,144,100		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	45,596,121						55 %	609,859,100		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	8,342,000	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	10,209,100	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	37,254,121	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	199,350,000						100 %	219,285,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	199,350,000	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Manggis/Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	219,285,000	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							1,018,998,058							1,348,589,583	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	362,334,654							A	407,125,460	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	41,311,700							100 %	48,235,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah				1 Laporan	41,311,700	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	48,235,000	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	17,767,200							100 %	19,647,765	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	925,500	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Paket	1,018,215	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	10,309,800	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	26 Paket	11,314,000	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7000 Paket	2,409,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7000 Paket	2,651,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,320,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	2,802,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	3,091,550	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	10,440,000						100 %	12,479,500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	800,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	885,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	9,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	10,444,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	640,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,149,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	%		%	100 %	292,815,754						100 %	326,763,195	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40,026,250	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,960,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	244,829,504	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	269,314,320	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	225,555,900						82 % 82 % 82 %	89,940,127	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	225,555,900						3 Dokumen 100 %	7,150,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	225,555,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	7,150,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	%		%	100 %	431,107,504						100 %	851,523,996	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	81,291,304						55 %	615,243,996	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,737,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	15,593,996	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	71,553,804	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	349,816,200						100 %	236,280,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	349,816,200	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	236,280,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						770,718,008							1,201,312,242	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	131,093,854						A	150,085,348	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	22,314,300						100 %	24,574,908	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	835,700	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Paket	913,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	7,056,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	19 Paket	7,764,020	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8820 Paket	5,498,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8820 Paket	6,048,488	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,400,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	7,524,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	8,276,400	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	16,506,400						100 %	19,262,100	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	710,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	786,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	12,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	14,289,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	3,796,400	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	4,186,600	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	92,273,154						100 %	106,248,340	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40,026,250	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,960,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,920,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	44,366,904	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	48,799,465	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	271,490,700						82 % 82 % 82 %	133,940,127	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	271,490,700						3 Dokumen 100 %	51,150,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	271,490,700	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	51,150,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	368,133,454						100 %	917,286,767		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	75,941,854						55 %	615,336,767		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,701,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	15,686,767	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	66,240,254	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	292,191,600						100 %	301,950,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	292,191,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	301,950,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							756,577,416							1,229,201,364	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	166,594,354							A	159,903,337	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	24,723,800							100 %	27,140,740	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,848,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Paket	2,033,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	9,412,200	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	28 Paket	10,374,100	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13020 Paket	5,859,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	13020 Paket	6,445,450	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	6,103,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	6,714,290	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	11,820,000						100 %	12,984,400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	590,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	654,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	9,900,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	10,890,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1,330,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,439,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	130,050,554						100 %	119,778,197	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	65,026,250	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,993,500	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,460,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56,570,804	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	62,329,322	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	123,750,404						82 % 82 % 82 %	91,040,127	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	47,500,000						100 %	8,250,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	47,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	8,250,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	76,250,404						100 %	82,790,127	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	76,250,404	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	82,790,127	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	466,232,658						100 %	978,257,900	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	110,232,658						55 %	614,157,900	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,281,100	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	14,507,900	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	100,951,558	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	356,000,000						100 %	364,100,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	356,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	364,100,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						958,696,608							1,281,313,696	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	103,347,500						A	150,952,989	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	18,142,400						100 %	20,715,354	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	713,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Paket	813,120	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	4,575,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	18 Paket	5,248,375	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11729 Paket	4,953,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	11729 Paket	5,691,114	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,200,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	2,750,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	4,200,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	4,639,745	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	15,040,000						100 %	16,162,300	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	750,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	885,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	13,560,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	14,091,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	730,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,185,800	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	70,165,100						100 %	114,075,335	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11,550,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,261,400	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,880,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	51,473,700	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	56,626,460	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	342,836,504					82 % 82 % 82 %	91,040,127		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	267,455,700					3 Dokumen 100 %	8,250,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	267,455,700	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	8,250,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	75,380,804					100 %	82,790,127		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	75,380,804	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	82,790,127	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	512,512,604					100 %	1,039,320,580		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	216,512,804					55 %	614,720,580		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,570,500	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	15,070,580	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	206,942,304	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	295,999,800					100 %	424,600,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	295,999,800	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	424,600,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,151,912,870							1,793,265,535	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	153,006,912						A	238,327,903	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	41,626,600						100 %	48,235,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah				1 Laporan	41,626,600	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	48,235,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	16,175,800						100 %	17,922,487	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1,224,500	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	6 Paket	1,468,500	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	7,818,300	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	35 Paket	8,602,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7000 Paket	2,040,000	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7000 Paket	2,244,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,430,000	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	3,663,000	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	4,034,987	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	11,070,000						100 %	20,322,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	270,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	302,500	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	10,800,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	18,480,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	84,134,512						100 %	151,847,916	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19,250,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	79,972,750	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,960,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,590,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	57,334,512	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	63,075,166	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	378,999,800						82 % 82 % 82 %	202,690,127	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	378,999,800						3 Dokumen 100 %	119,900,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	378,999,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	119,900,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	619,906,158						100 %	1,352,247,505	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	109,623,858						55 %	620,087,505	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,820,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	20,437,505	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	99,803,858	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	510,282,300						100 %	732,160,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	510,282,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	732,160,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						621,330,832							1,173,844,736	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	96,355,645						A	141,931,174	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	15,537,300						100 %	17,020,949	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1,038,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Paket	1,144,660	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	4,883,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	18 Paket	5,373,610	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7000 Paket	3,158,600	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	7000 Paket	3,474,515	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,573,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	4,956,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	5,455,164	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	9,932,400						100 %	10,981,410	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	423,300	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	465,850	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	8,040,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	8,899,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1,469,100	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Tahun	1,616,560	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	70,885,945						100 %	113,928,815	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11,550,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	48,648,875	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4,990,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Unit	5,500,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,000,000	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,300,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	51,345,045	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	56,479,940	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	% % %		% % %	82 % 82 % 82 %	281,584,804						82 % 82 % 82 %	89,940,127	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	206,199,900						3 Dokumen 100 %	7,150,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	206,199,900	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	7,150,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%		%	100 %	75,384,904						100 %	82,790,127	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	75,384,904	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		12 Laporan	82,790,127	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	243,390,383						100 %	941,973,435	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	55 %	73,390,583						55 %	611,538,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga				2 Berita Acara	9,645,800	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Berita Acara	11,888,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	63,744,783	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit	599,650,000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	100 %	169,999,800						100 %	330,435,435	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK				12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	169,999,800	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Garegeh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	330,435,435	Kecamatan Mandiangan Koto Selayan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						35,206,569,135							44,221,791,557	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ilai SAKIP SKPD				BB	33,580,655,847						BB	42,366,136,402	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	80 %	24,000,000						80 %	29,534,890	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24,000,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	29,534,890	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	10,830,697,847						100 %	12,319,316,368	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	10,830,697,847	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	83 Orang/bulan	12,319,316,368	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	160,000,000						100 %	182,600,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	160,000,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	182,600,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	318,340,600						100 %	233,200,000	
7 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan sapas disiplin pegawai				8 Paket	254,644,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8 Paket	176,000,000	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				80 Stel	63,696,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	80 Stel	57,200,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bahan cetak jumlah penggandaan yang tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis	199,491,200						3 Jenis	222,758,525	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,583,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	3,941,850	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,164,200	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	27,363,600	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,488,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	23,972,575	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,000,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	2,200,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150,255,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	165,280,500	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21,758,347,400							29,040,000,000	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3,900,000,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		2 Unit	4,290,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	17,858,347,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		4 Unit	24,750,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,680,000							58,476,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,700,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Laporan	19,250,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	34,980,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		3 Laporan	39,226,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	252,098,800						100 %	280,250,619	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	98,443,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8 Unit	108,328,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	9,022,800	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8 Unit	9,930,525	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	144,633,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	161,992,094	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	671,761,744						80 80 80	818,950,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	354,761,940						78 %	403,700,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait MUSRENBANG Kecamatan Rakor				1 Laporan 1 Kali 4 Kali	29,999,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan 1 Kali 4 Kali	33,000,000	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	324,762,040	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	370,700,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Tepat Waktu	%		%	75 %	316,999,804						75 %	415,250,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	316,999,804	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	348,700,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	21 %	904,681,244						21 %	992,705,155	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	150,000,000						15 %	165,000,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	150,000,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	165,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	754,681,244						75 %	827,705,155	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	747,456,144	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	822,205,155	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	7,225,100	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	49,470,300						100 %	44,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasus		Kasus	4 Kasus	49,470,300						4 Kasus	44,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	49,470,300	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	44,000,000	Kecamatan Guguk Panjang
UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						1,186,857,522							2,314,848,668	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	116,089,500						A	516,712,955	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	19,888,300						100 %	142,679,075	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,595,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	2,855,325	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,807,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	9,659,650	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,948,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	4,229,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,480,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3,056,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	3,306,600	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26,100,000							28,666,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	760,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Laporan	836,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	25,340,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		4 Laporan	27,830,000	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	70,101,200						100 %	79,167,880	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	12,105,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	16,060,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2,840,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Unit	2,436,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55,156,200	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	60,671,380	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	319,799,600						80 80 80	344,300,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	319,799,600						78 %	344,300,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	319,799,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	344,300,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	750,968,422						21 %	1,453,835,713	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	488,558,322						15 %	1,172,565,713	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	8,800,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	9,680,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara				1 Kelurahan	479,758,322	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	562,885,713	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	262,410,100						75 %	281,270,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	262,410,100	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	281,270,000	Kecamatan Guguk Panjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,200,931,564							2,240,180,833	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	124,442,600						A	522,984,220	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	33,468,700						100 %	154,073,040	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,604,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	2,689,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,359,100	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	16,127,540	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,785,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	4,570,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,320,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	8,400,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	8,057,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	14,880,000						100 %	13,409,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	660,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	14,280,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Laporan	12,749,000	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	76,093,900						100 %	89,302,180	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11,550,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	15,603,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5,680,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	3,575,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	58,863,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	70,123,680	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	233,038,300						80 80 80	256,300,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	233,038,300						78 %	256,300,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	233,038,300	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	256,300,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	843,450,664						21 %	1,460,896,613	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	417,438,364						15 %	1,047,406,613	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	8,018,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	8,820,900	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara				1 Kelurahan	409,419,464	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	438,585,713	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	426,012,300						75 %	413,490,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	426,012,300	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Pakan Kurai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	413,490,000	Kecamatan Guguk Pangjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						637,501,008							1,758,572,013	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	90,907,404						A	501,636,300	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	19,523,900						100 %	142,100,200	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	405,000	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	452,100	Kecamatan Guguk Pangjang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,169,100	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	7,778,100	Kecamatan Guguk Pangjang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,269,800	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	2,497,000	Kecamatan Guguk Pangjang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,640,000	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	3,019,500	Kecamatan Guguk Pangjang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,040,000	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	7,353,500	Kecamatan Guguk Pangjang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	12,160,000						100 %	12,056,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	460,000	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	506,000	Kecamatan Guguk Pangjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	11,700,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Laporan	11,550,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	59,223,504						100 %	81,280,100	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	13,770,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Unit	15,961,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,920,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Unit	3,399,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42,533,504	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	61,920,100	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0		0 0 0	80 0 80 0 80 0	216,604,900						80 0 80 0 80 0	255,750,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	216,604,900						78 %	255,750,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	216,604,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	255,750,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	329,988,704						21 %	1,001,185,713	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	166,735,104						15 %	786,685,713	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	7,985,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	8,800,000	Kecamatan Guguk Panjang	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara				1 Kelurahan	158,750,104	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	177,885,713	Kecamatan Guguk Panjang	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	163,253,600						75 %	214,500,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	163,253,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	214,500,000	Kecamatan Guguk Panjang	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						953,917,670							2,060,393,444		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	116,757,604							A	539,952,730	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	26,204,800							100 %	150,010,630	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,179,600	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	1,308,780	Kecamatan Guguk Panjang	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,760,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	9,643,150	Kecamatan Guguk Panjang	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,209,300	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	3,531,000	Kecamatan Guguk Panjang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,385,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	11,670,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	12,899,700	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9,850,000							10,857,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Laporan	550,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	9,350,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		4 Laporan	10,307,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	80,702,804						100 %	112,885,100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	13,400,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	15,609,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,295,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Unit	2,557,500	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65,007,804	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	94,718,600	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	232,499,400					80 80 80	255,750,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	232,499,400					78 %	255,750,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	232,499,400	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	255,750,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	604,660,666					21 %	1,264,690,714		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Maasyarakat	%		%	15 %	369,250,766					15 %	1,006,190,714		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	7,543,700	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	8,305,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Kelurahan	361,707,066	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	397,885,714	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	235,409,900					75 %	258,500,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	235,409,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	258,500,000	Kecamatan Guguk Panjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,142,885,474							2,332,474,443	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	162,880,254					A	570,371,725		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	26,713,300						100 %	148,538,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	764,100	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	841,500	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,268,900	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	13,952,950	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,920,300	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	4,098,050	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,370,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6,390,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	7,018,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	12,230,000						100 %	13,398,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	590,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	649,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	11,640,000	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Laporan	12,749,000	Kecamatan Guguk Panjang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	123,936,954						100 %	142,235,225	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	42,246,250	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	52,278,875	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	22,635,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	5 Unit	24,992,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah				3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	59,055,204	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	64,964,350	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	340,856,100						80 80 80	373,450,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	340,856,100						78 %	373,450,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	340,856,100	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	373,450,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	639,149,120						21 %	1,388,652,718	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Maasyarakat	%		%	15 %	177,273,920						15 %	827,495,713	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	10,450,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	8,910,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Kelurahan	166,823,020	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	218,585,713	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	461,875,200						75 %	561,157,005	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	461,875,200	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	561,157,005	Kecamatan Guguk Panjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,393,133,274						2,541,530,173	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	128,519,304					A	528,454,460		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	43,635,800					100 %	168,980,620		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	553,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	610,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,235,400	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	11,251,570	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	12,982,400	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	14,280,750	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,490,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18,375,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	20,210,300	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	12,475,000					100 %	13,915,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	460,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	506,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12,015,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Laporan	13,409,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	72,408,504					100 %	79,358,840		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	14,410,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	15,851,000	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,420,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	1,254,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Retribusi sampah				3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	56,578,504	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	62,253,840	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	264,000,000						80 80 80	290,400,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	264,000,000						78 %	290,400,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	264,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	290,400,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	1,000,613,970						21 %	1,722,675,713	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	260,913,970						15 %	887,005,713	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	10,199,800	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	11,220,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara				1 Kelurahan	250,714,170	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	275,785,713	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	739,700,000						75 %	835,670,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	739,700,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	835,670,000	Kecamatan Guguk Panjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							908,590,130						1,990,236,413	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	116,971,104					A	517,667,700		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	25,276,900					100 %	148,724,400		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,009,100	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	3,311,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,172,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Paket	10,091,400	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,684,800	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Paket	6,253,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,561,500	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	1,628,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5,849,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	6,440,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,700,000							18,381,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	390,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		1 Laporan	429,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	16,310,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		4 Laporan	17,952,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	74,994,204						100 %	84,362,300	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	13,770,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Unit	16,901,500	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	3,105,000	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 3 Unit	3,531,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Retribusi sampah				3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	58,119,204	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Jenis 1 Unit 1 Tahun	63,929,800	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				80 80 80	232,499,800						80 80 80	255,750,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%	%		%	78 %	232,499,800						78 %	255,750,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	232,499,800	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	255,750,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	21 %	559,119,226						21 %	1,216,818,713	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%		%	15 %	205,819,240						15 %	828,188,713	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUSRENBANG Kelurahan Rembuk Warga				1 Kali 1 Kali	8,727,900	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kali 1 Kali	9,603,000	Kecamatan Guguk Panjang
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara				1 Kelurahan	197,091,340	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Kelurahan	218,585,713	Kecamatan Guguk Panjang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	%		%	75 %	353,299,986						75 %	388,630,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LPMK Pembinaan PKK				4 Kali 4 Kali	353,299,986	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Kali 4 Kali	388,630,000	Kecamatan Guguk Panjang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						15,096,349,560							24,780,635,249	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	14,458,757,115						A -	23,208,296,449	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	80 %	59,230,000						80 %	49,658,163	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	59,230,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	49,658,163	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	9,961,086,365						100 %	10,962,399,911	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	9,961,086,365	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	81 Orang/bulan	10,962,399,911	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	201,050,000						100 %	220,000,000	
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	201,050,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Dokumen	220,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	49,400,000						100 %	60,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	49,400,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	85 Paket	60,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	148,386,250						100 %	314,038,375	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17,625,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	10 Paket	21,326,250	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket 0 Paket	12,150,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	30 Paket 0 Paket	14,701,500	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				4 Paket	11,646,250	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	4 Paket	140,919,625	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan				8 Dokumen 0 Orang	13,300,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	8 Dokumen 0 Orang	0	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah tamu yang dilayani				0 Laporan 1 Laporan 200 orang	5,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Laporan 1 Laporan 200 orang	6,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Makan lembur makan rapat Minum lembur perjalanan dinas snack rapat				1 Laporan 100 PORSI 600 porsi 100 porsi 1 ls 1500 porsi	88,665,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan 100 PORSI 600 porsi 100 porsi 1 ls 1500 porsi	131,091,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%		%	55 %	3,500,000,000						55 %	11,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dibangun				1 gedung	3,500,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 gedung	6,000,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	159,908,000						100 %	193,400,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8,678,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan	10,500,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jukah rekening tagihan air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening tagihan listrik jumlah rekening tagihan telepon jumlah tagihan rekening internet				9 rekening 12 Laporan 9 rekening 2 rekening 9 rekening	151,230,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	9 rekening 12 Laporan 9 rekening 2 rekening 9 rekening	182,900,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	379,696,500						100 %	408,800,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				35 Unit 35 unit	191,400,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	35 Unit 35 unit	174,900,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70 Unit 12 bulan	39,091,500	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	70 Unit 12 bulan	41,200,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149,205,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	192,700,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	- - -		- - -	78 - 78 - 78 -	341,358,333					78 - 78 - 78 -	503,721,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	250,750,000					82 %	298,265,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	berita acara musrenbang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 laporan 2 Laporan	28,750,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 2 Laporan	84,095,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Kegiatan				0 Dokumen 3 laporan	222,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Dokumen 3 laporan	214,170,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu	%		%	85 %	90,608,333					85 %	205,456,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jasa tenaga administrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan laporan paten sesuai SOP				2 orang 0 Laporan 12 bulan	90,608,333	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 orang 0 Laporan 12 bulan	102,728,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	214,539,704					100 %	512,017,800		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	25 %	30,000,000					25 %	187,550,000		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan laporan pembinaan				1 Laporan 1 laporan	30,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Laporan 1 laporan	187,550,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	184,539,704					85 %	324,467,800		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pembinaan Laporan PKK				1 LAPORAN 1 LAPORAN	184,539,704	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 LAPORAN 1 LAPORAN	249,467,800	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tk Kecamatan	%		%	100 %	81,694,408						100 %	465,850,000	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kasus		kasus	4 kasus	81,694,408						4 kasus	465,850,000	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jasa tenaga administrasi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan monitoring laporan pembinaan				2 orang 1 Laporan 1 laporan 1 laporan	81,694,408	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 orang 1 Laporan 1 laporan 1 laporan	465,850,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,042,547,750						928,149,443		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	78,747,750						A -	100,411,948	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,711,750						100 %	26,561,948	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket	9,543,600	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,064,750	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,918,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	56,036,000						100 %	73,850,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56,036,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	73,850,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0		0 0 0	78 0 78 0 78 0	440,000,000						78 0 78 0 78 0	166,846,295	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	440,000,000						82 %	166,846,295	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	440,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Dokumen	166,846,295	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	100 %	523,800,000						100 %	660,891,200	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	243,000,000						23 %	412,160,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Rembuk Warga berita acara musrenbang				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	12,160,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	234,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	280,800,000						85 %	248,731,200	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Laporan PKK				1 laporan 1 LAPORAN	280,800,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 LAPORAN	248,731,200	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01		KECAMATAN					945,795,000						939,580,190		
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-	-	A -	79,945,000					A -	102,814,190		
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Q	%Q	100 %Q	22,710,000					100 %Q	27,514,190		
7 01 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 Paket 0 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket 0 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan			3 Paket	4,063,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,916,230	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	%	100 %	57,235,000					100 %	75,300,000		
7 01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	57,235,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 Unit	75,300,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0	0 0 0	78 0 78 0 78 0	277,000,000					78 0 78 0 78 0	73,359,000		
7 01 02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%	%	82 %	277,000,000					82 %	73,359,000		
7 01 02 2.01 02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3 Dokumen	277,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Dokumen	73,359,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakat an yang aktif	%	%	100 %	588,850,000					100 %	763,407,000		
7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%	%	23 %	243,000,000					23 %	413,051,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	13,051,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	234,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	345,850,000						85 %	350,356,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pembinaan Laporan PKK				1 LAPORAN 1 laporan	345,850,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 LAPORAN 1 laporan	350,356,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,333,462,750							1,003,776,508	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	82,787,750						A -	106,257,308	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,711,750						100 %	27,516,308	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket 0 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket 0 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,064,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,918,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	60,076,000						100 %	78,741,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang tersedia jasa tenaga kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi retribusi keberihan yang dibayarkan				20 item 1 orang 0 Unit 1 Unit 12 bulan	60,076,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 item 1 orang 0 Unit 1 Unit 12 bulan	78,741,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0		0 0 0	78 0 78 0 78 0	707,000,000						78 0 78 0 78 0	132,519,200	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	707,000,000						82 %	132,519,200	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	707,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Dokumen	132,519,200	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	100 %	543,675,000						100 %	765,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	243,000,000						23 %	413,300,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	13,300,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	234,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	300,675,000						85 %	351,700,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan pembinaan laporan PKK				1 laporan 1 laporan	300,675,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 laporan	351,700,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						558,812,750						827,428,508		
7	01	01											A -	96,917,308	
7	01	01	2.06										100 %	25,417,308	
7	01	01	2.06	04									25 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	01	01	2.06	05									3 Paket	4,948,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	01	01	2.06	09									12 Laporan	9,971,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	01	01	2.09										100 %	71,500,000	
7	01	01	2.09	09									20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	71,500,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	01	02											78 0 78 0 78 0	100,941,200	
7	01	02	2.01										82 %	100,941,200	
7	01	02	2.01	02									2 Dokumen	100,941,200	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	100 %	434,625,000						100 %	629,570,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	206,000,000						23 %	410,970,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	10,970,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	197,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	228,625,000						85 %	218,600,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan pembinaan laporan PKK				1 laporan 1 LAPORAN	228,625,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 LAPORAN	218,600,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						780,042,550							782,948,908	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	73,842,750						A -	95,416,308	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,711,750						100 %	27,516,308	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,064,750	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,918,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%		%	100 %	51,131,000						100 %	67,900,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang tersedia jasa tenaga kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi retribusi kebersihan kantor yang dibayar				20 item 1 orang 0 Unit 1 Unit 12 bulan	51,131,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 item 1 orang 0 Unit 1 Unit 12 bulan	67,900,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0		0 0 0	78 0 78 0 78 0	342,000,000						78 0 78 0 78 0	74,974,900	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	342,000,000						82 %	74,974,900	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	342,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	74,974,900	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	364,199,800						100 %	612,557,700	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	205,999,900						23 %	412,562,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	8,999,900	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	12,562,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	197,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	158,199,900						85 %	199,995,700	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Laporan PKK				1 laporan 1 laporan	158,199,900	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 laporan	199,995,700	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						902,146,750							883,964,303	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	78,746,750						A -	101,265,308	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,711,750						100 %	27,515,308	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket	10,496,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,064,750	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,918,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	56,035,000						100 %	73,750,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang terdia jasa tenaga kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi retribusi kebersihan yang dibayarkan				20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	56,035,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	73,750,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	0 0 0		0 0 0	78 0 78 0 78 0	297,000,000						78 0 78 0 78 0	82,109,995	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	297,000,000						82 %	82,109,995	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	297,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	2 Dokumen	82,109,995	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	526,400,000						100 %	700,589,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	243,000,000						23 %	422,600,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	22,600,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	234,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	283,400,000						85 %	277,989,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan pembinaan laporan PKK				1 laporan 1 laporan	283,400,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 laporan	277,989,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							795,441,500							778,555,908	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	73,841,500							A -	95,414,308	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,710,500							100 %	27,514,308	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	8,676,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,063,500	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,916,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	51,131,000						100 %	67,900,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang tersedia jasa tenaga kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi retribusi kebersihan yang dibayarkan				20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	51,131,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	67,900,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	- - -		- - -	78 - 78 - 78 -	362,000,000						78 - 78 - 78 -	70,755,300	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	362,000,000						82 %	70,755,300	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	362,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Dokumen	70,755,300	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	100 %	359,600,000						100 %	612,386,300	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	206,000,000						23 %	412,821,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	12,821,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	197,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	85 %	153,600,000						85 %	199,565,300	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pembinaan Laporan PKK				1 laporan 1 laporan	153,600,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 laporan	199,565,300	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						965,283,750							817,842,608	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	-		-	A -	77,783,750						A -	100,244,308	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	22,711,750						100 %	27,544,308	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	8,676,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	25 Paket	10,497,960	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4,064,750	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Paket	4,946,348	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9,971,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	12 Laporan	12,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	55,072,000						100 %	72,700,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan yang tersedia jasa tenaga kebersihan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi retribusi kebersihan yang dibayarkan				20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	55,072,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	20 item 1 orang 1 Unit 12 bulan	72,700,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	- - -		- - -	78 - 78 - 78 -	427,000,000						78 - 78 - 78 -	78,850,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	%		%	82 %	427,000,000						82 %	78,850,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	427,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	3 Dokumen	78,850,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	%		%	100 %	460,500,000						100 %	638,748,300		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	%		%	23 %	206,000,000						23 %	418,100,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Rembuk Warga				1 berita acara 1 berita acara	9,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 berita acara 1 berita acara	18,100,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara				0 Unit 1 kelurahan	197,000,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	0 Unit 1 kelurahan	400,000,000	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%		%	23 %	254,500,000						23 %	220,648,300		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan pembinaan Laporan Pkk				1 laporan 1 laporan	254,500,000	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	0	1 laporan 1 laporan	220,648,300	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							18,321,605,101							7,949,900,000	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	2,107,817,374							A	2,584,900,000	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	22,157,900							100 %	40,000,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22,157,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	2 Dokumen	40,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	1,820,837,427						100 %	2,200,000,000	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,820,837,427	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	14 Orang/bulan	2,200,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	10,350,600						100 %	13,000,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10,350,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Paket	13,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	125,851,450						100 %	168,400,000	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	781,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Paket	1,400,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,593,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	3 Paket	13,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6,933,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	2 Paket	10,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Laporan	9,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	102,544,450	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	20 Laporan	135,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan SKPD yang dilaksanakan	%		%	100 %	30,970,000						100 %	41,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	970,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Laporan	1,500,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Laporan	40,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		%	80 %	97,649,997						80 %	122,000,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	32,649,999	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	3 Unit	45,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4,999,998	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	6 Unit	7,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60,000,000	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	1 Unit	70,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	KASUS		KASUS	8 KASUS	257,772,500						8 KASUS	280,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kasus Penyimpangan Idiologi Negara	kasus		kasus	0 kasus	257,772,500						0 kasus	280,000,000	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	219,999,900	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, TNI/Polri, Peserta Didik, masyarakat	1000 Orang	220,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				140 Orang	37,772,600	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, TNI/Polri, Peserta Didik, masyarakat	140 Orang	60,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	KASUS		KASUS	2 KASUS	13,141,944,423						2 KASUS	1,800,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang akuntabel Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Persentase partisipasi masyarakat pada Pemilu / Pilkada di Kota Bukittinggi Persentase pengurus perempuan di Partai Politik	parpol % parpol %		parpol % parpol %	8 parpol 8 % 8 parpol 20 %	13,141,944,423						8 parpol 8 % 8 parpol 20 %	1,800,000,000	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	11,736,999,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pemilih Pemula, masyarakat, Forkopimda, TNI/Polri, SKPD terkait	50 Orang	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6 Laporan	1,404,944,623	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Pemilih Pemula, masyarakat, Forkopimda, TNI/Polri, SKPD terkait	6 Laporan	1,500,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	KASUS		KASUS	2 KASUS	495,976,300						2 KASUS	420,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	Organisasi		Organisasi	85 Organisasi	495,976,300						85 Organisasi	420,000,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	479,220,800	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Ormas yang terdaftar di Kota Bukittinggi	100 Orang	400,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	16,755,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Ormas yang terdaftar di Kota Bukittinggi	1 Laporan	20,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	KASUS		KASUS	8 KASUS	431,350,400						8 KASUS	515,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus Narkoba Jumlah Kasus SARA	kasus kasus		kasus kasus	0 kasus 0 kasus	431,350,400						0 kasus 0 kasus	515,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	57,813,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, Peserta Didik, Instansi Vertikal, masyarakat	200 Orang	65,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	373,536,700	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan 6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, Peserta Didik, Instansi Vertikal, masyarakat	500 Orang	450,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	KASUS		KASUS	8 KASUS	1,886,744,104						8 KASUS	2,350,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini	kasus		kasus	3 kasus	1,886,744,104						3 kasus	2,350,000,000	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	481,037,604	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Forkopimda, Instansi Vertikal, SKPD terkait, masyarakat	50 Orang	550,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,405,706,500	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Forkopimda, Instansi Vertikal, SKPD terkait, masyarakat	12 Dokumen	1,800,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bukittinggi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
TOTAL						979,836,860,368						1,168,302,851,269			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama : klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua : menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga : melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat : memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2021—2026, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Tahun Dasar		Target Kinerja		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4		5		6
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	-1,74	2,67	3	4,84	4,63
2	Indeks Gini	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261
3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks komposit yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari aspek kualitas air, kualitas udaran dan kualitas tutupan lahan	56,64	63,19	63,48	63,76	64,04
5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB ADHK pada lapangan usaha terkait aktifitas pariwisata (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	-5,46	2,67	3	4,29	4,63
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks komposit pembangunan kebudayaan dari tujuh dimensi pengukuran yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik
7	Indeks pembangunan olahraga	Indeks komposit pembangunan olahraga melalui empat indikator yaitu Indeks Ruang terbuka, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Partisipasi Masyarakat, dan Indeks Kebugaran Jasmani	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik
8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Indeks perbaikan tata kelola pemerintahan instansi pemerintah daerah yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria BB
9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks komposit pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Tahun Dasar		Target Kinerja		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	1,34	1,44	1,53	1,63	1,72
11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa	13,282	13,445	13,509	13,746	14,035
12	Pertumbuhan PMTB (%)	Persentase kenaikan PMTB tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9
13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu	50*	55	60	65	70
14	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks komposit capaian pembangunan infrastruktur dari indikator jalan, air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman, dan perumahan	74*	75	76	77	78
15	Tingkat kemiskinan (%)	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk pada tahun tertentu	4,74	4,59	4,48	4,46	4,24
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	7,51	7,35	7,18	5,87	6,74
17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	11,33	11,44	11,56	11,67	11,78
18	Harapan lama sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01
19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Pencapaian kualitas peserta didik terkait kesadaran situasional, autentisitas, clarit, dan empati	45*	46,00	48,00	50,00	52,00
20	Indeks kesalehan sosial (%)	Indeks capaian pembangunan manusia terkait kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika di ruang publik, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan kepada negara	83,8*	84,0	84,2	84,4	84,6
21	Angka harapan hidup (Tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30
22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Capaian pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi	0,6949*	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Tahun Dasar		Target Kinerja		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
23	Prevalensi Stunting (%)	Persentase anak dibawah lima tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO	14,9	14,1	13,3	12,5	11,6
24	Indeks kualitas air	indeks kondisi air suatu daerah menggunakan metode indeks pencemar	47,33	49,61	51,89	54,17	56,09
25	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks kondisi tutupan lahan menggunakan parameter tutupan hutan, belukar, dan belukar rawa pada kawasan hutan atau kawasan berfungsi lindung	22,9	36,42	37,36	38,3	39,24
26	Indeks kualitas udara	indek kondisi udara yang diukur menggunakan parameter SO2 dan NO2	83,54	84,54	84,64	84,74	84,84
27	Persentase penanganan sampah	Persentase sampah yang melalu tahapan penanganan terhadap total sampah	22	24	26	27	28
28	Persentase pengurangan sampah	Persentase sampah yang melalu tahapan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah terhadap total sampah	75	74	73	72	71
29	Indeks Pembangunan Pariwisata	Indeks capaian pembangunan pariwisata menggunakan pendekatan faktor kebencanaan, posisi target pasar, karakteristik dan kualitas produk, serta indeks experience dan hospitality	4,25*	4,30	4,34	4,38	4,42
30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Persentase jumlah usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi terhadap jumlah seluruh usaha ekonomi kreatif	0	1	1	2	3
31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah waisatawan yang mengunjungi objek wisata pada satu tahun tertentu	507,316	532,682	559,316	587,282	880,923
32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks komposit pelestarian warisan budaya benda dan tidak benda	16,5	28,5	30	32	34
33	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat daerah pada penyelenggaraan PORPROV	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2
34	Nilai SAKIP	Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB	71,13	73,35	75,57	77,78	80,00

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Tahun Dasar		Target Kinerja		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
35	Nilai EKPPD	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh BPKP	32.293	32.308	32.323	32.338	32.353
36	Indeks integritas pemerintah daerah	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi	75*	75	76	76	77
37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62
38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29
39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25
40	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks komposit atas keamanan pribadi dan kemananan lingkungan dari bencana	2,9*	3	3,15	3,3	3,4
41	Persentase Penurunan PPKS (%)	Persentase jumlah PPKS tahun tertentu terhadap jumlah PPKS tahun sebelumnya	1,7	2	2	2,2	2,2
42	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks komposit dari aspek ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga	55*	56,5	58,0	59,5	61,0
43	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	89,00	89,17	89,33	89,50	89,67
44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indeks komposit dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi ekologi kegiatan pertanian	69*	70,00	72,00	74,00	76,00

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Pelayanan Umum, dan (3) Aspek Daya Saing.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial. Sementara *Aspek Pelayanan Umum* meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Sedangkan *Aspek Daya Saing* meliputi: a) Nilai Tukar Petani, b) Produktivitas Total Daerah, dan c) Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s/d 2023

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	INDIKATOR KINERJA MAKRO					
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74	2,67	3,00	4,84	4,63
2	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	49,95	48,47	49,32	53,50	52,54
3	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	71,29	71,76	75,16	77,57	83,51
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	5,86	6,74
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,56	11,67	11,78
9	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.586	14.035
10	Tingkat Kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	5,71	4,24
11	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	5,74	5,88	5,81	5,71	5,63
12	Indeks Gini	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261
B	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) (%)	-1,74	2,67	3,00	4,29	4,63

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Laju inflasi (%)	2,02	3,00	2,90	2,80	2,70
3	PDRB per kapita (ADHK) (Rp. Juta)	49,95	48,47	49,32	50,82	52,54
4	Indeks Gini	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	95,26	95,41	95,52	95,64	95,76
10	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82
11	Angka melek huruf (%)	99,96	99,97	99,98	99,99	100
12	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,40	11,47	11,54	11,61
13	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30
14	Persentase balita gizi buruk (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Prevalensi balita gizi kurang (%)	5,24	4,19	3,14	2,10	1,05
16	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69	69	70	71	71
19	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74
20	Rasio penduduk yang bekerja (%)	46	53	65	67	72
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62
22	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29
23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,5	81,5	82,0	82,0	82,5
25	Penguatan cadangan pangan (Ton)	0	0	13	23	33
26	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100	100
27	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
28	Produksi sektor pertanian (Ton)	5.844	5.845	5.846	5.857	5.858
29	Produksi sektor perkebunan (Ton)	40,26	40,27	40,28	40,29	40,30
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	55,71	55,94	56,17	56,41	56,64
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	33,73	34,85	35,00	35,15	35,30
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,19	5,24	5,29	5,35	5,40
33	Pertumbuhan Industri (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
34	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	13.232	13.445	13.509	13.746	14.035
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25
36	Harapan Lama Sekolah	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. Juta)	163,33	167,69	172,72	180,13	188,47
3	Nilai tukar petani	100,94	101	102	103	104
4	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	41,69	41,46	41,23	41,00	40,77
5	Produktivitas total (Rp. Juta)	122,92	126,20	129,99	135,56	141,84
6	Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)	663	597	537	483	435
7	Rasio ketergantungan (%)	46,70	48,50	50,34	52,23	54,17
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	PELAYANAN URUSAN WAJIB					
	PENDIDIKAN					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	112,44	113,43	114,41	115,40	116,38
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	84,76	85,83	86,89	87,96	89,03
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,38	99,69	99,99	100,30	100,60
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,46	81,99	82,51	83,04	83,56
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	99,94	99,95	99,95	99,96	99,96
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	98,36	98,38	98,45	98,52	98,59
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	89	89,66	90,66	91,66	92,66
12	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	47,76	53,73	59,70	65,67	71,64
13	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	42,86	47,62	54,55	59,09	63,64
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:233	1:234	1:239	1:243	1:249
15	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:469	1:493	1:503	1:481	1:490
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	602	599	597	594	591
17	Rasio guru terhadap murid	726	747	734	734	734

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pendidikan menengah					
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	38,23	39,31	38,63	38,63	38,63
19	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	2,73	1,87	1,86	1,86	1,85
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88	90	92	94	96
	KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,36	4,83	4,29	3,75	3,22
2	Angka kelangsungan hidup bayi	994,64	995,17	995,71	996,25	996,78
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,83	4,29	3,75	3,22	2,68
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	321,72	268,10	214,48	160,86	107,24
6	Rasio posyandu per satuan balita	13,94	14,04	14,15	14,25	14,36
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9	Rasio dokter per satuan penduduk	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,71	92,20	92,69	93,18	93,67
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	88	92	92	96	96
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	62,4	65	70	75	80
16	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	60	65	70	75	80
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	40	45	50	55	60
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2,99	1,99	1,99	1,00	1,00
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	47,84	51,44	55,04	58,63	62,23

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	87,14	90,00	91,43	92,86	94,29
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
24	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	0
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17,8	17	17	16,8	16,5
27	Cakupan kunjungan bayi (%)	81	83	85	88	90
28	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100	100	100
29	Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100	100	100
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	91	92	92,5	93	93,5
31	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,3	92,5	93	93,5	94
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	71,4	72	73	74	75
33	Cakupan pelayanan anak balita (%)	55,5	56	57	58	60
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100
35	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95	95,5	96	96,5	97
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
38	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/ mantap	0,8907	0,892	0,8945	0,8996	0,902
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m/jiwa)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	49,39	49,70	49,95	51,96	54,20
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	28,62	28,73	28,73	28,73	28,73
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	80,23	81,00	82,50	83,00	83,50

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi (%)	80,23	81,00	82,50	83,00	83,50
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,15	81,00	82,50	85,00	86,50
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	2,00	1,80	1,20	1,00	0,80
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50
10	Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
11	Persentase penduduk berakses air minum (%)	84,99	85,00	85,50	85,60	85,70
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	84,99	85,00	85,50	85,60	85,70
13	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	434	425	417	408	400
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
15	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
16	Ketaatan terhadap RTRW (%)	79*	80	80	85	85
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Rasio rumah layak huni	0,160	0,160	0,159	0,159	0,158
2	Rasio permukiman layak huni	0,944	0,944	0,944	0,963	0,982
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	83,35	83,35	83,10	82,86	82,62
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,26	0,26	0,25	0,17	0,08
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,26	0,26	0,25	0,17	0,08
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	11,61	9,29	6,97	4,64	2,32
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	94,40	94,40	94,44	96,25	98,23
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	36	36	50	55	60
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	90	95	95	95	95

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	12	11,5	10,5	10	9,5
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	90	95	95	95	95
	SOSIAL					
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00
2	Persentase PPKS yang tertangani (%)	65,38	65,38	65,38	69,23	69,23
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	40,61	42,76	45,00	50,00	55,00
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	0,00	8,33	16,67	25,00	33,33
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	80	80	85	90	90
	TENAGA KERJA					
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100	100	100
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	127	150	150	200	220
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100	100	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	13.624	13.800	13.900	14.000	14.300
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	80	82	85	87	90
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	10	20	30	40
8	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (%)	100	100	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	32	96	96	96	102
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16	32	32	32	32
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50	50	50	50	50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8	8	8	8	12
3	Rasio KDRT	13,48	12,83	12,18	11,53	10,88
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	1,53	1,44	1,35	1,27	1,18
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,51	60,51	60,65	60,75	60,85
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	100	100	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	95	90	90	90	90
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29
13	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di seKtor nonpertanian	80,67	80,67	80,68	80,69	80,7

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PANGAN					
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	14,6	14,76	14,88	15,01	15,26
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hr)	262	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	24	24	23	23	22
	PERTANAHAN					
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	38,54	45,00	50	55,00	60
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	78*	80	82	84	86
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	47,33	50,65	50,7	50,75	50,8
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	83,54	84,00	84,50	85,00	85,50
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
7	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	18	50	50	50	53
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (org)	0	1	2	4	6
9	Terlaksananya pendidikan (sekolah) / pelatihan masyarakat (siswa)	-	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	ada	ada	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait persetujuan lingkungan, yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani (%)	40	41	42	43	44

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	92,71	93	94	95	96
14	Persentase cakupan area pelayanan (%)	96	98	98	98	98
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	96	98	98	98	98
16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	89	90	91	92	93
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%)	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	100	100	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	73	74	75	76	77
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	64	66	68	70	72
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	47	50	55	60
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,55	1,5	1,5	1,5	1,48
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	2,45	2,4	2,38
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	34,5	34,5	35	36	36
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	2	2	2

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	5	5	5
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	3	5	7	9
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB (%)	68,00	68,20	68,50	68,90	69,00
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	68,08	68,29	68,50	68,75	69,00
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	7,52	2,24	2,21	2,19	2,1
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	19,88	19,69	19,36	19,02	18,34
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,93	86,30	80,00	77,00	74,00
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	32,40	32,48	33,00	33,18	33,21
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	89,20	89,25	89,26	89,32	89,35
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,00	86,00	86,00	86,00	87,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100	100	100
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100	100	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	66,80	66,90	67,00	67,00	67,10
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	14,49	17,21	20,00	23,00	25,00
29	Cakupan peserta KB aktif (%)	68	68	69	69	69
	PERHUBUNGAN					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	618.079	711.984	711.984	711.984	711.984
2	Rasio ijin trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
3	Jumlah uji kir angkutan umum (uji)	4.150	4.592	5.054	5.558	6.113
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,087	0,076	0,076	0,076	0,076
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	79	80	80	80	80
7	Pemasangan Rambu- rambu (%)	67,34	70,00	77,50	78,00	80,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.554.040	20.800.180	20.800.180	20.800.180	20.800.180
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	618.079	711.984	711.984	711.984	711.984
11	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	28	28	28	28	28
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	14	14	15	17	18

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	98	98	99	99	99
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi aktif (%)	75,50	75,80	76,10	76,40	76,70
2	Persentase Usaha Mikro (%)	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60
	PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	40	43	45	50	55
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	11	12	14	16	18
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	10	10	10	10	10
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	5	5	7	7	7
2	Persentase wirausaha muda (%)	2	2	3	3	3
3	Cakupan pembinaan olahraga (cabor)	32	32	32	32	32
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (orang)	10	25	35	35	35
5	Jumlah atlet berprestasi (orang)	0	150	150	150	150
6	Jumlah prestasi olahraga (medali)	0	50	150	50	150
	STATISTIK					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	belum ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada
	PERSANDIAN					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	3,50	3,50	3,50	7,00	7,00
	KEBUDAYAAN					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	5	5	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	11	11	12	12
	PERPUSATAKAAN					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,062	0,1	0,11	0,12	0,13
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,52	0,33	0,33	0,33	0,33
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	8392	13600	14960	16320	17680
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	10.989	11.539	12.339	13.139	13.939
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	KEARSIPAN					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	10,71	17,86	28,57	39,29	50,00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	2	2	2	2	2
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN					
	PARIWISATA					
1	Kunjungan wisata	507.316	538.774	546.895	557.832	568.988
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	2,5	2	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	10.809	15.561	12.500	15.000	15.000
	PERTANIAN					
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	6,78	6,79	6,8	6,8	6,8
2	Cakupan bina kelompok petani (poktan)	15	20	20	20	20
	PERDAGANGAN					
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	20	20	20	20
	PERINDUSTRIAN					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (KUB)	20	20	20	20	20

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi perikanan (ton)	420,20	430	440	450	460
2	Konsumsi ikan (kg/kap/th)	40,5	41	41,5	42	43
3	Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)	3.798	3.800	3.850	3.950	4.000
	PENUNJANG URUSAN					
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100
	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	19,85	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%) 9%)	19,54	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam)	8	16	20	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun Dasar		Target Kinerja		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	63	60	67	74	81
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26	26	26
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	338	338	338	338	338
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	542	1000	1000	1000	1000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	18	50	100	100	100
	PENGAWASAN					
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82	82	83	83	84
2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,23	0,43	0,41	0,39	0,37
3	Jumlah temuan BPK (temuan)	10	10	10	10	9
	SEKRTARIAT DPRD					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (9%)	100	100	100	100	100
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (%)	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan RKPD tahun berjalan Tahun 2022. Di samping itu, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi pada tahun 2023. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR